

BESTSELLER INTERNASIONAL



“Mencerahkan dan sangat tepat waktu.”

New York Times Book Review

BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

HOW DEMOCRACIES DIE

**Apa yang Diungkapkan Sejarah
tentang Masa Depan Kita**

**STEVEN LEVITSKY
& DANIEL ZIBLATT**



**BAGAIMANA
DEMOKRASI
MATI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

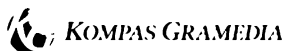
BAGAIMANA DEMOKRASI MATI



**STEVEN LEVITSKY
DANIEL ZIBLATT**



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



HOW DEMOCRACIES DIE

by Steven Levitsky & Daniel Ziblatt

Copyright © 2018 by Steven Levitsky and Daniel Ziblatt

All rights reserved.

BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita

oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt

GM 619222019

Hak cipta terjemahan Indonesia:

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Published in agreement with the author,

c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,

Armonk, New York, USA

Alih bahasa: Zia Anshor

Desain sampul: Suprianto

Tata letak isi: Sukoco

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

anggota IKAPI, Jakarta, 2019

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-03-8504-4

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Daftar Isi

PENGANTAR	vii
1. Persekutuan Penentu Nasib	1
2. Menjaga Gerbang Demokrasi di Amerika	20
3. Pelepasan Kekuasaan Partai Republik	38
4. Menumbangkan Demokrasi	55
5. Pagar Demokrasi	79
6. Aturan-Aturan Tak Tertulis Politik Amerika	98
7. Buyar	123
8. Tahun Pertama Trump: Rapor Otoriter	151
9. Menyelamatkan Demokrasi	178
UCAPAN TERIMA KASIH	205
CATATAN AKHIR	207

Pengantar

A pakah demokrasi kita dalam bahaya? Itu pertanyaan yang tak pernah kami bayangkan akan kami ajukan. Kami sudah menjadi kolega selama lima belas tahun, berpikir, menulis, dan mengajar mahasiswa mengenai kegagalan demokrasi di tempat dan waktu lain—Eropa yang gelap pada 1930-an, Amerika Latin yang represif pada 1970-an. Kami telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti bentuk-bentuk otoritarianisme baru yang bermunculan di seluruh dunia. Bagi kami, bagaimana dan mengapa demokrasi mati telah menjadi obsesi dalam pekerjaan.

Namun kini kami mendapati diri beralih ke negara kami sendiri. Selama dua tahun belakangan, kami telah menyaksikan para politikus berkata dan berbuat hal-hal yang belum pernah ada di Amerika Serikat—tapi kami kenali sebagai pendahulu krisis demokrasi di tempat-tempat lain. Kami merasa ngeri, seperti banyak orang Amerika lain, meski kami mencoba meyakinkan diri bahwa *keadaan tak bisa seburuk itu di sini*. Bagaimanapun, walau kami tahu demokrasi selalu rapuh, demokrasi di negara tempat tinggal kami entah bagaimana caranya selalu bisa bertahan. Konstitusi AS, credo kebebasan dan kesetaraan nasional kami, kelas menengah kami yang kuat sepanjang sejarah, tingginya tingkat kekayaan dan pendidikan kami, dan besar serta beragamnya sektor swasta kami—semua itu seharusnya melindungi kami dari jenis kehancuran demokrasi yang telah terjadi di tempat-tempat lain.

Ya, kami khawatir. Para politikus Amerika Serikat sekarang memperlakukan pesaing sebagai musuh, mengintimidasi pers bebas, dan mengancam akan menolak hasil pemilihan umum. Mereka mencoba melemahkan kelembagaan pelindung demokrasi kami, termasuk pengadilan, badan intelijen, dan kantor etika. Boleh jadi Amerika Serikat tak sendirian. Para ahli makin mencemaskan demokrasi yang barangkali mendapat ancaman di seluruh dunia—bahkan di tempat-tempat di mana keberadaannya sudah lama dianggap biasa. Pemerintahan-pemerintahan populis telah menyerang lembaga-lembaga demokrasi di Hungaria, Turki, dan Polandia. Kekuatan-kekutan ekstremis telah mendapat keberhasilan dramatis dalam pemilihan umum di Austria, Prancis, Jerman, Belanda, dan tempat-tempat lain di Eropa. Dan di Amerika Serikat, untuk pertama kali dalam sejarah, seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, dipilih menjadi presiden.

Apa arti semua itu? Apakah kita sedang hidup pada masa kemerosotan dan kehancuran salah satu negara demokrasi tertua dan tersukses di dunia?

Tengah hari pada 11 September 1973, sesudah berbulan-bulan ketegangan meningkat di jalan-jalan Santiago, Chile, pesawat-pesawat jet Hawker Hunter buatan Inggris terbang lalu menjatuhkan bom ke La Moneda, istana kepresidenan bergaya neoklasik di tengah kota. Selagi bom-bom terus dijatuhkan, La Moneda terbakar. Presiden Salvador Allende, yang terpilih tiga tahun sebelumnya sebagai pemimpin koalisi kiri, dibarikade di dalam. Selama masa jabatan Allende, Chile telah dilanda keresahan sosial, krisis ekonomi, dan kelompok politik. Allende berkata dia tak bakal meninggalkan posisinya sampai dia menyelesaikan pekerjaan—namun saat yang menentukan telah tiba. Di bawah komando Jenderal Augusto Pinochet, angkatan bersenjata Chile merebut kendali negara. Pagi-pagi sekali pada hari bersejarah itu, Allende berpidato menentang di siaran radio nasional, berharap para pendukungnya bakal

turun ke jalan membela demokrasi. Namun perlawanan itu tak terjadi. Polisi militer yang menjaga istana kepresidenan meninggalkan dia; siaran pidatonya ditanggapi kesunyian. Beberapa jam kemudian Presiden Allende tewas. Begitu juga demokrasi Chile.

Demikianlah cara kita biasa berpikir mengenai matinya demokrasi: di tangan orang-orang bersenjata. Selama Perang Dingin, kudeta menyebabkan hampir tiga dari tiap empat kehancuran demokrasi. Demokrasi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani mati dengan cara seperti itu. Baru-baru ini, kudeta militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi di Mesir pada 2013 dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di Thailand pada 2014. Di semua kasus itu, demokrasi hancur secara spektakuler, melalui kekuatan militer dan pemaksaan.

Namun ada cara lain menghancurkan demokrasi. Kurang dramatis tapi sama destruktifnya. Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal melainkan di tangan pemimpin terpilih—presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata.

Di Venezuela, contohnya, Hugo Chávez tadinya orang luar di dunia politik, menentang apa yang dia gambarkan sebagai elite pemerintah korup, dan menjanjikan membangun demokrasi lebih "otentik" yang menggunakan kekayaan besar negara itu dari minyak untuk memperbaiki kehidupan orang miskin. Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat biasa Venezuela, yang merasa diabaikan atau diperlakukan tak pantas oleh partai-partai politik mapan, Chávez terpilih sebagai presiden pada 1998. Seperti dikatakan seorang perempuan di negara bagian asal Chávez, Barinas, pada malam sebelum pemilihan umum, "Demokrasi terinfeksi. Dan Chávez satu-satunya antibiotik yang kami punya."

Ketika meluncurkan revolusi yang dia janjikan, Chávez melakukannya secara demokratis. Pada 1999 dia menyelenggarakan pemilihan umum

bebas untuk dewan konstituante, dan hasilnya adalah kemenangan besar bagi para sekutunya. Itu memungkinkan para *chavista* menulis konstituante baru secara sepihak. Konstitusi barunya demokratis, dan untuk memperkuat legitimasi, pemilihan presiden dan legislatif diadakan pada 2000. Chávez dan sekutu-sekutunya menang lagi. Populisme Chávez memicu oposisi keras, dan pada April 2002 militer mencoba menggulingkannya. Namun kudeta itu gagal, sehingga Chávez yang berjaya malah meraih legitimasi demokratis makin besar.

Baru pada 2003 Chávez melakukan langkah-langkah pertama menuju otoritarianisme. Di tengah mudarnya dukungan rakyat, Chávez menghambat referendum yang diusulkan oposisi untuk menurunkannya dari jabatan—sampai setahun kemudian, ketika kenaikan harga minyak ikut mengangkat namanya sehingga dia bisa menang. Pada 2004, pemerintah membuat daftar hitam berisi nama-nama yang telah menandatangani petisi penurunan dan mengatur isi mahkamah agung, namun kemenangan besar Chávez pada pemilihan presiden 2006 membuat dia masih bisa tampil demokratis. Rezim *chavista* menjadi makin represif sesudah 2006, menutup satu stasiun televisi besar, menangkap atau mengasingkan politikus oposisi, hakim, dan tokoh media dengan tuduhan tak jelas, serta menghilangkan batas masa jabatan presiden supaya Chávez dapat berkuasa selamanya. Chávez yang sudah sekarat karena kanker terpilih kembali pada 2012, dalam pemilihan presiden yang bebas tapi tak adil: *Chavismo* mengendalikan sebagian besar media dan mengerahkan aparat pemerintah untuk menang. Sesudah kematian Chávez setahun kemudian, penggantinya, Nicolás Maduro, menang dalam satu lagi pemilihan umum yang mencurigakan, dan pada 2014 pemerintahannya memenjarakan seorang pemimpin utama oposisi. Tetap saja, kemenangan besar oposisi dalam pemilihan umum legislatif 2015 tampak menyangkal klaim para pengkritik yang menyatakan Venezuela tak lagi demokratis. Barulah ketika satu dewan konstituante baru yang hanya berisi satu partai mengambil alih kekuasaan Kongres Venezuela pada 2017, hampir dua dasawarsa sesudah Chávez pertama kali meraih kursi kepresidenan, Venezuela diakui secara luas sebagai negara otokrasi.

Itulah cara demokrasi mati sekarang. Kediktatoran yang mencolok—dalam bentuk fasisme, komunisme, atau kekuasaan militer—sudah hilang di sebagian besar negara di dunia. Kudeta militer dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan jarang terjadi. Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chávez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara.

Jalan menuju kerusakan lewat pemilu benar-benar mengecoh. Dengan kudeta klasik, seperti yang dilakukan Pinochet di Chile, kematian demokrasi langsung terjadi dan tampak jelas bagi semua pihak. Istana kepresidenan terbakar. Presiden terbunuh, dipenjara, atau terusir ke pengasingan. Konstitusi dianggap tak berlaku atau dibuang. Di jalan pemilu, hal-hal itu tak terjadi. Tak ada tank di jalanan. Konstitusi dan lembaga berlabel demokratis lainnya tetap ada. Rakyat masih memberi suara. Autokrat hasil pemilu mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghilangkan substansinya.

Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu "legal", dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya *memperbaiki* demokrasi—membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, atau membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik. Orang tak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi. Pada 2011, ketika satu survei Latinobarómetro meminta warga Venezuela menilai negara sendiri dari 1 ("tak demokratis sama sekali") sampai 10 ("sepenuhnya demokratis"), 51 persen responden memberi nilai 8 atau lebih untuk negara mereka.

Karena tak ada satu momen—tak ada kudeta, pengumuman pemberlakuan hukum militer, atau pernyataan bahwa konstitusi tak berlaku—ketika rezim jelas-jelas “melewati batas” memasuki kediktatoran, tak ada yang bisa membuat alarm masyarakat berbunyi. Mereka yang mencela tindakan pemerintah barangkali dianggap berlebihan atau bohong. Erosi demokrasi itu hampir tak terasa bagi banyak orang.

Seberapa rentankah demokrasi Amerika terhadap kemunduran model begitu? Dasar-dasar demokrasi kita jelas lebih kuat daripada yang di Venezuela, Turki, atau Hungaria. Tapi apakah cukup kuat?

Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita perlu mundur dari hiruk-pikuk berita harian terkini dan memperluas pandangan, mencari pelajaran dari pengalaman negara demokrasi lain di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Belajar dari negara demokrasi yang mengalami krisis memperkenalkan kita mengerti lebih baik tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi kita sendiri. Contohnya, berdasarkan pengalaman sejarah negara lain, kami telah mengembangkan tes untuk membantu mengenali calon autokrat sebelum berkuasa. Kita bisa belajar dari kesalahan para pemimpin demokratis masa lalu yang membuka pintu bagi calon pemimpin otoriter—dan sebaliknya, dari cara negara-negara demokrasi lain menjaga agar kelompok ekstremis tak berkuasa. Pendekatan komparatif juga mengungkap bagaimana autokrat hasil pemilu di berbagai bagian dunia menggunakan strategi-strategi yang amat mirip untuk membajak lembaga-lembaga demokrasi. Selagi pola-pola itu menjadi kentara, langkah-langkah menuju kerusakan jadi makin jelas—dan lebih gampang dilawan. Mengetahui bagaimana rakyat negara demokrasi lain berhasil menolak autokrat hasil pemilu, atau mengapa mereka secara tragis gagal melakukannya, itu penting bagi mereka yang ingin membela demokrasi Amerika hari ini.

Kita tahu bahwa para demagog (“provokator”) ekstremis bermunculan dari waktu ke waktu di semua masyarakat, bahkan di demokrasi sehat. Amerika Serikat pernah punya beberapa, termasuk Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy, dan George Wallace. Satu tes penting bagi

demokrasi bukanlah apakah tokoh-tokoh semacam itu muncul, melainkan apakah pemimpin politik, dan terutama partai politik, bekerja untuk mencegah mereka meraih kekuasaan—dengan tak memberi mereka tempat penting di partai, menolak menyetujui atau bersekutu dengan mereka, dan kalau perlu, bekerja sama dengan pesaing mendukung calon-calon demokratis. Mengisolasi ekstremis populer membutuhkan keberanian politik. Namun ketika rasa takut, oportunisme, atau kesalahan perhitungan membuat partai-partai mapan membawa kaum ekstremis ke arus utama, maka demokrasi menghadapi bahaya.

Segera sesudah seorang calon pemimpin otoriter berhasil meraih kekuasaan, demokrasi menghadapi tes penting kedua: Akankah si pemimpin autokratik membajak lembaga-lembaga demokrasi, ataukah dibatasi oleh lembaga-lembaga itu? Lembaga saja tak cukup untuk mengekang autokrat terpilih. Konstitusi mesti dibela—oleh partai politik dan rakyat terorganisasi, juga oleh norma-norma demokratik. Tanpa norma-norma kuat, pengawasan dan penyeimbangan konstitusional tidak menjadi benteng demokrasi sebagaimana kita bayangkan. Lembaga-lembaga menjadi senjata politik, digunakan mereka yang mengendalikannya untuk menghantam mereka yang tidak. Begitulah cara autokrat terpilih membajak demokrasi—menjadikan pengadilan dan badan netral lainnya “senjata”, membeli media dan sektor swasta (atau menggencet keduanya agar diam), serta mengubah aturan politik agar keseimbangan kekuatan berubah merugikan lawan. Paradoks tragis jalan menuju kerusakan melalui pemilu adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri—pelan-pelan, secara halus, bahkan legal—untuk membunuhnya.

Amerika Serikat gagal di tes pertama pada November 2016, ketika kami memilih seorang presiden yang diragukan kesetiaannya kepada norma-norma demokrasi. Kemenangan mengejutkan Donald Trump bukan hanya dimungkinkan oleh kekecewaan publik, melainkan juga kegagalan Partai Republik AS mencegah demagog ekstremis di dalamnya mendapat pencalonan.

Seserius apa ancamannya sekarang? Banyak pengamat menghibur diri dengan mengandalkan Konstitusi AS, yang dirancang persis untuk merintangi dan menahan demagog seperti Donald Trump. Sistem pengawasan dan penyeimbangan AS telah bertahan melebihi dua abad. Sistem itu bertahan melalui Perang Saudara AS, Depresi Besar, Perang Dingin, dan Watergate. Maka mestinya sistem itu akan bertahan melalui kepresidenan Trump.

Kami kurang yakin. Sepanjang sejarah, sistem pengawasan dan penyeimbangan AS *sudah* bekerja baik—tapi bukan, atau bukan sepenuhnya, karena sistem konstitusional yang dirancang para pendiri negara. Demokrasi bekerja paling baik—dan bertahan paling lama—kalau konstitusi diperkuat norma-norma demokratik tak tertulis. Dua norma dasar telah melestarikan sistem pengawasan dan penyeimbangan Amerika sehingga dianggap amat wajar: saling toleransi, atau pemahaman bahwa partai-partai yang bersaing menerima lawannya sebagai rival sah; dan kesabaran, atau gagasan bahwa politikus harus menahan diri dalam menggunakan hak khusus kelembagaannya. Dua norma itu mendasari demokrasi Amerika Serikat selama sebagian besar abad ke-20. Para pemimpin kedua partai besar menerima sesamanya sebagai rival sah dan menolak godaan menggunakan kendali sementara atas lembaga untuk kepentingan partisan sebesar-besarnya. Norma toleransi dan menahan diri bekerja sebagai peredam di demokrasi Amerika Serikat, membantunya menghindari pertarungan partisan sampai mati yang telah menghancurkan demokrasi di tempat-tempat lain di dunia, termasuk Eropa pada 1930-an dan Amerika Selatan pada 1960-an dan 1970-an.

Namun hari ini penjaga demokrasi Amerika Serikat melemah. Erosi norma-norma demokratik kita dimulai pada 1980-an dan 1990-an, dan makin cepat pada 2000-an. Ketika Barack Obama menjadi presiden, banyak orang Partai Republik mempertanyakan legitimasi rival mereka, Demokrat, dan meninggalkan kesabaran demi strategi untuk menang dengan segala cara. Donald Trump boleh jadi mempercepat proses itu, tapi dia bukan penyebabnya. Tantangan-tantangan yang dihadapi

demokrasi Amerika berakar lebih dalam. Pelemahan norma-norma demokratik berakar di polarisasi partisan ekstrem—yang meluas melampaui perbedaan kebijakan, menjadi konflik eksistensial terkait ras dan budaya. Upaya Amerika mencapai kesetaraan ras selagi masyarakatnya makin beragam telah memicu reaksi keras dan polarisasi intensif. Dan satu hal yang jelas dari mempelajari kerusakan demokrasi sepanjang sejarah, polarisasi ekstrem bisa membunuh demokrasi.

Oleh karena itu, ada alasan-alasan untuk waspada. Rakyat Amerika Serikat bukan hanya memilih seorang demagog pada 2016; kami melakukan itu pada waktu ketika norma-norma yang dulu melindungi demokrasi kami sudah mulai pudar. Namun, bila pelajaran dari pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa polarisasi bisa membunuh demokrasi, kerusakan itu juga tidak tak terelakkan ataupun tak dapat dipulihkan. Berdasarkan pelajaran dari negara demokrasi lain yang mengalami krisis, buku ini mengusulkan strategi-strategi yang sebaiknya atau *jangan* diikuti rakyat untuk membela demokrasi kita.

Banyak orang Amerika Serikat yang wajar saja ketakutan dengan apa yang terjadi di negara kami. Namun melindungi demokrasi kita tak hanya memerlukan rasa takut atau marah. Kita mesti rendah hati *dan* berani. Kita mesti belajar dari negara-negara lain untuk melihat tanda-tanda peringatan—dan mengenali tanda palsu. Kita mesti sadar mengenai salah langkah fatal yang telah merusak negara demokrasi lain. Dan kita mesti melihat bagaimana rakyat telah bangkit untuk menghadapi krisis-krisis besar demokrasi pada masa lalu, melampaui perbedaan besar di antara mereka untuk mencegah kerusakan. Sejarah tidak berulang. Namun sejarah bisa berirama. Janji sejarah, dan harapan buku ini, adalah bahwa kita bisa menemukan irama itu sebelum terlambat.

1

Persekutuan Penentu Nasib

Pertengkaran terjadi antara Kuda dan Rusa, jadi Kuda mendatangi Pemburu untuk meminta bantuan membalas dendam kepada Rusa. Pemburu setuju tapi berkata: "Kalau kamu mau mengalahkan Rusa, kamu harus memperbolehkanku menempatkan sepotong besi ini di mulutmu, supaya aku bisa membimbingmu dengan kekang. Kamu juga harus memperbolehkan aku menaruh pelana di punggungmu supaya aku bisa duduk di sana selagi kita mengejar musuh." Kuda setuju dengan permintaan itu, dan Pemburu kemudian memasang kekang serta pelana. Lalu, dengan bantuan Pemburu, Kuda mengalahkan Rusa dan berkata kepada Pemburu: "Sekarang turunlah, dan lepaskan benda-benda ini dari mulut dan punggungku." "Jangan buru-buru, kawan," kata Pemburu. "Aku sekarang sudah mengendalikanmu dan lebih suka mempertahankanmu seperti sekarang."

—"Kuda, Rusa, dan Pemburu", *Dongeng Aesop*

Pada 30 Oktober 1922, Benito Mussolini tiba di Roma pada pukul 10.55 pagi dalam kereta malam dari Milano. Dia telah diundang ke ibukota oleh raja untuk menerima jabatan perdana menteri Italia dan membentuk kabinet baru. Ditemani sekelompok kecil pengawal, Mussolini pertama-tama mampir di Hotel Savoia, lalu dengan mengenakan jas hitam, kemeja hitam, dan topi hitam dia berjalan masuk istana raja, Palazzo del Quirinale. Roma penuh desas-desus mengenai kerusuhan. Gerombolan-gerombolan Fasis—banyak yang mengenakan berbagai seragam—berkeliaran di jalan-jalan kota itu. Mussolini yang

sadar akan kekuatan penampilan masuk ke istana raja yang berlantai marmer dan menghadap raja, "Baginda, maafkan cara berpakaian saya. Saya datang dari medan perang."

Itulah permulaan "Pawai ke Roma" legendaris Mussolini. Gambaran massa berkemeja hitam yang menyeberang Sungai Rubicone untuk merebut kekuasaan dari negara liberal Italia menjadi ajaran Fasis yang diulang-ulang pada hari besar nasional dan di buku pelajaran anak sepanjang 1920-an dan 1930-an. Mussolini ikut memperkuat mitos itu. Di perhentian kereta terakhir sebelum masuk Roma, dia sudah mempertimbangkan turun dari kereta dan masuk kota naik kuda dikelilingi para pengawal. Walau rencana itu akhirnya tak dilaksanakan, dia sudahnya melakukan segala yang dia bisa untuk memperkuat legenda kenaikannya ke tampuk kekuasaan sebagai, menurut kata-katanya sendiri, "revolusi" dan "aksi kebangkitan" yang mengawali zaman baru Fasis.

Kenyataannya lebih bersahaja. Sebagian besar massa "Kemeja Hitam" Mussolini, yang umumnya kurang makan dan tak bersenjata, baru datang sesudah Mussolini diundang untuk menjadi perdana menteri. Gerombolan Fasis di seantero Italia memang mengancam, tapi cara Mussolini merebut kendali negara bukan revolusi. Dia menggunakan 35 kursi parlemen (dari 535) partainya, perpecahan di antara para politikus mapan, rasa takut terhadap sosialisme, dan ancaman kekerasan oleh 30.000 Kemeja Hitam untuk meraih perhatian Raja Vittorio Emanuele III, yang memandang Mussolini sebagai politikus yang naik daun dan tokoh yang bisa menenangkan keresahan.

Keteraturan politik dipulihkan oleh penunjukan Mussolini, sementara sosialisme mundur, sehingga bursa saham Italia bangkit. Para negarawan tua liberal, seperti Giovanni Giolitti dan Antonio Salandra, jadi memuji perubahan itu. Mereka menganggap Mussolini sebagai sekutu berguna. Namun seperti kuda di dongeng Aesop, Italia segera mendapati diri dipasangi "kekang dan pelana".

Cerita serupa telah berulang-ulang di seantero dunia sepanjang abad kemarin. Sejumlah orang luar di bidang politik, termasuk Adolf

Hitler, Getúlio Vargas di Brazil, Alberto Fujimori di Peru, dan Hugo Chávez di Venezuela, meraih kekuasaan dengan jalan yang sama: dari dalam, melalui pemilihan umum atau persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa. Di setiap contoh, kaum elite percaya bahwa undangan ke kekuasaan bakal *meredam* si orang luar, mengarah ke pemulihan kendali di tangan politikus arus utama. Namun, rencana mereka jadi senjata makan tuan. Campuran maut ambisi, rasa takut, dan kesalahan perhitungan berpadu menjadikan mereka melakukan kekeliruan fatal yang sama: sengaja menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat.

Mengapa para negarawan tua berpengalaman membuat kesalahan itu? Hanya sedikit contoh yang lebih mencolok ketimbang kebangkitan Adolf Hitler pada Januari 1933. Kemampuannya melakukan tindakan kekerasan sudah tampak sejak peristiwa Putsch di Muenchen tahun 1923—serangan kejutan malam ketika sekelompok pengikut setia Hitler yang bersenjata pistol merebut kendali atas sejumlah bangunan pemerintah dan satu ruang pertemuan di Muenchen di mana beberapa pejabat Bayern sedang berkumpul. Serangan yang kurang matang persiapannya itu diatasi oleh pemerintah, dan Hitler pun menghabiskan sembilan bulan dalam penjara, di mana dia menulis kesaksian pribadinya yang terkenal, *Mein Kampf*. Hitler sesudahnya menyatakan akan meraih kekuasaan melalui pemilihan umum. Awalnya gerakan Nasional Sosialis-nya hanya mendapat sedikit suara. Sistem politik negara Weimar dibangun pada 1919 oleh koalisi prodemokrasi Katolik, Liberal, dan Sosial Demokrat. Namun sejak 1930, dengan hancurnya ekonomi Jerman, kelompok kanan-tengah melemah karena bertengkar sendiri, sementara Komunis dan Nazi makin populer.

Pemerintahan terpilih ambruk pada Maret 1930 di tengah Depresi Besar yang menyakitkan. Dengan adanya kebuntuan politik yang menghambat gerak pemerintah, presiden yang jabatannya hanya simbolis, pahlawan Perang Dunia I Paul von Hindenburg, memanfaatkan satu pasal konstitusi yang memberi kepala negara wewenang untuk menun-

juk kanselir dalam kondisi darurat ketika parlemen gagal membentuk pemerintahan mayoritas. Tujuan kanselir yang bukan hasil pemilu—dan presiden—bukan hanya memerintah, melainkan juga mengesampingkan kaum radikal kiri dan kanan. Pertama-tama, ahli ekonomi dari Partai Tengah, Heinrich Brüning (yang kemudian meninggalkan Jerman untuk menjadi profesor di Harvard) berusaha namun gagal memulihkan pertumbuhan ekonomi; masa jabatannya sebagai kanselir tak lama. Presiden von Hindenburg kemudian beralih ke bangsawan Franz von Papen, lalu dengan lebih putus asa beralih lagi ke sahabat sekaligus rival von Papen, mantan menteri pertahanan Jenderal Kurt von Schleicher. Namun, tanpa dukungan mayoritas parlementer di Reichstag, kebuntuan bertahan. Ada alasan bagus yang membuat para pemimpin mengkhawatirkan pemilihan umum mendatang.

Karena yakin bahwa "sesuatu harus dilakukan", sekelompok konservatif yang saling bersaing mengadakan pertemuan pada akhir Januari 1933 dan mencapai satu kesimpulan: Orang luar yang populer sebaiknya dijadikan kepala pemerintahan. Mereka membenci dia, tapi tahu bahwa setidaknya dia punya massa pengikut. Dan terutama, mereka pikir bisa mengendalikan dia.

Pada 30 Januari 1933, von Papen, salah seorang arsitek utama rencana itu, mengabaikan kekhawatiran mengenai pertarungan untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman di tengah krisis dengan kata-kata menenangkan berikut: "Kita sudah pegang dia ... Dalam dua bulan, kita akan desak dia sampai terpojok dan menjerit." Sukar membayangkan kesalahan perhitungan yang lebih besar daripada itu.

Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe "persekutuan penentu nasib" yang sering kali mengangkat tokoh otoriter ke kekuasaan. Di demokrasi mana pun, politikus kadang menghadapi tantangan berat. Krisis ekonomi, memuncaknya ketidakpuasan masyarakat, dan kemerosotan partai-partai politik arus utama dalam pemilihan umum bisa menjadi ujian bagi pertimbangan bahkan orang dalam yang paling berpengalaman. Bila orang luar yang karismatik muncul, meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa

kehilangan kendali bisa tergoda untuk memanfaatkan dia. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukan itu, maka dia bisa menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu para politikus mapan berharap si orang baru bisa diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri.

"Perjanjian dengan iblis" semacam itu sering berubah menguntungkan si orang baru, karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah. Di Italia awal 1920-an, tatanan liberal lama sedang ambruk di tengah pemogokan dan keresahan sosial. Kegagalan partai-partai tradisional membentuk mayoritas parlementer yang solid membuat perdana menteri tua yang telah menjabat lima kali, Giovanni Giolitti, putus asa, dan dia mengabaikan para penasihatnya lalu mengadakan pemilu lebih awal pada Mei 1921. Dengan niat memanfaatkan daya tarik massa Fasis, Giolitti memutuskan untuk menawarkan tempat kepada gerakan baru Mussolini di "blok borjuis" Nasionalis, Fasis, dan Liberal-nya. Strategi itu gagal—blok borjuis meraih di bawah 20 persen suara, sehingga Giolitti mengundurkan diri. Namun posisi Mussolini membuat kelompoknya mendapat legitimasi sehingga bisa menanjak dalam politik.

Persekutuan penentu takdir tak hanya terjadi di Eropa pada masa antara dua perang dunia. Persekutuan semacam itu juga membantu menjelaskan kebangkitan Hugo Chávez. Venezuela dulu membanggakan diri sebagai demokrasi tertua di Amerika Selatan, yang sudah berjalan sejak 1958. Chávez, perwira militer junior dan pemimpin kudeta gagal yang tak pernah memegang jabatan publik, adalah orang luar dalam politik. Namun kebangkitannya menuju kekuasaan mendapat dorongan kritis dari orang dalam: mantan presiden Rafael Caldera, salah seorang pendiri demokrasi Venezuela.

Politik Venezuela sejak lama didominasi dua partai, Aksi Demokratik yang beraliran tengah-kiri dan partai tengah-kanan Caldera, Partai Sosial Kristen (dikenal dengan singkatannya, COPEI). Keduanya bergantian berkuasa dengan damai selama tiga puluh tahun lebih, dan pada 1970-

an Venezuela dipandang sebagai teladan demokrasi di kawasan yang sering mengalami kudeta dan kediktatoran. Namun selama 1980-an ekonomi Venezuela yang amat bergantung kepada minyak merosot, mengalami krisis yang bertahan sampai melebihi satu dasawarsa, nyaris melipatgandakan angka kemiskinan. Tak heran kalau rakyat Venezuela jadi kecewa. Kerusuhan besar pada Februari 1989 memberi kesan bahwa partai-partai mapan bermasalah. Tiga tahun kemudian, pada Februari 1992, sekelompok perwira militer junior bangkit melawan Presiden Carlos Andrés Pérez. Para pemberontak yang dipimpin Hugo Chávez itu menyebut diri sendiri "Bolivariano", meminjam nama pahlawan kemerdekaan Simón Bolívar. Kudeta itu gagal. Namun ketika Chávez yang ditangkap ditampilkan di televisi untuk memberitahu pengikutnya agar meletakkan senjata (mengumumkan, dengan kata-kata yang bakal menjadi legendaris, bahwa misi mereka telah gagal "untuk sekarang"), dia menjadi pahlawan di mata banyak orang Venezuela, terutama yang miskin. Sesudah kudeta gagal kedua pada November 1992, Chávez yang dipenjara berubah haluan, memilih mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum. Dia butuh bantuan.

Walau mantan presiden Caldera merupakan negarawan tua yang dihormati, karier politiknya sudah memudar pada 1992. Empat tahun sebelumnya dia gagal menjadi calon presiden di partainya sendiri, dan sudah dianggap ketinggalan zaman secara politis. Namun, senator berumur tujuh puluh enam tahun tersebut masih mengimpikan bisa kembali menjabat presiden, dan kemunculan Chávez memberikan jalan. Pada malam kudeta pertama Chávez, sang mantan presiden berdiri di tengah sidang darurat kongres dan mendukung perjuangan para pemberontak, menyatakan:

Sukar meminta rakyat berkorban demi kebebasan dan demokrasi ketika mereka berpikir bahwa kebebasan dan demokrasi tak bisa memberi makanan, tak bisa mencegah kenaikan harga gila-gilaan, atau tak bisa mengakhiri korupsi parah yang di mata dunia menggerogoti lembaga-lembaga Venezuela setiap hari.

Pidato mengejutkan itu menghidupkan kembali karier politik Caldera. Sesudah mendapatkan konstituen antisistem Chávez, dukungan publik bagi sang mantan presiden naik, sehingga dia berhasil menang dalam pemilihan presiden 1993.

Pendekatan publik Caldera ke Chávez bukan hanya membantu Caldera dalam pemilu, melainkan juga memberi kredibilitas baru kepada Chávez. Chávez dan kawan-kawan tadinya berusaha menghancurkan demokrasi negara mereka yang sudah berumur tiga puluh empat tahun. Namun, bukannya menyatakan para pemimpin kudeta sebagai ancaman ekstremis, sang mantan presiden malah menawarkan simpati publik—dan sekaligus pintu masuk ke politik arus utama.

Caldera juga membantu membuka pintu istana kepresidenan untuk Chávez dengan memukul partai-partai mapan Venezuela. Secara mengejutkan Caldera meninggalkan COPEI, partai yang dia dirikan hampir setengah abad sebelumnya, dan menjadi calon presiden jalur independen. Partai-partai Venezuela memang sudah krisis. Namun kepergian Caldera dan kampanye anti-kemapanan yang terjadi sesudahnya membantu mengubur partai-partai. Sistem partai ambruk sesudah pemilu 1993 yang dimenangi Caldera sebagai calon independen anti-partai, membuka jalan untuk orang luar lainnya pada masa depan. Lima tahun kemudian, giliran Chávez maju.

Namun, pada 1993 Chávez masih punya masalah besar. Dia dipenjara, menunggu sidang atas tuduhan makar. Namun, pada 1994 Presiden Caldera mencabut semua tuntutan atas Chávez. Tindakan terakhir Caldera untuk membantu Chávez adalah membuka pintu—pintu penjara—secara harfiah untuk Chávez. Sesudah Chávez bebas, seorang reporter bertanya ke mana dia akan menuju. "Menuju kekuasaan," jawab Chávez. Membebaskan Chávez itu kebijakan populer, dan Caldera memang menjanjikan itu sewaktu berkampanye. Seperti sebagian besar elite Venezuela, dia memandang Chávez hanya akan terkenal sebentar—yang pada pemilu berikutnya sudah dilupakan masyarakat. Namun, dengan mencabut semua tuntutan, bukannya membiarkan Chávez diadili untuk kemudian diampuni, Caldera justru mengangkat Chávez, mengubah

mantan pemimpin kudeta itu menjadi calon presiden dalam sekejap. Pada 6 Desember 1998 Chávez menang pemilihan presiden, mengalahkan calon yang didukung kubu mapan. Pada hari pelantikan, Caldera, presiden sebelumnya, tak mampu melaksanakan serah terima jabatan ke Chávez sebagaimana tradisi. Dia hanya berdiri murung di pinggir.

Meski ketiganya amat berbeda, Hitler, Mussolini, dan Chávez menempuh jalan menuju kekuasaan yang mirip. Mereka semua adalah orang luar yang mahir merebut perhatian publik, tapi semuanya meraih kekuasaan karena para politikus mapan mengabaikan tanda-tanda peringatan dan entah menyerahkan kekuasaan kepada mereka (Hitler dan Mussolini) atau membuka pintu untuk mereka (Chávez).

Pengalihan tanggung jawab politis oleh pemimpin yang sedang berkuasa sering menandai langkah pertama suatu negara menuju otoritarianisme. Bertahun-tahun sesudah kemenangan Chávez di pemilihan presiden, Rafael Caldera menjelaskan kesalahannya dengan sederhana: "Tak seorang pun berpikir bahwa Mr. Chávez berpeluang jadi presiden, sekecil apa pun." Dan hanya satu hari sesudah Hitler menjadi kanselir, seorang tokoh konservatif yang membantu dia mengaku, "Saya telah melakukan kebodohan terbesar dalam hidup; saya telah bersekutu dengan demagog terbesar dalam sejarah dunia."

Tidak semua demokrasi terjerumus dalam jebakan demikian. Beberapa—termasuk Belgia, Britania, Kosta Rika, dan Finlandia—telah menghadapi tantangan dari demagog, tapi berhasil mencegah mereka meraih kekuasaan. Bagaimana caranya? Ada godaan untuk menganggap keberhasilan itu berakar di kebijaksanaan bersama para pemilih. Barangkali orang Belgia dan Kosta Rika memang lebih demokratis daripada orang Jerman atau Italia. Bagaimanapun, kita suka mempercayai bahwa nasib suatu pemerintahan terletak di tangan rakyatnya. Bila rakyat suka otoritarianisme, maka cepat atau lambat demokrasi akan bermasalah di sana.

Pandangan itu keliru, karena berasumsi terlalu banyak terhadap demokrasi—bahwa "rakyat" bisa membentuk jenis pemerintahan se-

maunya. Sukar menemukan bukti dukungan mayoritas terhadap otoritarianisme di Jerman dan Italia pada 1920-an. Sebelum Nazi dan Fasis berkuasa, kurang dari 2 persen populasi yang menjadi anggota partai-partai itu, dan kedua partai tidak meraih mayoritas suara dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Justru mayoritas pemilih menentang Hitler dan Mussolini—sebelum keduanya meraih kekuasaan karena dukungan orang dalam politik yang buta akan bahaya ambisi mereka.

Hugo Chávez dipilih mayoritas pemilih, tapi tak banyak bukti bahwa orang Venezuela mencari pemimpin bertangan besi. Waktu itu dukungan publik terhadap demokrasi di sana lebih tinggi daripada di Chile—negara yang ketika itu dan sampai sekarang masih stabil dalam keadaan demokratis. Menurut survei Latinobarómetro 1998, 60 persen orang Venezuela setuju dengan pernyataan "Demokrasi selalu merupakan bentuk pemerintahan terbaik," hanya 25 persen yang setuju bahwa "dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter bisa lebih baik daripada pemerintahan demokratis." Sementara itu, hanya 53 persen penanggap di Chile yang setuju bahwa "demokrasi selalu merupakan bentuk pemerintahan terbaik".

Calon demagog ada di semua negara demokrasi, dan sekali-sekali salah satunya meraih perhatian publik. Namun di beberapa demokrasi, para pemimpin politik memperhatikan tanda-tanda peringatan dan melakukan langkah-langkah agar tokoh-tokoh otoriter tetap ada di pinggir, jauh dari pusat kekuasaan. Waktu menghadapi kebangkitan ekstremis atau demagog, mereka bersama-sama mengisolasi dan menyalahkannya. Walau tanggapan massa terhadap bujukan ekstremis itu penting, yang lebih penting adalah apakah elite politik, dan terutama partai, bertindak sebagai filter. Sederhananya, partai politik adalah penjaga gerbang demokrasi.

Bila kita mau menjaga agar tokoh-tokoh otoriter tetap di luar, maka pertama-tama mereka harus diidentifikasi. Sayangnya tak ada sistem peringatan dini yang senantiasa ampuh. Banyak tokoh otoriter bisa mudah dikenali sebelum mereka berkuasa. Mereka punya rekam jejak

jelas: Hitler memimpin *putsch* yang gagal; Chávez memimpin pembangkangan militer yang gagal; gerombolan Kemeja Hitam Mussolini terlibat kekerasan paramiliter; dan di Argentina pada pertengahan abad ke-20, Juan Perón turut memimpin kudeta yang sukses, dua setengah tahun sebelum ikut pemilihan presiden.

Namun politikus tak selalu mengungkap keseluruhan kadar otoritarianisme mereka sebelum meraih kekuasaan. Beberapa menganut norma-norma demokrasi pada awal karier, kemudian mencampakkannya. Pertimbangkan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán. Orbán dan Partai Fidesz-nya berawal sebagai kelompok demokrat liberal pada akhir 1980-an, dan dalam masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri antara 1998 dan 2002, dia memerintah dengan demokratis. Sesudah kembali berkuasa pada 2010, dia berbalik jadi autokrat secara mengejutkan.

Jadi bagaimana caranya mengenali otoritarianisme pada politikus yang tak punya riwayat antidemokrasi yang jelas? Di sini kita beralih ke ahli ilmu politik terkemuka Juan Linz. Linz, yang lahir di Jerman zaman Weimar dan dibesarkan di tengah perang saudara Spanyol, sangat paham mengenai pedihnya kehilangan demokrasi. Sebagai profesor di Yale, dia mengabdikan sebagian besar kariernya untuk mencoba mengerti bagaimana dan mengapa demokrasi mati. Banyak kesimpulan Linz bisa ditemukan di buku kecil perintis berjudul *The Breakdown of Democratic Regimes*. Buku yang terbit tahun 1978 itu menyoroti peran politikus, menunjukkan bagaimana perilaku mereka bisa memperkuat atau mengancam demokrasi. Dia juga mengusulkan, namun tak pernah mengembangkan, "tes litmus" untuk mengenali politikus antidemokrasi.

Berdasarkan karya Linz, kami telah mengembangkan satu set berisi empat tanda peringatan terkait perilaku yang bisa membantu kita mengenali tokoh otoriter. Kita sebaiknya khawatir apabila seorang politikus 1) menolak aturan main demokrasi, dengan kata-kata atau perbuatan, 2) menyangkal legitimasi lawan, 3) menoleransi atau menyerukan kekerasan, atau 4) menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan

sipil lawan, termasuk media. Tabel 1 menunjukkan bagaimana menilai politikus dengan empat faktor itu.

Politikus yang memenuhi satu saja syarat tadi sudah mengkhawatirkan. Jenis kandidat apa yang cenderung mendapat hasil positif di tes litmus otoriterianisme? Sering kali orang luar yang populis. Populis adalah politikus anti-kemapanan—tokoh-tokoh yang mengaku mewakili suara “rakyat” lalu mengobarkan perang terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai elite korup yang bersekongkol. Populis cenderung menyangkal legitimasi partai-partai mapan, menyerang partai karena dianggap tak demokratis dan bahkan tak patriotis. Mereka memberitahu pemilih bahwa sistem yang ada bukan benar-benar demokrasi, melainkan telah dibajak, dikorup, atau diakali elite. Dan mereka berjanji mau mengubur elite lalu mengembalikan kekuasaan kepada “rakyat”. Wacana itu sebaiknya dianggap serius. Ketika populis menang pemilu, mereka sering menyerang lembaga-lembaga demokrasi. Di Amerika Latin, contohnya, dari lima belas presiden yang terpilih di Bolivia, Ekuador, Peru, dan Venezuela antara 1990 dan 2012, lima adalah orang luar populis: Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lucio Gutiérrez, dan Rafael Correa. Kelimanya memperlemah lembaga-lembaga demokrasi.

Tabel 1: Empat Indikator Kunci Perilaku Otoriter

1. Penolakan (atau komitmen lemah) atas aturan main demokratis	Apakah mereka menolak Konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggarnya? Apakah mereka mengusulkan cara-cara antidemokrasi, seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan Konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak asasi sipil atau politik? Apakah mereka berusaha (atau menyetujui) menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan? Apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel?
--	---

2. Menyangkal legitimasi lawan politik

Apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar, atau menentang tatanan konstitusional yang ada? Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial, baik bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum? Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum (atau berpotensi begitu) dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik? Apakah mereka berkata tanpa dasar bahwa lawan adalah antek asing, bekerja sama diam-diam dengan (atau dipekerjakan) pemerintah asing—biasanya yang bermusuhan?
3. Toleransi atau anjuran kekerasan

Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tak sah? Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan? Apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak mencela dan menghukumnya? Apakah mereka pernah memuji (atau menolak mencela) tindakan kekerasan politik, pada masa lalu atau di tempat lain?
4. Ketersediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media

Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah, atau organisasi sipil atau politis tertentu? Apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengkritik di partai lawan, masyarakat sipil, atau media? Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain, pada masa lalu atau di tempat lain?

Menjaga agar politikus otoriter tak berkuasa itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, demokrasi seharusnya tak melarang partai atau calon mana pun ikut pemilihan umum—dan kami tak menganjurkan cara demikian. Tanggung jawab menyaring kaum otoriter justru terletak di partai politik dan pemimpin partai: para penjaga pintu demokrasi.

Bila ingin berhasil menjaga pintu demokrasi, partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstremis, suatu perilaku yang disebut ahli ilmu politik Nancy Bermeo "menjaga jarak" (*distancing*). Partai-partai prodemokrasi bisa menjaga jarak dengan beberapa cara. Pertama, partai-partai bisa mencegah tokoh otoriter masuk daftar calon partai. Artinya partai-partai harus menolak godaan mencalonkan ekstremis, biarpun mereka bisa saja menambah suara.

Kedua, partai bisa membasmi ekstremis di tingkat akar rumputnya. Misalnya Partai Konservatif Swedia (AVF) selama masa antara Perang Dunia I dan II. Sayap pemuda AVF (organisasi aktivis yang memperjuangkan batas umur untuk hak suara), Organisasi Pemuda Nasionalis Swedia, menjadi makin radikal pada awal 1930-an, mengkritik demokrasi parlementer, terang-terangan mendukung Hitler, bahkan membuat kelompok pasukan berseragam. AVF menanggapi dengan mengeluarkan organisasi itu dari partai pada 1933. Hilangnya 25.000 anggota boleh jadi membuat AVF kehilangan suara pada pemilihan umum daerah 1934, tapi strategi menjaga jarak itu berhasil mengurangi pengaruh kekuatan antidemokrasi di partai tengah-kanan terbesar Swedia.

Ketiga, partai-partai prodemokrasi bisa menghindari segala persekutuan dengan partai dan calon antidemokrasi. Seperti kita lihat di Italia dan Jerman, partai-partai prodemokrasi kadang tergoda bersekutu dengan ekstremis di ujung kisaran ideologi mereka demi suara, atau di sistem parlementer, untuk membentuk pemerintahan. Namun, persekutuan seperti itu bisa punya konsekuensi merusak dalam jangka panjang. Seperti ditulis Linz, kerusakan banyak demokrasi bisa ditelusuri ke satu partai yang "lebih dekat ke ekstremis di ujung kisaran ideologi politiknya daripada ke partai [arus utama] yang berseberangan."

Keempat, partai-partai prodemokrasi bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremis, bukan memberi legitimasi. Artinya para politikus harus menghindari tindakan—seperti aksi bersama kelompok Konservatif Jerman dan Hitler pada 1930-an atau pidato Caldera yang bersimpati kepada Chávez—yang membantu “menormalkan” atau memberi penghormatan publik kepada tokoh otoriter.

Terakhir, sewaktu ekstremis bangkit sebagai kandidat serius di pemilu, partai-partai arus utama mesti membentuk persekutuan untuk mengalahkan mereka. Mengutip Linz, partai-partai mesti bersedia “bergabung dengan lawan-lawan yang beda ideologi namun berkomitmen terhadap kelangsungan tatanan politik demokrasi.” Dalam keadaan normal, persekutuan itu hampir tak terbayangkan. Bayangkan Senator Edward Kennedy dan orang-orang Demokrat liberal lain berkampanye mendukung Ronald Reagan, atau Partai Buruh Britania dan sekutusekutunya di kalangan serikat buruh mendukung Margaret Thatcher. Pengikut tiap partai bakal marah dengan apa yang tampak sebagai pengkhianatan terhadap prinsip. Namun dalam keadaan darurat, kepemimpinan partai yang berani harus mengutamakan demokrasi dan negara sebelum kepentingan partai, dan menyampaikan kepada pemilih mengenai apa yang dipertaruhkan. Ketika partai atau politikus yang mendapat hasil positif di tes litmus kita bangkit sebagai ancaman serius dalam pemilu, tak banyak pilihan lain. Front demokratis bersatu bisa mencegah ekstremis meraih kekuasaan, yang bisa berarti menyelamatkan demokrasi.

Walau kegagalan lebih mudah diingat, beberapa negara demokrasi Eropa mempraktikkan penjagaan gerbang dengan sukses antara Perang Dunia I dan II. Pelajaran besar bisa diambil dari negara-negara kecil. Pertimbangkan Belgia dan Finlandia. Pada tahun-tahun krisis politik dan ekonomi Eropa, 1920-an dan 1930-an, kedua negara mengalami tanda-tanda peringatan kerusakan demokrasi—kebangkitan ekstremis antisistem—tapi tak seperti Italia dan Jerman, keduanya diselamatkan elite politik yang mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi (setidaknya sampai serbuan Nazi beberapa tahun sesudahnya).

Pada pemilihan umum Belgia 1936, selagi fasisme menular dari Italia dan Jerman ke seluruh Eropa, para pemilih memberi hasil menggetarkan. Dua partai ultrakanan otoriter, Partai Rex dan Vlaams Nationaal Verbond (VNV, Partai Nasionalis Vlaam)—mendapat cukup banyak suara, hampir 20 persen dari total suara, menantang dominasi lama tiga partai mapan: Partai Katolik tengah-kanan, Partai Sosialis, dan Partai Liberal. Tantangan dari pemimpin Partai Rex, Léon Degrelle, seorang jurnalis Katolik yang kemudian menjadi kolaborator Nazi, sangat kuat. Degrelle, kritikus keras demokrasi parlementer, telah memisahkan diri dari ujung kanan Partai Katolik lalu menyerang para pemimpin partai tersebut yang dia anggap korup. Degrelle mendapat dukungan moral maupun finansial dari Hitler dan Mussolini.

Pemilihan umum 1936 menggoncang partai-partai tengah, yang menderita kekalahan. Karena sadar akan gerakan antidemokrasi di Italia dan Jerman, serta khawatir akan kelangsungan diri sendiri, partai-partai itu pun harus memutuskan bagaimana menanggapi. Partai Katolik, khususnya, menghadapi dilema sulit: berkolaborasi dengan seteru lama, Partai Sosialis dan Liberal, atau membentuk aliansi sayap kanan bersama Partai Rex, yang mirip secara ideologis namun menolak nilai politik demokrasi.

Tak seperti para politikus arus utama Italia dan Jerman yang melangkah mundur, para pemimpin Partai Katolik Belgia menyatakan bahwa kerja sama apa pun dengan Partai Rex tak cocok dengan aspirasi anggota partai, lalu menggunakan strategi bermata dua untuk melawan gerakan itu. Di dalam, para pemimpin Partai Katolik menegakkan disiplin dengan memeriksa para kandidat kalau-kalau ada yang bersimpati ke Partai Rex dan mengeluarkan mereka yang menyatakan pandangan ekstrem. Selain itu, para pemimpin partai bersikap keras menolak kerja sama dengan kubu kanan garis keras. Ke luar, Partai Katolik melawan Rex di kandang sendiri. Partai Katolik menggunakan taktik propaganda dan kampanye baru yang mengincar kaum muda Katolik, yang sebelumnya menjadi basis Rex. Front Katolik Muda dibentuk pada Desember 1935 dan mulai mengadu Degrelle dengan mantan-mantan sekutunya.

Konflik terakhir antara Partai Rex dan Katolik, yang membuat Rex efektif tersingkir (sampai pendudukan Nazi), berpusat di pembentukan pemerintahan baru sesudah pemilu 1936. Partai Katolik mendukung perdana menteri petahana dari Partai Katolik, Paul van Zeeland. Sesudah van Zeeland meraih kembali kursi perdana menteri, ada dua pilihan utama untuk membentuk pemerintahan: Yang pertama adalah persekutuan dengan rival mereka, Partai Sosialis, meniru "Front Rakyat" Prancis; van Zeeland dan para pemimpin Katolik lain awalnya berharap bisa menghindari pilihan ini. Yang kedua adalah persekutuan sayap kanan antisosialis yang bakal mencakup Rex dan VNV. Penentuannya tak mudah; pilihan kedua didukung faksi tradisional yang ingin menggoyang kabinet van Zeeland yang rapuh dengan menggalang massa Katolik, mengadakan "Aksi ke Brussels" dan memaksakan pemilu sela di mana pemimpin Rex, Degrelle, bakal bertanding dengan van Zeeland. Rencana itu digagalkan pada 1937 ketika Degrelle kalah dalam pemilu sela, sebagian besar karena sikap para anggota dewan dari Partai Katolik: Mereka menolak ikut rencana faksi tradisional dan memilih bersatu dengan Partai Liberal dan Sosialis di belakang van Zeeland. Itulah tindakan penjagaan gerbang terpenting Partai Katolik Belgia.

Sikap Partai Katolik di sayap kanan juga dimungkinkan oleh Raja Leopold III dan Partai Sosialis. Pemilihan umum 1936 membuat Partai Sosialis menjadi pemilik mayoritas kursi legislatif, sehingga berhak membentuk pemerintahan. Namun ketika tampak bahwa Partai Sosialis tak dapat meraih cukup banyak dukungan di parlemen, bukannya mengadakan pemilihan umum ulang—yang boleh jadi memberi makin banyak kursi untuk partai-partai ekstremis—sang raja bertemu para pemimpin partai-partai terbesar untuk membujuk mereka agar membentuk kabinet berbagi kekuasaan, dipimpin perdana menteri petahana van Zeeland, yang bakal melibatkan Partai Katolik konservatif dan Partai Sosialis namun tak melibatkan ekstremis di kedua sisi. Walau Partai Sosialis merasa tidak percaya kepada van Zeeland, seorang tokoh Partai Katolik, mereka tetap mengutamakan demokrasi daripada kepentingan pribadi dan mendukung koalisi besar.

Dinamika serupa terjadi di Finlandia, di mana Gerakan Lapua ekstrem kanan muncul di panggung politik pada 1929, mengancam demokrasi yang rapuh di negara itu. Gerakan Lapua ingin menghancurkan komunisme dengan segala cara. Gerakan itu mengancam akan melakukan kekerasan apabila tuntutan mereka tak dipenuhi, dan menyerang politikus arus utama yang dianggap berkolaborasi dengan kaum Sosialis. Awalnya, para politikus dari Partai Persatuan Agraria (*Maalaisliitto*) melirik Gerakan Lapua karena menganggap sikap antikomunisnya berguna dalam politik; mereka memenuhi permintaan gerakan itu untuk membatasi hak politik komunis sambil membiarkan kekerasan oleh kelompok ekstrem kanan. Pada 1930, P.E. Svinhufvud, seorang konservatif yang dianggap para pemimpin Lapua "orang kita" menjadi perdana menteri, dan menawarkan dua posisi di kabinet untuk Lapua. Setahun kemudian Svinhufvud menjadi presiden. Namun Gerakan Lapua melanjutkan perilaku ekstremnya; sesudah komunis dilarang, Lapua mengincar Partai Sosial Demokrat yang lebih moderat. Para preman Lapua menculik seribu lebih anggota Partai Sosial Demokrat, termasuk para pemimpin serikat dan anggota parlemen. Gerakan Lapua juga mengadakan aksi jalan kaki 12.000 orang ke Helsinki (meniru Pawai ke Roma), dan pada 1932 Lapua mendukung kudeta (yang gagal) untuk menggantikan pemerintah dengan yang lebih "patriotis" dan "tak politis".

Namun, selagi Gerakan Lapua tumbuh makin radikal, partai-partai konservatif tradisional Finlandia memutuskan hubungannya. Pada akhir 1930, sebagian besar Partai Persatuan Agraria, Partai Kemajuan yang liberal, dan sebagian besar Partai Orang Swedia bergabung dengan rival ideologis utama mereka, Partai Sosial Demokrat, dalam Front Taat Hukum untuk membela demokrasi dari ekstremis pelaku kekerasan. Bahkan sang presiden konservatif, Svinhufvud, menolak keras—dan akhirnya melarang—bekas sekutunya. Gerakan Lapua terkucil, dan lonjakan fasisme singkat di Finlandia pun berakhir.

Keberhasilan menjaga gerbang demokrasi bukan hanya terjadi di kasus-kasus lama dalam sejarah. Di Austria pada 2016, partai tengah-kanan utama (Partai Rakyat Austria, *ÖVP*) efektif menyingkirkan Partai

Kebebasan (FPÖ) radikal-kanan dari kabinet kepresidenan. Austria punya sejarah panjang politik ekstrem kanan, dan FPÖ adalah salah satu partai kanan ekstrem terkuat di Eropa. Sistem politik Austria makin rawan karena dua partai terbesar, Partai Sosial Demokrat (SPÖ) dan Partai Rakyat Austria, yang bergantian memegang jabatan presiden sepanjang masa pasca-Perang Dunia II, sedang melemah. Pada 2016, dominasi keduanya ditantang dua orang baru—mantan ketua Partai Hijau, Alexander van der Bellen, dan pemimpin ekstremis FPÖ Norbert Hofer.

Yang mengejutkan sebagian besar analis, sesudah putaran pertama pemilu, van der Bellen dan si orang luar sayap kanan Hofer menjadi dua calon yang bertarung di putaran kedua. Sesudah satu kesalahan prosedur pada Oktober 2016, pemilu putaran kedua diadakan pada Desember. Di titik itu, beberapa politikus terkemuka, termasuk dari ÖVP yang konservatif, menyatakan bahwa Hofer dan Partai Kebebasan harus dikalahkan. Hofer telah mendukung kekerasan terhadap imigran, dan banyak yang bertanya apakah kalau Hofer terpilih, partainya akan mendapat keuntungan, dengan cara yang melanggar norma lama yaitu presiden tak terlibat politik. Menghadapi ancaman itu, beberapa pemimpin utama ÖVP berusaha mengalahkan Hofer dengan mendukung rival ideologis mereka, calon Partai Hijau yang kekiri-kirian, van der Bellen. Calon presiden dari ÖVP, Andreas Khol, mendukung van der Bellen, begitu juga Ketua ÖVP Reinhold Mitterlehner, Menteri Sophie Karnasin, dan lusinan walikota dari ÖVP di seantero Austria. Di satu surat, mantan ketua partai Erhard Busek menyatakan bahwa dia mendukung van der Bellen "bukan dengan semangat melainkan sesudah berpikir cermat", dan bahwa keputusan itu termotivasi sentimen bahwa "kami tak ingin diberi selamat oleh Le Pen, Jobbik, Wilders, dan AfD [serta ekstremis lain] sesudah pemilihan presiden." Van der Bellen menang dengan selisih hanya 300.000 suara.

Tindakan itu butuh keberanian politik cukup besar. Menurut seorang walikota dari Partai Katolik yang memimpin kota kecil di luar Wina, Stefan Schmuckenschlager, yang mendukung calon dari Partai

Hijau, keputusan itu sampai memecah-belah keluarga. Saudara kembarnya, pemimpin partai lain, mendukung Hofer. Seperti dijelaskan Schmuckenschlager, politik kekuasaan kadang harus dikesampingkan untuk melakukan hal yang benar.

Apakah dukungan dari ÖVP membantu? Ada bukti bahwa dukungan itu benar-benar membantu. Menurut *exit poll*, 55 persen penanggap yang mengaku pendukung ÖVP berkata memilih van der Bellen, dan 48 persen pemilih van der Bellen berkata mereka memilih dia untuk mencegah Hofer menang. Selain itu, perbedaan besar antara kota dan desa yang selalu menandai politik Austria (kota cenderung kiri dan desa cenderung kanan) berkurang dramatis pada putaran kedua pemilihan presiden, Desember 2016, dengan banyaknya negara bagian perdesaan yang secara tradisional konservatif beralih memilih van der Bellen.

Pendeknya, pada 2016, para pemimpin ÖVP yang bertanggung jawab menolak godaan bersekutu dengan partai ekstremis di sayap ideologisnya sendiri, dan hasilnya adalah kekalahan partai ekstremis itu. Hasil bagus yang didapat FPÖ pada pemilu legislatif 2017, yang memosisikannya menjadi mitra junior dalam suatu pemerintahan baru sayap kanan, menunjukkan bahwa dilema yang dihadapi kaum konservatif Austria masih bertahan. Tetap saja, upaya mereka untuk mencegah seorang ekstremis menjadi presiden menjadi contoh berguna cara menjaga gerbang demokrasi pada zaman sekarang.

Amerika Serikat sendiri punya catatan menjaga gerbang demokrasi yang mengesankan. Partai Demokrat dan Republik sama-sama pernah menghadapi tokoh-tokoh ekstremis di kubu masing-masing, yang sebagiannya mendapat dukungan publik lumayan. Selama berpuluh-puluh tahun, kedua partai berhasil mencegah tokoh-tokoh itu masuk arus utama. Tentu saja, hingga 2016.

2

Menjaga Gerbang Demokrasi di Amerika

Dalam *The Plot Against America*, penulis novel Amerika Philip Roth menggunakan peristiwa-peristiwa sejarah sungguhan untuk membayangkan seperti apa kiranya fasisme di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia II.

Seorang pahlawan kesayangan media Amerika, Charles Lindbergh, ialah tokoh utama novel itu: Dia menjadi terkenal karena pada 1927 terbang sendirian melintas Atlantik, lalu belakangan dia menjadi penganjur isolasionisme (sikap menjauhi ikut campur urusan negara lain) dan simpatisan Nazi. Berikut cara sejarah dibelokkan dalam fiksi karya Roth: Bukannya pelan-pelan menghilang dari mata masyarakat, Lindbergh justru datang naik pesawat di konvensi Partai Republik 1940 di Philadelphia pada pukul 3.14 pagi, selagi ruang sidang yang penuh mengalami kebuntuan dalam pemungutan suara. Seruan "Lindy! Lindy! Lindy!" meledak selama setengah jam di ruang konvensi, dan dalam momen semangat kolektif yang dahsyat, nama Lindbergh diajukan, didukung, dan disetujui dengan suara bulat sebagai calon presiden Partai Republik. Lindbergh, orang tanpa pengalaman politik namun amat pandai memanfaatkan media, mengabaikan saran para penasihatnya dengan memiloti pesawat terkenalnya, *Spirit of St. Louis*, dari negara bagian ke negara bagian, mengenakan kacamata penerbang, sepatu bot tinggi, dan baju terusan.

Di dunia yang terbalik itu, Lindbergh mengalahkan petahana Franklin Delano Roosevelt, dan menjadi presiden Amerika Serikat. Dan Lindbergh, yang kampanyenya kemudian terungkap ada hubungan dengan Hitler, lantas menandatangani perjanjian damai dengan musuh-musuh Amerika. Gelombang anti-Semitisme dan kekerasan pun melanda seantero Amerika.

Banyak orang Amerika telah menemukan kemiripan-kemiripan antara pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 dan karya fiksi Roth. Premisnya—orang luar dengan latar demokratis meragukan meraih kekuasaan dengan bantuan negara asing—tak bisa tak terpikirkan. Namun perbandingan itu menimbulkan pertanyaan menarik lain: Mengingat beratnya krisis ekonomi 1930-an di Amerika, mengapa itu *tidak* terjadi?

Alasan tak ada demagog ekstremis menang pemilihan presiden sebelum 2016 bukanlah karena tidak pernah ada calon presiden yang demikian. Bukan juga karena tidak ada dukungan publik untuk mereka. Sebaliknya, tokoh-tokoh ekstremis sudah lama bertebaran di arena politik Amerika. Pada 1930-an saja, sampai delapan ratus kelompok ekstrem kanan ada di Amerika Serikat. Di antara tokoh-tokoh paling penting yang muncul pada periode itu, ada Romo Charles Coughlin, seorang pastor Katolik anti-Semit yang punya program radio nasionalis berapi-api dengan empat puluh juta pendengar per minggu. Romo Coughlin terang-terangan antidemokrasi, menyerukan pembubaran partai politik dan mempertanyakan gunanya pemilu. Korannya, *Social Justice*, bersikap pro-fasis pada 1930-an, pernah menjadikan Mussolini "Tokoh Minggu Ini" dan sering membela rezim Nazi. Meski ekstrem, Romo Coughlin sangat populer. Majalah *Fortune* menyebut dia "mungkin hal terbesar yang pernah terjadi di radio." Dia berpidato dalam stadion dan auditorium penuh penonton di seantero negeri; selagi dia bepergian dari kota ke kota, para penggemarnya berjejer di sepanjang jalan untuk melihat dia lewat. Beberapa pengamat zaman itu menyebut dia tokoh paling berpengaruh di Amerika Serikat sesudah Roosevelt.

Zaman Depresi juga menghasilkan seorang gubernur dan senator

Louisiana, Huey Long, yang menyebut dirinya sendiri "Kingfish". Long dijabarkan oleh ahli sejarah Arthur M. Schlesinger, Jr. sebagai "demagog besar pada zamannya, seseorang yang menyerupai ... diktator Amerika Latin, Vargas atau Perón." "Kingfish" ialah seorang ahli pidato berbakat, dan dia secara rutin meremehkan supremasi hukum. Sebagai gubernur, Long membangun apa yang Schlesinger jabarkan sebagai "pendekatan termirip negara totaliter yang pernah dilihat republik Amerika Serikat", menggunakan campuran sogokan dan ancaman untuk mengendalikan badan legislatif, hakim, dan pers di negara bagiannya. Ketika ditanya oleh seorang anggota legislatif dari kubu oposisi mengenai apakah dia tahu konstitusi, Long menjawab, "Akulah konstitusinya sekarang". Redaktur koran Hodding Carter menyebut Long "diktator sejati pertama yang muncul di tanah Amerika Serikat." Ketika manajer kampanye Franklin Roosevelt, James A. Farley, bertemu Mussolini di Roma pada 1933, dia menulis bahwa sang diktator Italia "membuat saya teringat Huey Long."

Long mendapat banyak pengikut karena seruannya untuk redistribusi kekayaan. Pada 1934, dia dikatakan telah "menerima lebih banyak surat dibanding gabungan semua senator lain, bahkan lebih banyak daripada presiden." Ketika itu gerakan Share Our Wealth-nya sudah punya 27.000 lebih cabang di seantero negara dan daftar penerima suratnya hampir delapan juta nama. Long berencana mencalonkan diri sebagai presiden, dan berkata kepada seorang reporter *New York Times*, "Aku bisa hadapi Roosevelt ... aku bisa kalahkan janji-janjinya. Dan dia tahu itu." Roosevelt memandang Long sebagai ancaman serius, tapi dia terbebas dari ancaman itu ketika Long dibunuh pada September 1935.

Kecenderungan otoriter Amerika bertahan di zaman keemasan pasca-Perang Dunia II. Senator Joseph McCarthy, yang menggunakan rasa takut komunis dalam Perang Dingin untuk mendorong pembuatan daftar hitam, sensor, dan pelarangan buku, dan mendapat dukungan luas dari sebagian masyarakat Amerika. Pada puncak kekuatan politik McCarthy, jajak pendapat menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk Amerika mendukung dia. Bahkan sesudah Senat mengecam dia

pada 1954, McCarthy mendapat 40 persen dukungan menurut jajak pendapat Gallup.

Satu dasawarsa kemudian, gubernur Alabama George Wallace yang bersikap segregasionis keras menjadi terkenal di tingkat nasional, sehingga berani maju dalam pemilihan presiden 1968 dan 1972. Wallace terlibat apa yang jurnalis Arthur Hadley sebut "tradisi lama dan terhormat Amerika untuk membenci yang berkuasa." Hadley menulis bahwa Wallace adalah jagonya mengeksploitasi "kemarahan biasa dan lama Amerika". Wallace sering menganjurkan kekerasan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap norma-norma konstitusional, menyatakan:

Ada satu hal yang lebih berkuasa daripada Konstitusi ... Itu adalah kehendak rakyat. Apa sih Konstitusi itu? Produk rakyat, rakyat adalah sumber utama kekuasaan, dan rakyat bisa membatalkan Konstitusi bila mau.

Pesan Wallace, yang mencampurkan rasisme dengan daya tarik populis bagi orang kulit putih kelas pekerja yang merasa jadi korban dan marah secara ekonomi, membantu dia merebut basis Demokrat di kalangan pekerja. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kira-kira 40 persen orang Amerika menyetujui pencalonan Wallace sebagai presiden pada 1968, dan pada 1972 dia mengagetkan kalangan mapan dengan muncul sebagai penantang serius di pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Ketika kampanye Wallace diganggu upaya pembunuhan pada Mei 1972, dia sedang unggul sejuta lebih suara dari George McGovern dalam pemilihan pendahuluan.

Pendeknya, Amerika Serikat punya riwayat otoriter yang panjang. Tak aneh bila tokoh-tokoh seperti Coughlin, Long, McCarthy, dan Wallace mendapat dukungan minoritas cukup besar—30, bahkan 40 persen—di Amerika. Sering kali kita berkata kepada diri sendiri bahwa budaya politik nasional Amerika entah bagaimana caranya bisa membuat kita kebal dari yang semacam itu, tapi itu artinya kita membaca sejarah dengan kaca mata kuda. Perlindungan sejati terhadap calon otoriter bukanlah

komitmen kuat orang Amerika terhadap demokrasi, melainkan para penjaga gerbang—partai-partai politik kita.

Pada 8 Juni 1920, selagi masa jabatan kepresidenan Woodrow Wilson mendekati akhir, delegasi-delegasi Partai Republik berkumpul untuk memilih calon presiden di Chicago Coliseum yang penuh bendera namun berventilasi buruk, sehingga panasnya melebihi 37 derajat Celsius. Sesudah sembilan kali pemungutan suara selama empat hari, konvensi Partai Republik tetap belum bisa memutuskan. Pada Jumat sore, di Suite 404 lantai tiga belas Blackstone Hotel dekat sana, Ketua Komite Nasional Partai Republik Will Hays dan George Harvey, penerbit *Harvey's Weekly* yang berpengaruh, menjamu sekelompok senator AS dan pemimpin partai di "ruang belakang penuh asap rokok". Old Guard, julukan jurnalis untuk mereka, minum-minum, merokok cerutu, dan berbicara sampai larut malam mengenai cara menembus kebuntuan untuk mendapat satu calon yang disetujui 493 delegasi.

Penantang terkuat di konvensi adalah Mayor Jenderal Leonard Wood, seorang sekutu lama Theodore Roosevelt yang telah membangkitkan antusiasme masyarakat di pemilihan pendahuluan dan mendominasi perolehan suara pada awal minggu, meraih dukungan 287 delegasi. Dia diikuti gubernur Illinois Frank Lowden, senator California Hiram Johnson, sementara senator Ohio Warren G. Harding ada di posisi keempat dengan hanya 65½ delegasi. Dari konvensi, para reporter menulis, "Tak seorang pun berbicara mengenai Harding ... Dia tak dianggap kuda hitam paling menjanjikan." Namun, selagi para reporter mendingar desas-desus mengenai diskusi yang terjadi di Blackstone, yang paling termotivasi pergi ke lantai tiga belas hotel itu dan menunggu dalam diam di luar Suite 404 untuk mengintip selagi para senator terkemuka—termasuk Henry Cabot Lodge dari Massachusetts, McCormick dari Illinois, Phipps dari Colorado, Calder dari New York, mantan senator Crane dari Massachusetts, dan lainnya—datang dan pergi.

Di dalam Suite 404, lebih kurangnya semua calon dibahas dan diperdebatkan (Knox terlalu tua; Lodge tak suka Coolidge). Pada pukul satu

pagi, tujuh anggota Old Guard tetap berada di ruangan dan melakukan pemungutan suara dengan berdiri atau duduk. Pada 2:11 pagi, Harding dipanggil George Harvey dan kaget ketika diberitahu *dia* telah terpilih. Kabar menyebar. Malam berikutnya, pada pemungutan suara kesepuluh yang membuat lega delegasi-delegasi yang kepanasan, Warren G. Harding mendapat dukungan 692½ delegasi di konvensi, di tengah riuh sorak-sorai. Walau hanya mendapat 4 persen pada pemungutan suara pertama, Harding akhirnya menjadi calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu 1920.

Tak ada yang suka ruang penuh asap rokok sekarang—karena alasan bagus. Ruang semacam itu kurang demokratis. Calon dipilih oleh sekelompok kecil pialang kekuasaan yang tak bertanggung jawab kepada anggota-anggota partai, apalagi rakyat biasa. Dan ruang penuh asap rokok tak selalu menghasilkan presiden bagus—bagaimanapun, masa jabatan Harding dinodai skandal. Namun pemilihan calon di balik layar punya satu keunggulan yang sering dilupakan hari ini: berperan sebagai penjaga gerbang, yang mencegah tokoh-tokoh yang jelas tak cocok menjadi calon dan memegang jabatan. Untuk pastinya, alasannya bukanlah karena para pemimpin partai berpikiran luhur. Justru para "bos" partai lebih tertarik memilih calon aman yang mungkin menang. Yang terutama, rasa takut risiko membuat mereka menghindari ekstremis.

Lembaga-lembaga penjaga gerbang sudah ada sejak pendirian republik Amerika Serikat. Konstitusi 1787 menciptakan sistem presidensial pertama di dunia. Presidensialisme memberi tantangan khas untuk penjagaan gerbang demokrasi. Dalam demokrasi parlementer, perdana menteri adalah anggota parlemen dan dipilih oleh partai-partai terbesar di parlemen, yang hampir memastikan dia akan bisa diterima orang-orang dalam di perpolitikan. Proses pembentukan pemerintahan itu sendiri menjadi filter. Sementara itu presiden bukan anggota legislatif, juga tak dipilih oleh badan legislatif. Setidaknya dalam teori, Presiden dipilih rakyat, dan siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai presiden, lalu menang bila mendapat dukungan cukup besar.

Para pendiri Amerika Serikat amat memperhatikan penjagaan gerbang demokrasi. Ketika merancang Konstitusi dan sistem pemilihan umum, mereka bergulat dengan dilema yang boleh dikata masih kita hadapi sekarang. Di satu sisi, mereka bukan mencari raja, melainkan presiden hasil pemilu—yang cocok dengan gagasan mereka mengenai pemerintahan republik populer, mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain, para pendiri AS tak sepenuhnya percaya dengan kemampuan rakyat menilai kecocokan calon untuk memegang jabatan. Alexander Hamilton khawatir kursi presiden yang dipilih rakyat dapat dengan mudah direbut mereka yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan untuk menang pemilu lalu berkuasa sebagai tiran. "Sejarah akan mengajari kita," tulis Hamilton di *Federalist Papers*, bahwa "di antara orang-orang yang telah menumbangkan kemerdekaan di republik, banyak yang mengawali karier dengan memenuhi keinginan rakyat; awalnya jadi demagog, dan akhirnya jadi tiran." Bagi Hamilton dan kolega-koleganya, pemilihan umum membutuhkan semacam alat penyaringan.

Alat yang para pendiri AS buat adalah Electoral College. Pasal II Konstitusi AS menciptakan sistem pemilu tak langsung yang mencerminkan pemikiran Hamilton di *Federalist* 68:

Pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan, dan bertindak dalam kondisi yang bagus untuk berpikir, dan kombinasi bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan mereka.

Electoral College, yang terdiri atas tokoh-tokoh lokal di tiap negara bagian, bertanggung jawab memilih presiden. Dengan cara demikian, menurut Hamilton, "jabatan presiden akan jarang jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki kecakapan yang diperlukan." Orang-orang dengan "bakat intrik dan sekadar populer" bakal tersingkir. Electoral College pun menjadi penjaga gerbang demokrasi di Amerika Serikat.

Namun sistem itu terbukti berumur pendek karena ada dua kekurangan di rancangan asli para pendiri AS. Pertama, Konstitusi tak berkata apa-apa mengenai persoalan bagaimana calon presiden dipilih.

Electoral College bekerja *sesudah* rakyat memberi suara, tak berperan dalam menentukan siapa yang menjadi calon presiden. Kedua, Konstitusi tak pernah menyebut-nyebut partai politik. Walau Thomas Jefferson dan James Madison kemudian merintis sistem dua partai AS, para pendiri AS tak serius memikirkan keberadaan partai.

Kemunculan partai-partai pada awal 1800-an mengubah cara kerja sistem pemilu AS. Bukannya memilih tokoh lokal sebagai wakil di Electoral College, seperti dibayangkan para pendiri AS, tiap negara bagian mulai memilih loyalis partai. Anggota Electoral College menjadi agen partai, artinya Electoral College menyerahkan wewenang menjaga gerbangnya ke partai. Dan partai terus memegang wewenang itu sampai sekarang.

Maka partai-partai pun menjadi pengawal demokrasi Amerika Serikat. Karena partailah yang menentukan calon-calon presiden, maka partai punya kemampuan—dan kami tambahkan, tanggung jawab—untuk mencegah tokoh-tokoh berbahaya agar tak masuk Gedung Putih. Oleh karena itu, partai-partai mesti menjaga keseimbangan antara dua peran: peran demokratis, memilih calon yang paling baik mewakili para pemilih partainya; dan apa yang ahli ilmu politik James Ceaser sebut peran "penyaring", menyisihkan mereka yang mengancam demokrasi atau tidak cocok memegang jabatan.

Kewajiban ganda itu—memilih calon populer dan menolak demagog—kadang bisa saling bertentangan. Bagaimana bila rakyat memilih demagog? Itu ketegangan yang berkali-kali muncul di inti proses pencalonan presiden, dari zaman para pendiri AS hingga hari ini. Terlalu mengandalkan penjagaan gerbang itu sendiri tak demokratis—bisa menciptakan dunia bos partai yang mengabaikan anggota biasa dan gagal mewakili rakyat. Namun, terlalu mengandalkan "kehendak rakyat" bisa berbahaya juga, karena bisa mengarah ke terpilihnya demagog yang mengancam demokrasi itu sendiri. Tidak ada jalan keluar dari ketegangan itu. Selalu ada untung rugi.

Selama sebagian besar sejarah Amerika Serikat, partai-partai politik memprioritaskan penjagaan gerbang dibanding keterbukaan. Selalu

ada semacam ruang penuh asap. Pada awal abad ke-19, calon-calon presiden dipilih sekelompok anggota Kongres di Washington, dalam sistem yang dikenal sebagai Kaukus Kongres. Sistem itu segera dikritik karena terlalu tertutup, jadi sejak awal 1830-an para calon diajukan di konvensi nasional partai yang dihadiri delegasi dari tiap negara bagian. Para anggota delegasi tidak dipilih rakyat; mereka dipilih komite partai tingkat negara bagian dan lokal, dan tak terikat komitmen mendukung calon populer. Biasanya mereka mengikuti instruksi pemimpin partai tingkat negara bagian yang mengutus mereka ke konvensi. Sistem demikian menguntungkan orang dalam, atau calon yang didukung pemimpin partai pengendali delegasi. Calon-calon yang tak punya dukungan di jejaring partai tingkat negara bagian dan lokal tak punya peluang sukses.

Sistem konvensi juga dikritik karena tertutup dan tak demokratis, dan upaya mereformasinya terus ada. Pemilihan pendahuluan diperkenalkan pada era Progresif; yang pertama diadakan di Wisconsin pada 1901, dan pada 1916 pemilihan pendahuluan diadakan di dua lusin negara bagian. Namun perubahan yang dihasilkan hanya sedikit—sebagian karena banyak negara bagian tak melakukannya, tapi umumnya karena delegasi terpilih tidak diwajibkan mendukung calon yang menang di pemilihan pendahuluan. Mereka tetap "tak berjanji", bebas berunding mengenai suara di konvensi. Pemimpin partai—yang mengendalikan jabatan pemerintahan, pembagian jatah, dan imbalan lain—berposisi bagus untuk mengatur dukungan, sehingga tetap menjadi penjaga gerbang kepresidenan. Karena pemilihan pendahuluan tak mengikat untuk pencalonan presiden, maka fungsinya sekadar kontes kecantikan. Kekuasaan yang sejati tetap berada di tangan para orang dalam partai, atau yang disebut "orang organisasi". Bakal calon harus mengamankan dukungan orang organisasi sebagai satu-satunya cara mendapat pencalonan.

Sistem konvensi lama menunjukkan perimbangan untung rugi dalam penjagaan gerbang. Di satu sisi, sistemnya kurang demokratis. Orang-orang organisasi tidak mewakili masyarakat Amerika. Mereka adalah jejaring "orang lama". Sebagian besar anggota biasa partai, terutama

yang miskin dan tanpa koneksi politik, perempuan, dan minoritas, tidak diwakili di ruang penuh asap dan dikesampingkan dari proses pencalonan presiden.

Di lain pihak, sistem konvensi adalah penjaga gerbang yang efektif, karena secara sistematis mencegah lolosnya calon berbahaya. Orang dalam partai memberikan apa yang ahli ilmu politik sebut "tinjauan sejawat" (*peer review*). Para walikota, senator, dan anggota Kongres mengenal para calon secara pribadi. Mereka telah bekerja bersama para calon, dalam berbagai keadaan, selama bertahun-tahun, sehingga berposisi cukup baik untuk mengevaluasi sifat, pertimbangan, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Ruang belakang penuh asap menjadi mekanisme penyaringan, membantu menjauhkan para demagog dan ekstremis yang membuat demokrasi keluar jalur di tempat-tempat lain di dunia. Penjagaan gerbang demokrasi Amerika oleh partai sangat efektif sehingga orang luar mustahil menang. Alhasil, sebagian besarnya bahkan tak berminat mencoba.

Pertimbangkan Henry Ford, pendiri Ford Motor Company. Ford, salah seorang terkaya di dunia pada awal abad ke-20, adalah versi modern demagog ekstremis yang telah dikhawatirkan Hamilton. Menggunakan *Dearborn Independent* sebagai corong, Ford menyerang para bankir, orang Yahudi, dan kaum Bolshevik, menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa kepentingan bankir Yahudi merugikan Amerika. Pandangannya mendapat pujian dari kaum rasis sedunia. Dia dipuji Adolf Hitler dalam *Mein Kampf* dan dijabarkan Heinrich Himmler yang kemudian menjadi pemimpin Nazi sebagai "salah satu pejuang kita yang paling berharga, penting, dan cerdas." Pada 1938, pemerintahan Nazi menganugerahkan Salib Agung Rajawali Jerman kepada Henry Ford.

Namun Ford juga tokoh yang dikagumi dan dicintai di Amerika Serikat, terutama di Midwest. Seorang "anak petani miskin yang jadi masyhur", sang pengusaha blak-blakan dipuja banyak warga perdesaan Amerika sebagai pahlawan rakyat, di samping para presiden seperti Washington dan Lincoln.

Sikap dominan Ford yang tak henti-henti akhirnya membawa dia masuk politik. Dia memulai dengan menentang Perang Dunia I, meluncurkan "misi damai" amatir namun terkenal ke Eropa. Dia keluar masuk politik sesudah Perang Dunia I, hampir meraih kursi Senat pada 1918 lalu mempertimbangkan gagasan maju dalam pemilihan presiden (sebagai calon Demokrat) pada 1924. Gagasan itu segera memunculkan antusiasme, terutama di bagian perdesaan Amerika. Klub "Ford for President" muncul pada 1923, dan pers mulai menulis mengenai "Keranjingan Ford".

Musim panas itu, majalah populer *Collier's* mulai mengadakan jajak pendapat nasional mingguan terhadap para pembacanya, yang memberi kesan bahwa ketenaran, reputasi sebagai pengusaha sukses, dan perhatian media yang tak henti-henti kepada Ford dapat diterjemahkan menjadi pencalonan presiden populer. Selagi hasilnya masuk minggu demi minggu, judul beritanya makin memuji-muji: "Politics in Chaos as Ford Vote Grows" dan "Ford Leads in Presidential Free-for-All." Pada akhir jajak pendapat mingguan sesudah dua bulan yang melibatkan sampai 250.000 pembaca, Henry Ford mengalahkan dua belas pesaing, termasuk Presiden Warren Harding dan Herbert Hoover yang kelak menjadi presiden. Dengan hasil demikian, redaksi *Collier's* menyimpulkan, "Henry Ford telah menjadi orang terpenting di politik Amerika."

Namun andaikata Ford benar-benar berambisi menjadi presiden, dia lahir seabad terlalu cepat. Yang jauh lebih penting daripada pendapat masyarakat adalah pendapat para pemimpin partai, dan para pemimpin partai sepakat menolak dia. Seminggu sesudah menerbitkan hasil jajak pendapat pembaca, dalam serangkaian artikel, termasuk satu yang berjudul "The Politicians Pick a President", *Collier's* melaporkan hasil jajak pendapatnya terhadap orang dalam—116 pemimpin kedua partai, termasuk semua anggota Komite Nasional Partai Republik dan Demokrat, 14 gubernur terkemuka, serta senator dan anggota Kongres dari kedua partai. Dalam jajak pendapat para *kingmaker* itu, Ford hanya meraih peringkat kelima. Redaksi *Collier's* mengomentari kedudukan itu:

Waktu para pemimpin Demokrat ditanya: "Bagaimana dengan Ford?" mereka semua angkat bahu. Hampir tanpa pengecualian, orang-orang yang biasa dikenal sebagai "orang organisasi" di semua negara bagian menolak Ford. *Di semua negara bagian kecuali yang menyelenggarakan pemilihan pendahuluan, orang-orang itu praktis memilih sendiri anggota delegasi ke konvensi nasional ...* Tak ada yang menyangkal besarnya sentimen pro-Ford di antara massa—Demokrat dan Republik. Tiap pemimpin Demokrat tahu negara bagiannya penuh pendukung Ford—dan takut karenanya. Namun dia berpikir bahwa mekanisme seleksi delegasi membuat kemungkinan Ford akan berhasil kecil.

Meski masyarakat antusias dengan pencalonannya, pintu bagi Ford efektif tertutup. Senator James Couzens menyebut gagasan pencalonan Ford konyol. "Bagaimana bisa seseorang yang berumur di atas enam puluh tahun—tanpa pendidikan, tanpa pengalaman—bercita-cita menduduki jabatan itu?" tanya Couzens. "Sangat lucu."

Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa ketika Ford diwawancara *Collier's* pada akhir musim panas yang panjang itu, ambisinya menjadi presiden sudah berkurang:

Saya tak bisa membayangkan diri saya sendiri menerima pencalonan. Tentu saja, saya tak bisa bilang ... apa yang akan saya lakukan besok. Boleh jadi akan ada perang atau krisis, ketika hukum dan konstitusi dan segala macamnya tak diindahkan, dan bangsa ingin seseorang yang bisa bekerja cepat.

Ford pada dasarnya berkata bahwa dia hanya bakal mempertimbangkan maju bila sistem penjaga gerbang yang menghalangnya hilang, entah bagaimana caranya. Jadi kenyataannya dia tak pernah punya kesempatan.

Huey Long tak hidup cukup lama untuk menjajal pemilihan presiden, tapi meski dia punya keahlian politik, ketenaran, dan ambisi luar biasa, ada alasan bagus bahwa dia juga bakal dihentikan para penjaga gerbang partisan. Ketika terpilih sebagai anggota Senat pada 1932, perilaku

Long yang melanggar norma membuat dia segera terkucil dari sesama anggota Senat. Tanpa dukungan dari para pemimpin Partai Demokrat, Long tak berpeluang mengalahkan Roosevelt di konvensi 1936. Dia harus maju lewat jalur independen yang amat berat. Jajak pendapat memberi kesan bahwa pencalonan Long sebagai presiden dapat memecah suara Demokrat dan membuat pemilihan presiden AS 1936 dimenangi Republik, dan Long sendiri kecil kemungkinannya menang.

Penjagaan gerbang oleh partai juga membuat George Wallace tetap berada di pinggir arena politik. Gubernur segregasionis itu ikut beberapa pemilihan pendahuluan Demokrat pada 1964, dan mendapat hasil yang ternyata bagus. Dengan berkampanye menentang hak sipil dan bersemboyan "Stand Up for America" Wallace mengejutkan para pakar dengan meraih hampir sepertiga suara di Wisconsin dan Indiana, serta 43 persen di Maryland. Namun pemilihan pendahuluan tak begitu penting pada 1964, dan Wallace segera dikalahkan pencalonan Lyndon Johnson yang sukar dibendung. Namun selama empat tahun berikutnya Wallace berkampanye ke seluruh negeri sebagai persiapan pemilihan presiden 1968. Campuran populisme dan nasionalisme kulit putih memberikan dukungan kuat bagi Wallace di antara beberapa pemilih kelas pekerja berkulit putih. Pada 1968, hampir 40 persen orang Amerika mendukung dia. Dengan kata lain, Wallace memiliki daya tarik seperti Trump pada 1968, dan menikmati tingkat dukungan masyarakat seperti Trump.

Namun, Wallace ada di dunia politik yang berbeda. Karena tahu bahwa Partai Demokrat tak bakal mendukung pencalonannya, dia maju sebagai calon dari Partai Kemerdekaan Amerika, dan gagal karenanya. Perolehan Wallace—13,5 persen suara—besar untuk calon partai kecil, tapi tak cukup untuk membawanya ke Gedung Putih.

Kita sekarang bisa memahami skala keseluruhan lompatan imajinasi Philip Roth dalam novelnya *The Plot Against America*. Fenomena Lindbergh bukan sepenuhnya khayalan Roth. Lindbergh—seorang penganjur "kemurnian rasial" yang berkunjung ke Jerman zaman Nazi pada 1936 dan dianugerahi medali kehormatan oleh Hermann Göring—menjadi

salah seorang tokoh isolasionis paling terkemuka di Amerika pada 1939 dan 1940, dan berbicara di seantero negara atas nama America First Committee. Dia juga luar biasa populer. Pidatonya menarik banyak orang, dan pada 1939, menurut redaktur *Reader's Digest* Paul Palmer, acara radionya menghasilkan lebih banyak surat tanggapan daripada acara radio orang lain di Amerika. Seorang ahli sejarah mengatakan, "Orang biasa berkata bahwa Lindbergh bakal mencoba meraih jabatan publik," dan pada 1939, senator Idaho William Borah mengusulkan bahwa Lindbergh bakal jadi calon presiden yang pas. Namun, di situ kita kembali ke realitas. Konvensi Partai Republik 1940 tak seperti yang ada dalam fiksi *The Plot Against America*. Lindbergh bukan hanya tak muncul di konvensi; namanya tak disebut-sebut sama sekali di sana. Penjagaan gerbang berfungsi.

Dalam kesimpulan buku sejarah politik radikal sayap kanan di Amerika Serikat *The Politics of Unreason*, Seymour Martin Lipset dan Earl Raab menjabarkan partai-partai Amerika sebagai "pertahanan praktis utama" terhadap ekstremis. Mereka benar. Namun Lipset & Raab menerbitkan buku mereka pada 1970, persis ketika partai-partai sedang melakukan reformasi paling dramatis dalam sistem pencalonan setelah seabad lebih. Segalanya akan berubah, dengan konsekuensi jauh melebihi apa pun yang dibayangkan.

Titik balik itu ada pada 1968, tahun yang menyentuh hati orang Amerika Serikat. Presiden Lyndon Johnson telah mempergencar perang di Vietnam, yang sudah lepas kendali—16.592 orang Amerika tewas di Vietnam pada 1968, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Keluarga-keluarga Amerika duduk di ruang tengah tiap malam menonton berita TV, dibanjiri adegan-adegan perang yang makin mengerikan. Pada April 1968, seorang pembunuh menembak mati Martin Luther King, Jr. Lalu pada Juni, dalam hitungan jam sesudah kemenangannya di pemilihan pendahuluan Demokrat California, kampanye kepresidenan Robert F. Kennedy—yang berpusat di perlawanan terhadap perang yang digencarkan Johnson—terhenti dengan paksa oleh tembakan senjata

pembunuh juga. Jerit keputusan di aula Ambassador Hotel Los Angeles malam itu dikomentari oleh penulis novel John Updike, terasa seolah "Tuhan mungkin telah menarik berkah-Nya dari Amerika."

Sementara itu, Partai Demokrat terbelah antara pendukung kebijakan luar negeri Johnson dan mereka yang telah menerima posisi antiperang Robert Kennedy. Perpecahan itu mengganggu konvensi Demokrat di Chicago. Kennedy sudah meninggal dengan tragis sehingga organisasi tradisional partai pun mengambil alih. Orang-orang dalam partai yang mendominasi konvensi memilih Wakil Presiden Hubert Humphrey, tapi Humphrey sangat tak populer di antara anggota delegasi antiperang karena terkait dengan kebijakan Vietnam Presiden Johnson. Selain itu, Humphrey tidak ikut pemilihan pendahuluan. Kampanyenya, seperti dikatakan sekelompok analis, terbatas ke "pemimpin partai, pemimpin serikat, dan orang dalam lainnya." Namun dengan dukungan orang lama di partai, termasuk walikota Chicago yang kuat, Richard Daley, Humphrey menjadi calon presiden sesudah pemungutan suara pertama.

Humphrey bukanlah calon presiden pertama yang mendapat pencalonan tanpa pernah bersaing di pemilihan pendahuluan. Namun, dia adalah yang terakhir. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Chicago—ditayangkan di layar televisi se-Amerika—mematikan sistem pemilihan calon presiden oleh orang dalam partai. Sebelum konvensi dimulai pun, pukulan berat akibat pembunuhan Robert Kennedy, memanasnya konflik terkait Vietnam, dan energi unjuk rasa antiperang di Grant Park Chicago sudah menghabiskan sisa-sisa keyakinan masyarakat terhadap sistem lama. Pada 28 Agustus para pengunjung rasa beralih ke tempat konvensi: polisi berhelm biru menyerang pengunjung rasa dan orang-orang di dekatnya, dan para laki-laki, perempuan, dan anak yang terluka menyelamatkan diri ke hotel-hotel terdekat. Peristiwa yang disebut Pertempuran Michigan Avenue itu lantas tumpah ke ruang konvensi. Senator Abraham Ribicoff dari Connecticut, dalam pidato dukungan untuk calon antiperang George McGovern, mencela "taktik gestapo" polisi Chicago, sambil menatap langsung ke Walikota Daley—dalam siaran langsung televisi. Selagi konfrontasi meledak di ruang

konvensi, polisi berseragam menyeret beberapa anggota delegasi dari auditorium. Pembaca berita NBC Chet Huntley kaget menyaksikannya dan berkomentar, "Jelas ini pertama kalinya polisi masuk ruang konvensi." Rekannya, David Brinkley, menambahkan dengan miris, "Di Amerika Serikat."

Malapetaka Chicago memicu reformasi yang berdampak luas. Setelah kekalahan Humphrey di pemilu 1968, Partai Demokrat membentuk Komisi McGovern–Fraser dan tugasnya memikirkan kembali sistem pencalonan. Laporan final komisi tersebut, yang diterbitkan pada 1971, mengutip satu pepatah lama: "Obat untuk penyakit demokrasi adalah lebih banyak demokrasi." Karena legitimasi sistem politik dipertaruhkan, maka para pemimpin partai merasakan tekanan besar untuk membuat proses pencalonan presiden lebih terbuka. Seperti dikatakan George McGovern, "Kecuali kalau ada perubahan, konvensi berikutnya akan membuat yang terakhir tampak seperti piknik sekolah Minggu." Bila rakyat tak didengar suaranya, laporan McGovern–Fraser memperingatkan, mereka bakal beralih ke "anti-politik jalanan."

Komisi McGovern–Fraser memberi satu set saran yang dijalankan kedua partai sebelum pemilu 1972. Yang muncul adalah sistem pemilihan pendahuluan presidensial yang mengikat. Sejak 1972, sebagian besar delegasi konvensi Demokrat dan Republik dipilih di pemilihan pendahuluan dan kaukus tingkat negara bagian. Delegasi dipilih terlebih dahulu oleh para calon untuk memastikan kesetiaan. Artinya, untuk pertama kali, orang-orang yang memilih calon presiden dari partai tidak terikat ke pemimpin partai maupun bebas membuat kesepakatan di balik layar dalam konvensi; mereka bakal setia membawa kehendak sebagian besar pemilih di negara bagian mereka. Ada perbedaan antarpartai, misalnya Demokrat menggunakan aturan proporsional di banyak negara dan mekanisme untuk menambah perwakilan perempuan serta minoritas. Namun dalam penggunaan pemilihan pendahuluan yang mengikat, kedua partai banyak melepas kendali para pemimpin atas proses pemilihan calon—dan menyerahkannya kepada pemilih. Ketua Komite Nasional Partai Demokrat Larry O'Brien menyebut reformasi

itu "perubahan terbesar sejak adanya sistem partai". George McGovern, yang tanpa terduga mendapatkan pencalonan sebagai presiden dari Partai Demokrat pada 1972, menyebut sistem pemilihan pendahuluan baru "proses politik paling terbuka dalam sejarah nasional kita."

McGovern benar. Jalur menuju pencalonan tak lagi harus melewati orang-orang mapan di partai. Untuk pertama kali, para penjaga gerbang di partai dapat diatasi—dan dikalahkan.

Partai Demokrat, yang pemilihan pendahuluannya panas dan memecah-belah, melangkah mundur sedikit pada awal 1980-an, menetapkan bahwa sebagian delegasi nasional bakal terdiri atas pejabat terpilih—gubernur, walikota besar, senator, dan anggota Kongres—yang ditunjuk cabang partai di negara bagian, bukan dipilih di pemilihan pendahuluan. "Superdelegasi", yang mencapai 15 sampai 20 persen dari seluruh delegasi secara nasional, bakal bertindak sebagai pengimbang para pemilih di pemilihan pendahuluan—dan mekanisme untuk menolak calon-calon yang tak disetujui para pemimpin partai. Sementara itu Partai Republik terbang tinggi di bawah Ronald Reagan pada 1980-an. Republik tak merasa perlu ada superdelegasi dan memilih mempertahankan sistem pencalonan yang lebih demokratis—suatu pilihan yang berpengaruh ke takdir.

Beberapa ahli ilmu politik khawatir dengan sistem baru. Pemilihan pendahuluan yang mengikat jelas lebih demokratis. Namun, mungkinkah itu *terlalu* demokratis? Dengan menyerahkan pencalonan presiden ke tangan massa, pemilihan pendahuluan melemahkan fungsi partai sebagai penjaga gerbang, berpotensi menghilangkan proses tinjauan sejawat dan membuka pintu bagi orang luar. Sebelum Komisi McGovern-Fraser mulai bekerja, dua ahli ilmu politik terkemuka memperingatkan bahwa pemilihan pendahuluan dapat "mengarah ke kemunculan calon ekstremis dan demagog" yang tidak terikat kesetiaan ke partai, dan "tak rugi apa-apa kalau memicu kebencian massal atau membuat janji-janji absurd."

Pada permulaannya, ketakutan itu tampak dibesar-besarkan. Orang luar memang muncul: pemimpin pergerakan hak sipil Jesse Jackson

ikut pencalonan presiden di Partai Demokrat pada 1984 dan 1988, sementara pemimpin Gereja Baptis Selatan Pat Robertson (1988), komentator televisi Pat Buchanan (1992, 1996, 2000) dan penerbit majalah *Forbes* Steve Forbes (1996) mencoba di Partai Republik. Namun mereka semua kalah.

Melangkahi tokoh-tokoh mapan di partai ternyata lebih mudah dalam teori ketimbang praktik. Meraih mayoritas delegasi berarti harus menang di pemilihan pendahuluan di seantero negara, yang pada gilirannya membutuhkan uang, liputan media yang positif, dan terutama orang-orang yang bekerja langsung di lapangan di semua negara bagian. Calon mana pun yang mau melalui beratnya pemilihan pendahuluan AS butuh sekutu dari kalangan penyumbang, redaksi koran, kelompok kepentingan, kelompok aktivis, dan politikus tingkat negara bagian seperti gubernur, walikota, senator, dan anggota Kongres. Pada 1976 Arthur Hadley menjabarkan proses sukar itu sebagai "pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan". Dia menyatakan bahwa tahap itu, yang terjadi sebelum musim pemilihan pendahuluan, adalah "tahap di mana calon yang menang sesungguhnya terpilih." Anggota-anggota kalangan mapan partai—pejabat terpilih, aktivis, kelompok kepentingan yang bersekutu—tidak mesti tersingkir dari permainan. Tanpa mereka, kata Hadley, hampir mustahil meraih pencalonan di partai mana pun.

Selama seperempat abad, Hadley terbukti benar.

3

Pelepasan Kekuasaan Partai Republik

Pada 15 Juni 2015, pengembang real estat dan bintang acara realitas TV Donald Trump turun dengan eskalator ke lobi gedung miliknya, Trump Tower, untuk membuat pengumuman: dia akan maju pada pemilihan presiden. Waktu itu, dia hanyalah calon berpeluang kecil yang menganggap kekayaan dan ketenarannya bisa memberinya peluang, atau setidaknya membuat dia disorot selama beberapa bulan. Seperti sesama pebisnis, Henry Ford, seabad sebelumnya, Trump punya beberapa pandangan ekstrem—pengalaman terakhirnya dengan politik adalah sebagai "*birther*" yang mempertanyakan apakah Presiden Barack Obama benar-benar lahir di Amerika Serikat. Media dan tokoh politik hanya menanggapi dia serius untuk mencela.

Namun, sistem pemilihan pendahuluan telah membuat proses pencalonan presiden lebih terbuka dibanding kapan pun sepanjang sejarah Amerika. Dan keterbukaan selalu merupakan pedang bermata dua. Di lingkungan baru itu, makin banyak politikus, dari George McGovern sampai Barack Obama, yang dapat bersaing serius untuk menjadi presiden. Namun pintu juga dibuka bagi orang luar murni—yang tak pernah memegang jabatan hasil pemilu. Dalam dua puluh tiga tahun antara 1945 dan 1968, di bawah sistem konvensi lama, hanya satu orang luar (Dwight Eisenhower) yang terang-terangan mengejar pencalonan di kedua partai. Sementara itu, selama dua dasawarsa pertama

sistem pemilihan pendahuluan, 1972 sampai 1992, delapan orang luar mencoba (lima di Demokrat dan tiga di Republik), rata-rata 1,25 per pemilu; dan antara 1996 dan 2016, delapan belas orang luar bersaing di pemilihan pendahuluan salah satu dari kedua partai—rata-rata tiga per pemilu. Tiga belas di antaranya di Partai Republik.

Sistem pemilihan pendahuluan pasca-1972 khususnya rentan terhadap orang luar jenis tertentu: orang dengan ketenaran dan uang cukup besar untuk melangkahi "pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan". Dengan kata lain, selebritas. Walau orang luar konservatif seperti Pat Robertson, Pat Buchanan, dan Steve Forbes tak berhasil mengatasi efek pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan selama 1980-an dan 1990-an, keberhasilan relatif mereka memberi petunjuk mengenai bagaimana caranya. Forbes, seorang pengusaha amat kaya, bisa membeli ketenaran, sementara Robertson, penceramah televisi yang mendirikan Christian Broadcasting Network, dan Buchanan, seorang komentator televisi (dan pendukung nasionalisme kulit putih Republik tahap awal) sama-sama tokoh terkenal dengan akses luas ke media. Walau mereka semua tak berhasil meraih pencalonan, mereka menggunakan kekayaan besar dan status selebritas untuk menjadi pesaing.

Namun pada akhirnya selebritas luar selalu belum berhasil. Maka pada siang awal musim panas di lobi Trump Tower itu, tampaknya tak ada alasan untuk berpikir bahwa keadaan akan berbeda. Untuk meraih pencalonan, Trump bakal harus bersaing dalam jejaring kaukus dan pemilihan pendahuluan rumit melawan enam belas calon lain. Banyak pesaingnya punya riwayat seperti calon-calon sukses pada masa lalu. Yang paling diunggulkan ialah gubernur Florida Jeb Bush, putra dan adik presiden-presiden terdahulu. Ada gubernur-gubernur lain, termasuk gubernur Wisconsin Scott Walker, gubernur Louisiana Bobby Jindal, gubernur New Jersey Chris Christie, dan gubernur Ohio John Kasich. Selain itu, ada beberapa bintang Partai Republik yang sedang naik daun—politikus muda yang mahir memanfaatkan media seperti Senator Marco Rubio dan Rand Paul, yang berharap meniru jalur cepat Barack Obama menuju kursi presiden. Texas, tempat asal tiga dari dela-

pan presiden terpilih sebelumnya, menawarkan dua calon lain: Senator Ted Cruz dan mantan gubernur Rick Perry. Selain Trump, dua orang luar lain ikut berlaga: perempuan pengusaha Carly Fiorina dan dokter bedah syaraf Ben Carson.

Trump tak dapat berharap meraih dukungan kelompok mapan. Dia bukan hanya tak punya pengalaman politik. Dia juga bukan orang Partai Republik sepanjang hidup. Bush, Rubio, Cruz, Christie, Walker, dan Kasich berakar kuat di Partai Republik, sementara Trump pernah berganti partai beberapa kali dan bahkan pernah menyumbang ke kampanye Hillary Clinton untuk menjadi anggota Senat AS.

Sesudah Trump mulai naik ketenarannya di jajak pendapat pun hanya sedikit orang yang menganggap serius usahanya. Pada Agustus 2015, dua bulan sesudah Trump menyatakan ingin mencalonkan diri, para bandar Las Vegas memberi dia peluang seratus banding satu untuk meraih kursi di Gedung Putih. Dan pada November 2015, sewaktu Trump berada di puncak jajak pendapat Republik, Nate Silver, penulis blog *FiveThirtyEight* yang terkenal karena prediksinya akurat pada pemilu 2008 dan 2012, menulis artikel berjudul "Dear Media: Stop Freaking Out About Donald Trump's Poll Numbers." Artikel itu memprediksi bahwa kelemahan Trump di kalangan orang dalam partai bakal menghentikan dia. Meski Trump tampak unggul jauh, Silver meyakinkan kita bahwa peluang Trump meraih pencalonan "jauh lebih kecil daripada 20 persen".

Namun dunia sudah berubah. Para penjaga gerbang partai sudah tak seperti dulu lagi, karena dua alasan utama. Salah satunya adalah peningkatan dramatis ketersediaan uang dari luar, yang dipercepat (walau bukan disebabkan) putusan *Citizens United* di Mahkamah Agung AS pada 2010. Sesudah putusan itu, calon presiden pinggiran—Michele Bachmann, Herman Cain, Howard Dean, Bernie Sanders—dapat mengumpulkan banyak uang, entah dengan menemukan penyandang dana kaya atau melalui penggalangan dana lewat Internet. Maraknya calon berdana besar di pemilihan pendahuluan menandakan lingkungan politik yang lebih terbuka dan cair.

Faktor penting lain yang mengurangi kekuasaan penjaga gerbang tradisional adalah ledakan media alternatif, terutama berita TV kabel dan media sosial. Sementara jalur menuju ketenaran nasional dulu melewati sedikit saluran utama, yang mengutamakan politikus mapan ketimbang ekstremis, lingkungan media baru memudahkan selebritas meraih ketenaran luas—dan dukungan masyarakat—praktis dalam sekejap. Itu terutama berlaku di sisi Partai Republik, di mana kemunculan Fox News dan pembawa acara bincang-bincang radio berpengaruh—yang oleh komentator politik David Frum disebut “kompleks hiburan konservatif”—meradikalkan pemilih konservatif sehingga menguntungkan calon-calon ekstrem. Akibatnya muncullah fenomena seperti Herman Cain, mantan CEO Godfather Pizza dan pembawa acara bincang-bincang radio yang meroket ke puncak jajak pendapat Partai Republik pada 2011 sebelum amblas lagi karena skandal.

Proses pencalonan pun menjadi terbuka lebar. Aturan permainannya memang tidak menjamin kebangkitan sosok seperti Trump, tapi juga tidak bisa lagi mencegahnya. Ibarat permainan rolet Rusia: peluang orang luar ekstremis menjadi calon presiden lebih tinggi daripada sebelumnya sepanjang sejarah.

Walau ada banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan politis mengejutkan Donald Trump, kenaikannya ke kursi kepresidenan boleh dikata adalah kisah penjagaan gerbang yang tak efektif. Para penjaga gerbang partai gagal di tiga titik: “pemilihan pendahuluan tak kelihatan”, pemilihan pendahuluan yang sesungguhnya, dan pemilihan umum.

Trump mendapat urutan terakhir di pemilihan pendahuluan tak kelihatan. Ketika musim pemilihan pendahuluan sesungguhnya bermula pada 1 Februari 2016, hari Kaukus Iowa, dia tak punya dukungan di antara para pialang kekuasaan Republik. Kalau diukur dari dukungan para gubernur, senator AS, dan anggota Kongres pada waktu Kaukus Iowa, Jeb Bush ialah pemenang pemilihan pendahuluan tak kelihatan dengan 31 dukungan. Marco Rubio peringkat kedua dengan 27. Ted Cruz peringkat ketiga dengan 18, diikuti Rand Paul yang mendapat 11.

Chris Christie, John Kasich, Mike Huckabee, Scott Walker, Rick Perry, dan Carly Fiorina mendapat lebih banyak dukungan daripada Trump. Maka berdasarkan pertimbangan biasa, pencalonan Trump sudah tamat. Bila sejarah bisa jadi pedoman, maka keunggulannya di jajak pendapat pasti bakal pudar.

Prestasi Trump di kontes tingkat negara bagian yang pertama, Iowa—24 persen, lumayan untuk peringkat kedua—tak banyak mengubah harapan itu. Bagaimanapun, orang-orang luar seperti Pat Robertson (25 persen suara pada 1988), Pat Buchanan (23 persen pada 1996), dan Steve Forbes (31 persen pada 2000) semuanya mendapat peringkat kedua di Iowa, tapi kemudian memudar namanya.

Kemudian Trump melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang luar terdahulu. Dengan mudah dia menang pemilihan pendahuluan berikutnya di New Hampshire dan South Carolina. Namun dia tetap diemohi kalangan mapan di partai. Pada hari pemilihan pendahuluan South Carolina, Trump belum mendapat satu pun dukungan gubernur, senator, atau anggota Kongres dari Partai Republik yang sedang menjabat. Baru sesudah menang di South Carolina, Trump mendapat para pendukung pertama: anggota Kongres garis belakang Duncan Hunter (California) dan Chris Collins (New York), Selagi dia terus mengalahkan pesaing-pesaingnya di Partai Republik di tempat pemungutan suara, Trump tak pernah meraih banyak dukungan. Ketika musim pemilihan pendahuluan berakhir, dia mendapat empat puluh enam dukungan—tak sampai sepertiga yang didapat Marco Rubio dan jelas tak sebanyak yang didapat kampanye Bush.

Waktu Trump menuju kemenangan pada pemilihan pendahuluan 1 Maret "Super Tuesday", jelaslah bahwa dia sudah mengalahkan pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan, menjadikannya tak relevan. Tak diragukan bahwa status selebritas Trump berperan. Namun yang sama pentingnya adalah bentang media yang berubah. Sejak awal kampanye, Trump mendapat simpati atau dukungan tokoh-tokoh sayap kanan media seperti Sean Hannity, Ann Coulter, Mark Levin, dan Michael Savage, juga Breitbart News yang makin berpengaruh. Walau Trump

awalnya punya hubungan kurang baik dengan Fox News, dia mendapat manfaat dari bentang media yang terpolarisasi.

Trump juga menemukan cara-cara baru menggunakan media lama sebagai ganti dukungan partai dan belanja kampanye tradisional. Trump, "calon dengan ciri-ciri unik yang sesuai dengan zaman digital", menarik pemberitaan arus utama dengan menciptakan kontroversi. Satu perkiraan menunjukkan bahwa akun Twitter MSNBC, CNN, CBS, dan NBC—empat saluran yang tak dapat dituduh pro-Trump—menyebut Trump dua kali lebih sering daripada lawannya di pemilu, Hillary Clinton. Menurut penelitian lain, Trump menikmati liputan media gratis yang bernilai setara \$2 miliar selama musim pemilihan pendahuluan. Sebagai yang tak diragukan lagi terdepan dalam pemberitaan arus utama dan kesayangan sebagian besar jejaring media alternatif sayap kiri, Trump tak butuh para pialang kekuasaan tradisional Partai Republik. Para penjaga gerbang pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan bukan hanya tak kelihatan; pada 2016 mereka telah meninggalkan ruangan.

Sesudah kemenangan Trump pada Super Tuesday, timbul kepanikan di kalangan mapan Partai Republik. Orang-orang dalam terkemuka dan para pemimpin opini konservatif mulai menentang Trump. Pada Maret 2016, mantan calon presiden AS dari Partai Republik, Mitt Romney, berpidato di Hinckley Institute of Politics, menjabarkan Trump sebagai bahaya bagi Partai Republik dan negara. Mengulang pidato Ronald Reagan 1964 "A Time for Choosing", Romney menyatakan bahwa Trump "penipu" yang "tak punya temperamen maupun pertimbangan yang layak untuk menjadi presiden." Para sesepuh partai, termasuk calon presiden 2008 John McCain dan Senator Lindsey Graham, memperingatkan mengenai Trump. Dan media konservatif terkemuka, termasuk *National Review* dan *Weekly Standard*, menolak keras Trump. Namun gerakan #NeverTrump selalu lebih banyak bicara daripada bekerja. Kenyataannya, sistem pemilihan pendahuluan telah membuat para pemimpin Partai Republik nyaris tanpa senjata untuk menghentikan kebangkitan Trump. Serangan gencar itu berdampak kecil dan

barangkali malah merugikan di titik menentukan: tempat pemungutan suara.

Para pemimpin Partai Republik tak bergigi, sebagaimana tampak di Konvensi Nasional Partai Republik pada Juli 2016 di Cleveland. Pada masa persiapan konvensi, ada banyak pembicaraan mengenai kebuntuan pemungutan suara, meyakinkan delegasi yang sudah berkomitmen agar memilih calon lain. Akhir Juni, satu grup bernama Delegates Unbound mulai menayangkan iklan televisi nasional yang memberitahu para anggota delegasi Republik bahwa mereka tidak terikat secara hukum kepada Trump dan membujuk mereka agar meninggalkan dia. Kelompok-kelompok seperti Free the Delegates, Courageous Conservatives, dan Save Our Party memimpin kampanye agar Panel Peraturan Komite Nasional Partai Republik yang beranggota 112 orang mengubah aturan yang mengikat delegasi ke calon, membebaskan delegasi untuk memilih, seperti sebelum reformasi 1972. Segala upaya itu sia-sia; memang tak bakal berhasil sejak awal.

Gagasan bahwa pencalonan Trump sebagai presiden bisa digagalkan di konvensi adalah angan-angan belaka. Di sistem berbasis pemilihan pendahuluan yang sekarang berlaku, suara memberi legitimasi yang tak mudah diabaikan atau diakali, dan Donald Trump mendapat suara—hampir empat belas juta suara. Seperti dikatakan Cindy Costa, seorang anggota Komite Nasional Partai Republik dari South Carolina, Trump “menang dengan adil”. Menyerahkan posisi calon presiden ke orang lain bakal menciptakan “kekacauan besar”. Para pemimpin Partai Republik terpaksa menghadapi kenyataan: Mereka tak lagi memegang kunci pencalonan presiden dari partai.

Selagi medan laga bergeser ke pemilihan umum, jelaslah bahwa pemilu tersebut bukan pemilu biasa. Sederhananya, Donald Trump bukan calon biasa. Dia bukan hanya tak berpengalaman—belum ada presiden AS selain jenderal sukses yang pernah terpilih tanpa pernah memegang jabatan hasil pemilu atau kursi kabinet. Sifat demagognya, pandangan ekstremnya terhadap imigran dan Muslim, kesediaannya melanggar

norma-norma dasar kesantunan, dan pujiannya terhadap Vladimir Putin dan diktator lain menimbulkan keresahan di banyak media dan kalangan politikus mapan. Apakah Partai Republik telah mencalonkan seseorang yang akan menjadi diktator? Mustahil mengetahui itu dengan pasti. Banyak orang Partai Republik berpegang ke anggapan bahwa meski para pengkritik Trump memandang Trump secara apa adanya tapi tak serius, para pendukung Trump memandangnya serius tapi tidak sebagaimana adanya. Retorika kampanye Trump, menurut pandangan itu, "hanya kata-kata".

Selalu ada ketidakpastian mengenai bagaimana seorang politikus tanpa rekam jejak akan berperilaku ketika memegang jabatan, tapi seperti kami sebut sebelumnya, pemimpin antidemokrasi sering bisa dikenali sebelum berkuasa. Bahkan sebelum dilantik, Trump sudah mendapat hasil positif di keempat ukuran dalam tes autokrat kami.

Tanda pertama adalah komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi. Trump memenuhi syarat itu ketika dia mempertanyakan legitimasi proses pemilu dan menyatakan bahwa dia boleh jadi tak akan menerima hasil pemilu 2016. Tingkat rekayasa suara di Amerika Serikat rendah sekali, dan karena pemilu dikelola pemerintah negara bagian dan lokal, hampir mustahil menggalang rekayasa suara tingkat nasional. Namun sepanjang kampanye pemilu 2016, Trump ngotot menganggap bahwa jutaan imigran ilegal dan orang mati di daftar pemilih bakal dikerahkan untuk memilih Clinton. Berbulan-bulan situs web kampanyenya menyatakan "Bantu Saya Stop Si Curang Hillary Mengakali Pemilu!" Pada Agustus, Trump memberitahu Sean Hannity, "Kita sebaiknya hati-hati, karena pemilu akan diakali... Saya harap Partai Republik mengawasi dengan ketat, atau kita akan kalah." Pada Oktober, dia mencuit, "Tentu saja ada rekayasa suara skala besar terjadi pada dan sebelum hari pemilu." Dalam debat calon presiden terakhir, Trump menolak berkata dia bakal menerima hasil pemilu andai kalah.

Menurut ahli sejarah Douglas Brinkley, tak pernah ada calon presiden AS yang menyatakan keraguan terhadap sistem demokrasi sejak 1860. Kita baru melihat politikus besar "mempertanyakan legitimasi

pemerintah federal” dengan cara demikian pada masa sebelum Perang Saudara AS. Seperti dikatakan Brinkley, “Itu motif perpecahan, revolusioner. Itu orang yang mencoba menjungkirbalikkan semuanya.” Dan kata-kata Trump berpengaruh—amat berpengaruh. Satu jajak pendapat Politico/Morning Consult yang diadakan pada pertengahan Oktober mendapati bahwa 41 persen orang Amerika, dan 73 persen pendukung Partai Republik, percaya bahwa pemilu bisa direayasa agar Trump tak menang. Dengan kata lain, tiga dari tiap empat pendukung Republik tak lagi yakin mereka hidup dalam sistem demokrasi dengan pemilu bebas.

Kategori kedua di tes litmus kami adalah penolakan atas legitimasi lawan. Politikus otoriter menyebut lawannya kriminal, subversif, tak patriotis, atau ancaman terhadap keamanan nasional atau cara hidup. Trump memenuhi syarat ini juga. Pertama, dia seorang “birther” yang mempertanyakan legitimasi kepresidenan Barack Obama dengan menganggap Obama lahir di Kenya dan beragama Islam, yang disamakan banyak pendukungnya dengan “bukan Amerika”. Dalam kampanye 2016, Trump menyangkal legitimasi Hillary Clinton sebagai lawan dengan mengecap Hillary sebagai “kriminal” dan menyatakan berulang-ulang bahwa Hillary “harus dipenjara.” Dalam kampanye dia bertepuk tangan ke pendukungnya yang berseru-seru “Kurung Hillary!”

Kriteria ketiga adalah toleransi atau dukungan terhadap kekerasan. Kekerasan partisan sering sekali menjadi pendahulu kerusakan demokrasi. Contoh-contoh terkenalnya adalah kelompok Kemeja Hitam di Italia, Kemeja Coklat di Jerman, kemunculan gerilyawan kiri di Uruguay, dan kebangkitan kelompok paramiliter sayap kanan dan kiri pada awal 1960-an di Brazil. Pada abad kemarin, tak ada calon presiden dari partai besar yang pernah mendukung kekerasan (George Wallace melakukan itu pada 1968, tapi dia calon partai kecil). Trump merusak pola itu. Dalam kampanye, Trump bukan hanya menoleransi kekerasan, melainkan juga kadang tampak menikmatinya. Trump merangkul—bahkan menyemangati—pendukungnya yang menyerang pemrotes secara fisik. Dia menawarkan membayar biaya pengacara seorang pendukung yang memukul dan mengancam akan membunuh

pengunjuk rasa di acara kampanye di Fayetteville, North Carolina. Pada kesempatan lain, dia menanggapi pemrotes di kampanyenya dengan mengajak pendukungnya berbuat kekerasan. Berikut beberapa contoh yang dikumpulkan *Vox*.

"Kalau kalian lihat orang mau lempar tomat, hajar dia, ya? Serius. Hajar saja mereka. Saya janji akan bayari pengacara. Janji." (1 Februari 2016, Iowa)

"Saya suka zaman dulu. Tahu kan apa yang dulu dilakukan ke orang-orang macam itu kalau mereka ada di tempat seperti ini? Mereka bakal dibawa keluar pakai tandu, kawan-kawan. Benar.... Saya bilang saya mau tonjok mukanya." (22 Februari 2016, Nevada)

"Dulu mereka bakal langsung tarik dia dari kursi. Tapi sekarang semua orang mau benar secara politis. Negara kita akan hancur gara-gara sikap benar secara politis." (26 Februari 2016, Oklahoma)

"Keluar dari sini. Keluar. Keluar! Ini hebat. Asyik sekali. Saya suka. Saya suka. Kita asyik? USA, USA, USA! Ayo, keluarkan dia. Jangan disakiti. Tapi kalau disakiti, saya akan bela kalian di pengadilan. Jangan khawatir ... Ada empat orang, mereka serang dia. Besoknya kita dibantai pers—dibilang terlalu kasar. Yang benar saja! Tahu kan? Iya kan? Kita tidak mau terlalu benar secara politis lagi. Iya kan, kawan-kawan?" (4 Maret 2016, Michigan)

"Ada beberapa orang kasar seperti yang ada di sini. Dan mereka mulai memukul balik. Itu bagus. Maksudnya, memukul balik. Dulu itu tidak terjadi karena biasanya perlakuan ke mereka sangat kasar. Dan kalau mereka protes, kalian tahu kan, mereka tidak akan gampang memprotes lagi. Tapi hari ini mereka datang dan acungkan tangan dan tunjuk-tunjuk semua orang, dan mereka bisa berbuat begitu, karena kita sudah jadi lemah." (9 Maret 2016, North Carolina)

Pada Agustus 2016, Trump mengeluarkan dukungan terselubung atas kekerasan terhadap Hillary Clinton, dengan memberitahu para pendukung dalam kampanye di Wilmington, North Carolina, bahwa hakim yang ditunjuk Clinton di Mahkamah Agung AS dapat menyebabkan penghapusan hak memiliki senjata. Dia lantas berkata, "Kalau Hillary

bisa memilih hakim, tidak ada yang bisa kalian lakukan, kawan-kawan ... Walaupun ada Amandemen Kedua—tapi ya, saya tidak tahu.”

Tanda peringatan terakhir adalah kesediaan membatasi kebebasan sipil pesaing dan pengkritik. Satu hal yang membedakan autokrat zaman sekarang dengan pemimpin demokratis adalah autokrat tak toleran terhadap kritik dan menggunakan kekuasaan untuk menghukum mereka yang mengkritik—di kubu oposisi, media, atau masyarakat sipil. Donald Trump menunjukkan kesediaan itu pada 2016. Dia berkata dia berencana menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki Hillary Clinton sesudah pemilu dan menyatakan bahwa Clinton harus dipenjara. Trump juga berkali-kali mengancam akan menghukum media yang tak bersahabat. Di satu kampanye di Fort Worth, Texas, misalnya, dia menyerang pemilik *Washington Post* Jeff Bezos, dengan mengatakan, “Bila saya jadi presiden, habislah mereka. Mereka akan kena masalah.” Media dijabarkannya sebagai “termasuk kelompok orang paling tak jujur yang pernah saya temui.” Trump menyatakan:

Saya akan adakan pasal pencemaran nama baik supaya kalau mereka sengaja menulis artikel negatif dan buruk dan palsu, kita bisa tuntutan mereka dan mendapat banyak uang.... Jadi kalau *New York Times* menulis berita yang bikin malu—atau kalau *Washington Post* ... menyerang, kita bisa tuntutan....

Dengan kekecualian Richard Nixon, tak ada calon presiden AS dari partai besar yang memenuhi bahkan hanya satu dari empat syarat itu selama abad kemarin. Seperti ditunjukkan Tabel 2, Donald Trump memenuhi semuanya. Tak ada calon presiden lain dari partai-partai besar dalam sejarah AS modern, termasuk Nixon, pernah menunjukkan komitmen publik begitu lemah terhadap hak konstitusional dan norma demokrasi. Trump jelas termasuk jenis tokoh yang membuat khawatir Hamilton dan para pendiri AS lain ketika menciptakan lembaga kepresidenan AS.

Tabel 2: Donald Trump dan Empat Indikator Kunci Perilaku Otoriter

1. Penolakan (atau komitmen lemah) terhadap aturan main demokratis	<p>Apakah mereka menolak Konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggarnya?</p> <p>Apakah mereka mengusulkan cara-cara antidemokrasi, seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan Konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak asasi sipil atau politik?</p> <p>Apakah mereka berusaha (atau menyetujui) menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan?</p> <p>Apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel?</p>
2. Menyangkal legitimasi lawan politik	<p>Apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar, atau menentang tatanan konstitusional yang ada?</p> <p>Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial, baik bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum?</p> <p>Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum (atau berpotensi begitu) dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik?</p>
3. Toleransi atau anjuran kekerasan	<p>Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tak sah?</p> <p>Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan?</p>

Apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak mencela dan menghukumnya?

Apakah mereka pernah memuji (atau menolak mencela) tindakan kekerasan politik, pada masa lalu atau di tempat lain?

4. Kesiediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media

Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah, atau organisasi sipil atau politis tertentu?

Apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengkritik di partai lawan, masyarakat sipil, atau media?

Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain, pada masa lalu atau di tempat lain?

Semua itu seharusnya menyalakan alarm. Proses pemilihan pendahuluan telah gagal melaksanakan peran penjaga gerbang dan memperkenankan seseorang yang tak cocok memegang jabatan menjadi calon presiden dari partai besar. Namun, bagaimana Partai Republik dapat menanggapi di tahap itu? Ingat lagi pelajaran dari kerusakan demokrasi di Eropa pada 1930-an dan Amerika Selatan pada 1960-an dan 1970-an: Ketika lembaga penjaga gerbang gagal, politikus arus utama mesti melakukan segala yang mungkin untuk menjauhkan tokoh-tokoh berbahaya dari pusat-pusat kekuasaan.

Pelepasan kekuasaan kolektif—pengalihan wewenang ke seorang pemimpin yang mengancam demokrasi—biasanya mengalir dari satu di antara dua sumber. Yang pertama adalah kepercayaan keliru bahwa

seorang yang otoriter bisa dikendalikan atau dijinakkan. Yang kedua adalah apa yang ahli sosiologi Ivan Ermakoff sebut "kolusi ideologis", di mana agenda tokoh otoriter punya cukup banyak kesamaan dengan agenda politikus arus utama sehingga pelepasan kekuasaan lebih disukai daripada alternatif lain. Namun, kala menghadapi calon pemimpin otoriter, politikus mapan mesti tegas menolak dia dan melakukan segala yang mungkin untuk membela lembaga demokrasi—bahkan bila itu berarti bergandengan tangan dengan musuh bebuyutan untuk sementara waktu.

Bagi Partai Republik yang menyambut pemilihan umum 2016, dampaknya jelas. Bila Trump mengancam kaidah-kaidah dasar demokrasi, maka mereka harus menghentikan dia. Melakukan yang lain berarti membuat demokrasi berada dalam risiko, dan kehilangan demokrasi jauh lebih buruk daripada kalah pemilu. Artinya adalah melakukan apa yang tak terbayangkan banyak orang: mendukung Hillary Clinton agar menjadi presiden. Amerika Serikat menggunakan sistem dua partai; hanya dua calon yang berpeluang besar menang pemilu 2016, dan salah seorangnya demagog. Partai Republik mendapat ujian keberanian politik. Apa mereka bakal melakukan pengorbanan politik jangka pendek demi negara?

Seperti telah kami tunjukkan, perilaku seperti itu ada contohnya. Pada 2016, kaum konservatif Austria mendukung calon dari Partai Hijau, Alexander van der Bellen, untuk mencegah terpilihnya radikal sayap kanan Norbert Hofer. Dan pada 2017, calon konservatif Prancis François Fillon yang telah kalah menyerukan kepada para pendukungnya agar memilih calon tengah-kiri Emmanuel Macron untuk mencegah calon kanan ekstrem Marine Le Pen berkuasa. Di kedua kasus, politikus sayap kanan mendukung rival ideologis—membuat marah sebagian besar pendukung partai, tapi mengerahkan cukup banyak pemilihnya agar para ekstremis tak berkuasa.

Beberapa orang Partai Republik memang mendukung Hillary Clinton dengan alasan Donald Trump berbahaya dan tak cocok untuk jabatan presiden. Seperti rekan sesama konservatif di Austria dan Prancis, mereka menganggap perlu mengesampingkan kepentingan partisan

demokrasi komitmen bersama terhadap demokrasi. Berikut kata-kata tiga di antara mereka:

Republikan 1: *"Pilihan kami dalam pemilu ini tidak bisa tidak lebih jelas lagi—Hillary Clinton ialah pendukung kepentingan demokrasi Amerika yang kuat dan jelas.... Donald Trump adalah ancaman bagi demokrasi kita."*

Republikan 2: *"Waktunya ... mendahulukan negara ketimbang partai dan memilih Menteri Clinton. Trump terlalu berbahaya dan terlalu tak cocok untuk memegang jabatan tertinggi di negara kita."*

Republikan 3: *"Ini perkara serius, dan saya tak akan buang suara ke calon lain. Karena masa depan negara boleh jadi tergantung bisa tidaknya kita mencegah Donald Trump menjadi presiden, maka saya bersama dia [Clinton] November ini, dan saya ajak rekan-rekan Partai Republik bergabung."*

Andai pernyataan-pernyataan itu dibuat Ketua DPR Paul Ryan, Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell, dan mantan Presiden George W. Bush, atau trio senator terkemuka seperti John McCain, Marco Rubio, dan Ted Cruz, jalannya pemilu 2016 bakal berubah dramatis. Sayang, ketiganya adalah William Pierce, mantan sekretaris pers mantan senator Maine Olympia Snowe (Republikan 1); Jack McGregor, mantan senator negara bagian dari Pennsylvania (Republikan 2); dan Rick Stoddard, seorang bankir pendukung Republik di Denver (Republikan 3).

Politikus-politikus Partai Republik terkemuka tingkat nasional seperti Paul Ryan, Mitch McConnell, Marco Rubio, dan Ted Cruz mendukung Donald Trump. Tokoh-tokoh Republik yang mendukung Hillary Clinton hanyalah politikus pensiunan atau mantan pejabat—orang-orang yang tak berencana ikut pemilu lagi, yang secara politis tidak akan rugi apa-apa. Pada malam sebelum pemilu, *Washington Post* menerbitkan daftar tujuh puluh delapan tokoh Partai Republik yang secara terbuka mendukung Clinton. Hanya satu di antara mereka, anggota Kongres Richard Hanna dari New York, yang merupakan pejabat terpilih. Dan dia sudah mau pensiun. Tak ada gubernur Republik di daftar. Tak ada senator. Dan hanya satu anggota Kongres (yang akan pensiun).

Sejumlah pemimpin aktif Partai Republik, termasuk Senator McCain, Mark Kirk, Susan Collins, Kelly Ayotte, Mike Lee, Lisa Murkowski, dan Ben Sasse; Gubernur John Kasich dan Charlie Baker, dan mantan gubernur Jeb Bush dan Mitt Romney, menolak menyokong Trump. Mantan presiden George W. Bush tetap diam. Namun, tak seorang pun di antara mereka bersedia mendukung Clinton.

Pendek kata, sebagian besar pemimpin Partai Republik akhirnya mengikuti garis kebijakan partai. Andai saja mereka tegas memutuskan hubungan dengan Trump, memberitahu orang Amerika dengan keras dan jelas bahwa Trump mengancam lembaga-lembaga negara, dan bila mereka mendukung Hillary Clinton dengan alasan itu, Donald Trump boleh jadi tak akan meraih kursi kepresidenan. Di Prancis, diperkirakan separuh pemilih Partai Republik Prancis konservatif-nya François Fillon mengikuti dia yang memihak Macron; sepertiga lainnya tak memberi suara, sehingga tinggal seperenam pendukung Fillon yang beralih ke Le Pen, dan boleh dikata memengaruhi hasil pemilu Prancis. Di Amerika Serikat, kita tak tahu bagaimana suara pemilih Partai Republik bakal terpecah. Beberapa, mungkin sebagian besar, basis Republik akan tetap memilih Trump. Namun bakal cukup banyak yang terbujuk gambaran kedua partai besar bersatu untuk mengalahkan Trump.

Yang terjadi berbeda sekali, tragisnya. Meski mengomel, sebagian besar pemimpin Partai Republik akhirnya bersatu di belakang Trump, menciptakan gambaran partai yang kompak. Pada gilirannya, itu membuat pemilihan umum jadi normal. Bukannya krisis, pemilu menjadi persaingan standar antara dua partai, Partai Republik mendukung calon Republik dan Partai Demokrat mendukung calon Demokrat.

Pergeseran itu terbukti amat penting. Sesudah pemilu menjadi normal, hasilnya menjadi tak bisa ditebak, karena dua alasan. Pertama, polarisasi partisan intensif telah memperkeras sikap di kalangan pemilih selama bertahun-tahun belakangan. Amerika Serikat bukan hanya makin terpecah menjadi pendukung Republik dan Demokrat, dengan hanya sedikit pemilih murni independen atau yang bisa berubah pikiran, tapi pendukung Republik dan Demokrat juga makin setia ke partai

masing-masing—dan memusuhi partai lawan. Pemilih menjadi makin teguh ke pilihannya, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kemenangan besar dalam pemilu seperti pada 1964 atau 1972. Tak peduli siapa saja calon-calonnya pada 2000-an, pemilihan presiden selalu ketat hasilnya.

Kedua, mengingat keadaan ekonomi yang kurang seimbang dan tingkat kepuasan terhadap Presiden Obama yang sedang-sedang saja, hampir semua model dalam ilmu politik memprediksi persaingan ketat di pemilu. Sebagian besar meramalkan kemenangan tipis Clinton di pemungutan suara rakyat, tapi ada yang memprediksi kemenangan tipis Trump. Yang jelas, model-model itu semuanya menyatakan hasilnya akan ketat. Siapa pun bisa menang. Yang berpengaruh adalah peristiwa-peristiwa langsung—kebetulan-kebetulan dalam sejarah. Dalam konteks itu, "kejutan Oktober" bisa berpengaruh besar. Jadi ketika ditemukan ada video yang menggambarkan satu calon secara negatif, atau surat dari direktur FBI yang membuat calon lain terkesan tak bisa dipercaya, itu semua bisa menentukan.

Andai para pemimpin Partai Republik menentang Trump di depan umum, dinamika ketat merah lawan biru seperti empat pemilu sebelumnya bakal buyar. Pemilih Republik bakal terpecah—beberapa mengikuti peringatan pemimpin partai, sementara yang lain tetap bersama Trump. Tapi tetap saja, kekalahan Trump hanya membutuhkan pembelotan sebagian kecil pemilih Republik. Namun, pemilu menjadi normal. Persaingan menjadi ketat. Trump pun menang.

4

Menumbangkan Demokrasi

Alberto Fujimori tak berencana menjadi diktator Peru. Dia bahkan tak berencana menjadi presiden. Fujimori, rektor universitas keturunan Jepang yang kurang dikenal awalnya, tadinya berharap bisa mendapat kursi senat pada 1990. Ketika tidak ada partai yang mau mencalonkan dia, dia membuat partai sendiri dan maju dari partai itu. Dia kekurangan dana dan ikut pemilihan presiden untuk menarik perhatian ke kampanye senatnya. Namun, 1990 adalah tahun krisis berat. Ekonomi Peru ambruk dalam inflasi besar-besaran, dan satu kelompok gerilya Maois bernama Sendero Luminoso (Jejak Bercahaya) yang aksi brutalnya telah menewaskan puluhan ribu orang sejak pertama berdiri pada 1980 sedang mendekati ibukota Lima. Rakyat Peru muak dengan partai-partai lama. Mereka memprotes dengan beralih mendukung si tokoh kurang terkenal dalam politik yang slogan kampanyenya "Presiden Seperti Anda". Tanpa diduga, Fujimori memimpin di jajak pendapat. Dia mengejutkan dunia politik Peru dengan meraih suara terbanyak kedua dan masuk putaran kedua menantang Mario Vargas Llosa, penulis novel paling terkenal di Peru. Rakyat Peru mengagumi Vargas Llosa, yang sesudahnya meraih Hadiah Nobel bidang sastra. Hampir seluruh kalangan mapan—politikus, media, pemimpin bisnis—menyokong Vargas Llosa, tapi rakyat biasa Peru memandang dia terlalu akrab dengan kaum elite, yang tampak tak mendengarkan kekhawatiran mereka. Fujimori, dengan wacana populis yang memanfaatkan kemarahan itu, dianggap

banyak orang sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan perubahan. Dia menang.

Dalam pidato pelantikan, Fujimori memperingatkan bahwa Peru menghadapi "krisis terbesar dalam sejarahnya sebagai republik." Ekonomi "menjelang ambruk," katanya, dan masyarakat Peru telah "terpecah karena kekerasan, korupsi, terorisme, dan obat terlarang." Fujimori berjanji akan "mengeluarkan Peru dari keadaan sekarang dan membimbingnya ke nasib yang lebih baik." Dia yakin bahwa negara itu butuh reformasi ekonomi drastis dan harus mempergencar perang melawan terorisme. Namun, dia tidak punya gagasan jelas tentang bagaimana mencapai semua itu.

Dia juga menghadapi rintangan menakutkan. Sebagai orang luar di dunia politik, Fujimori hanya punya sedikit teman di antara para pialang kekuasaan tradisional Peru. Partai-partai oposisi mengendalikan kongres, dan hakim-hakim yang mereka tunjuk menguasai mahkamah agung. Media tradisional, yang sebagian besarnya mendukung Vargas Llosa, tidak percaya dia. Fujimori tadinya gencar menyerang elite politik, menyebut mereka sebagai oligarki korup yang merusak negara. Dia lantas mendapati bahwa orang-orang yang dia serang dan kalahkan dalam kampanye masih mengendalikan banyak tuas kekuasaan.

Awal yang berat bagi Fujimori. Kongres tidak menghasilkan satu pun undang-undang pada bulan-bulan pertama Fujimori menjabat, dan pengadilan tidak tampak siap menanggapi ancaman teroris. Fujimori bukan hanya tak punya pengalaman dengan kerumitan politik legislatif, melainkan juga tidak sabaran. Seperti dikatakan salah seorang ajudannya, Fujimori "tak tahan dengan gagasan mengundang Ketua Senat ke istana kepresidenan tiap kali dia ingin Kongres menyetujui satu undang-undang." Dia lebih suka, seperti kadang dia katakan sendiri, memerintah Peru sendirian—dari balik komputernya.

Jadi bukannya berunding dengan para pemimpin Kongres, Fujimori malah menyerang mereka, menyebut mereka "penipu tak produktif". Dia menyebut hakim-hakim yang tak kooperatif sebagai "serigala" dan "bajingan". Yang lebih meresahkan, dia mulai melangkahi Kongres dan

beralih menggunakan dekrit eksekutif. Pejabat-pejabat pemerintah mulai mengeluhkan konstitusi Peru yang "kaku" dan "membatasi", memperkuat kekhawatiran bahwa komitmen Fujimori ke lembaga demokrasi itu lemah. Dalam satu pidato di depan para pemimpin bisnis, Fujimori bertanya, "Apa kita benar-benar negara demokrasi? ... Saya dapati sukar menjawab ya. Kita negara yang sebenarnya selalu diperintah minoritas berkuasa, oligopoli, klik, lobi...."

Kalangan mapan Peru yang waspada memukul balik. Ketika Fujimori melangkahi pengadilan untuk membebaskan ribuan narapidana tindak pidana ringan agar ada ruang untuk memenjarakan teroris, Asosiasi Hakim Nasional menuduh dia melakukan "otoriterianisme antidemokrasi yang tak bisa diterima". Pengadilan memang menyatakan beberapa dekrit Fujimori tak konstitusional. Para pengkritiknya jadi sering mencela dia "otoriter", dan media mulai menggambarkan dia sebagai "kaisar Jepang". Pada awal 1991, ada pembicaraan mengenai pemakzulan. Bulan Maret, majalah berita *Caretas* memajang sampul bergambar Fujimori dibidik, bertanya "Bisakah Fujimori diturunkan? Beberapa orang sudah mempelajari kemungkinannya di Konstitusi."

Karena merasa dikepung, Fujimori makin keras. Dalam satu pidato di depan para pemimpin bisnis, dia menyatakan, "Saya tak akan berhenti sampai saya telah mematahkan semua tabu yang tersisa, satu demi satu semua akan jatuh; kita akan tiga kali lipat lebih berani dalam merobohkan dinding-dinding lama yang memisahkan negara ini dan kemajuan." Pada November 1991 dia mengajukan paket besar berisi 126 dekrit untuk disetujui Kongres. Dekrit-dekrit itu berjangkauan jauh, mencakup beberapa aturan antiteroris yang mengancam kebebasan sipil. Kongres menyatakan ketidaksetujuan. Kongres bukan hanya menolak atau melemahkan beberapa dekrit terpenting yang diajukan, melainkan juga mengesahkan undang-undang yang membatasi kekuasaan Fujimori. Konflik memanasi. Fujimori menuduh Kongres dikendalikan para penjual obat terlarang, dan sebagai tanggapan, Senat mengajukan mosi "pengosongan" kepresidenan karena "ketidaklayakan moral" Fujimori. Walau mosi gagal karena kekurangan beberapa suara di Kamar Deputi,

konflik telah mencapai titik di mana seorang pejabat pemerintah sampai khawatir "antara Kongres bakal membunuh Presiden, atau Presiden bakal membunuh Kongres."

Presiden membunuh Kongres. Pada 5 April 1992 Fujimori tampil di televisi dan mengumumkan bahwa dia membubarkan Kongres dan menyatakan Konstitusi tak berlaku lagi. Tak sampai dua tahun sesudah terpilih secara mengejutkan, si orang luar menjadi tiran.

Walau beberapa demagog hasil pemilu menjabat dengan rencana otorokrasi, banyak yang tidak, seperti Fujimori. Kerusakan demokrasi tak perlu rencana. Sebaliknya, seperti dikesankan pengalaman Peru, kerusakan demokrasi bisa menjadi hasil serangkaian peristiwa tak terduga—saling balas yang memanas antara pemimpin demagog pelanggar norma dan tatanan politik yang terancam.

Prosesnya sering diawali kata-kata. Demagog menyerang pengkritik dengan istilah-istilah kasar dan provokatif—sebagai musuh, pelaku makar, bahkan teroris. Ketika pertama kali ikut pemilihan presiden, Hugo Chávez menjabarkan lawan-lawannya sebagai "babi busuk" dan "oligark kotor". Setelah menjadi presiden, dia menyebut para pengkritiknya "musuh" dan "pengkhianat"; Fujimori mengaitkan lawan-lawannya dengan terorisme dan obat terlarang; Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menyerang hakim yang membuat putusan yang menentang dia sebagai "komunis". Jurnalis juga menjadi sasaran. Presiden Ekuador Rafael Correa menyebut media "musuh besar politik" yang "harus dikalahkan". Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menuduh jurnalis menyebarkan "terorisme". Serangan-serangan itu bisa berakibat: Bila masyarakat jadi berpandangan bahwa lawan politik terkait dengan terorisme dan media menyebar kebohongan, maka penguasa jadi mudah menindak lawan dan media.

Serangan jarang berhenti di sana. Walau para pengamat sering meyakinkan bahwa demagog "hanya bisa omong" dan kata-katanya jangan dianggap serius, sekilas pandang ke para pemimpin demagog di seluruh dunia menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang benar-benar

melaksanakan kata-katanya. Itu karena kenaikan demagog ke kekuasaan cenderung membuat masyarakat terpolarisasi, menciptakan iklim kepanikan, permusuhan, dan saling tak percaya. Kata-kata pemimpin baru yang mengancam sering punya efek bumerang. Bila merasa terancam, media bisa tidak menahan diri dan melanggar standar profesional dalam upaya nekat untuk melemahkan pemerintah. Dan oposisi boleh jadi menyimpulkan bahwa demi kebaikan negara, pemerintah harus dicopot lewat cara-cara ekstrem—pemakzulan, unjuk rasa akbar, bahkan kudeta.

Waktu Juan Perón pertama kali terpilih di Argentina pada 1946, banyak lawannya yang memandang dia sebagai seorang fasis. Anggota-anggota oposisi Uni Rakyat Radikal, yang percaya bahwa mereka "berjuang melawan Nazisme", memboikot pelantikan Perón. Sejak hari pertama masa jabatan Perón, lawan-lawannya di Kongres menggunakan strategi "oposisi, halangan, dan provokasi", bahkan menyerukan agar mahkamah agung merebut kendali pemerintahan. Begitu juga, oposisi Venezuela meminta mahkamah agung menunjuk tim psikiater untuk menentukan apakah Chávez dapat dicopot dari jabatan presiden berdasarkan "ketidaklayakan mental". Koran dan televisi terkemuka mendukung upaya ekstrakonstitusional untuk menggulingkan Chávez. Tentu saja para calon pemimpin otoriter menafsirkan serangan-serangan itu sebagai ancaman serius dan pada gilirannya menjadi makin keras.

Mereka melakukan langkah itu karena alasan lain juga: Demokrasi itu pekerjaan berat. Bisnis keluarga dan tentara bisa diperintah secara sepihak, sementara demokrasi butuh perundingan, kompromi, dan bagi-bagi. Hambatan tak bisa dielakkan, kemenangan selalu tak sempurna. Inisiatif presiden bisa mati di kongres atau dibatalkan pengadilan. Semua politikus frustrasi karena batasan-batasan itu, tapi politikus demokratis tahu harus menerimanya. Mereka bisa menanggung cecaran kritik. Namun orang luar, terutama yang berkecenderungan demagog, sering menganggap politik demokratis terlalu memusingkan. Mereka menganggap pengawasan dan perimbangan seperti ikatan. Presiden Fujimori, misalnya, tidak bisa menerima gagasan harus makan bersama

para pemimpin Senat tiap kali dia ingin mengesahkan undang-undang. Para calon pemimpin otoriter tak sabar dengan politik demokrasi harian. Seperti Fujimori, mereka ingin bebas dari semua itu.

Bagaimana pemimpin otoriter terpilih merusak lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya membatasi dia? Beberapa melakukannya sekali pukul. Namun lebih sering serangan terhadap demokrasi dimulai dengan perlahan. Banyak rakyat yang awalnya tak menyadari. Bagaimanapun, pemilihan umum terus diselenggarakan. Politikus oposisi masih duduk di badan legislatif. Koran independen masih beredar. Erosi demokrasi terjadi selangkah demi selangkah, kadang amat kecil langkahnya. Tiap langkah kecil tampak tak penting—tak ada yang kelihatan benar-benar mengancam demokrasi. Langkah pemerintah menumbangkan demokrasi memang sering berkesan legal: disetujui parlemen atau dianggap konstitusional oleh mahkamah agung. Banyak yang diterapkan dengan dalih demi satu tujuan publik yang sah—bahkan terpuji, seperti melawan korupsi, "membersihkan" pemilu, memperbaiki mutu demokrasi, atau meningkatkan keamanan nasional.

Untuk memahami lebih baik bagaimana autokrat hasil pemilu merusak lembaga secara halus, bayangkan pertandingan sepak bola. Demi konsolidasi kekuasaan, calon pemimpin otoriter mesti menangkap wasit, mengeluarkan setidaknya beberapa pemain bintang tim lawan, dan menulis ulang aturan permainan untuk mengamankan keunggulan sendiri, dan pada dasarnya membuat arena jadi merugikan lawan.

Wasit selalu ada gunanya. Negara modern punya banyak lembaga dengan wewenang menyelidiki dan menghukum pelanggaran yang dilakukan pejabat publik maupun warga biasa. Lembaga-lembaga itu antara lain sistem hukum, aparat penegak hukum, serta badan intelijen, pajak, dan pengatur. Di negara demokrasi, lembaga-lembaga seperti itu dirancang agar berperan sebagai pemberi putusan netral. Oleh karena itu, lembaga hukum dan penegak hukum memberi tantangan sekaligus kesempatan bagi calon pemimpin otoriter. Bila tetap independen, lembaga-lembaga

itu bisa mengungkap dan menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimanapun, wasit bertugas mencegah kecurangan. Namun bila lembaga-lembaga itu dikendalikan mereka yang setia kepada pemerintah, mereka dapat melayani tujuan si calon diktator, melindungi pemerintah dari penyelidikan dan penuntutan pidana yang dapat menggulingkannya. Presiden boleh melanggar hukum, mengancam hak rakyat, bahkan melanggar konstitusi tanpa harus khawatir semua itu akan diselidiki atau dikecam. Dengan pengadilan dan penegak hukum yang sudah dipegang, pemerintah bisa bertindak tanpa dihalangi.

Menangkap wasit bukan hanya memberikan perisai bagi pemerintah, melainkan juga senjata yang kuat, memungkinkan pemerintah menegakkan hukum secara pilih-pilih, menghukum lawan sambil melindungi kawan. Aparat pajak bisa digunakan untuk mengincar politikus, bisnis, atau saluran media rival. Polisi bisa membubarkan unjuk rasa oposisi sambil membiarkan tindak kekerasan pendukung pemerintah. Badan intelijen bisa digunakan untuk memata-matai pengkritik dan mencari bahan untuk pemerasan.

Sering kali penangkapan wasit dilakukan dengan diam-diam memecat beberapa pegawai dan pejabat nonpartisan lalu menggantikan mereka dengan orang-orang yang setia. Di Hungaria, misalnya, Perdana Menteri Viktor Orbán mengisi Kejaksaan, Kantor Audit Negara, Ombudsman, Biro Pusat Statistik, dan Mahkamah Konstitusi dengan sekutu-sekutu partisannya sesudah kembali berkuasa pada 2010.

Lembaga-lembaga yang tak bisa dibersihkan dengan mudah bisa dibajak secara halus dengan cara lain. Hanya sedikit yang lebih ahli melakukannya dibanding "penasihat intelijen" Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Di bawah kepemimpinan Montesinos, Badan Intelijen Nasional Peru memvideokan ratusan politikus oposisi, hakim, anggota Kongres, pengusaha, jurnalis, dan redaktur ketika mereka memberi atau menerima suap, memasuki bordil, atau melakukan kegiatan tercela lain—lalu menggunakan video itu untuk memeras. Montesinos juga memegang tiga hakim agung, dua hakim konstitusi, dan "banyak" hakim serta jaksa dengan mengirim uang bulanan ke rumah mereka. Itu semua

dilakukan diam-diam; di muka umum, sistem hukum Peru tampak berfungsi seperti biasa. Namun di balik layar, Montesinos membantu Fujimori mengonsolidasi kekuasaan.

Hakim-hakim yang tak bisa dibeli bisa diincar untuk dicopot. Ketika Juan Perón menjadi presiden Argentina pada 1946, empat dari lima hakim agung Argentina adalah lawannya dari kubu konservatif, dan salah satunya pernah menyebut dia fasis. Karena khawatir dengan sejarah pengadilan yang membatalkan undang-undang pro-buruh, para sekutu Perón di kongres mencopot tiga hakim atas dasar melanggar hukum (yang keempat mengundurkan diri sebelum dicopot). Perón lalu menunjuk empat loyalis, dan pengadilan tak pernah menentang dia lagi. Begitu juga, waktu Mahkamah Konstitusi Peru mengancam akan mencegah Presiden Fujimori melanjutkan ke masa jabatan ketiga pada 1997, sekutu-sekutu Fujimori di kongres mencopot tiga dari tujuh hakim konstitusi—dengan alasan bahwa ketika menyatakan upaya Fujimori menghindari pembatasan masa jabatan menurut konstitusi "tak konstitusional", mereka sendiri telah melanggar konstitusi.

Pemerintah yang tak dapat mencopot hakim independen bisa mengatasinya dengan menaruh hakim-hakim lain. Di Hungaria, contohnya, pemerintah Orbán menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi dari delapan ke lima belas, mengubah aturan pengajuan supaya partai Fidesz yang berkuasa dapat menunjuk hakim konstitusi baru secara langsung, lalu mengisi posisi hakim baru dengan para loyalis Fidesz. Di Polandia, beberapa inisiatif Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa dihadap Mahkamah Konstitusi Polandia—otoritas tertinggi negara itu dalam urusan konstitusi—antara 2005 dan 2007. Ketika kembali berkuasa pada 2015, partai itu melakukan langkah-langkah untuk mencegah adanya halangan serupa pada masa depan. Waktu itu ada dua posisi kosong di lima belas posisi hakim konstitusi, dan tiga hakim yang disetujui oleh parlemen hasil pemilu sebelumnya belum disumpah. Dalam satu langkah yang meragukan secara konstitusional, pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan yang baru menolak melantik tiga hakim itu dan justru mengangkat sendiri lima hakim konstitusi. Partai itu sekaligus membuat undang-undang yang mewajibkan semua

putusan Mahkamah Konstitusi disetujui mayoritas dua pertiga hakim agar mengikat. Itu efektif memberi kemampuan veto kepada para sekutu pemerintah dalam Mahkamah Konstitusi, membatasi kemampuan badan tersebut menjadi pengawas independen atas kekuasaan pemerintah.

Cara paling ekstrem untuk menangkap wasit adalah menghilangkan pengadilan sama sekali dan membuat yang baru. Pada 1999, pemerintahan Chávez mengadakan pemilihan majelis konstituante yang (dengan melanggar putusan mahkamah agung terdahulu) memberi kepada dirinya sendiri kekuasaan untuk membubarkan semua lembaga negara lain, termasuk pengadilan. Karena takut dibubarkan, mahkamah agung setuju dan memutuskan bahwa langkah itu konstitusional. Ketua mahkamah agung Cecilia Sosa mengundurkan diri, menyatakan bahwa pengadilan telah "bunuh diri agar tak dibunuh. Tapi hasilnya sama saja: mati." Dua bulan kemudian mahkamah agung dibubarkan dan digantikan Tribunal Agung Keadilan (Tribunal Supremo de Justicia). Itu pun belum cukup untuk memastikan pengadilan yang patuh, jadi pada 2004 pemerintah Chávez memperluas ukuran Tribunal dari dua puluh ke tiga puluh dua hakim dan mengisi posisi-posisi baru dengan orang-orang loyalis "revolusioner". Itu ampuh. Selama sembilan tahun berikutnya, tak satu pun putusan Tribunal menentang pemerintah.

Di tiap kasus, para wasit permainan demokrasi ditarik ke pihak pemerintah, sebagai perisai untuk berlindung dari tantangan konstitusional dan sebagai senjata kuat—serta "legal"—untuk memukul lawan bagi petahana.

Sesudah para wasit dipegang, autokrat hasil pemilu bisa menghadapi lawan. Sebagian besar otokrasi zaman sekarang tidak menghapus segala bentuk perlawanan, seperti Mussolini di Italia fasis atau Fidel Castro di Kuba komunis dulu. Tapi banyak yang berusaha untuk memastikan bahwa para pemain penting—siapa pun yang mampu benar-benar menyakiti pemerintah—dipinggirkan, dilumpuhkan, atau disogok agar keluar permainan. Pemain penting bisa mencakup politikus oposisi, pemimpin bisnis yang membiayai oposisi, media besar, dan dalam bebe-

rapa kasus, tokoh agama atau budaya yang terpandang secara moral di mata masyarakat.

Cara paling gampang membereskan calon lawan adalah membeli mereka. Sebagian besar autokrat terpilih mengawali dengan menawarkan jabatan, bantuan, imbalan, atau sogokan kepada tokoh politik, bisnis, atau media agar mendukungnya, atau setidaknya sikap netral dan diam. Media yang kooperatif bisa mendapat akses khusus ke presiden, sementara eksekutif bisnis yang bersahabat bisa menerima konsesi menguntungkan atau kontrak dari pemerintah. Pemerintahan Fujimori ahli dalam membeli pengritiknya, terutama yang di media. Pada akhir 1990-an tiap jejaring televisi utama, beberapa koran harian, dan tabloid-tabloid populer mendapat uang pemerintah. Vladimiro Montesinos membayar sekitar \$12 juta kepada para pemilik América Televisión (Canal 4) untuk bayaran atas penandatanganan "kontrak" yang memberi kendali atas program berita saluran itu kepada Montesinos. Pemegang saham utama Panamericana Televisión (Canal 5) menerima \$9 juta dari Montesinos, dan pemegang saham utama ATV (Canal 9) diberi \$50.000 karena memecat dua reporter investigasi terkemuka. Dalam satu percakapan yang direkam video pada akhir 1999, Montesinos menyatakan bahwa para pemimpin jejaring televisi "sudah berbaris.... Kami buat mereka menandatangani surat dan segalanya.... Mereka semua, semua berbaris. Tiap hari saya adakan pertemuan pada pukul 12:30 ... dan kami merencanakan siaran berita malam."

Tokoh-tokoh media menerima sogokan terbesar dari Montesinos, tapi dia juga membeli politikus. Pada 1998, ketika kelompok-kelompok oposisi mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memaksa referendum mengenai pertanyaan apakah Fujimori dapat maju lagi dalam pemilihan umum 2000, persoalan itu dilempar ke kongres, untuk dimintakan dukungan 40 persen anggota legislatif. Dalam teori, oposisi punya empat puluh delapan suara yang dibutuhkan untuk menyetujui referendum. Tapi Montesinos menyogok tiga anggota legislatif agar abstain. Salah satunya, Luis Chu, menerima bayaran \$130.000 di satu apartemen dari dana badan intelijen; yang lain, Miguel Ciccía, menerima

bantuan dalam kasus hukum yang melibatkan salah satu bisnisnya. Yang ketiga, Susy Díaz, setuju untuk tetap di rumah karena "alasan pribadi". Suara yang dikumpulkan oposisi di kongres tak cukup, sehingga Fujimori bisa ikut pemilu dan menang sehingga menjabat untuk masa jabatan ketiga yang ilegal pada 2000. Dan ketika hasil pemilu tak memberi mayoritas di kongres untuk Fujimori, Montesinos menyogok delapan belas anggota legislatif kubu oposisi untuk membelot.

Para pemain yang tak bisa dibeli mesti dilemahkan dengan cara lain. Diktator gaya lama sering memenjarakan, mengasingkan, atau bahkan membunuh lawannya, sementara autokrat zaman sekarang cenderung menyembunyikan tindakan represif di balik kedok legalitas. Itulah sebabnya menangkap wasit jadi penting. Di bawah Perón, pemimpin oposisi Ricardo Balbín dipenjara karena "menghina" presiden dalam kampanye pemilu. Balbín naik banding ke mahkamah agung, tapi karena mahkamah agung sudah diisi hakim-hakim pro-Perón, Balbín kalah. Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menggunakan polisi dan hakim yang setia secara politis terhadapnya untuk menyelidiki, menahan, dan memenjarakan pesaing utamanya, Anwar Ibrahim, atas tuduhan sodomi pada akhir 1990-an. Di Venezuela, pemimpin oposisi Leopoldo López ditangkap dan didakwa "menghasut kekerasan" selama satu gelombang unjuk rasa antipemerintah pada 2014. Pejabat-pejabat pemerintah tak memberi bukti bahwa dia menghasut, malah menyatakan hasutannya "tak langsung".

Pemerintah bisa juga menggunakan kendali atas wasit untuk meminggirkan media oposisi "secara legal", sering kali melalui gugatan pencemaran nama baik. Presiden Ekuador Rafael Correa ialah ahlinya. Pada 2011, dia menang dalam gugatan pencemaran nama baik senilai \$40 juta melawan para pemilik dan redaksi satu koran besar, *El Universo*, karena menerbitkan tajuk rencana yang mengecap dia "diktator". Correa menyebut kasus itu "langkah maju besar untuk membebaskan Amerika kita dari salah satu kekuasaan terbesar dan paling tak terkendali: media korup." Belakangan dia memaafkan para pemilik koran itu, tapi gugatan tersebut berefek kuat, membuat pers ngeri.

Pemerintahan Erdoğan dan Putin juga menggunakan hukum secara efektif. Di Turki, satu korban pentingnya adalah konglomerat media Doğan Yayın yang kuat, pengendali sekitar 50 persen pasar media Turki, termasuk koran paling banyak dibaca di negara itu, *Hürriyet*, dan beberapa stasiun televisi. Banyak saluran media grup Doğan berciri sekuler dan liberal, sehingga bertentangan dengan pemerintahan AKP (partai Erdoğan). Pada 2009 pemerintah memukul balik, mendenda Doğan hampir \$2,5 miliar—jumlah yang hampir melebihi total nilai perusahaan itu—karena menghindari pajak. Doğan yang kewalahan dipaksa menjual sebagian besar bisnisnya, termasuk dua koran besar dan satu stasiun TV. Pembelinya adalah pengusaha pro-pemerintah. Di Rusia, sesudah jejaring televisi independen NTV milik Vladimir Gusinsky mendapat reputasi "menyebalkan", pemerintahan Putin mengerahkan aparat pajak, yang menahan Gusinsky karena "pelanggaran finansial". Gusinsky ditawarkan "kesepakatan seperti dalam film Mafia: serahkan NTV demi kebebasan". Gusinsky menerima kesepakatan itu, menyerahkan NTV ke perusahaan energi raksasa yang dikendalikan pemerintah, Gazprom, lalu meninggalkan Rusia. Di Venezuela, pemerintahan Chávez mengadakan penyelidikan atas ketidakberesan finansial yang dilakukan pemilik televisi Globovisión Guillermo Zuloaga, memaksa Zuloaga kabur dari Venezuela untuk menghindari penangkapan. Di bawah tekanan besar finansial, Zuloaga akhirnya menjual Globovisión ke seorang pengusaha yang dekat dengan pemerintah.

Selagi saluran-saluran media penting diserang, yang lainnya jadi waspada dan mulai melakukan sensor diri. Ketika pemerintahan Chávez menggencarkan serangan pada pertengahan 2000-an, salah satu jejaring televisi terbesar di Venezuela, Venevisión, memutuskan untuk berhenti meliput politik. Acara bincang pagi diganti program astrologi, dan telenovela diperbanyak menggeser berita malam. Venevisión yang dulunya dianggap jejaring pro-oposisi malah hampir tak meliput oposisi selama pemilu 2006, dan meliput Presiden Chávez lebih daripada lima kali lipat liputan pesaingnya.

Autokrat terpilih juga berusaha melemahkan para pemimpin bisnis

yang membiayai oposisi. Itu salah satu kunci konsolidasi kekuasaan Putin di Rusia. Pada Juli 2000, ketika belum tiga bulan menjabat presiden, Putin memanggil dua puluh satu pebisnis terkaya Rusia ke Kremlin, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka dipersilakan mencari uang di bawah pemerintahannya—tapi hanya bila mereka tak ikut-ikut politik. Sebagian besar "oligark" itu mengindahkan peringatannya. Miliarder Boris Berezovsky, pemegang saham terbesar stasiun televisi ORT, tidak. Ketika liputan ORT mulai kritis, pemerintah mengangkat lagi satu kasus penipuan lama dan memerintahkan penahanan Berezovsky. Berezovsky kabur ke pengasingan, meninggalkan aset medianya di tangan mitra juniornya yang "dengan baik hati menyerahkannya kepada Putin." Oligark lain yang mengabaikan peringatan Putin ialah Mikhail Khodorkovsky, pemimpin perusahaan minyak raksasa Yukos. Khodorkovsky, orang terkaya Rusia (berharta \$15 miliar, menurut *Forbes*), dipercaya tak tersentuh. Namun dia melangkah terlalu jauh. Sebagai seorang liberal yang tak suka Putin, Khodorkovsky mulai mendanai partai-partai oposisi secara besar-besaran, termasuk Yabloko yang pro-Barat. Pernah, sampai seratus anggota Duma (parlemen) mendapat bayaran atau dukungan dari dia. Ada desas-desus bahwa dia berencana menjadi presiden. Putin yang merasa terancam lantas menahan Khodorkovsky pada 2003 atas dasar penghindaran pajak, penggelapan, dan penipuan. Khodorkovsky dipenjara hampir sepuluh tahun. Pesan kepada para oligark jelas: Jangan ikut-ikut politik. Hampir semuanya patuh. Tanpa sumber daya, partai-partai oposisi melemah, banyak yang sampai bubar.

Pemerintahan Erdoğan juga mendesak pebisnis ke pinggir arena politik. Ketika Partai Muda (Gençparti, GP) yang dibentuk dan didanai orang kaya Cem Uzan muncul sebagai pesaing serius pada 2004, aparat keuangan merampas kerajaan bisnis Uzan dan memidanakan Uzan dengan tuduhan pemerasan. Uzan kabur ke Prancis, dan GP ambruk tak lama sesudahnya. Beberapa tahun kemudian, grup Koç, konglomerat industri terbesar Turki, dituduh membantu unjuk rasa besar pada 2013 di Taman Gezi (satu hotel milik Koç dekat taman itu digunakan

sebagai tempat berlindung dan rumah sakit darurat di tengah aksi penindakan oleh polisi). Tahun itu, petugas pajak mengaudit beberapa perusahaan Koç dan membatalkan satu kontrak besar kementerian pertahanan dengan anak perusahaan Koç. Keluarga Koç belajar dari pengalaman itu. Sesudah 2013, Koç menjaga jarak dengan oposisi.

Terakhir, autokrat hasil pemilu sering mencoba membungkam tokoh-tokoh budaya—seniman, intelektual, bintang pop, atlet—yang ketenaran atau posisi moralnya membuat mereka jadi ancaman potensial. Ketika tokoh sastra Argentina Jorge Luis Borges muncul sebagai pengkritik terkenal Perón (seorang penulis lain menjabarkan Borges sebagai "semacam Anti-Perón"), para pejabat pemerintah memindahtugaskan dia dari posisinya di perpustakaan kota menjadi apa yang Borges sebut "inspektur unggas dan kelinci". Borges mengundurkan diri dan tak bisa mendapat pekerjaan selama berbulan-bulan.

Namun biasanya pemerintah lebih suka merangkul tokoh budaya terkenal atau mencapai kesepakatan bersama dengan mereka, membiarkan mereka melanjutkan pekerjaan asalkan tidak ikut-ikut berpolitik. Gustavo Dudamel, tokoh Venezuela, dirigen Orkestra Simfoni Bolivar dan Los Angeles Philharmonic yang terkenal di tingkat internasional, adalah satu contoh. Dudamel dulu pendukung utama El Sistema, program pendidikan musik terkenal Venezuela, yang membantu ratusan ribu remaja miskin Venezuela. Karena El Sistema bergantung kepada pendanaan pemerintah, para pendirinya tetap netral secara politis. Dudamel melanjutkan praktik itu, menolak mengkritik pemerintahan Chávez yang makin otoriter. Dudamel memimpin Orkestra Simfoni Bolivar pada pemakaman Chávez tahun 2012, dan sampai 2015, ketika tokoh-tokoh oposisi utama dipenjara, dia menulis kolom di *Los Angeles Times* membela sikap netralnya dan menyatakan "rasa hormat" terhadap pemerintahan Maduro. Sebagai balasan, El Sistema menerima tambahan pendanaan pemerintah, yang memungkinkannya menjangkau 700.000 anak pada 2015, dari 500.000 pada tiga tahun sebelumnya. Namun keadaan berubah pada Mei 2017, dengan pembunuhan seorang pemain biola muda—alumnus El Sistema—oleh aparat keamanan dalam satu unjuk rasa

antipemerintah. Lalu Dudamel menghentikan sikap bungkam politiknya, menulis kolom *New York Times* yang mencela penindasan oleh pemerintah dan pergeseran Venezuela menjadi kediktatoran. Dia mendapat balasan: bulan berikutnya, pemerintah membatalkan tur Orkestra Pemuda Nasional yang sudah direncanakan ke Amerika Serikat.

Pembungkaman diam-diam suara-suara berpengaruh—dengan kooptasi atau kalau perlu penekanan—bisa berkonsekuensi kuat bagi oposisi terhadap rezim. Ketika pebisnis besar dipenjara atau dijatuhkan secara ekonomi, seperti kasus Khodorkovsky di Rusia, pebisnis lain menyimpulkan bahwa lebih bijak tidak ikut-ikutan politik sama sekali. Dan ketika politikus oposisi ditahan atau diasingkan, seperti di Venezuela, politikus lain memutuskan untuk menyerah dan pensiun. Banyak pembangkang memutuskan untuk tetap di rumah ketimbang masuk politik, dan yang masih aktif jadi patah semangat. Itulah yang dituju pemerintah. Kalau para pemain utama oposisi, media, dan bisnis dibeli atau dipinggirkan, oposisi gembos. Pemerintah “menang” tanpa harus melanggar aturan.

Namun untuk memperkokoh kekuasaan, pemerintah mesti berbuat lebih banyak—pemerintah mesti mengubah aturan permainan juga. Tokoh otoriter yang ingin melakukan konsolidasi kekuasaan sering mengubah konstitusi, sistem pemilihan umum, dan lembaga-lembaga lain agar melemahkan atau memberatkan oposisi, membuat arena menjadi merugikan lawan. Perubahan itu sering dilaksanakan dengan alasan demi kepentingan umum, padahal sebenarnya menguntungkan petahana. Dan karena melibatkan perubahan legal atau bahkan konstitusional, perubahan sistem bisa memungkinkan autokrat unggul selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Pertimbangkan Malaysia, yang sistem pemilihan umumnya sepanjang sejarah diatur untuk menguntungkan UMNO yang berkuasa, satu partai yang umumnya berbasis orang Melayu. Walau orang Melayu hanya menjadi sedikit di atas setengah penduduk Malaysia, daerah pemilihan parlemen diatur supaya 70 persennya berpenduduk mayoritas Melayu,

sehingga memungkinkan UMNO dan sekutu-sekutunya meraih mayoritas besar di parlemen. Namun keadaan berubah ketika Parti Islam se-Malaysia (PAS) menjadi partai oposisi utama negara itu pada akhir 1990-an. PAS juga partai yang amat Melayu. Jadi pada 2002, otoritas pemilu yang didominasi UMNO mengubah haluan dan melakukan penataan ulang yang mengurangi jumlah kursi parlemen dari daerah-daerah perdesaan yang dianggap basis PAS—bertentangan dengan kecenderungan demografis. Otak-atik itu membantu koalisi yang dipimpin UMNO meraih 91 persen kursi parlemen pada pemilu 2004.

Pemerintahan Orbán di Hungaria melakukan sesuatu yang serupa. Sesudah mendapat mayoritas dua pertiga di parlemen pada 2010, Partai Fidesz yang berkuasa menggunakan kekuasaan mayoritasnya untuk mengamandemen konstitusi dan undang-undang pemilu untuk mempertahankan keunggulan. Dibuatlah aturan-aturan pemilu baru yang menguntungkan partai terbesar (Fidesz) dan mengatur daerah pemilihan senegara untuk memaksimalkan jumlah kursi yang bakal diraih partai itu. Terakhir, pemerintah melarang iklan kampanye di media swasta, membatasi kampanye televisi hanya di stasiun televisi publik, yang dipegang loyalis Fidesz. Pengaruh keunggulan kelembagaan baru itu tampak di pemilihan umum legislatif 2014: Meski porsi suara untuk Fidesz turun, dari 53 persen pada 2010 ke 44,5 persen pada 2014, partai penguasa itu berhasil mempertahankan mayoritas dua pertiga di parlemen.

Barangkali contoh paling mencolok penulisan ulang aturan untuk mempertahankan keunggulan otoriter berasal dari Amerika Serikat. Akhir masa Rekonstruksi pasca-Perang Saudara AS pada 1870-an menyebabkan kemunculan rezim-rezim otoriter satu partai di tiap negara bagian eks Konfederasi. Kekuasaan satu partai bukanlah suatu kebetulan sejarah, melainkan produk rekayasa konstitusi yang terang-terangan antidemokrasi.

Selama era Rekonstruksi, pemberian hak suara secara besar-besaran kepada orang Afrika-Amerika menjadi ancaman besar bagi kendali politik kulit putih di AS selatan dan dominasi politis Partai Demokrat. Di

bawah Reconstruction Act 1867 dan Amandemen Ke-15, yang melarang pembatasan hak suara berdasarkan ras, orang Afrika-Amerika tiba-tiba menjadi mayoritas pemilih di Mississippi, South Carolina, dan Louisiana, dan hampir mayoritas di Alabama, Florida, Georgia, dan North Carolina. Pasukan federal mengawasi pendaftaran massal pemilih berkulit hitam di AS selatan. Di seluruh Amerika Serikat, persentase orang berkulit hitam yang berhak memilih meningkat dari 0,5 persen pada 1866 ke 80,5 persen dua tahun sesudahnya. Di banyak negara bagian selatan, orang kulit hitam yang terdaftar sebagai pemilih melebihi 90 persen. Dan warga berkulit hitam memang memberi suara. Pada pemilihan presiden 1880, diperkirakan partisipasi pemilih kulit hitam itu 65 persen atau lebih tinggi di North Carolina dan South Carolina, Tennessee, Texas, dan Virginia. Pemberian hak suara membuat orang Afrika-Amerika lebih berdaya: Lebih dari dua ribu mantan budak di AS selatan meraih jabatan dalam pemilu pada 1870-an, termasuk empat belas anggota Kongres dan dua senator AS. Di satu titik, 40 persen lebih anggota legislatif di dewan perwakilan rakyat Louisiana dan South Carolina berkulit hitam. Dan karena orang Afrika-Amerika banyak yang memilih Partai Republik, pemberian hak suara bagi orang berkulit hitam memperkuat Partai Republik dan penantang lain dalam menghadapi Partai Demokrat yang dulu dominan. Partai Demokrat kehilangan kekuasaan di North Carolina, Tennessee, dan Virginia pada 1880-an dan 1890-an, dan hampir kehilangan Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi, dan Texas. Bila pemilu demokratis berlanjut, ahli ilmu politik V.O. Key, Jr., mengamati bahwa akibatnya "bakal fatal bagi status orang berkulit putih di sabuk kulit hitam."

Maka mereka pun mengubah aturan—dan menyingkirkan demokrasi. "Beri kami satu aturan [konstitusional], dan saya akan ubah supaya ... Negro tak akan terdengar," kata mantan senator Georgia Robert Toombs selagi Rekonstruksi berakhir. Antara 1885 dan 1908, kesebelas negara bagian eks Konfederasi mengubah konstitusi dan undang-undang pemilu masing-masing untuk melemahkan orang Afrika-Amerika. Agar tidak melanggar isi Amandemen Ke-15, ras tak disebut dalam upaya

membatasi hak suara, jadi negara bagian mengadakan pajak suara, syarat properti, tes kemampuan baca tulis, dan surat suara tertulis rumit yang konon "netral". "Maksud utama segala pembatasan itu," kata ahli sejarah Alex Keyssar, "adalah membuat orang kulit hitam yang miskin dan buta huruf ... tidak memberi suara." Dan karena orang Afrika-Amerika banyak mendukung Partai Republik, hilangnya suara mereka diharapkan mengembalikan dominasi Partai Demokrat dalam pemilu. Tujuannya, seperti dikatakan seorang senator negara bagian North Carolina, adalah menulis "aturan bagus dan jujur yang akan selalu memberi mayoritas bagi Demokrat."

South Carolina, yang penduduknya sebagian besar berkulit hitam, adalah pelopor pembatasan hak suara. "Eight Box Law" 1882 menciptakan kertas suara rumit yang menyulitkan orang buta huruf menggunakan hak suara, dan karena sebagian besar warga negara bagian itu yang berkulit hitam buta huruf, partisipasi orang kulit hitam dalam pemilu merosot. Namun itu belum cukup. Pada 1888, Gubernur John Richardson menyatakan "Kita sekarang punya kekuasaan minoritas 400.000 [orang kulit putih] atas mayoritas 600.000 [orang kulit hitam]... Satu-satunya yang berdiri di antara kita dan kekuasaan mereka hari ini adalah satu aturan lemah—Eight Box Law." Tujuh tahun kemudian negara bagian itu memberlakukan pajak suara dan tes baca tulis. Partisipasi orang kulit hitam, yang telah mencapai 96 persen pada 1876, turun sampai hanya 11 persen pada 1898. Hilangnya suara kulit hitam "menghancurkan Partai Republik", membuat partai itu tak punya kursi di dewan perwakilan rakyat negara bagian selama hampir seabad.

Di Tennessee, pemberian hak suara kepada orang kulit hitam membuat Partai Republik sangat kompetitif pada 1888 sampai-sampai koran *Avalanche* yang pro-Demokrat memprediksi "kemenangan besar Republik" pada pemilu berikutnya kalau tak ada yang dilakukan. Tahun berikutnya, para legislator Demokrat mengesahkan pajak suara, syarat pendaftaran ketat, dan Dortch Law, yang menciptakan surat suara rumit yang butuh pemilih melek huruf. Selagi dewan berdebat, *Avalanche* menyatakan, "Beri kita undang-undang Dortch atau kita habis."

Sesudahnya, judul berita *Memphis Daily Appeal* menyatakan: "Akhirnya Aman—Selamat Tinggal Partai Republik, Selamat Tinggal." Partai Demokrat menang pada 1890, sementara Partai Republik "ambruk". Tajuk rencana *Daily Appeal* menyatakan efek Dortch Law "sangat mengagumkan. Suara berkurang drastis, tapi rasio mayoritas Demokrat naik sampai minimal empat kali lipat." Pada 1896, partisipasi orang kulit hitam dalam pemilu mendekati nol.

Di Alabama, di mana Partai Demokrat hampir kehilangan kursi gubernur ke seorang populis pada 1892, mereka "beralih ke pembatasan hak suara untuk menghindari kesulitan." Sesudah DPR negara bagian mengesahkan satu undang-undang untuk menekan suara kulit hitam, Gubernur Thomas Jones dilaporkan berkata, "Saya mau tanda tangani undang-undang itu secepatnya, sebelum tangan dan lengan saya tak bisa bergerak, karena undang-undang itu selamanya menghapuskan [kaum populis] ... dan semua *nigger*." Cerita yang sama berulang di Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Texas, dan Virginia.

Langkah-langkah "reformasi" itu efektif membunuh demokrasi di AS Selatan. Walau orang Afrika-Amerika tetap menjadi mayoritas atau hampir mayoritas populasi di banyak negara bagian, dan walau hak suara orang kulit hitam sudah ditetapkan di Konstitusi AS, cara-cara "legal" atau terkesan netral digunakan untuk "memastikan bahwa pemilihan di Selatan ... hampir semuanya berkulit putih." Partisipasi pemilihan berkulit hitam di AS Selatan turun dari 61 persen pada 1880 menjadi hanya 2 persen pada 1912. Penghilangan hak suara orang Afrika-Amerika menyingkirkan Partai Republik, mempertahankan supremasi kulit putih dan kekuasaan satu partai selama hampir satu abad. Seperti diamati seorang kulit hitam AS Selatan, "Seluruh kawasan Selatan—tiap negara bagian di Selatan—telah berada di tangan orang-orang yang dulu memperbudak kami."

Dengan menangkap wasit, membeli atau melemahkan lawan, dan mengubah aturan permainan, pemimpin hasil pemilu bisa membangun

keunggulan nyata—dan permanen—atas lawan-lawannya. Karena langkah-langkah itu dilaksanakan sedikit demi sedikit dan dengan terkesan legal, pergeseran ke otoritarianisme tak selalu membuat alarm berbunyi. Warga sering terlambat menyadari bahwa demokrasi sedang dipreteli—bahkan bila itu terjadi di depan mata mereka.

Salah satu ironi besar terkait bagaimana demokrasi mati adalah bahwa pembelaan terhadap demokrasi itu sendiri sering dijadikan alasan untuk menumbangkannya. Para calon autokrat sering menggunakan krisis ekonomi, bencana alam, dan terutama ancaman keamanan—perang, perlawanan bersenjata, atau serangan teroris—untuk membenarkan langkah-langkah antidemokrasi. Pada 1969, sesudah terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dan terakhir, Presiden Ferdinand Marcos di Filipina mulai memikirkan bagaimana dia mungkin bisa menggunakan keadaan darurat untuk memperpanjang kekuasaannya. Marcos tak mau turun ketika masa jabatan keduanya berakhir pada 1973, seperti diharuskan konstitusi, jadi dia membuat rencana untuk memberlakukan hukum perang dan mengubah konstitusi. Namun, dia butuh alasan. Kesempatan datang pada Juli 1972, ketika serangkaian pengeboman misterius menggoncang Manila. Sesudah upaya pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, Marcos menyalahkan teroris komunis dan melaksanakan rencananya. Dia mengumumkan pemberlakuan hukum perang di televisi nasional, bersikeras "Saudara sebangsa dan setanah air ... ini bukanlah kudeta militer." Dia beralasan bahwa "suatu bentuk pemerintahan demokratis bukanlah pemerintahan yang tak berdaya" dan konstitusi—yang dia jadikan tak berlaku—"dengan bijak memberi sarana untuk melindunginya" ketika menghadapi bahaya seperti pemberontakan. Dengan langkah itu, Marcos bercokol di kekuasaan selama empat belas tahun berikutnya.

Krisis sukar diprediksi, tapi konsekuensi politiknya tidak. Krisis membantu konsentrasi dan, sering kali, penyalahgunaan kekuasaan. Perang dan serangan teroris menghasilkan efek "berkumpul di sekitar bendera" yang menyebabkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah meningkat—sering kali secara dramatis; sesudah serangan tero-

ris 11 September 2001, Presiden George W. Bush mendapat kenaikan angka dukungan dari 53 persen ke 90 persen—angka tertinggi yang pernah dicatat lembaga jajak pendapat Gallup. (Rekor tertinggi sebelumnya—89 persen—telah dicapai ayah George W. Bush, George H.W. Bush, sesudah Perang Teluk Persia 1991.) Karena hanya sedikit politikus yang bersedia menantang presiden dengan dukungan 90 persen di tengah krisis keamanan nasional, maka presiden jadi tak terhalang. USA PATRIOT Act, yang ditandatangani oleh George W. Bush pada Oktober 2001, tak bakal disahkan andai serangan 11 September tak terjadi pada bulan sebelumnya.

Rakyat juga lebih mungkin menoleransi—bahkan mendukung—cara-cara otoriter selama krisis keamanan, terutama bila mereka mengkhawatirkan keselamatan sendiri. Sesudah 9/11, 55 persen orang Amerika Serikat yang disurvei mengaku percaya beberapa kebebasan sipil perlu dibatasi untuk melawan terorisme, naik dari 29 persen pada 1997. Demikian juga, penahanan orang-orang Jepang-Amerika oleh pemerintah Roosevelt kiranya tak terpikirkan tanpa adanya rasa takut masyarakat akibat serangan ke Pearl Harbor. Sesudah Pearl Harbor, 60 persen lebih orang Amerika yang disurvei mendukung pengusiran orang-orang Jepang-Amerika dari Amerika Serikat, dan setahun kemudian, penahanan orang-orang Jepang-Amerika masih mendapat dukungan masyarakat cukup besar.

Sebagian besar konstitusi memperbolehkan perluasan kekuasaan eksekutif selama krisis. Alhasil, presiden yang terpilih secara demokratis pun bisa mengonsentrasikan kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil selama perang. Di tangan calon pemimpin otoriter, kekuasaan terkonsentrasi itu jauh lebih berbahaya. Bagi demagog yang merasa terkepung kritik dan terikat lembaga-lembaga demokrasi, krisis membuka jendela kesempatan untuk membungkam kritik dan melemahkan pesaing. Memang, autokrat terpilih sering *butuh* krisis—ancaman dari luar yang menawarkan kesempatan bagi mereka untuk membebaskan diri dengan cepat dan sering kali "legal".

Kombinasi calon pemimpin otoriter dan krisis besar bisa mematikan bagi demokrasi. Beberapa pemimpin mulai menjabat dengan meng-

hadapi krisis. Contohnya, Fujimori mulai menjabat di tengah hiperinflasi dan perlawanan gerilya, jadi ketika dia menyatakan kudeta kepresidenan 1992 sebagai hal buruk yang diperlukan, sebagian besar orang Peru setuju dengan dia. Dukungan terhadap Fujimori naik ke 81 persen sesudah kudeta.

Pemimpin lain menciptakan krisis. Ada cerita di balik pernyataan pemberlakuan hukum perang oleh Ferdinand Marcos pada 1972: "Krisis" itu direkayasa. Karena sadar bahwa dia perlu mencari pembenaran atas rencananya mengakali batas dua masa jabatan kepresidenan dalam konstitusi, Marcos memutuskan untuk merekayasa suatu "ancaman komunis". Meski hanya menghadapi selusin pemberontak sungguhan, Presiden Marcos mengobarkan histeria masyarakat untuk dalih tindakan darurat. Marcos ingin menyatakan pemberlakuan hukum perang sejak 1971, tapi rencananya butuh tindak kekerasan—serangan teroris—yang membangkitkan rasa takut secara luas. Peristiwa demikian terjadi setahun sesudah pengeboman Manila, yang dipercaya intelijen AS sebagai ulah orang pemerintah, dan upaya pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Enrile—yang Enrile belakangan akui sebagai "akal-akalan". Malah dia berkata bahwa dia "tidak berada di tempat kejadian" serangan yang dilaporkan.

Baik krisisnya nyata atau bukan, para calon pemimpin otoriter siap memanfaatkan krisis untuk membenarkan perebutan kekuasaan. Barangkali kasus paling terkenal adalah tanggapan Adolf Hitler terhadap kebakaran Reichstag 27 Februari 1933, hanya sebulan sesudah dia diangkat sebagai kanselir. Persoalan apakah pelaku pembakar gedung parlemen di Berlin itu seorang pemuda Belanda simpatisan komunis atau pemimpin Nazi sendiri, tetap diperdebatkan di kalangan ahli sejarah. Apa pun yang sebenarnya terjadi, Hitler, Hermann Göring, dan Joseph Goebbels tiba di Reichstag yang terbakar dan langsung menggunakan peristiwa itu untuk alasan dekrit darurat yang menghapuskan kebebasan sipil. Tindakan itu, dan Ermächtigungsgesetz (Undang-undang Pemberdayaan) sebulan kemudian, menghancurkan segala perlawanan, mengonsolidasi kekuasaan Nazi sampai akhir Perang Dunia II.

Suatu krisis keamanan juga memudahkan Vladimir Putin menjadi otoriter. Pada September 1999, tak lama sesudah Putin dilantik sebagai perdana menteri, serangkaian pengeboman di Moskwa dan kota-kota lain—disebut-sebut sebagai ulah teroris Chechen—membunuh hampir tiga ratus orang. Putin menanggapi dengan mengobarkan perang di Chechnya dan melakukan penindakan berskala besar. Seperti kasus Jerman Nazi, ada perdebatan mengenai apakah pengeboman itu benar-benar dilakukan teroris Chechen ataukah oleh badan intelijen pemerintah Rusia sendiri. Namun yang jelas adalah bahwa kepopuleran politik Putin mendapat dorongan besar karena pengeboman. Masyarakat Rusia bersatu di belakang Putin, menoleransi, bila bukan mendukung, serangan terhadap oposisi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sesudahnya.

Yang terbaru, pemerintahan Erdoğan di Turki menggunakan krisis keamanan untuk membenarkan cengkeraman makin kuat terhadap kekuasaan. Sesudah AKP kehilangan kedudukan mayoritas di parlemen pada Juni 2015, serangkaian serangan teroris ISIS memungkinkan Erdoğan menggunakan efek berkumpul di sekitar bendera untuk mengadakan pemilu sela dan merebut kembali parlemen hanya lima bulan kemudian. Yang lebih besar lagi pengaruhnya adalah upaya kudeta Juli 2016, yang memberi pembenaran untuk penindakan besar-besaran. Erdoğan menanggapi kudeta dengan menyatakan keadaan darurat dan meluncurkan gelombang besar penindasan yang mencakup pemecatan sekitar 100.000 pejabat publik, penutupan beberapa koran, dan penangkapan lebih dari 50.000 orang—termasuk ratusan hakim dan jaksa, 144 jurnalis, bahkan dua hakim konstitusi. Erdoğan juga menggunakan upaya kudeta sebagai jendela kesempatan untuk menambah kekuasaan eksekutif. Perebutan kekuasaan berpuncak pada April 2017, ketika satu amandemen konstitusi menghapuskan pengawasan terhadap wewenang presiden.

Bagi demagog yang dikungkung batas-batas konstitusional, krisis merupakan kesempatan untuk mulai membongkar pengawasan dan pertimbangan dalam politik demokrasi yang merepotkan dan kadang

mengancam. Krisis memperkenankan autokrat memperluas ruang gerak untuk bermanuver dan melindungi diri dari musuh. Namun pertanyaannya masih ada: Apakah lembaga-lembaga demokrasi semudah itu hilang?

5

Pagar Demokrasi

Selama bergenerasi-generasi, orang Amerika Serikat terus memercayai Konstitusi Amerika Serikat sebagai pusat keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah negara dan bangsa terpilih, dibimbing Ilahi, mercusuar harapan dan kemungkinan di dunia. Walau visi akbar itu mungkin memudar, rasa percaya terhadap Konstitusi AS tetap tinggi. Survei tahun 1999 mendapati bahwa 85 persen orang Amerika Serikat percaya bahwa Konstitusi AS adalah alasan utama "Amerika telah berhasil selama abad ini". Memang, sistem konstitusional AS dengan pengawasan dan perimbangan dirancang untuk mencegah pemimpin mengonsentrasikan dan menyalahgunakan kekuasaan, dan sepanjang sebagian besar sejarah Amerika Serikat, sistemnya ampuh. Konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Abraham Lincoln selama Perang Saudara AS dibatalkan Mahkamah Agung sesudah perang berakhir. Penyadapan ilegal Presiden Richard Nixon, yang terungkap sesudah Watergate 1972, memicu penyelidikan oleh kongres dan tekanan bipartisan untuk jaksa penuntut khusus yang akhirnya memaksa Nixon mengundurkan diri sebelum pasti dimakzulkan. Di contoh-contoh itu dan yang lainnya, lembaga-lembaga politik AS bekerja sebagai benteng penting untuk membendung kecenderungan otoriter.

Namun, apakah sarana perlindungan konstitusional itu sendiri memadai untuk mengamankan demokrasi? Kami percaya jawabannya tidak. Konstitusi yang dirancang dengan baik pun kadang gagal. Konstitusi Weimar 1919 Jerman dirancang oleh beberapa pemikir hukum terhebat

di negara itu. *Rechtsstaat* ("negara hukum") yang sudah berlangsung lama dan dihargai dianggap banyak orang sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan pemerintah. Namun, konstitusi dan *Rechtsstaat* ambruk dengan cepat sesudah Adolf Hitler meraih kekuasaan pada 1933.

Atau pertimbangkan pengalaman Amerika Latin pascakolonial. Banyak republik yang baru merdeka di kawasan itu menjadikan Amerika Serikat sebagai model, menggunakan presidensialisme, badan legislatif bikameral, mahkamah agung, dan dalam beberapa kasus, Electoral College dan sistem federal, semuanya gaya AS. Beberapa menulis konstitusi yang hampir mirip Konstitusi AS. Namun hampir semua republik muda di kawasan itu terjerumus perang saudara dan kediktatoran. Contohnya, konstitusi 1853 Argentina amat mirip dengan Konstitusi AS: dua pertiga teksnya diambil langsung dari Konstitusi AS. Namun, tatanan konstitusional itu tak bisa mencegah pemilu curang pada akhir abad ke-19, kudeta militer pada 1930 dan 1943, dan otokrasi populis Perón.

Begitu juga, konstitusi 1935 Filipina telah dijabarkan sebagai "salinan persis Konstitusi AS." Konstitusi yang ditulis di bawah pengawasan kolonial AS dan disetujui Kongres AS itu "menyediakan contoh khas demokrasi liberal", dengan pemisahan kekuasaan, pengakuan atas hak asasi manusia, dan pembatasan masa jabatan presiden dua kali. Namun Presiden Ferdinand Marcos, yang tidak mau turun sesudah masa jabatan keduanya berakhir, menghapuskan ketentuan itu dengan mudah sesudah mengumumkan berlakunya hukum perang pada 1972.

Andaikata aturan konstitusional sudah cukup, maka tokoh-tokoh seperti Perón, Marcos, dan Getúlio Vargas di Brazil—yang semuanya mulai menjabat berdasarkan konstitusi gaya AS yang di atas kertas mengandung sejumlah pengawasan dan perimbangan yang mengesankan—bakal menjadi presiden untuk satu atau dua masa jabatan, bukan autokrat.

Bahkan konstitusi yang dirumuskan dengan baik pun tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya demokrasi. Memang, konstitusi selalu tidak lengkap. Sebagaimana halnya perangkat peraturan lainnya,

konstitusi memiliki kesenjangan dan ambiguitas tak terbilang. Tidak ada petunjuk pelaksanaan—sedetail apa pun petunjuk itu—yang bisa mengantisipasi semua kemungkinan kontingensi atau menentukan bagaimana menghadapi segala keadaan yang mungkin terjadi.

Aturan-aturan konstitusional juga selalu punya banyak penafsiran. Misalnya apa tepatnya arti “nasihat dan persetujuan” dalam peran Senat AS menunjuk hakim agung? Jenis batas pemakzulan apa yang ditetapkan kalimat “kejahatan dan perilaku keliru”? Orang Amerika sudah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan konstitusional itu selama berabad-abad. Bila kekuasaan konstitusional bisa ditafsirkan bermacam-macam, maka kekuasaan itu bisa digunakan dengan cara-cara yang tak terduga oleh para penciptanya.

Terakhir, kata-kata yang tertulis di konstitusi bisa diikuti secara harfiah dalam cara-cara yang merusak semangat hukum. Salah satu bentuk unjuk rasa buruh yang paling mengganggu adalah kampanye “bekerja sesuai aturan”, di mana para buruh melakukan apa yang diwajibkan dalam kontrak atau deskripsi pekerjaan dan tidak lebih. Dengan kata lain, mereka mengikuti aturan secara harfiah. Hampir selalu, tempat kerja mereka berhenti berfungsi.

Karena ada kesenjangan dan ambiguitas di dalam semua sistem hukum, maka kita tak bisa mengandalkan konstitusi saja untuk menjaga demokrasi dari para calon pemimpin otoriter. “Tuhan tak pernah menganugrahi negarawan atau filsuf, atau siapa pun,” tulis mantan presiden AS Benjamin Harrison, “dengan cukup banyak kebijaksanaan untuk merumuskan suatu sistem pemerintahan yang bisa langsung dijalankan semua orang begitu saja.”

Itu mencakup sistem politik Amerika Serikat juga. Konstitusi AS umumnya dianggap dokumen yang brilian. Namun, Konstitusi AS yang asli—hanya empat halaman—bisa ditafsirkan dengan banyak cara yang bisa saling bertentangan. Contohnya, di Konstitusi AS hanya sedikit pen-jagaan untuk mencegah pengisian lembaga independen (seperti FBI) dengan loyalis. Menurut dua ahli konstitusi, Aziz Huq dan Tom Ginsburg, hanya “lapisan tipis kebiasaan” yang mencegah presiden Amerika me-

nangkap wasit dan menggunakan wasit untuk menekan lawan. Begitu juga, Konstitusi AS tak berkata apa-apa mengenai wewenang presiden bertindak sepihak melalui dekrit perintah eksekutif, dan tidak mendefinisikan batas kekuasaan eksekutif pada masa krisis. Maka Huq dan Ginsburg baru-baru ini memperingatkan bahwa "penjaga konstitusional dan legal demokrasi [Amerika] ... bakal terbukti mudah dimanipulasi oleh pemimpin yang benar-benar antidemokrasi."

Bila konstitusi yang ditulis di Philadelphia pada 1787 bukanlah hal yang menjaga demokrasi Amerika sedemikian lama, lantas apa yang menjaganya? Banyak faktor berpengaruh, termasuk kekayaan besar Amerika Serikat, kelas menengah yang besar, dan masyarakat madani yang hidup. Namun kami percaya bahwa sebagian besar juga terletak di pengembangan norma-norma demokrasi yang kuat. Semua negara demokrasi yang sukses mengandalkan aturan-aturan informal yang dikenal luas dan dihormati, walau tak tertulis di konstitusi atau hukum. Dalam kasus demokrasi Amerika Serikat, semua itu selama ini vital.

Sebagaimana segala kenyataan, dari kehidupan keluarga sampai operasi bisnis dan universitas, aturan-aturan tak tertulis itu penting dalam politik. Untuk mengerti cara kerjanya, pikirkan contoh pertandingan bola basket jalanan. Olahraga bola basket jalanan tidak diatur oleh aturan-aturan NBA, NCAA, atau liga lain. Dan tidak ada wasit untuk menegakkan aturan. Hanya pemahaman bersama mengenai apa yang bisa dan tak bisa diterima-lah yang mencegah pertandingan kacau. Aturan tak tertulis pertandingan bola basket setengah lapangan diketahui siapa pun yang telah memainkannya. Berikut beberapa dasarnya:

- Nilai dihitung satu per satu, bukan dua seperti olahraga bola basket reguler, dan tim pemenang harus unggul dua angka.
- Tim yang memasukkan bola kemudian memegang bola. Tim yang mendapat angka membawa bola ke ujung lapangan, dan untuk menjamin tim bertahan sudah siap, "mengecek" dengan mengoper bola ke pemain lawan terdekat.
- Pemain yang memegang bola pertama kali tidak boleh menembak langsung; dia harus mengoper dulu.

- Pemain menyatakan sendiri pelanggaran tapi dengan hati-hati; hanya pelanggaran berat yang dianggap pelanggaran. Tapi kalau ada pernyataan pelanggaran, seruan itu mesti dihormati.

Demokrasi tentu saja bukan pertandingan bola basket jalanan. Demokrasi *memang* punya aturan tertulis (konstitusi) dan wasit (pengadilan). Namun, aturan tertulis dan wasit bekerja paling baik dan bertahan paling lama di negara-negara yang konstitusi tertulisnya diperkuat oleh aturan permainan tak tertulis. Aturan atau norma itu berperan sebagai pagar lembut demokrasi, mencegah persaingan politik harian merosot menjadi konflik tanpa aturan.

Norma-norma bukan hanya kecenderungan pribadi. Norma tidak bisa hanya mengandalkan sifat baik pemimpin politik, melainkan berupa kode etik bersama yang telah menjadi pengetahuan umum dalam satu komunitas atau masyarakat—diterima, dihormati, dan ditegakkan anggota-anggotanya. Karena tak tertulis, norma-norma itu sering sukar dilihat, terutama bila berfungsi dengan baik. Itu bisa mengecoh kita sehingga menganggap norma-norma tak perlu. Namun itu jauh sekali dari kebenaran. Seperti oksigen atau air jernih, makna norma segera tampak kalau norma itu tak berlaku. Kalau norma kuat, pelanggarannya memicu ekspresi ketidaksetujuan, mulai dari geleng-geleng kepala dan cemoohan sampai kritik publik dan pengucilan terang-terangan. Dan politikus yang melanggar norma akan rugi.

Aturan-aturan tak tertulis ada di mana-mana di perpolitikan Amerika, berkisar dari cara kerja Senat dan Electoral College ke format konferensi. Namun, ada dua norma yang menonjol sebagai norma fundamental untuk demokrasi yang berfungsi: saling toleransi dan sikap menahan diri secara kelembagaan.

Saling toleransi merujuk ke gagasan bahwa selama pesaing-pesaing kita bermain sesuai aturan konstitusional, kita menerima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing berebut kekuasaan, dan memerintah, yang setara. Boleh jadi kita tak setuju dan bahkan sangat tak menyukai pe-

saing kita, tapi kita tetap saja menerima keabsahan mereka. Artinya, kita mengakui bahwa pesaing kita dalam politik adalah warga negara yang baik, patriotis, taat hukum—mereka cinta negara dan menghormati Konstitusi seperti kita. Artinya bahwa biarpun kita percaya gagasan-gagasan lawan kita konyol atau keliru, kita tak memandang mereka sebagai ancaman terhadap keberadaan kita. Kita juga tak memperlakukan mereka sebagai pengkhianat, subversif, atau lain-lainnya. Barangkali kita menangis pada malam sesudah pemilu ketika lawan kita menang, tapi kita tak menganggap kejadian itu sebagai kiamat. Dengan kata lain, saling toleransi adalah kesediaan bersama para politikus untuk sepakat tak bersepakat.

Meski gagasan itu mungkin kedengaran wajar, kepercayaan bahwa lawan politik bukan musuh adalah suatu temuan yang luar biasa dan canggih. Sepanjang sejarah, perlawanan terhadap penguasa telah dipandang sebagai pengkhianatan, dan gagasan partai oposisi yang sah memang masih dianggap tak wajar pada waktu pendirian negara Amerika Serikat. Kedua sisi di pertempuran-pertempuran partisan awal Amerika Serikat—kelompok Federalis John Adams dan kelompok Republik Thomas Jefferson—menganggap lawannya sebagai ancaman bagi negara. Kelompok Federalis memandang diri sendiri sebagai perwujudan Konstitusi; dalam pandangan mereka, orang tak bisa menentang kelompok Federalis tanpa menentang seluruh proyek Amerika. Jadi ketika Jefferson dan Madison mengorganisasi apa yang kemudian menjadi Partai Republik, kelompok Federalis menganggap mereka pengkhianat, bahkan mencurigai mereka berpihak kepada Prancis Revolusioner—yang hampir berperang dengan Amerika Serikat. Jefferson dan para pengikutnya membalas dengan menuduh kelompok Federalis sebagai kaum konservatif dan merencanakan restorasi sistem kerajaan yang didukung Britania. Tiap sisi berharap bisa memusnahkan lawannya, melakukan langkah-langkah (seperti Alien Act and Sedition Act 1798) untuk menghukum oposisi politik. Konflik partisan sangat panas sehingga banyak yang takut republik baru akan gagal. Barulah perlahan-lahan, selama puluhan tahun, partai-partai yang berlawanan

di Amerika Serikat akhirnya menyadari bahwa partai-partai dapat menjadi rival, bukan musuh, yang saling bergantian berkuasa, bukan saling memusnahkan. Kesadaran itu adalah dasar kritis demokrasi Amerika.

Namun, saling toleransi tidak inheren di semua negara demokrasi. Ketika Spanyol mengalami transisi demokratis sejati pertama pada 1931 misalnya, harapan membubung. Pemerintah Republik Spanyol baru yang berkecenderungan kiri, dipimpin Perdana Menteri Manuel Azaña, berkomitmen ke demokrasi parlementer. Namun pemerintah menghadapi masyarakat yang amat terpolarisasi, dari anarkis dan Marxis di kiri sampai monarkis dan fasis di kanan. Pihak-pihak yang saling berlawanan memandang lawannya bukan sebagai pesaing partisan, melainkan musuh bebuyutan. Di satu sisi, orang-orang Katolik dan monarkis sayap kanan, yang ngeri menyaksikan hak-hak istimewa lembaga-lembaga sosial yang mereka paling hargai—Gereja, tentara, dan kerajaan—dipreteli, tidak menerima keabsahan republik baru. Mereka memandang diri mereka sendiri, menurut kata-kata seorang ahli sejarah, terlibat dalam pertempuran melawan "agen asing Bolsyevik." Situasi meresahkan di perdesaan dan ratusan pembakaran gereja, biara, dan lembaga Katolik lain membuat kaum konservatif merasa terkurung dalam cengkeraman suatu konspirasi yang mengamuk. Para pemimpin agama memperingatkan, "Kita telah memasuki pusaran sekarang ... kita harus siap untuk semuanya."

Di lain pihak, banyak orang Sosialis dan Republikan kiri memandang kaum kanan seperti José Maria Gil-Robles, pemimpin *Confederación Española de Derechas Autónomas* (CEDA) Katolik konservatif, sebagai kelompok monarkis atau fasis kontrarevolusi. Sebaik-baiknya, banyak orang kiri yang menganggap CEDA yang terorganisasi baik sebagai sekadar kedok untuk kaum monarkis ultrakonservatif yang merencanakan penggulingan republik dengan kekerasan. Meski CEDA tampak bersedia bermain di arena demokrasi dengan ikut pemilu, para pemimpinnya menolak berkomitmen tanpa syarat ke rezim baru. Jadi mereka masih merupakan sasaran kecurigaan ekstrem. Pendek kata, kelompok Republik di kiri maupun kelompok Katolik dan monarkis di

kanan sama-sama tak sepenuhnya menerima satu sama lain sebagai lawan yang sah.

Kala norma saling toleransi lemah, demokrasi sukar dipelihara. Bila kita memandang pesaing sebagai ancaman berbahaya, maka kita jadi takut mereka menang. Boleh jadi kita memutuskan untuk menggunakan segala cara untuk mengalahkan mereka—sehingga membenarkan cara-cara otoriter. Politikus yang dianggap kriminal atau subversif bisa dipenjara; pemerintahan yang dianggap mengancam negara dan bangsa bisa digulingkan.

Tanpa norma saling toleransi yang kuat, Republik Spanyol segera berantakan. Republik baru itu mengalami krisis ketika CEDA sayap kanan menang dalam pemilu 1933 dan menjadi fraksi terbesar di parlemen. Koalisi Republik tengah-kiri yang memerintah ambruk dan digantikan pemerintahan minoritas tengah yang tak melibatkan kelompok Sosialis. Karena banyak orang Sosialis dan Republikan kiri memandang pemerintahan tengah-kiri pertama (1931–33) sebagai perwujudan republik, maka mereka menganggap upaya-upaya membatalkan atau mengubah kebijakannya sebagai "tak setia" secara mendasar terhadap republik. Dan ketika CEDA—yang punya kelompok pemuda berkecenderungan fasis—bergabung dengan pemerintah pada tahun berikutnya, banyak Republikan yang memandangnya sebagai ancaman besar. Partai Republik Spanyol kiri menyatakan bahwa

Kenyataan mengerikan, yaitu mengalihkan pemerintahan Republik ke musuh, adalah pengkhianatan. [Kami] memutuskan segala solidaritas dengan lembaga-lembaga rezim sekarang dan menegaskan keputusan kami untuk beralih ke segala cara yang dibutuhkan untuk membela Republik.

Menghadapi apa yang mereka pandang sebagai pergeseran menuju fasisme, kelompok kiri dan anarkis memberontak di Catalunya dan Asturias, menyerukan pemogokan umum dan membentuk pemerintahan tandingan. Pemerintah kanan menindas pemberontakan itu dengan brutal. Kemudian pemerintah mencoba mengaitkannya dengan keselu-

ruhan oposisi Republik, bahkan sampai memenjarakan mantan Perdana Menteri Azaña (yang tak terlibat dalam pemberontakan). Spanyol terbenam dalam konflik yang makin keras di mana pertarungan di jalan, pengeboman, pembakaran gereja, pembunuhan politis, dan konspirasi kudeta menggantikan persaingan politik. Pada 1936, demokrasi Spanyol yang masih muda sudah merosot menjadi perang saudara.

Di hampir semua kasus kerusakan demokrasi yang telah kita pelajari, para calon pemimpin otoriter—dari Franco, Hitler, dan Mussolini di Eropa antara dua perang dunia, lalu Marcos, Castro, dan Pinochet selama Perang Dingin sampai Putin, Chávez, dan Erdoğan baru-baru ini—membenarkan konsolidasi kekuasaan dengan mengecap lawan mereka sebagai ancaman eksistensial.

Norma kedua yang penting bagi kelangsungan demokrasi adalah apa yang kami sebut sikap menahan diri secara kelembagaan (*institutional forbearance*). "Sikap menahan diri" berarti "pengendalian diri yang sabar; legawa dan toleran", atau "tindakan tidak menggunakan suatu hak legal". Untuk keperluan kita, sikap menahan diri secara kelembagaan bisa dianggap sebagai menghindari tindakan yang, meskipun sesuai hukum secara harfiah, jelas-jelas melanggar semangat hukum. Kalau norma menahan diri kuat, para politikus tak menggunakan seluruh hak kelembagaan mereka, bahkan bila secara teknis sah-sah saja melakukannya, karena tindakan demikian dapat mengancam sistem yang ada.

Sikap menahan diri secara kelembagaan punya asal-usul di suatu tradisi yang lebih tua daripada demokrasi itu sendiri. Pada masa ketika raja-raja menyatakan kekuasaan sebagai bersumber dari Tuhan—ketika agama menjadi dasar wewenang raja—tak ada batas legal duniawi bagi kekuasaan raja. Namun banyak raja Eropa sebelum zaman demokrasi yang bertindak menahan diri. Bagaimanapun, bersikap "ilahiah" membutuhkan kebijaksanaan dan sikap menahan diri. Ketika sosok seperti Raja Richard II, yang digambarkan sebagai tiran di satu drama sejarah Shakespeare paling terkenal, menyalahgunakan hak istimewanya sebagai raja untuk merampas dan menjarah, tindakannya tak ilegal;

sekadar melanggar kepatantasan. Namun pelanggaran itu amat besar dampaknya, karena memicu perang saudara berdarah. Seperti tokoh ciptaan Shakespeare, Carlisle, mengingatkan kepada rekannya dalam drama itu, meninggalkan sikap menahan diri berarti "Darah orang Inggris akan memupuk tanah ... dan masa depan meratapi tindakan keji itu."

Sebagaimana kerajaan berdasar agama, demokrasi juga butuh sikap menahan diri. Pikirkan demokrasi sebagai permainan yang kita ingin mainkan selama-lamanya. Untuk memastikan bahwa permainan terus berlangsung, para pemain mesti menahan diri agar tak melumpuhkan tim lawan atau memusuhi mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau main lagi besok. Bila pesaing berhenti, maka tidak ada lagi permainan pada masa depan. Artinya, walau bermain untuk menang, kita harus melakukannya dengan menahan diri. Dalam pertandingan bola basket jalanan, kita bermain agresif, tapi kita tahu bahwa kita tak boleh melanggar berlebihan—dan hanya menyatakan terjadi pelanggaran kalau dilanggar berlebihan. Bagaimanapun, kita datang ke taman untuk bermain, bukan berkelahi. Dalam politik, itu sering berarti tidak memakai trik kotor atau taktik keras demi kesantunan dan persaingan adil.

Seperti apa kelihatannya sikap menahan diri secara kelembagaan dalam demokrasi? Pikirkanlah pembentukan pemerintahan di Britania. Seperti diingatkan ahli konstitusi dan penulis Keith Whittington, pemilihan perdana menteri Britania "adalah hak raja atau ratu. Secara formal, pemegang takhta dapat memilih siapa pun untuk jabatan itu dan membentuk pemerintahan." Dalam praktiknya, perdana menteri ialah anggota Parlemen yang memimpin fraksi mayoritas di House of Commons—biasanya ketua partai terbesar di parlemen. Hari ini kita menganggap sistem itu wajar, tapi selama berabad-abad raja atau ratu Inggris mengikutinya secara sukarela. Tidak ada aturan tertulis konstitusionalnya.

Atau batas masa jabatan presiden. Selama sebagian besar sejarah Amerika Serikat, batas dua kali masa jabatan bukan hukum tertulis,

melainkan norma menahan diri. Sebelum ratifikasi Amandemen ke-21 pada 1951, tidak ada pasal dalam Konstitusi AS yang mewajibkan presiden berhenti menjabat sesudah dua masa jabatan. Namun, berhentinya George Washington sesudah dua masa jabatan pada 1797 menjadi preseden kuat. Seperti diamati Thomas Jefferson, presiden pertama yang mengikuti norma itu,

Bila penghentian masa bakti [Presiden] tak ditetapkan Konstitusi, atau dilakukan dalam praktik, maka masa jabatannya, yang semestinya empat tahun, bisa berlangsung seumur hidup.... Seharusnya saya dengan enggan menjadi orang yang memberi contoh pertama perpanjangan masa jabatan sesudah masa jabatan kedua, mengabaikan preseden baik yang diberikan seorang pendahulu terkemuka.

Sesudah ditetapkan demikian, batas informal dua masa jabatan terbukti lumayan kuat. Bahkan presiden-presiden ambisius dan populer seperti Jefferson, Andrew Jackson, dan Ulysses S. Grant tidak mau melanggarnya. Ketika teman-teman Grant mendorong dia maju lagi untuk masa jabatan ketiga, terjadi kehebohan, dan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan resolusi yang menyatakan:

Preseden yang ditetapkan Washington dan para presiden lain ... yaitu berhenti ... menjabat sesudah masa jabatan kedua telah menjadi ... suatu bagian sistem republik kita.... Penyimpangan apa pun dari kebiasaan yang dihargai selama ini kiranya tak bijak, tak patriotis, dan membahayakan lembaga-lembaga bebas kita.

Begitu juga, Partai Demokrat menolak mencalonkan Grover Cleveland untuk masa jabatan ketiga (tidak berturut-turut) pada 1892, mengingatkan bahwa pencalonan itu bakal melanggar suatu "hukum tak tertulis". Hanya pemilihan kembali FDR pada 1940-lah yang jelas-jelas melanggar norma itu—pelanggaran yang memicu pengesahan Amandemen ke-21.

Norma menahan diri amat penting di demokrasi presidensial. Se-

perti pendapat Juan Linz, pemerintahan yang terbagi bisa dengan mudah mengalami kebuntuan, disfungsi, dan krisis konstitusional. Presiden yang tak dibatasi bisa menguasai Mahkamah Agung atau melangkahi badan legislatif dengan menggunakan dekrit. Sementara badan legislatif yang tak dibatasi bisa menghentikan semua langkah presiden, mengancam mengacau negara dengan menolak mendanai pemerintah, atau mengambil suara untuk mencopot presiden karena alasan tak jelas.

Lawannya sikap menahan diri adalah memanfaatkan hak istimewa kelembagaan tanpa batas. Ahli hukum Mark Tushnet menyebutnya "main kasar konstitusional": main sesuai aturan tapi sampai menyentuh batas dan "main habis-habisan". Itu suatu bentuk pertempuran kelembagaan yang bertujuan mengalahkan secara permanen pesaing partisan—tanpa peduli apakah permainan demokrasi berlanjut atau tidak.

Presiden-presiden Argentina sudah lama menjadi pakarnya main kasar konstitusional. Pada 1940-an Presiden Juan Perón menggunakan mayoritas di kongres untuk memakzulkan tiga dari lima hakim agung, menggunakan "keuntungan maksimal" satu pasal konstitusi kurang jelas yang menyebutkan "tindakan tercela" sebagai dasar pemakzulan. Hampir setengah abad kemudian, Presiden Carlos Menem menunjukkan kesukaan memepet batas yang sama. Konstitusi 1853 Argentina tidak jelas mendefinisikan wewenang presiden untuk mengeluarkan dekrit. Sepanjang sejarah, para presiden hasil pemilu telah menggunakan wewenang itu sedikit saja, hanya ada dua puluh lima dekrit antara 1853 dan 1989. Menem tidak tanggung-tanggung, mengeluarkan 336 dekrit bahkan sebelum satu masa jabatan berakhir.

Lembaga yudikatif juga bisa digunakan untuk main kasar konstitusional. Sesudah partai-partai oposisi merebut kendali atas kongres Venezuela dalam kemenangan besar di pemilu Desember 2015, mereka berharap menggunakan badan legislatif untuk membatasi kekuasaan presiden autokrat Nicolás Maduro. Kongres baru hasil pemilu pun mengesahkan undang-undang amnesti yang bakal membebaskan 120 tahanan politik, dan mengadakan pemungutan suara untuk menolak pernyataan darurat ekonomi oleh Maduro (yang memberi dia kekuasaan

besar untuk memerintah dengan dekrit). Untuk melawan tantangan itu, Maduro beralih ke mahkamah agung, yang penuh loyalisnya. Pengadilan *chavista* secara efektif melumpuhkan badan legislatif dengan menyatakan hampir semua rancangan undang-undangnya—termasuk undang-undang amnesti, upaya merevisi anggaran negara, dan penolakan keadaan darurat—tak konstitusional. Menurut koran Kolombia *El Tiempo*, pengadilan membuat putusan yang merugikan kongres dua puluh empat kali dalam enam bulan, membatalkan "semua undang-undang yang sudah disetujui".

Badan legislatif juga bisa menggunakan hak istimewa konstitusional secara berlebihan. Misalnya pemakzulan Presiden Fernando Lugo di Paraguay pada 2012. Lugo, seorang mantan pendeta beraliran kiri, terpilih pada 2008, mengakhiri kekuasaan Partai Colorado selama enam puluh satu tahun. Lugo, orang luar dengan hanya sedikit teman di kongres, menghadapi beberapa upaya pemakzulan sepanjang masa jabatannya. Upaya-upaya itu akhirnya berhasil pada 2012, sesudah kepopuleran sang presiden terkikis dan mantan sekutunya, kelompok Liberal, meninggalkan dia. Pemicunya adalah suatu konflik kekerasan antara polisi dan petani yang menduduki tanah, yang menewaskan tujuh belas orang. Walau kekerasan serupa sudah pernah terjadi dalam pemerintahan-pemerintahan terdahulu, oposisi menggunakan insiden itu untuk menurunkan Lugo. Pada 21 Juni, enam hari sesudah pembunuhan-pembunuhan terjadi, dewan perwakilan rakyat Paraguay mengadakan pemungutan suara untuk memakzulkan Lugo dengan alasan "tak becus melaksanakan pekerjaan". Satu hari kemudian, sesudah sidang terburu-buru di mana sang presiden hanya punya dua jam untuk membela diri, Lugo dicopot dari jabatannya oleh senat. Menurut seorang pengamat, sidang itu "jelas-jelas konyol.... Pemakzulan Lugo bahkan tidak pantas disebut sidang akal-akalan." Namun, secara teknis sidang itu legal.

Sesuatu yang serupa terjadi di Ekuador pada 1990-an. Presiden Abdalá Bucaram ialah seorang populis yang meraih kursi kepresidenan dengan menyerang kalangan mapan politik Ekuador. Bucaram yang berjulukan

El Loco atau "Si Gila" menyukai kontroversi, sehingga menguji kesabaran lawan-lawannya. Pada bulan-bulan pertama menjabat, dia terlibat apa yang dipandang banyak orang sebagai nepotisme terang-terangan, menyebut mantan Presiden Rodrigo Borja "keledai", dan mengedarkan susu bersubsidi yang berlabel namanya. Walau menghebohkan, semua itu jelas belum layak jadi alasan pemakzulan. Meski demikian, upaya-upaya memakzulkan Bucaram dimulai dalam hitungan minggu sesudah dia dilantik. Ketika mulai jelas bahwa oposisi tidak punya dukungan dua pertiga suara yang diperlukan untuk pemakzulan, ditemukanlah satu alternatif meragukan tapi konstitusional: Konstitusi 1979 Ekuador memperkenankan mayoritas legislatif sederhana (sekadar melebihi setengah) untuk mencopot presiden dengan alasan "ketidakmampuan mental". Pada 6 Februari 1997 kongres Ekuador melakukan itu. Dalam suatu pelanggaran terang-terangan atas semangat konstitusi, kongres memungut suara untuk mencopot Bucaram tanpa memperdebatkan apakah Bucaram benar-benar tak mampu secara mental.

Amerika Serikat juga pernah mengalami main kasar konstitusional. Seperti telah kita perhatikan, sesudah Amandemen ke-14 dan ke-15 secara formal menetapkan hak suara universal bagi semua laki-laki, badan legislatif yang dikuasai Demokrat di AS Selatan menemukan cara-cara baru untuk menghilangkan hak suara orang Afrika-Amerika. Sebagian besar pajak suara dan tes baca tulis yang baru dianggap tak melanggar konstitusi, tapi jelas dirancang untuk melanggar semangatnya. Seperti dinyatakan anggota legislatif negara bagian Alabama Anthony D. Sayre ketika mengajukannya, rancangan undang-undang itu bakal "menyingkirkan Negro dari politik, secara sepenuhnya legal."

Sikap saling toleransi dan menahan diri secara kelembagaan berhubungan erat. Kadang keduanya saling memperkuat. Para politikus lebih besar kemungkinannya menahan diri bila menerima sesamanya sebagai pesaing yang sah, dan politikus yang tak memandang pesaingnya sebagai pelaku makar akan tidak tergoda menggunakan pelanggaran norma untuk mencegah pesaingnya berkuasa. Tindakan menahan diri—con-

tohnya, Senat yang dikendalikan Republik menyetujui hakim agung pilihan presiden dari Demokrat—akan memperkuat keyakinan tiap partai bahwa pihak lainnya bisa ditoleransi, mendukung rasa saling percaya.

Namun, yang sebaliknya bisa terjadi juga. Terkikisnya rasa saling toleransi bisa memotivasi para politikus untuk menggunakan kekuasaan kelembagaan seluas-luasnya. Ketika partai-partai memandang lawannya sebagai musuh bebuyutan, yang dipertaruhkan dalam persaingan politik jadi naik secara dramatis. Kekalahan tidak lagi menjadi bagian rutin yang bisa diterima dalam proses politik, dan justru menjadi bencana besar. Ketika biaya kekalahan dianggap cukup tinggi, para politikus akan tergoda meninggalkan sikap menahan diri. Tindakan main kasar konstitusional bisa merusak saling toleransi lebih lanjut, memperkuat kepercayaan bahwa pesaing kita merupakan ancaman berbahaya.

Hasilnya adalah politik tanpa pagar—apa yang disebut ahli ilmu politik Eric Nelson sebagai “lingkaran saling dorong konstitusional yang tereskalasi”. Seperti apa kelihatannya politik macam itu? Nelson menawarkan satu contoh: ambruknya pemerintahan Raja Charles I di Inggris pada 1640-an. Konflik agama antara Takhta, Gereja Inggris, dan kaum Puritan di Parlemen mengarah ke saling tuduh sesat dan makar, dan kerusakan norma-norma yang telah menopang takhta Inggris. Tradisi konstitusi Inggris memberi hak eksklusif kepada Parlemen untuk menarik pajak yang dibutuhkan guna membiayai pemerintahan. Namun Parlemen, yang memandang Charles kelewat dekat dengan Kepausan, tidak mau membiayai kerajaan kalau kerajaan tak memenuhi beberapa tuntutan mereka yang berakibat jauh, termasuk pembubaran (praktis) Gereja Inggris. Parlemen bersikukuh dengan sikap itu bahkan sesudah Inggris diserbu oleh Skotlandia dan sangat membutuhkan uang untuk pertahanan negara. Charles menanggapi pelanggaran norma itu dengan pelanggaran norma juga: Dia membubarkan Parlemen dan memerintah tanpa Parlemen selama sebelas tahun. Seperti diamati Nelson, “Tak pernah sekali pun ... Charles mengklaim hak membuat hukum tanpa parlemen.” Dia justru “hanya mencoba melanjutkan memerintah tanpa

membuat hukum baru.” Akhirnya kebutuhan uang membuat Charles melangkahi monopoli pajak Parlemen, sehingga lawan-lawannya yang kesal makin ngotot ketika Parlemen dibentuk lagi pada 1640. Nelson menyimpulkan, “Lingkaran hadangan legislatif dan tindakan terlalu jauh raja berlanjut sampai hanya bisa diselesaikan dengan perang.” Perang saudara yang kemudian terjadi akhirnya melucuti takhta Inggris dan memakan korban jiwa Charles sendiri.

Beberapa kerusakan demokrasi paling tragis dalam sejarah didahului rusaknya norma-norma dasar. Satu contoh bisa ditemukan di Chile. Sebelum kudeta 1973, Chile merupakan negara demokrasi tertua dan tersukses di Amerika Latin, yang ditopang norma-norma demokrasi sehat. Walau partai-partai politik di Chile berkisar dari kiri Marxis sampai kanan reaksioner, suatu “budaya kompromi” mewarnai sebagian besar abad ke-20 di sana. Seperti dinyatakan reporter Pamela Constable dan ahli ilmu politik, Chile Arturo Valenzuela:

Tradisi taat hukum yang kuat di Chile menjaga persaingan tetap dibatasi aturan dan ritual, melunakkan permusuhan antarkelas dan konflik ideologi. Dikatakan bahwa tidak ada pertengkaran yang tak dapat diselesaikan sambil bersama-sama minum sebotol anggur cabernet Chile.

Namun sejak 1960-an budaya kompromi Chile didesak oleh polarisasi Perang Dingin. Beberapa orang di sayap kiri, terilhami Revolusi Kuba, mulai mengabaikan tradisi saling beri saling terima politis negara itu, menganggapnya tindakan borjuis yang tak sesuai zaman. Banyak orang di sayap kanan mulai takut kalau-kalau koalisi Unidad Popular (Uni Rakyat) kiri meraih kekuasaan, Chile bakal diubah menjadi seperti Kuba. Pada pemilu 1970, ketegangan itu mencapai ekstrem. Calon Uni Rakyat, Salvador Allende, menghadapi apa yang disebut pesaingnya dari Partai Demokrat Kristen, Radomiro Tomic, sebagai “kampanye kebencian raksasa” di media yang “secara sistematis membangun rasa takut” di kalangan kanan.

Allende menang, dan walau dia berkomitmen ke demokrasi, kepre-

sidenannya membuat kelompok konservatif panik. Partai Tanah Air & Kemerdekaan ekstrem kanan menuntut Allende dicopot dari jabatan presiden dengan cara apa pun, dan Partai Nasional sayap kanan yang didanai CIA melakukan taktik main kasar sebelum Allende disumpah. Konstitusi Chile menyatakan bahwa apabila tidak ada calon presiden yang meraih sekurang-kurangnya 50 persen suara, maka pemilihan umum bakal diputuskan hasilnya oleh kongres; Allende hanya meraih 36 persen. Walau norma yang berlaku mengharuskan kongres memilih calon dengan suara terbanyak, tidak ada aturan tertulis yang mewajibkannya. Partai Nasional meninggalkan sikap menahan diri dan mencoba membujuk Partai Demokrat Kristen untuk mendukung calonnya, Jorge Alessandri, yang meraih peringkat kedua. Partai Demokrat Kristen menolak, tapi sebagai ganti suara mereka, mereka memaksa Allende menandatangani Statuta Jaminan konstitusional yang mewajibkan presiden menghormati pemilu bebas dan kebebasan sipil seperti kebebasan pers. Tuntutan itu cukup masuk akal, tapi seperti diamati Arturo Valenzuela, tuntutan itu "menandai kerusakan rasa saling percaya" antarpemimpin "yang tadinya menghormati aturan main secara tersirat."

Selama masa kepresidenan Allende, erosi norma demokrasi terus terjadi. Tanpa mayoritas di legislatif, pemerintahannya tak mampu menerapkan program sosialis secara utuh. Jadi, Allende mengeksploitasi kekuasaan presidensial, mengancam akan mengesahkan hukum melalui referendum nasional bila kongres menolak, dan menggunakan "celah hukum" untuk mengusung program di samping badan legislatif. Oposisi membalas. Dalam satu pidato di suatu pertemuan sosial pada bulan kedua masa jabatan Allende, senator sayap kanan Raúl Morales memetakan apa yang dia sebut strategi "skak mat kelembagaan". Walau oposisi tak menguasai dua pertiga suara senat yang dibutuhkan untuk memakzulkan Allende, mayoritas senat dapat mencopot menteri lewat pemungutan suara untuk menyatakan ketidaksetujuan. Cara itu sudah tertulis sejak 1833, dirancang untuk digunakan hanya dalam keadaan luar biasa, dan jarang dipakai sebelum 1970. Namun, cara itu kemudian

dijadikan senjata. Pada Januari 1972, senat mencopot Menteri Dalam Negeri José Tohá, seorang sekutu dekat Allende. Allende menanggapi dengan mengangkat kembali Tohá ke kabinet sebagai menteri pertahanan.

Permusuhan partisan menguat sepanjang masa kepresidenan Allende. Sekutu kirinya menjabarkan lawan sebagai fasis dan "musuh rakyat", sementara kelompok kanan menyebut pemerintah sebagai totaliter. Saling tak toleran yang membesar merusak upaya Allende dan Partai Demokrat Kristen berunding: Sekutu-sekutu radikal Allende memandang negosiasi seperti itu sebagai "membuka pintu fasisme" sementara kelompok-kelompok sayap kanan mengkritik Partai Demokrat Kristen karena tak menolak ancaman komunis. Untuk mengesahkan undang-undang, pemerintah membutuhkan dukungan Partai Demokrat Kristen, namun pada awal 1973 Partai Demokrat Kristen telah memutuskan untuk "tak membiarkan Allende mencetak gol satu pun," sebagaimana kata pemimpin partai itu, Patricio Aylwin.

Polarisasi bisa menghancurkan norma demokrasi. Ketika perbedaan sosial-ekonomi, rasial, atau agama memunculkan sikap partisan ekstrem, sehingga masyarakat terbagi-bagi menjadi kubu-kubu politik yang pandangan dunianya bukan hanya berbeda-beda melainkan saling eksklusif, toleransi menjadi makin sulit dipelihara. Polarisasi sampai batas tertentu itu sehat—bahkan diperlukan—untuk demokrasi. Dan memang, pengalaman sejarah demokrasi di Eropa Barat menunjukkan kepada kita bahwa norma-norma bisa dipertahankan biarpun partai-partai dipisahkan oleh perbedaan ideologi yang cukup besar. Namun, ketika masyarakat menjadi terpecah-belah begitu tajam sehingga partai-partai jadi terikat ke pandangan dunia yang tak saling cocok, terutama ketika anggota-anggota partai terpisah secara sosial dan jarang berinteraksi dengan orang lain partai, persaingan partisan yang stabil akhirnya kalah oleh pandangan bahwa pihak lain adalah ancaman. Selagi saling toleransi hilang, para politikus makin tergoda untuk tidak lagi menahan diri dan mencoba menang dengan segala cara. Boleh jadi itu mendorong kebangkitan kelompok-kelompok antisistem yang menolak aturan demokrasi sekalian. Kalau itu terjadi, demokrasi bermasalah.

Politik tanpa pagar mematikan demokrasi Chile. Pemerintah dan oposisi sama-sama memandang pemilihan umum legislatif Maret 1973 sebagai kesempatan menang pertarungan untuk seterusnya. Allende membutuhkan mayoritas di kongres untuk menerapkan program-program sosialisnya secara legal, sedangkan oposisi mengusahakan mendapat mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk "penggulingan konstitusional" Allende melalui pemakzulan. Namun, kedua pihak tak mencapai mayoritas yang diinginkan. Karena tak bisa mengalahkan lawan secara permanen dan tak mau berkompromi, partai-partai Chile melempar demokrasi ke dalam spiral maut. Orang-orang garis keras mengambil alih Partai Demokrat Kristen, bersumpah akan menggunakan segala cara untuk menghalangi apa yang dijabarkan mantan presiden Eduardo Frei sebagai upaya Allende "menerapkan totaliterianisme di Chile". Dan usaha Allende mengadakan kembali dialog dengan oposisi digagalkan sekutu-sekutunya sendiri, yang menyerukan kepada dia agar menolak "segala dialog dengan partai-partai reaksioner" dan justru membubarkan kongres. Allende menolak, tapi dia ingin menenangkan sekutu-sekutunya dengan makin menekan lawan. Ketika pihak berwenang yudikatif menghalangi perampasan empat puluh perusahaan oleh pekerja yang beraksi mogok, Allende menanggapi dengan "dekrit paksaan" yang meragukan secara konstitusional, yang pada gilirannya memicu seruan pemakzulan dari oposisi. Seorang senator sayap kanan menyatakan di televisi nasional bahwa Allende telah menjadi "seorang kepala negara tanpa legitimasi", dan pada Agustus 1973, Dewan Perwakilan Rakyat Chile mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa pemerintah tak konstitusional.

Tak sampai sebulan kemudian, militer merebut kekuasaan. Rakyat Chile, yang sejak lama berbangga karena memiliki demokrasi paling stabil di Amerika Selatan, terjerumus dalam kediktatoran. Para jenderal menguasai Chile selama tujuh belas tahun sesudahnya.

6

Aturan-Aturan Tak Tertulis Politik Amerika

Pada 4 Maret 1933, selagi keluarga-keluarga Amerika berkumpul di sekitar radio mereka selama hari-hari paling gelap Depresi Besar untuk mendengarkan pidato pertama Franklin D. Roosevelt, mereka mendengar suaranya yang tegas dan menggelegar menyatakan, "Saya akan meminta Kongres memberi satu-satunya alat yang tersisa untuk mengatasi krisis: kekuasaan eksekutif luas untuk berperang melawan keadaan darurat, sebesar kekuasaan yang bakal diberikan kepada saya bila kita sedang diserang musuh asing." Roosevelt sedang menyebutkan kekuasaan paling terbuka yang ditawarkan Konstitusi kepadanya sebagai presiden—kekuasaan dalam perang—untuk menghadapi krisis *dalam negeri*.

Roosevelt memutuskan bahwa itu pun belum cukup. Pada November 1936, dia terpilih kembali dengan 61 persen suara—mandat presidensial terbesar dari rakyat sepanjang sejarah Amerika. Namun dia mendapati agenda kebijakan ambisiusnya dikekang satu sumber tak terduga: Mahkamah Agung konservatif (dan menurut dia, berpandangan ke belakang)—suatu badan yang terdiri sepenuhnya atas orang-orang yang belajar hukum pada abad ke-19. Mahkamah Agung tak pernah aktif menghalangi legislasi seperti pada 1935 dan 1936. Mahkamah Agung mendapati banyak bagian program New Deal tak konstitusional, sering kali secara meragukan. Agenda Roosevelt terancam.

Jadi pada Februari 1937, dua minggu sesudah memulai masa jabatan kedua, Roosevelt mengajukan usul untuk memperbesar Mahkamah Agung. "Skema perebut pengadilan", demikian sebutan dari para lawannya, memanfaatkan satu celah di Konstitusi: Pasal III tak menyebutkan jumlah hakim di Mahkamah Agung. Usul Roosevelt bakal memungkinkan dia menambah satu hakim ke Mahkamah Agung apabila ada hakim agung yang sudah berumur di atas tujuh puluh tahun, dengan jumlah maksimal lima belas. Karena ada enam hakim agung berumur tujuh puluh tahun ke atas, maka Roosevelt bakal bisa mengangkat enam hakim secara langsung. Motivasi sang presiden bisa dimengerti—dia mencari dasar hukum yang lebih aman untuk mencapai tujuan New Deal. Namun andai usulnya diterima, itu bakal menjadi preseden berbahaya. Mahkamah Agung bakal jadi amat politis, karena keanggotaan, ukuran, dan aturan pemilihannya terbuka untuk manipulasi terus-menerus, tak beda dengan Argentina di bawah Perón atau Venezuela di bawah Chávez. Andai Roosevelt berhasil mengesahkan usulnya untuk lembaga yudikatif, satu norma penting—bahwa presiden seharusnya tidak merusak cabang pemerintahan lain—bakal hancur.

Namun norma itu bertahan. Rencana Roosevelt untuk Mahkamah Agung menghadapi perlawanan lebih besar daripada segala inisiatif lain yang diajukan sepanjang masa kepresidenannya. Usul itu ditentang bukan hanya oleh Partai Republik, melainkan juga oleh pers, pengacara dan hakim terkemuka, dan banyak anggota Partai Demokrat juga. Dalam hitungan bulan, usul itu mati—dimatikan Kongres yang didominasi partai Roosevelt sendiri. Bahkan di tengah krisis sebesar Depresi Besar, sistem pengawasan dan perimbangan terus bekerja.

Republik Amerika Serikat tak lahir dengan norma-norma demokrasi kuat. Malah, tahun-tahun pertamanya adalah kasus khas politik tanpa pagar. Seperti telah kita lihat, norma saling toleransi masih amat baru pada 1780-an dan 1790-an: bukannya saling menerima sebagai pesaing sah, kelompok Federalis dan Republik awalnya saling curiga, menganggap lawannya pengkhianat.

Iklim permusuhan partisan dan saling tak percaya mendorong apa yang sekarang kita sebut main kasar konstitusional. Pada 1798, kelompok Federalis mengesahkan Sedition Act, yang meskipun katanya mengkriminalkan pernyataan fitnah terhadap pemerintah, isinya begitu tak jelas sehingga boleh dikata mengkriminalkan kritik terhadap pemerintah. Undang-undang itu digunakan untuk mengincar koran dan aktivis Partai Republik. Pada pemilihan umum 1800, yang menghadapkan Presiden Adams dari Federalis melawan Jefferson, pemimpin oposisi Republik, masing-masing kubu mengincar kemenangan permanen—membubarkan partai lawan untuk seterusnya. Pemimpin Federalis Alexander Hamilton berbicara mengenai pencarian suatu "langkah legal dan konstitusional" untuk menghalangi langkah Jefferson menuju kursi presiden, sementara Jefferson menyebut pemilu sebagai kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Amerika dari kerajaan. Kemenangan Jefferson tidak mengakhiri permusuhan partisan intens. Kongres Federalis yang lemah memperkecil jumlah hakim Mahkamah Agung dari enam menjadi lima untuk membatasi pengaruh Jefferson terhadap Mahkamah Agung. Dengan mayoritas barunya, Kongres Republik membatalkan langkah itu, dan beberapa tahun kemudian memperbesar jumlah hakim agung jadi tujuh untuk memberi kesempatan Jefferson menunjuk seorang hakim lagi.

Butuh beberapa puluh tahun sampai usaha keras meraih kemenangan permanen itu reda. Tuntutan politik sehari-hari dan kehadiran generasi baru politikus karier membantu menurunkan tingkat persiangan. Generasi pasca-Revolusi jadi terbiasa dengan gagasan bahwa kita kadang menang dan kadang kalah dalam politik—dan bahwa pesaing tidak harus jadi musuh. Yang khas memegang pandangan itu ialah Martin van Buren, seorang pendiri Partai Demokrat modern dan belakangan menjadi presiden AS. Menurut Richard Hofstadter, van Buren

melambangkan semangat pengacara di pengadilan tingkat *county* yang ramah yang diterjemahkan ke dalam politik, pengacara yang boleh jadi selama bertahun-tahun terlibat duel panas di ruang sidang dengan lawan, namun di luar ruang sidang saling menghormati, dan sering kali bersahabat akrab, dengan sesama profesional.

Walau van Buren punya "banyak lawan" sepanjang kariernya, seorang penulis biografi menulis bahwa dia punya "sedikit musuh". Sementara para pendiri AS menerima oposisi partisan dengan berat hati, generasi van Buren menganggapnya wajar. Politik oposisi total telah menjadi politik saling toleransi.

Namun norma-norma baru Amerika segera buyar karena satu perkara yang para pendiri telah coba redam: perbudakan. Selama 1850-an, suatu konflik yang makin lama makin terbuka mengenai masa depan perbudakan memecah-belah negara, memberi apa yang satu ahli sejarah sebut "intensitas emosional" baru dalam politik. Bagi para pemilik kebun kulit putih di AS selatan dan sekutu mereka di Partai Demokrat, abolisionisme—satu perjuangan yang dikaitkan dengan Partai Republik baru—menjadi ancaman eksistensi. Senator South Carolina John C. Calhoun, salah seorang pembela perbudakan yang paling berpengaruh, menjabarkan AS Selatan pasca-emansipasi seolah kiamat, di mana para mantan budak bakal

naik di atas orang kulit putih ... dalam skala politik dan sosial. Boleh dikata kita akan bertukar keadaan dengan mereka—suatu kemosotan yang lebih besar daripada yang pernah terjadi pada suatu bangsa merdeka dan tercerahkan, dan tak dapat kita hindari ... selain dengan pergi dari rumah kita dan leluhur kita, dan meninggalkan negara kita di tangan mantan budak kita, sehingga menjadi tempat yang penuh ketidakteraturan, anarki, kemiskinan, kesengsaraan, dan keburukan.

Polarisasi karena perbudakan merusak norma saling toleransi yang masih rapuh di Amerika. Wakil Demokrat Henry Shaw menyerang Partai Republik yang dia anggap "pengkhianat Konstitusi dan Serikat" sementara senator Georgia Robert Toombs bersumpah "tak akan membiarkan pemerintah federal jatuh ke tangan khianat Partai Republik Hitam." Sementara itu para politikus anti-perbudakan menuduh politikus properbudakan "pelaku makar" dan "penghasut".

Erosi norma-norma dasar memperlebar kisaran tindakan politik

yang bisa diterima. Beberapa tahun sebelum tembak-menembak dimulai di Fort Sumter, kekerasan partisan melanda Kongres. Ahli sejarah Yale Joanne Freeman memperkirakan ada 125 insiden kekerasan—termasuk penusukan, pemukulan dengan tongkat, dan aksi cabut pistol—di DPR dan Senat AS antara 1830 dan 1860. Tak lama kemudian orang Amerika Serikat saling bunuh, dengan korban mencapai ratusan ribu.

Perang Saudara merusak demokrasi Amerika Serikat. Seperti dari semua negara bagian Amerika Serikat tak ikut pemilihan umum 1864; dua puluh dua dari lima puluh kursi Senat dan lebih dari seperempat kursi DPR dikosongkan. Presiden Lincoln menghapuskan *habeas corpus* (hak orang mempertanyakan penahanan terhadapnya) dan mengeluarkan beberapa perintah eksekutif yang meragukan secara konstitusional, walau memang salah satunya membebaskan para budak. Dan sesudah kemenangan Serikat (Utara), sebagian besar Konfederasi (Selatan) berada di bawah kekuasaan militer.

Trauma Perang Saudara membuat orang Amerika Serikat bertanya-tanya mengenai apa yang salah. Kehancuran yang terjadi—juga 600.000 lebih korban tewas—memupus kepercayaan banyak intelektual utara terhadap keunggulan bentuk demokrasi mereka. Apakah Konstitusi AS bukan dokumen yang terinspirasi ilahi sebagaimana dikira? Gelombang mawas diri itu memunculkan ketertarikan baru terhadap aturan-aturan tak tertulis. Pada 1885, profesor ilmu politik Woodrow Wilson, putra keluarga Konfederasi selatan, menerbitkan buku mengenai Kongres yang mempelajari kesenjangan antara janji tatanan konstitusional dan cara lembaga-lembaga sebenarnya bekerja. Selain hukum yang baik, Amerika Serikat butuh norma efektif.

Membangun kembali norma-norma demokrasi sesudah perang saudara itu tak pernah gampang, termasuk di Amerika. Luka perang sembuh dengan lambat; Partai Demokrat dan Republik hanya mengakui satu sama lain sebagai pesaing sah dengan berat hati. Di satu acara kampanye tahun 1876 untuk calon presiden Partai Republik Rutherford B. Hayes, politikus Robert Ingersoll berbicara mengecam Partai Demokrat dengan pedas:

Semua orang yang mencoba menghancurkan negara ini adalah orang Partai Demokrat. Setiap musuh Republik yang besar ini selama dua puluh tahun adalah orang Demokrat.... Semua orang yang tidak memberikan bahkan sisa-sisa makanan yang sudah dimakan cacing kepada tahanan Serikat, dan ketika seorang patriot Serikat yang malang dan kurus dan hampir gila karena kelaparan memandang wajah ibunya dalam mimpi gila, lalu ibunya memanggil dan dia menghampiri, berharap mendapat ciuman ibu sekali lagi di wajahnya yang demam, dan ketika dia melangkah melewati garis kematian, keparat yang menembakkan peluru menembus jantungnya yang berdenyut dan penuh cinta dulu—dan sekarang—adalah seorang Demokrat.

Retorika semacam itu, dikenal sebagai "mengibarkan baju berdarah", bertahan bertahun-tahun.

Karena permusuhan partisan berlanjut, terjadilah main keras konstitusional. Pada 1866, Kongres yang dikuasai Partai Republik mengurangi jumlah hakim di Mahkamah Agung dari sepuluh ke tujuh untuk mencegah Presiden Andrew Johnson dari Partai Demokrat—yang dipandang oleh Partai Republik akan menunggangi Rekonstruksi—menunjuk hakim agung, dan setahun kemudian Kongres mengesahkan *Tenure of Office Act*, yang melarang Johnson mencopot anggota-anggota kabinet Lincoln tanpa persetujuan Senat. Johnson memandang undang-undang itu sebagai pelanggaran atas wewenang konstitusionalnya dan mengabaikannya—suatu "tindakan tak pantas tingkat tinggi" yang menyebabkan dia dimakzulkan pada 1868.

Namun pelan-pelan, selagi generasi Perang Saudara mulai berlalu, orang-orang Partai Demokrat dan Republik mulai belajar hidup bersama. Mereka mengindahkan kata-kata mantan Ketua DPR James Blaine, yang pada 1880 menasihati sesama anggota Partai Republik untuk "melipat baju berdarah" dan menggeser perdebatan ke masalah-masalah ekonomi.

Bukan hanya waktu yang menyembuhkan luka partisan. Saling toleransi baru hadir sesudah persoalan kesetaraan ras dihilangkan dari agenda politik. Ada dua peristiwa penting yang terkait. Yang pertama

adalah Kompromi 1877 yang terkenal, yang mengakhiri perselisihan akibat pemilihan presiden 1876 dan mengangkat Rutherford B. Hayes dari Partai Republik sebagai presiden dengan ganti janji menarik pasukan federal dari AS Selatan. Perjanjian itu secara efektif mengakhiri Rekonstruksi, karena menghilangkan perlindungan federal yang telah diperjuangkan untuk orang Afrika-Amerika, serta memperkenankan orang-orang Partai Demokrat selatan untuk menghapuskan hak-hak asasi demokrasi dan melakukan konsolidasi kekuasaan partai tunggal. Peristiwa kedua adalah kegagalan Federal Elections Bill 1890 yang diajukan Henry Cabot Lodge, yang bakal memperkenankan pengawasan federal atas pemilihan anggota kongres untuk memastikan terjaminnya hak suara orang kulit hitam. Kegagalan usul itu mengakhiri upaya federal melindungi hak suara orang Afrika-Amerika di Selatan, sehingga menyebabkan kekalahan mereka.

Sukar mengecilkan makna tragis peristiwa-peristiwa itu. Karena hak sipil dan hak suara dianggap sebagai ancaman mendasar oleh banyak orang Partai Demokrat di AS Selatan, maka kesepakatan partai-partai untuk meninggalkan perkara-perkara itu memberi dasar untuk memulihkan saling toleransi. Pencabutan hak suara orang Afrika-Amerika memelihara supremasi kulit putih dan dominasi Partai Demokrat di Selatan, yang membantu mempertahankan kelangsungan hidup Partai Demokrat di tingkat nasional. Dengan hilangnya kesetaraan ras dari agenda, rasa takut Partai Demokrat di Selatan reda. Barulah permusuhan partisan melunak. Maka anehnya, norma-norma yang belakangan menjadi dasar demokrasi Amerika muncul dari tatanan yang amat tak demokratis: peminggiran rasial dan konsolidasi kekuasaan partai tunggal di Selatan.

Sesudah Partai Demokrat dan Partai Republik saling menerima sebagai pesaing sah, polarisasi pelan-pelan mereda, menghasilkan jenis politik yang khas demokrasi Amerika selama puluhan tahun berikutnya. Kerja sama bipartisan memungkinkan serangkaian reformasi penting, termasuk Amendemen ke-16 (1913) yang memperkenankan pajak penghasilan federal, Amendemen ke-17 (1913) yang menetapkan pemi-

lihan langsung senator AS, dan Amendemen ke-19 (1919) yang memberi hak suara kepada perempuan.

Sikap saling toleransi pada gilirannya mendorong sikap menahan diri. Pada akhir abad ke-19, konvensi informal atau pencarian jalan pintas sudah mulai melanda semua cabang pemerintahan, memungkinkan sistem pengawasan dan perimbangan Amerika Serikat berfungsi cukup baik. Pentingnya norma-norma itu juga tidak luput dari pengamatan orang luar. Di mahakarya dua jilidnya, *The American Commonwealth* (1888), cendekiawan Britania James Bryce menulis bahwa bukan Konstitusi AS yang membuat sistem politik Amerika bekerja, melainkan apa yang dia sebut "praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan" (*usages*): aturan-aturan tak tertulis.

Pada peralihan menuju abad ke-20, norma-norma saling toleransi dan sikap menahan diri secara kelembagaan sudah mapan. Keduanya menjadi dasar sistem pengawasan dan perimbangan AS yang dikagumi. Agar sistem konstitusional AS berfungsi seperti yang diharapkan, cabang eksekutif, Kongres, dan yudikatif harus menjaga suatu keseimbangan yang rapuh. Di satu sisi, Kongres dan pengadilan harus mengawasi dan kalau perlu membatasi kekuasaan presiden. Mereka mesti menjadi penjaga demokrasi. Di sisi lain, Kongres dan pengadilan harus memperkenankan pemerintah bekerja. Di situlah sikap menahan diri berperan. Agar demokrasi presidensial bisa berhasil, lembaga-lembaga yang cukup kuat untuk menghalangi presiden mesti secara rutin tidak menggunakan seluruh kekuasaannya.

Tanpa norma-norma itu, keseimbangan lebih sukar dipertahankan. Ketika kebencian partisan mengalahkan komitmen politikus terhadap Konstitusi, sistem pengawasan dan perimbangan berisiko dibajak dengan dua cara. Di bawah pemerintahan yang terbelah, ketika lembaga legislatif atau yudikatif ada di tangan oposisi, risikonya adalah main kasar konstitusional, di mana oposisi menggunakan hak-hak istimewa kelembagaannya sejauh mungkin—menghilangkan pendanaan pemerintah, menolak semua hakim yang ditunjuk pemerintah, barangkali

bahkan mengadakan pemungutan suara untuk mencopot presiden. Dalam skenario demikian, "anjing penjaga" legislatif dan yudikatif menjadi anjing penyerang partisan.

Di bawah pemerintahan yang bersatu, di mana lembaga legislatif dan yudikatif ada di tangan partainya presiden, risikonya bukan konfrontasi melainkan penyerahan kekuasaan. Bila permusuhan partisan melebihi saling toleransi, maka yang mengendalikan lembaga legislatif bisa mengutamakan pembelaan terhadap presiden ketimbang pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. Dalam upaya mencegah kemenangan oposisi, mereka bisa mengabaikan peran pengawasan, memungkinkan presiden melakukan tindakan penyalahgunaan, ilegal, bahkan otoriter tanpa tercegah. Transformasi anjing penjaga menjadi anjing piaraan—pikirkanlah kongres yang patuh ke Perón di Argentina atau mahkamah agung *chavista* di Venezuela—bisa menjadi pendukung kekuasaan otoriter.

Oleh karena itu, sistem pengawasan dan perimbangan Amerika mewajibkan pejabat publik menggunakan hak istimewa kelembagaan secara bijak. Presiden AS, pemimpin kongres, dan hakim agung punya sejumlah kekuasaan yang bila digunakan tanpa batas dapat merusak sistem. Pertimbangkan enam kekuasaan berikut. Tiga tersedia bagi presiden: perintah eksekutif, amnesti presiden, dan penunjukan hakim. Tiga lagi tersedia bagi Kongres: *filibuster* (berbicara/berdebat panjang lebar untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang), kekuasaan untuk memberi nasihat dan persetujuan, dan pemakzulan. Baik hak-hak istimewa itu ditulis secara resmi dalam Konstitusi maupun sekadar diperkenankan oleh Konstitusi, penggunaannya sebagai senjata dapat menyebabkan kebuntuan, disfungsi, bahkan kerusakan demokratis. Namun selama sebagian besar abad ke-20, para politikus Amerika menggunakan semuanya dengan sikap menahan diri yang luar biasa.

Kita mulai dengan kekuasaan presidensial. Kepresiden Amerika Serikat adalah lembaga yang kuat dan berpotensi dominan, sebagian karena celah-celah di Konstitusi. Pasal II Konstitusi AS, yang menyatakan ke-

kuasaan formal kepresidenan, tidak jelas menetapkan batasnya. Pasal itu tak berkata apa-apa mengenai wewenang presiden untuk bertindak sepihak melalui perintah eksekutif atau dekrit. Selain itu, kekuasaan presiden sudah membesar selama abad kemarin. Didorong kebutuhan karena perang dan depresi ekonomi, cabang eksekutif telah membangun kapasitas legal, administratif, anggaran, intelijen, dan perang yang luas, sehingga berubah menjadi apa yang disebut ahli sejarah Arthur M. Schlesinger, Jr. sebagai "Kepresidenan Imperial" (*Imperial Presidency*). Presiden-presiden AS sesudah Perang Dunia II mengendalikan kekuatan militer terbesar di dunia. Dan tantangan memerintah negara adidaya global dengan ekonomi dan masyarakat industrial kompleks menimbulkan tuntutan aksi eksekutif terkonsentrasi yang terus membesar. Pada awal abad ke-21, sumber daya administratif di tangan eksekutif amatlah besar sehingga ahli hukum Bruce Ackerman menjabarkan kepresidenan sebagai "alat pendobrak konstitusional".

Besarnya kekuasaan cabang eksekutif menciptakan godaan bagi presiden untuk berkuasa secara sepihak—menghindari Kongres dan lembaga yudikatif. Para presiden yang agendanya dihadang bisa melangkahi badan legislatif dengan mengeluarkan perintah eksekutif, proklamasi, direktif, persetujuan eksekutif, atau memorandum presiden, yang bisa menjadi setara undang-undang tanpa persetujuan Kongres. Konstitusi AS tak melarang tindakan demikian.

Presiden Amerika Serikat juga bisa melangkahi badan yudikatif, baik dengan menolak mematuhi putusan pengadilan, seperti dilakukan Lincoln ketika Mahkamah Agung menolak keputusannya mencabut *habeas corpus*, maupun dengan menggunakan hak amnesti presiden. Alexander Hamilton berpendapat di Federalist 74 bahwa karena kekuasaan amnesti presiden sangat luas, maka kekuasaan itu kiranya "secara alami memicu kebijaksanaan dan kehati-hatian." Namun, di tangan presiden yang tak bijaksana dan tak hati-hati, amnesti bisa digunakan untuk melindungi pemerintah dari pengawasan yudikatif. Presiden bahkan bisa mengampuni dirinya sendiri. Tindakan seperti itu, walau konstitusional, bakal merusak independensi yudikatif.

Mengingat besarnya potensi tindakan sepihak, yang hampir semuanya dinyatakan atau diperbolehkan Konstitusi, pentingnya sikap menahan diri eksekutif tak bisa diremehkan. George Washington adalah tokoh penting yang menetapkan preseden dalam hal ini. Washington tahu bahwa tindakannya sebagai presiden bakal membantu menetapkan kisaran wewenang eksekutif pada masa depan; seperti dia katakan, "Saya berjalan di tanah yang belum diinjak. Hampir tak ada tindakan saya yang sesudah ini tidak akan dianggap preseden." Sebagai pemegang jabatan yang dikhawatirkan banyak orang bakal menjadi suatu bentuk monarki baru, Washington bekerja keras untuk menetapkan norma-norma dan praktik-praktik yang bakal melengkapi—dan memperkuat—aturan-aturan konstitusional. Dengan giat dia membela wilayah kewenangannya yang sudah ditetapkan, tapi dia juga berhati-hati agar tak melewati batas dan masuk ke wilayah kekuasaan Kongres. Dia membatasi penggunaan hak veto ke undang-undang yang dia anggap meragukan secara konstitusional, hanya mengeluarkan dua veto dalam delapan tahun dan menulis bahwa dia "menandatangani banyak undang-undang yang tidak sepenuhnya sesuai pertimbangan saya", karena "motif penghormatan terhadap legislatif." Washington juga enggan mengeluarkan dekrit yang dapat dipandang melangkahi yurisdiksi kongres. Dalam delapan tahun dia hanya mengeluarkan delapan perintah eksekutif.

Sepanjang hidup, Washington telah belajar bahwa dia "mendapat kekuasaan dari kesediaannya melepas kekuasaan". Berkat reputasi Washington yang besar, sikap menahan dirinya bisa menyebar ke banyak lembaga politik baru republik Amerika Serikat. Seperti dikatakan ahli sejarah Gordon Wood, "Andai ada satu orang yang bertanggung jawab memberi dasar yang kuat bagi Republik [Amerika Serikat] muda, Washington-lah orangnya."

Norma sikap menahan diri presiden pun berlaku. Walau kadang-kadang diuji, terutama selama masa perang, norma itu cukup kuat untuk menahan bahkan presiden-presiden AS yang paling ambisius. Pertimbangkan Theodore Roosevelt, yang menjadi presiden pada 1901 sesudah pembunuhan Presiden William McKinley. Roosevelt memegang

teori "penatagunaan" (*stewardship*) dalam kepresidenan, yang menyatakan bahwa segala tindakan eksekutif itu diperbolehkan, kecuali kalau dilarang secara tersurat oleh hukum. Pandangan luas mengenai kekuasaan presidensial ini, kesukaan Roosevelt membujuk "rakyat" dengan gaya populis, serta "energi dan ambisi tanpa batas"-nya membuat para pengamat yang sezaman jadi waspada, termasuk para pemimpin partainya sendiri, Republik. Penasihat Presiden McKinley yang berpengaruh, Mark Hanna, pernah menentang pemilihan Roosevelt sebagai wakil presiden, dengan berkata, "Apa Anda tak sadar bahwa hanya ada satu nyawa di antara orang gila itu dan Gedung Putih?" Namun sewaktu menjabat presiden, Roosevelt ternyata bisa menahan diri. Contohnya, dia sangat hati-hati supaya tak tampak mendesak Kongres dengan berbicara langsung kepada rakyat atau menyerang anggota Kongres secara individual selagi memperdebatkan pemungutan suara penting. Pada akhirnya, Roosevelt bekerja di dalam batas pengawasan dan keseimbangan konstitusional.

Selagi kemampuan legal, administratif, militer, dan intelijen eksekutif bertambah selama abad ke-20 pun para presiden tetap mengikuti norma-norma membatasi diri yang sudah mapan dalam interaksi mereka dengan Kongres dan pengadilan. Di luar masa perang, mereka bersikap bijak dalam menggunakan perintah eksekutif. Mereka tak pernah menggunakan hak amnesti untuk melindungi diri atau kepentingan politik sempit, dan sebagian besar meminta saran Departemen Kehakiman sebelum menggunakannya. Dan yang penting, para presiden AS abad ke-20 jarang menantang cabang-cabang pemerintahan lain, seperti Lincoln dan Andrew Johnson selama abad ke-19. Presiden Harry Truman patuh dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak perintah eksekutifnya pada 1952 untuk menasionalisasi industri baja sesudah terjadi pemogokan yang dia anggap sebagai darurat nasional. Eisenhower menegakkan putusan Mahkamah Agung *Brown v. Board of Education* meski dia sendiri tak menyukai putusan itu. Nixon pun menuruti tuntutan kongres supaya dia menyerahkan rekaman rahasia sesudah Mahkamah Agung memutuskan setuju dengan permintaan itu.

Jadi, walau jabatan presiden Amerika Serikat makin kuat selama abad ke-20, para presiden AS menunjukkan sikap menahan diri yang besar dalam menggunakan kekuasaan. Bahkan tanpa batas konstitusional, tindakan eksekutif sepihak tetap hanya umum dilakukan sebagai kekecualian dalam masa perang, bukan sebagai kebiasaan.

Begitu juga dengan penunjukan hakim oleh presiden. Presiden bisa saja menguasai pengadilan dengan dua cara: memecat hakim agung yang tak sejalan dan menggantikannya dengan sekutu partisan, atau mengubah jumlah hakim agung dan mengisi posisi kosong dengan loyalis. Kedua manuver itu secara sempit adalah legal; Konstitusi AS memperkenankan pencopotan hakim dan tidak menetapkan jumlah hakim agung. Presiden boleh mengosongkan Mahkamah Agung dan mengisinya dengan hakim-hakim pilihan sendiri tanpa melanggar hukum. Namun para presiden AS tak pernah melakukan itu selama seabad lebih.

Satu-satunya kasus pemakzulan hakim agung dalam sejarah Amerika Serikat terjadi pada 1804, ketika Dewan Perwakilan Rakyat yang didominasi Republik mengadakan pemungutan suara untuk memecat Hakim Samuel Chase, seorang "Federalis gigih" yang berkampanye menentang dan mengkritik Jefferson ketika menjabat presiden. Perilaku Chase dianggap menghasut oleh Jefferson yang kemudian mendorong pemakzulannya. Walau anggota-anggota Partai Republik mencoba membungkus langkah itu dengan legalitas, pemakzulan itu dianggap suatu "persekusi politik dari awal sampai akhir". Akhirnya Senat tidak jadi memakzulkan Chase, membuat presiden kuat untuk pemakzulan hakim.

Ukuran Mahkamah Agung lebih sering menjadi sasaran otak-atik partisan selama abad pertama Amerika Serikat. Dimulai dengan langkah kelompok Federalis memperkecil jumlah hakim untuk mencegah Presiden Jefferson menunjuk hakim, Mahkamah Agung AS berubah ukuran tujuh kali antara 1800 dan 1869—tiap kalinya karena alasan politis. Namun pada akhir abad ke-19 mengotak-atik pengadilan sudah dipandang secara umum sebagai tak bisa diterima. Dalam satu buku

terbitan 1893 mengenai sistem politik Amerika, Woodrow Wilson (yang kelak menjadi presiden) menulis bahwa "tindakan kelewatan seperti itu" adalah "pelanggaran terhadap semangat Konstitusi". Mantan Presiden Benjamin Harrison menulis pada waktu yang sama bahwa walau memperbesar Mahkamah Agung "amat menggoda bagi partisan", tindakan itu kiranya "merusak, fatal bagi keutuhan konstitusi kita." Pada 1920-an, jurnalis Britania H.W. Horwill menyimpulkan bahwa ada norma informal "yang cukup kuat untuk mencegah Presiden dan Kongres yang amat berkuasa, apa pun pemicunya, mengambil jalan yang bakal membuat Mahkamah Agung menjadi mainan politik partai."

Presiden Franklin Roosevelt jelas melanggar norma itu dengan upayanya mengotak-atik Mahkamah Agung pada 1937. Seperti ditulis para ahli konstitusi Lee Epstein dan Jeffrey Segal, usul Roosevelt yang melanggar norma "amat luar biasa angkuhnya". Namun yang sama luar biasanya adalah penolakan terhadap usul tersebut. Waktu itu Roosevelt amat populer—dia baru saja terpilih lagi dengan kemenangan besar bersejarah, dan sekutu-sekutu Demokratnya menikmati mayoritas solid di kedua kamar Kongres. Hanya sedikit presiden Amerika yang pernah menikmati kekuatan politik seperti itu. Namun otak-atik pengadilan memicu perlawanan lintas kubu. Kritik media sangat gencar—*San Francisco Chronicle* menjabarkan rencana itu sebagai "deklarasi perang terbuka terhadap Mahkamah Agung". Dan perlawanan dari Kongres langsung terjadi, bukan hanya dari Partai Republik, melainkan juga dari banyak anggota Partai Demokrat. Senator Missouri James A. Reed menyebut usul Roosevelt "langkah menuju kediktatoran". Edward Cox, anggota kongres asal Demokrat wakil Georgia, memperingatkan bahwa usul itu bakal "mengubah arti hukum dasar dan seluruh sistem pemerintahan kita" sehingga menjadi "ancaman terburuk terhadap pemerintahan konstitusional yang pernah ada sepanjang sejarah negara ini." Bahkan orang-orang yang setia mendukung New Deal ikut menentang Roosevelt. Senator Wyoming Joseph O'Mahoney adalah sekutu amat akrab Roosevelt sehingga bisa duduk di samping Eleanor Roosevelt di satu acara makan malam sebelum pelantikan di Gedung Putih dua

minggu sebelumnya. Namun O'Mahoney menentang rencana otak-atik Mahkamah Agung, dan menulis kepada seorang teman, "Semua ini berbau Machiavelli, dan baunya Machiavelli busuk!"

Layak disebutkan bahwa Mahkamah Agung sendiri berperan besar dalam menggagalkan rencana Roosevelt. Dalam satu langkah yang telah dijabarkan sebagai "langkah mundur piawai" untuk menjaga integritas, Mahkamah Agung yang sebelumnya anti-New Deal dengan cepat mengubah posisi di serangkaian keputusan. Pada musim semi 1937, Mahkamah Agung secara berturut-turut memberi putusan mendukung sejumlah legislasi New Deal, termasuk National Labor Relations Act dan Social Security. Dengan makin amannya program New Deal secara konstitusional, para Demokrat liberal di Kongres dapat dengan mudah menentang rencana presiden mengotak-atik Mahkamah Agung. Pada Juli 1937, rencana itu mati di Senat. Presiden, di puncak popularitas dan kekuasaannya, mencoba memepet batas wewenang konstitusionalnya dan dihalangi. Dan sesudahnya tak pernah lagi ada presiden Amerika Serikat yang mencoba mengotak-atik Mahkamah Agung.

Norma menahan diri juga berlaku di Kongres. Misalnya di Senat AS. Sebagai badan yang tujuan aslinya adalah melindungi minoritas dari kekuasaan mayoritas (yang bakal diwakili DPR menurut para pendiri AS), Senat sejak awal dirancang untuk memungkinkan musyawarah. Senat mengembangkan sejumlah alat—banyak di antaranya tak tertulis—yang memungkinkan minoritas legislatif, bahkan senator secara individual, memperlambat atau menghambat proyek yang diajukan mayoritas. Sebelum 1917, Senat tak punya aturan yang membatasi diskusi, sehingga artinya senator mana pun dapat mencegah pemungutan suara (atau "*filibuster*") untuk legislasi sampai waktu yang tak ditentukan dengan sekadar memperpanjang debat.

Hak-hak istimewa informal itu adalah pengawasan dan pertimbangan penting, yang bertindak sebagai sumber perlindungan untuk partai minoritas dan membatasi presiden yang bisa bertindak terlalu jauh. Namun kalau digunakan tanpa menahan diri, hak-hak itu dapat menye-

babkan kebuntuan dan konflik. Seperti ditulis ahli ilmu politik Donald Matthews:

[Tiap senator] punya kekuasaan besar atas aturan sidang. Contohnya, seorang senator saja bisa menghambat Senat sampai hampir berhenti dengan secara sistematis menolak semua permintaan persetujuan dengan suara bulat. Sejumlah senator, dengan menggunakan hak *filibuster*, bisa menghalangi pengesahan segala rancangan undang-undang.

Selama sebagian besar sejarah Amerika, disfungsi tak terjadi, sebagian karena norma-norma yang berlaku membuat para senator tak cenderung menggunakan wewenang politisnya secara berlebihan. Seperti diamati Matthews, walau alat-alat seperti *filibuster* "ada sebagai ancaman potensial, yang menakjubkannya adalah alat-alat itu jarang digunakan. Semangat timbal balik menyebabkan banyak, kalau bukan sebagian besar, kekuasaan senator yang sebenarnya tidak digunakan."

Penelitian Matthews atas Senat AS selama akhir 1950-an menyoroti bagaimana norma-norma informal, atau apa yang dia sebut "folkways", membantu lembaga itu berfungsi. Dua di antaranya berhubungan erat dengan sikap menahan diri: kesantunan dan timbal balik. Kesantunan terutama berarti menghindari serangan pribadi atau mempermalukan sesama senator. Aturan utamanya, kata Matthews, adalah para senator tidak membiarkan "ketidaksepakatan politik memengaruhi perasaan pribadi". Itu sukar, karena seperti dikatakan seorang senator, "sulit untuk tak menyebut seseorang sebagai pembohong ketika kita tahu dia berbohong." Namun para senator memandang kesantunan sebagai sesuatu yang penting bagi keberhasilan, karena seperti dikatakan seorang senator, "musuh kita di satu isu boleh jadi teman kita di isu berikutnya." Menurut senator lain, pertahanan diri politis "mengharuskan setidaknya tampilan persahabatan. Dan tahu-tahu, tanpa disadari, kita jadi benar-benar berteman."

Norma timbal balik mewajibkan senator menahan diri dalam menggunakan kekuasaannya agar tak berlebihan mendesak senator lain dan

membahayakan kerja sama pada masa depan. Dalam penelitiannya, Matthews menyimpulkan, "Bila seorang senator menggunakan kekuasaan formalnya sampai batas, maka dia telah merusak tawaran tersirat dan tidak bisa mengharap kerja sama dari kolega-koleganya, hanya akan ada pembalasan," ini membuat kerja legislatif makin sulit. Seperti penjabaran seorang senator mengenai norma itu, "Bukan masalah persahabatan; sekadar 'Saya tak akan brengsek bila Anda tak brengsek.'"

Tak ada alat kelembagaan yang menggambarkan pentingnya norma-norma itu dengan lebih jelas daripada *filibuster*. Lagi-lagi, sebelum 1917 setiap senator dapat menghalangi legislasi dengan menggunakan *filibuster* untuk menghambat pemungutan suara sampai waktu yang tak ditentukan. Namun itu jarang terjadi. Walau tersedia bagi setiap senator, kapan saja, sebagian besar senator memperlakukan *filibuster* sebagai suatu "senjata prosedural pamungkas". Menurut satu perhitungan, hanya dua puluh tiga *filibuster* yang terjadi sepanjang abad ke-19. Kenaikan sedikit dalam penggunaan *filibuster* pada awal abad ke-20 menghasilkan aturan *cloture* 1917, yang membuat dua pertiga (sekarang tiga perlima) Senat dapat memberi suara untuk mengakhiri debat. Namun ketika itu pun hanya tiga puluh *filibuster* terjadi antara 1880 dan 1917, menurut para ahli ilmu politik Sarah Binder dan Steven Smith. Penggunaan *filibuster* tetap rendah sepanjang akhir 1960-an—malah, antara 1917 dan 1959, Senat menggunakannya rata-rata hanya satu kali per masa jabatan kongres.

Hak istimewa kongres lain yang penting bagi sistem pengawasan dan perimbangan adalah kekuasaan Senat memberi nasihat dan persetujuan (*advice and consent*) terhadap penunjukan pejabat oleh presiden untuk Mahkamah Agung dan posisi penting lain. Walau dinyatakan di Konstitusi, jangkauan peran nasihat dan persetujuan Senat yang sebenarnya bisa ditafsirkan dan diperdebatkan. Teorinya, Senat dapat mencegah presiden menunjuk anggota kabinet atau hakim tertentu—suatu tindakan yang, walau bisa dianggap konstitusional, bakal melemahkan pemerintah. Itu tidak terjadi karena ada norma mapan di Senat, yaitu membiarkan saja presiden mengisi sendiri kabinet dan posisi

kosong di Mahkamah Agung. Hanya sembilan pejabat kabinet pilihan presiden yang ditolak antara 1800 dan 2005; ketika Senat menolak jaksa agung pilihan Calvin Coolidge pada 1925, Coolidge dengan marah menuduh Senat melanggar suatu "praktik tak terputus selama tiga generasi yang memperkenankan presiden memilih sendiri anggota kabinetnya."

Senat selalu mempertahankan hak menolak hakim agung yang diajukan presiden. Presiden Washington pun mengalaminya, seorang hakim agung yang dia ajukan ditolak pada 1795. Namun Senat sepanjang sejarah menggunakan hak itu dengan bijak. Antara 1880 dan 1980, 90 persen lebih hakim agung yang diajukan presiden diterima, dan hanya tiga presiden—Grover Cleveland, Herbert Hoover, dan Richard Nixon—yang pengajuan hakim agungnya pernah ditolak. Calon hakim agung yang amat kompeten selalu diterima, bahkan ketika para senator tak sepakat dengan mereka secara ideologis. Antonin Scalia yang ultrakonservatif, diajukan Ronald Reagan, disetujui pada 1986 dengan hasil pemungutan suara 98 lawan 0, meski kenyataannya Partai Demokrat punya suara melebihi cukup (47) untuk *filibuster*.

Baik menyetujui atau menolak pejabat yang diajukan presiden, Senat sejak lama telah menerima wewenang tertinggi presiden untuk menunjuk hakim. Dalam 150 tahun antara 1866 dan 2016, Senat tak pernah sekali pun menghalangi presiden mengisi posisi kosong di Mahkamah Agung. Dalam tujuh puluh empat kesempatan selama periode itu, para presiden mencoba mengisi posisi kosong di Mahkamah Agung sebelum pemilihan presiden penggantinya. Dan di ke-74 kesempatan—walau tak selalu pada percobaan pertama—mereka diperkenankan berbuat demikian.

Terakhir, salah satu hak istimewa Kongres dari Konstitusi yang paling berpotensi meledak adalah kekuasaan mencopot presiden yang sedang menjabat melalui pemakzulan. Cendekiawan Britania James Bryce berkomentar lebih dari seabad lalu bahwa pemakzulan adalah "artileri terberat di gudang senjata kongres". Namun Bryce melanjutkan, "saking beratnya, senjata itu tak cocok untuk penggunaan biasa." Bila digunakan seenaknya, ahli konstitusi Keith Whittington mem-

peringatkan, pemakzulan bisa menjadi suatu "alat partisan untuk mengganggu pengelola pemilu dan melangkahi hasil pemilu."

Itulah persisnya yang telah terjadi, seperti sudah kita bahas, di Paraguay pada 2012 dengan pemakzulan "kilat" Fernando Lugo dalam dua hari, dan di Ekuador pada 1997 dengan pencopotan Abdalá Bucaram dengan alasan meragukan "ketidakmampuan mental". Di kasus-kasus itu, pemakzulan dijadikan senjata—para pemimpin kongres menggunakannya untuk mencopot presiden yang tak mereka sukai.

Teorinya, presiden Amerika Serikat dapat mengalami nasib seperti Lugo atau Bucaram. Batas legal pemakzulan di Amerika Serikat sebenarnya cukup rendah. Menurut konstitusi, hanya dibutuhkan mayoritas sederhana di DPR. Walau penggugatan dan pencopotan presiden memerlukan suara dua pertiga Senat, pemakzulan tanpa gugatan masih merupakan peristiwa traumatis yang bisa melemahkan presiden sampai lumpuh secara politis—seperti yang terjadi pada Andrew Johnson sesudah 1868.

Tak seperti di Paraguay dan Ekuador, pemakzulan di Amerika Serikat sudah lama diatur norma menahan diri. Ahli konstitusi Mark Tushnet menjabarkan norma itu: "Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tak melaksanakan pemakzulan dengan agresif, kecuali ... ada probabilitas masuk akal bahwa pemakzulan akan menyebabkan sasaran dicopot dari jabatan." Karena pencopotan memerlukan suara dua pertiga Senat, maka itu berarti pemakzulan harus punya setidaknya sebagian dukungan bipartisan. Sesudah pemakzulan Johnson pada 1868, tidak ada lagi upaya serius kongres untuk memakzulkan presiden sampai skandal Nixon lebih dari seabad kemudian.

Sistem pengawasan dan perimbangan Amerika Serikat dapat berfungsi pada abad ke-20 karena tertanam dalam norma-norma saling toleransi dan menahan diri yang kuat. Ini bukan berarti Amerika Serikat pernah mengalami zaman keemasan tanpa penyimpangan, di mana politik negara benar-benar berjalan sportif dan taat aturan. Di berbagai kesempatan, norma-norma demokrasi ditantang dan bahkan dilanggar. Tiga insiden layak dibahas.

Yang pertama sudah kita teliti: konsentrasi kekuasaan eksekutif Roosevelt yang sebelumnya tak pernah terjadi, selama Depresi Besar dan Perang Dunia II. Selain upaya mengotak-atik Mahkamah Agung, kebiasaan Roosevelt mengandalkan tindakan sepihak memberi tantangan serius bagi pengawasan dan perimbangan tradisional. Penggunaan perintah eksekutif oleh Roosevelt—3.000 lebih selama dia menjabat presiden, rata-rata melebihi 300 per tahun—tak ada bandingannya sebelum dan sesudah dia. Keputusannya untuk melanjutkan masa jabatan ketiga (lalu keempat) merusak norma yang sudah berumur hampir 150 tahun, yaitu tentang pembatasan masa jabatan presiden yang hanya dua kali.

Namun kepresidenan Roosevelt tak pernah tergelincir menjadi otorokrasi. Ada banyak alasannya, tapi salah satunya adalah bahwa banyak tindakan eksekutif berlebihan Roosevelt memicu penolakan bipartisan. Rencana mengotak-atik Mahkamah Agung ditolak kedua partai besar, dan walau Roosevelt melanggar aturan tak tertulis yang membatasi presiden menjabat hanya dua kali, dukungan terhadap norma lama itu kuat sekali sehingga pada 1947, tak sampai dua tahun sesudah kematian Roosevelt, satu koalisi bipartisan di Kongres mengesahkan Amendemen ke-21, memastikan pembatasan masa jabatan presiden tertulis di Konstitusi. Pagar demokrasi diuji selama era Roosevelt, tapi terbukti kuat.

McCarthyisme menjadi tantangan besar kedua bagi lembaga-lembaga Amerika Serikat, mengancam norma saling toleransi pada awal 1950-an. Kebangkitan komunisme membuat takut banyak orang Amerika, terutama sesudah Uni Soviet hadir sebagai negara adidaya nuklir pada akhir 1940-an. Histeria antikomunis dapat digunakan untuk tujuan partisan: para politikus bisa "mengincar merah" atau mencari suara dengan menuding lawan sebagai komunis atau simpatisan komunis.

Antara 1946 dan 1954, antikomunisme menemukan jalan masuk ke politik partisan. Dimulainya Perang Dingin menyebabkan orang meributkan soal keamanan nasional, dan Partai Republik, yang telah berada di luar kekuasaan nasional selama hampir dua puluh tahun, sedang mencari-cari daya tarik baru bagi pemilih.

Senator Wisconsin Joseph McCarthy menemukan daya tarik itu. McCarthy, yang terpilih ke Senat untuk pertama kali pada 1947, naik ke panggung nasional pada 9 Februari 1950 dengan pidato terkenal di depan Ohio County Republican Women's Club di Wheeling, West Virginia. McCarthy berkoar menentang komunisme dan kehadiran "pengkhianat" di dalam negeri, lalu mengucapkan kalimat yang langsung terkenal: "Di sini, di tangan saya, ada daftar berisi 205 nama yang sudah diketahui Menteri Luar Negeri tapi masih bekerja dan membentuk kebijakan Departemen Luar Negeri." Reaksi terhadapnya langsung hebat. Pers menggila. McCarthy, demagog yang suka perhatian, mulai mengulang-ulang pidato itu, menyadari bahwa dia telah menemukan tambang emas politik. Partai Demokrat tersinggung. Orang-orang moderat Partai Republik khawatir, tapi yang konservatif melihat potensi manfaat politiknya dan mendukung McCarthy. Senator Republik Robert Taft menyampaikan pesan, "Teruslah berbicara". Tiga hari kemudian, McCarthy mengirim telegram ke Presiden Truman yang berbunyi, "Angkat telepon dan tanyai [Menteri Luar Negeri Dean] Acheson berapa Komunis yang tidak dia pecat.... Kegagalan Anda akan membuat Partai Demokrat dicap teman tidur Komunisme internasional."

"Perburuan merah" (*red-baiting*) menjadi taktik umum calon-calon dari Partai Republik pada awal 1950-an. Richard Nixon menggunakannya pada kampanye Senatnya tahun 1950, menuding pesaing Demokratnya, Helen Gahagan Douglas, sebagai "Pink Lady" yang "mengikuti jalur Komunis". Di Florida, George Smathers dari Republik menggunakan kampanye keji untuk mengalahkan petahana Claude Pepper, mengecap pesaing Demokratnya "Red Pepper".

Menjelang pemilihan presiden 1952, jelaslah bahwa antikomunisme McCarthy yang menular adalah pentungan yang berguna untuk memukul Partai Demokrat. McCarthy dijadikan juru kampanye nasional. Bahkan calon presiden moderat dari Partai Republik, Dwight Eisenhower, walau tidak bersikap jelas terhadap McCarthy, mengandalkan energi politik yang dibangkitkan McCarthy. Berkali-kali McCarthy menyatakan keraguan terhadap calon Demokrat, Adlai Stevenson, yang dianggapnya

pengkhianat, dengan sengaja salah menyebut namanya sebagai Alger Hiss yang dituduh mata-mata Soviet. Awalnya Eisenhower menolak tampil bersama McCarthy, namun karena didesak Komite Nasional Partai Republik, keduanya berkampanye bersama di Wisconsin sebulan sebelum hari pemungutan suara.

Serangan McCarthy terhadap sikap saling toleran berpuncak pada 1952. Karena Eisenhower sudah duduk di Gedung Putih, maka para pemimpin Partai Republik menganggap taktik McCarthy sudah tak berguna. Serangan McCarthy terhadap pemerintahan Eisenhower dan terutama Angkatan Darat AS membuat dia dianggap aib. Titik balik terjadi di acara dengar pendapat tahun 1954 antara Angkatan Darat AS dan McCarthy yang ditayangkan langsung di televisi, di mana McCarthy dipermalukan kepala bagian hukum Angkatan Darat Joseph Welch, yang menanggapi tuduhan tak berdasar McCarthy dengan berkata, "Apa Anda tak punya kesopanan, tuan? Sesudah selama ini, apa Anda tak punya lagi kesopanan?" Ketenaran McCarthy merosot, dan enam bulan kemudian Senat mengadakan pemungutan suara yang berujung keputusan mengecam dia, efektif mengakhiri kariernya.

Kejatuhan McCarthy membuat praktik perburuan merah dianggap buruk, memunculkan cap buruk baru: "McCarthyisme". Sesudah 1954, hanya sedikit orang Partai Republik yang terang-terangan menggunakan taktik itu, dan mereka yang melakukannya dikritik. Nixon yang selalu pragmatis pun mulai mempertimbangkan kembali penggunaan retorika McCarthy. Menurut satu penulis biografinya, Nixon (yang menjadi wakil presiden Eisenhower) "dengan berat hati mengakui kesetiaan Partai Demokrat" selama kampanye 1956. Walau kelompok-kelompok seperti John Birch Society yang ekstrem "menjaga semangat McCarthyisme tetap hidup", mereka ada di pinggir Partai Republik. Namun norma saling toleransi tetap utuh di faksi-faksi dominan kedua partai sampai akhir abad ke-20.

Tes terkenal ketiga atas lembaga-lembaga demokrasi Amerika adalah perilaku otoriter pemerintahan Nixon. Meski menunjukkan secara publik bahwa dia mendukung norma saling toleransi pada 1950-an, Nixon

tak pernah sepenuhnya menghayati norma itu. Dia memandang lawan publik dan pers sebagai musuh, sehingga dia dan stafnya membenarkan tindakan melanggar hukum dengan dalih bahwa lawan-lawan mereka di dalam negeri—sering digambarkan sebagai anarkis dan komunis—menjadi ancaman bagi negara dan tatanan konstitusional. Ketika memerintahkan H.R. Haldeman mengatur pembobolan Brookings Institution pada 1971 (rencana yang tak pernah dilaksanakan), Nixon memberitahu ajudannya, "Kita menghadapi musuh, konspirasi. Kita gunakan segala cara.... Jelas?" Begitu juga, konspirator Watergate G. Gordon Liddy membenarkan pembobolan markas Komite Nasional Partai Demokrat pada 1972 dengan mengklaim bahwa Gedung Putih sedang "berperang, di dalam dan luar negeri."

Langkah pemerintahan Nixon menjauhi norma-norma demokrasi dimulai dengan penyadapan besar-besaran dan pengawasan lain atas para jurnalis, aktivis oposisi, Komite Nasional Partai Demokrat, dan tokoh-tokoh terkemuka Demokrat seperti Senator Edward Kennedy. Pada November 1970, Nixon mengirim memo ke Haldeman, memerintahkan Haldeman menyusun daftar lawan pemerintah untuk mengembangkan suatu "program intelijen ... guna menghadapi mereka." Ratusan nama, termasuk "lusinan orang Partai Demokrat" dimasukkan ke daftar itu. Pemerintah juga menggunakan Internal Revenue Service sebagai alat politik, mengaudit para lawan politik utama seperti Ketua Komite Nasional Partai Demokrat Larry O'Brien. Namun yang paling terkenal adalah upaya Nixon menyabot pesaingnya dari Partai Demokrat pada pemilu 1972, yang berpuncak di pembobolan Watergate yang berantakan.

Seperti diketahui secara luas, serangan kriminal Nixon terhadap lembaga-lembaga demokrasi bisa diredam. Pada Februari 1973, Senat membentuk Komite Terpilih Kegiatan Kampanye Kepresidenan bipartisan, diketuai senator Sam Ervin dari Partai Demokrat (North Carolina). Komite Ervin mencakup kedua partai besar: wakil ketuanya, Howard Baker dari Partai Republik (Tennessee), menjabarkan misi komite sebagai "pencarian kebenaran sesungguhnya secara bipartisan." Selagi komite mulai bekerja, hampir selusin senator Republik bergabung ber-

sama para senator Demokrat untuk menyerukan dihadapkannya jaksa khusus yang independen. Archibald Cox, jaksa tersebut, dilantik pada Mei. Menginjak pertengahan 1973, penyelidikan mengarah ke Nixon. Acara dengar pendapat Senat mengungkap keberadaan rekaman-rekaman rahasia Gedung Putih yang bisa menyeret sang presiden. Cox meminta Nixon menyerahkan rekaman-rekaman itu—permintaan yang didukung para pemimpin kedua partai. Nixon main keras, menolak menyerahkan rekaman-rekaman itu dan ujung-ujungnya memecat Cox, tapi usahanya sia-sia.

Langkah itu memicu seruan agar Nixon mundur, dan Komite Kehakiman DPR, dipimpin wakil New Jersey Peter Rodino, melakukan langkah-langkah awal menuju pemakzulan. Pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Nixon mesti menyerahkan rekaman-rekaman itu. Ketika itu Rodino sudah mendapat dukungan cukup banyak dari Partai Republik di Komite Kehakiman untuk melaksanakan pemakzulan. Walau Nixon masih berharap bisa menggalang 34 suara Republik yang diperlukan untuk menghindari gugatan Senat, para senator Republik mengirim Barry Goldwater untuk memberitahu Nixon bahwa pemakzulan tak terhindarkan. Ketika Nixon bertanya kepada Goldwater berapa banyak suara yang dia punya, Goldwater dilaporkan menjawab, "Paling banyak sepuluh, barangkali kurang." Dua hari kemudian Nixon mengundurkan diri. Sebagian berkat kerja sama bipartisan, Kongres dan pengadilan telah mengatasi penyalahgunaan kekuasaan presiden.

Lembaga-lembaga demokrasi Amerika ditantang beberapa kali selama abad ke-20, tapi semua tantangan itu dihadapi dengan efektif. Pagar demokrasi tetap utuh, selagi para politikus dari kedua partai besar—dan sering kali masyarakat secara keseluruhan—menolak pelanggaran yang bisa mengancam demokrasi. Alhasil, peristiwa intoleransi dan perang partisan tak pernah meningkat menjadi jenis "spiral maut" yang menghancurkan demokrasi di Eropa pada 1930-an dan Amerika Latin pada 1960-an dan 1970-an.

Namun kita mesti mengakhiri bab ini dengan suatu peringatan meresahkan. Norma-norma yang menopang sistem politik Amerika Serikat didasari eksklusi rasial sampai batas tertentu. Kestabilan periode antara akhir Rekonstruksi dan 1980-an berakar di satu dosa asal: Kompromi 1877 dan kelanjutannya, yang memperkenankan de-demokratisasi AS Selatan dan konsolidasi Jim Crow. Eksklusi rasial menyumbang langsung ke sikap santun dan kerja sama partisan khas politik Amerika Serikat abad ke-20. "Selatan yang solid" muncul sebagai kekuatan konservatif dalam Partai Demokrat, memveto hak-hak sipil sekaligus menjadi jembatan ke Partai Republik. Kedekatan ideologi orang-orang Demokrat Selatan dan Republik konservatif mengurangi polarisasi dan memungkinkan tindakan bipartisan. Namun harganya mahal: membuat hak sipil—dan demokratisasi Amerika seutuhnya—keluar dari agenda politik.

Maka norma-norma demokrasi Amerika lahir dalam konteks eksklusi. Selama komunitas politik terbatas sebagian besarnya berisi orang kulit putih, Partai Demokrat dan Republik masih punya banyak kesamaan. Kedua partai tidak cenderung memandang satu sama lain sebagai ancaman terhadap keberadaan masing-masing. Proses inklusi rasial yang dimulai sesudah Perang Dunia II dan mencapai puncaknya pada Civil Rights Act 1964 dan Voting Rights Act 1965 akhirnya mendemokratisasi Amerika Serikat seutuhnya. Namun langkah itu menyebabkan polarisasi juga, menghadirkan tantangan terbesar ke bentuk-bentuk saling toleransi dan menahan diri yang mapan sejak Rekonstruksi.

7

Buyar

Pada Sabtu siang, 13 Februari 2016, satu koran San Antonio memberitakan bahwa Hakim Agung Antonin Scalia telah meninggal dalam tidur ketika sedang dalam perjalanan berburu di Texas. Media sosial meledak. Dalam hitungan menit, seorang mantan staf Partai Republik dan pendiri media hukum konservatif *The Federalist* mengetwit, "Bila Scalia benar-benar telah meninggal, maka Senat mesti menolak menyetujui pengajuan hakim agung selama 2016 dan menyerahkan pengajuan ke presiden berikutnya." Tak lama kemudian, direktur komunikasi senator Republik Mike Lee mengetwit, "Apa yang lebih sedikit daripada nol? Peluang Obama berhasil menunjuk hakim agung pengganti Scalia." Pada awal sore, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengeluarkan pernyataan belasungkawa untuk keluarga Scalia sambil mengumumkan, "Kekosongan ini seharusnya tak diisi sampai kita punya presiden baru."

Pada 16 Maret 2016 Presiden Barack Obama mengajukan hakim pengadilan banding Merrick Garland untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Scalia. Tak ada yang meragukan kualifikasi Garland, dan semua tahu dia moderat secara ideologis. Namun untuk pertama kali dalam sejarah Amerika, Senat AS menolak mempertimbangkan hakim agung yang diajukan presiden yang sedang menjabat. Seperti telah kita lihat, Senat selalu bersikap menahan diri dalam menggunakan hak nasihat dan persetujuan dalam pemilihan hakim agung: sejak 1866, tiap kali

seorang presiden mengajukan calon hakim agung untuk mengisi tempat kosong di Mahkamah Agung sebelum pemilihan presiden penggantinya, dia selalu diperbolehkan melakukan itu.

Namun dunia telah berubah pada 2016. Berbeda dengan preseden dalam sejarah, orang-orang Partai Republik di Senat menolak wewenang presiden mengajukan hakim agung baru. Itu contoh pelanggaran norma yang luar biasa. Dalam setahun, calon presiden Partai Republik meraih kursi di Gedung Putih dan orang-orang Republik di Senat mendapat apa yang mereka inginkan: seorang calon hakim agung konservatif, Neil Gorsuch, yang langsung mereka setuju. Partai Republik telah menginjak satu norma demokrasi dasar—boleh dikata, mencuri satu kursi hakim agung—dan berhasil melakukannya.

Tradisi-tradisi yang mendasari lembaga-lembaga demokrasi Amerika buyar; membuka kesenjangan meresahkan antara cara kerja sistem politik Amerika Serikat dan harapan lama mengenai bagaimana *seharusnya* sistem itu bekerja. Selagi pagar lunak kita melemah, kita jadi makin rentan terhadap pemimpin antidemokrasi.

Donald Trump, pelanggar norma kambuhan, dikritik secara luas (dengan sepatasnya) karena menyerang norma-norma demokrasi Amerika Serikat. Namun masalahnya tak dimulai di Trump. Proses erosi norma dimulai puluhan tahun sebelumnya—lama sebelum Trump turun eskalator untuk mengumumkan pencalonannya sebagai presiden.

Dalam kampanye kongres tahun 1978 di Georgia barat laut, Newt Gingrich muda mencoba mendapat kursi untuk ketiga kalinya di satu distrik di luar Atlanta. Sesudah dua kali gagal sebagai Republikan liberal, dia akhirnya menang—sebagai seorang konservatif, menang di distrik yang tak pernah berada di tangan Republik selama 130 tahun. Tampilan akademis Gingrich yang berkacamata (dia dulunya profesor sejarah di universitas setempat), suaranya yang cempreng, serta rambutnya dan jambangnya yang tebal tak menunjukkan sikap tega yang bakal turut mengubah politik Amerika Serikat.

Bulan Juni 1978, di tengah kampanye, Gingrich bertemu dengan seke-

lompok mahasiswa pendukung Partai Republik di Holiday Inn bandara Atlanta, dan membujuk mereka dengan visi politik yang lebih blak-blakan dan tega daripada yang mereka akrabi. Dia mendapat audiens yang tertarik. Gingrich memperingatkan para Republikan muda itu agar berhenti menggunakan "kata-kata Pramuka, yang bagus di dekat api unggun, tapi payah dalam politik." Dia melanjutkan:

Kalian berjuang dalam perang. Perang berebut kekuasaan.... Partai ini tak butuh satu lagi generasi pemimpin tak serius yang berhati-hati, tanggung, lemah, tak relevan... Kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang mau berdiri dan bertarung... Apa fungsi utama seorang pemimpin politik? ... Membangun mayoritas.

Ketika Gingrich tiba di Washington pada 1979, visi politik sebagai perang-nya bertentangan dengan visi para pemimpin Partai Republik. Pemimpin Minoritas DPR Bob Michel, tokoh ramah yang biasa semobil dengan koleganya dari Partai Demokrat, Dan Rostenkowski—kalau mereka pulang ke Illinois untuk masa reses kongres—berkomitmen mengikuti norma-norma kesantunan dan kerja sama bipartisan. Gingrich menolak pendekatan itu, menganggapnya terlalu "lembek". Gingrich percaya bahwa bila ingin meraih mayoritas, Partai Republik perlu main politik lebih keras.

Didukung sekelompok kecil loyalis yang makin lama makin besar, Gingrich berjuang menerapkan pendekatan lebih keras dalam partai. Memanfaatkan satu teknologi baru media, C-SPAN, Gingrich "menggunakan kata sifat seperti batu", sengaja menggunakan retorika berlebihan. Dia menyebut Kongres "korup" dan "sakit". Dia mempertanyakan patriotisme pesaingnya di Partai Demokrat. Dia bahkan membandingkan mereka dengan Mussolini dan menuduh mereka mencoba "menghancurkan negara kita". Menurut mantan pemimpin Partai Demokrat negara bagian Georgia Steve Anthony, "hal-hal yang keluar dari mulut Gingrich ... belum pernah kami [dengar] dari kubu lawan. Gingrich sangat berlebihan, sampai-sampai faktor syok membuat oposisi membeku selama beberapa tahun."

Melalui satu komite aksi politik baru, GOPAC, Gingrich dan sekutu-sekutunya berusaha menyebarkan taktik-taktik itu ke seluruh partai. GOPAC memproduksi dua ribu lebih kaset pelatihan, yang tiap bulan diedarkan agar para rekrutan "Revolusi Republik" Gingrich menggunakan retorika yang sama. Mantan sekretaris pers Gingrich, Tony Blankley, membandingkan taktik menyebar kaset itu dengan yang digunakan Ayatollah Khomeini ketika menuju kekuasaan di Iran. Pada awal 1990-an, Gingrich dan timnya menyebar memo ke calon-calon Partai Republik, menginstruksikan mereka agar menggunakan kata-kata negatif tertentu untuk menjabarkan Partai Demokrat, termasuk *menyedihkan, sakit, aneh, berkhianat, antibendera, antikeluarga*. Itulah awal pergeseran besar dalam politik Amerika Serikat.

Selagi Gingrich mulai naik di struktur kepemimpinan Partai Republik—menjadi penegak disiplin minoritas pada 1989 dan Ketua DPR pada 1995—dia menolak meninggalkan retorika garis keras. Dan ketimbang menolak partai, dia menarik partai mendekat. Ketika menjadi Ketua DPR, Gingrich menjadi contoh bagi generasi baru anggota legislatif Republik, banyak di antaranya yang terpilih dalam kemenangan besar 1994 yang memberi posisi mayoritas bagi Republik di DPR untuk pertama kali dalam empat puluh tahun. Senat juga berubah dengan kedatangan para "Senator Gingrich", dengan ideologi, ketidaksukaan berkompromi, dan kesediaan menghalangi legislasi yang membantu mempercepat berakhirnya "kebiasaan" tradisional lembaga tersebut.

Walau hanya sedikit yang menyadari ketika itu, Gingrich dan sekutu-sekutunya sedang ada di ambang gelombang baru polarisasi yang berakar dari ketidakpuasan publik yang membesar, terutama di basis pendukung Republik. Gingrich tak menciptakan polarisasi itu, tapi dia salah satu orang Partai Republik pertama yang memanfaatkan pergeseran sentimen masyarakat. Dan kepemimpinannya membantu menegaskan "politik sebagai perang" sebagai strategi utama Partai Republik. Menurut anggota kongres asal Partai Demokrat Barney Frank, Gingrich

mengubah politik Amerika dari penuh prasangka baik terhadap lawan meski tak saling setuju, menjadi ajang di mana orang

menganggap orang yang tak disetujuinya sebagai jahat dan tak bermoral. Dia semacam pengikut McCarthy yang berhasil.

Pendekatan baru Partai Republik yang keras terlihat selama masa kepresidenan Bill Clinton. Pada April 1993, empat bulan sesudah Clinton mulai menjabat untuk pertama kali, Pemimpin Minoritas Senat Robert Dole mengklaim bahwa kemenangan populer tipis Clinton berarti masa bulan madu tradisional ketika presiden baru masih dibiarkan tidak dijamin, sehingga dia menggalang *filibuster* untuk menghadang inisiatif lapangan kerja \$16 miliar dari presiden. Penggunaan *filibuster*, yang sudah naik secara mencolok pada 1980-an dan awal 1990-an, mencapai apa yang seorang mantan senator sebut tingkat "wabah" selama dua tahun pertama masa kepresidenan Clinton. Sebelum 1970-an, jumlah tahunan mosi *cloture* yang dilakukan untuk mengakhiri debat di senat—indikator bagus untuk upaya *filibuster*—tak pernah melebihi tujuh; pada 1993–94, jumlah itu mencapai delapan puluh. Orang-orang Partai Republik di Senat juga agresif mendorong penyelidikan atas sejumlah skandal meragukan, terutama satu pembelian tanah oleh Clinton pada 1980-an (yang disebut penyelidikan Whitewater). Upaya itu berpuncak pada penunjukan Kenneth Starr pada 1994 sebagai jaksa independen. Bayangan gelap menaungi seluruh masa kepresidenan Clinton.

Namun era politik sebagai perang beralih kencang sesudah kemenangan besar Republik pada pemilu 1994. Gingrich menjadi Ketua DPR dan Partai Republik memakai pendekatan "tanpa kompromi"—pertanda kemurnian ideologis bagi basis partai—yang terang-terangan menolak menahan diri untuk mengejar kemenangan dengan "cara apa pun yang diperlukan." Anggota-anggota DPR dari Partai Republik menolak berkompromi dalam pembahasan anggaran, misalnya, sehingga menyebabkan pemerintah berhenti selama lima hari pada 1995 dan dua puluh satu hari pada 1996. Itu perubahan arah yang berbahaya. Tanpa sikap menahan diri, pengawasan dan perimbangan berubah menjadi kebuntuan dan disfungsi.

Puncak main keras konstitusional 1990-an adalah pemungutan suara

di DPR pada Desember 1998 untuk memakzulkan Presiden Clinton. Upaya pemakzulan presiden kedua sepanjang sejarah Amerika itu melanggar norma-norma lama. Penyelidikan yang diawali kebuntuan kasus Whitewater dan ujung-ujungnya berpusat ke kesaksian Presiden Clinton atas perselingkuhan tak pernah mengungkap apa pun yang mendekati standar konvensional untuk kejahatan dan kesalahan tingkat tinggi. Seperti dikatakan ahli konstitusi Keith Whittington, orang-orang Partai Republik mencoba memakzulkan Clinton "dengan alasan teknis". Anggota-anggota DPR dari Partai Republik juga mencoba pemakzulan tanpa dukungan bipartisan, artinya Presiden Clinton hampir pasti tak akan dipersalahkan oleh Senat (dia dibebaskan Senat pada Februari 1999). Dalam suatu tindakan tanpa preseden di sejarah AS, anggota-anggota DPR dari Partai Republik telah melakukan politisasi atas proses pemakzulan, menurunkan derajatnya, sebagaimana dikatakan para pakar kongres Thomas Mann dan Norman Ornstein, menjadi "hanya senjata dalam perang partisan".

Newt Gingrich boleh jadi memimpin serangan awal terhadap sikap saling toleransi dan menahan diri, tapi kemerosotan ke politik sebagai perang baru menguat sesudah Gingrich meninggalkan Kongres pada 1999. Walau Gingrich digantikan Dennis Hastert sebagai Ketua DPR, kekuasaan sejati jatuh ke tangan Pemimpin Mayoritas DPR Tom DeLay. DeLay yang berjulukan "the Hammer" (Palu) juga punya sifat tega partisan seperti Gingrich. Dia menunjukkan itu sebagian melalui K Street Project, yang mengumpulkan orang-orang Partai Republik di perusahaan-perusahaan lobi dan menerapkan sistem bayar-untuk-bermain yang memberi legislasi kepada pelobi berdasarkan dukungan mereka ke pejabat Partai Republik. Anggota Kongres dari Partai Republik Chris Shays menjabarkan filosofi DeLay secara blak-blakan: "Kalau tidak ilegal, lakukan saja." Hasilnya adalah erosi norma lebih lanjut. "Berkali-kali," kata seorang reporter, DeLay "menerobos pagar tak kasat mata yang menghalangi partisan lain." DeLay membawa pelanggaran norma rutin ke abad ke-21.

Pada malam 14 Desember 2000, sesudah Al Gore mengakui kemenangan George W. Bush sesudah pertarungan sengit pascapemilu, Bush berpidato kepada negara di Gedung DPR Texas. Sesudah diperkenalkan oleh Ketua DPR Texas dari Partai Demokrat, Bush menyatakan bahwa dia telah memilih untuk berbicara di Gedung DPR Texas

karena telah menjadi tempat kerja sama bipartisan. Di sini, di tempat yang mayoritasnya Demokrat, orang-orang Partai Republik dan Demokrat telah bekerja sama untuk melakukan hal yang benar bagi rakyat yang kita wakili. Semangat kerja sama yang telah saya lihat di sini adalah sesuatu yang kita perlukan di Washington.

Semangat itu tak terwujud. Bush telah berjanji untuk menjadi seorang "pemersatu, bukan pemecah belah", tapi perang partisan menguat selama delapan tahun masa jabatannya. Sebelum pelantikan Bush, DeLay menjelaskan kenyataan kepada sang presiden terpilih, dan dilaporkan memberitahu Bush: "Kita tidak bekerja sama dengan Demokrat. Lupakan saja urusan pemersatu/pemecah belah itu."

Presiden Bush memerintah dengan sangat condong ke kanan, melupakan segala niat sikap bipartisan berdasarkan nasihat dari penasihat politiknya Karl Rove, yang telah menyimpulkan bahwa warga pemilih sangat terpolarisasi sehingga Partai Republik dapat meraih kemenangan dengan memobilisasi basisnya sendiri, ketimbang mencari pemilih independen. Dan selain sesudah serangan 11 September dan aksi militer di Afghanistan dan Irak, orang-orang Demokrat di kongres tak suka kerja sama bipartisan, lebih suka menghalangi. Harry Reid dan para pemimpin Senat lain menggunakan aturan-aturan Senat untuk memperlambat atau menghalangi legislasi Republik dan melanggar preseden dengan secara rutin melakukan *filibuster* terhadap usul-usul Bush yang mereka tentang.

Anggota Demokrat di Senat juga mulai menyimpang dari norma menahan diri dalam hal nasihat dan persetujuan, menolak banyak calon hakim yang diajukan Presiden Bush, baik dengan menolak langsung maupun menggantung nasib mereka dengan menolak mengadakan uji

kelayakan. Norma menahan diri terhadap penunjukan oleh presiden mulai pudar. Bahkan *New York Times* mengutip seorang ahli strategi Partai Demokrat yang berkata bahwa Senat perlu "mengubah aturan... tidak ada kewajiban untuk menyetujui seseorang hanya karena dia pandai atau pintar bicara." Sesudah Republik merebut kembali mayoritas Senat pada 2002, Demokrat menggunakan *filibuster* untuk menghambat beberapa calon hakim untuk pengadilan banding. Partai Republik bereaksi dengan marah. Kolomnis konservatif Charles Krauthammer menulis bahwa "salah satu tradisi besar, adat, dan aturan tak tertulis di Senat adalah tak melakukan *filibuster* terhadap pengajuan hakim." Selama Kongres ke-110, yang terakhir pada masa kepresidenan Bush, jumlah *filibuster* mencapai rekor tertinggi, 139—hampir dua kali lipat yang terjadi selama masa Clinton.

Kalau Partai Demokrat meninggalkan sikap menahan diri untuk menghalangi presiden, maka Partai Republik melakukan itu untuk melindungi presiden. Di DPR, praktik informal "aturan reguler" yang memastikan partai minoritas mendapat kesempatan berbicara dan mengubah undang-undang, sebagian besarnya ditinggalkan. Jumlah rancangan undang-undang yang diajukan di bawah "aturan tertutup" yang melarang perubahan meningkat pesat. Seperti dikatakan para pengamat kongres Thomas Mann dan Norman Ornstein, "norma-norma perilaku lama di DPR ... diacak-acak demi tujuan lebih besar yaitu menerapkan program presiden." Partai Republik efektif meninggalkan pengawasan atas presiden dari Republik, melemahkan kemampuan Kongres mengawasi eksekutif. Sementara sebelumnya DPR mengumpulkan 140 jam kesaksian di bawah sumpah dalam penyelidikan apakah Presiden Clinton menyalahgunakan daftar kartu Natal Gedung Putih dalam upaya mendapat donor baru, DPR tak pernah sekali pun mempertanyakan Gedung Putih selama enam tahun pertama masa kepresidenan George W. Bush. Kongres menolak pengawasan atas Perang Irak, dan hanya meluncurkan penyelidikan seadanya terhadap kasus-kasus pelanggaran serius, termasuk penyiksaan di penjara Abu Ghraib. Anjing penjaga kongres telah menjadi anjing peliharaan, meninggalkan tanggung jawab kelembagaannya.

Pelanggaran norma juga tampak di tingkat negara bagian. Di antara kasusnya yang paling terkenal adalah rencana pengaturan ulang daerah pemilihan di Texas pada 2003. Berdasarkan Konstitusi AS, badan legislatif negara bagian boleh mengubah daerah pemilihan kongres agar populasinya tetap seimbang. Namun ada norma lama dan umum bahwa pengubahan daerah pemilihan sebaiknya terjadi satu kali setiap satu dasawarsa, langsung sesudah pengumuman hasil sensus. Alasannya bagus: Karena penduduk sering pindah tempat tinggal, perubahan daerah pemilihan yang terjadi sebelum sepuluh tahun berlalu akan berdasarkan angka populasi yang kurang akurat. Walau tak ada batas legal yang melarang perubahan daerah pemilihan pada pertengahan dasawarsa, tindakan itu selalu jarang terjadi.

Pada 2003, orang-orang Partai Republik Texas, dipimpin Pemimpin Mayoritas DPR Tom DeLay, membuat rencana perubahan daerah pemilihan secara radikal dan di luar jadwal, yang mereka akui bertujuan memberi keuntungan partisan. Walau pemilih di Texas makin cenderung ke Partai Republik, tujuh belas dari tiga puluh dua anggota DPR dari negara bagian itu adalah dari Partai Demokrat, dan banyak di antaranya sudah lama menduduki kursi masing-masing. Itu penting bagi para pemimpin nasional Partai Republik karena Republik hanya memiliki mayoritas tipis (229–204) di DPR AS. Demokrat hanya perlu merebut tiga belas kursi Republik pada 2004 untuk merebut kembali posisi mayoritas DPR, jadi perpindahan segelintir kursi saja bisa menentukan.

Dipimpin DeLay, orang-orang Partai Republik Texas membuat rencana perubahan daerah pemilihan yang dirancang untuk menggeser pemilih Afrika-Amerika dan Latino ke beberapa distrik yang dikuasai Demokrat sambil menambahkan pemilih Republik ke distrik yang dipegang petahana Demokrat berkulit putih, sehingga memastikan kekalahan petahana. Peta baru itu membuat enam anggota kongres dari Demokrat terancam. Rencananya benar-benar main keras. Seperti dikatakan seorang analis, rencana itu "separtisan yang dimungkinkan hukum menurut Partai Republik."

Diperlukan langkah berani lain untuk mengesahkan usul Texas itu.

DPR Texas memerlukan kuorum—kehadiran dua pertiga anggotanya—untuk mengadakan pemungutan suara pengesahan. Dan Partai Demokrat punya suara untuk mencegah kuorum. Jadi ketika perubahan daerah pemilihan diajukan di sidang paripurna pada Mei 2003, Partai Demokrat menanggapi dengan manuver tak biasa: Empat puluh tujuh anggota legislatif negara bagian pergi naik bus ke Ardmore, Oklahoma. Mereka tetap di sana selama empat hari sampai DPR Texas membatalkan usul itu.

Sebagai tanggapan, Gubernur Rick Perry meminta sidang istimewa DPR Texas pada Juni, dan karena orang-orang Partai Demokrat terlalu lelah untuk mengadakan *walkout* lagi, usul perubahan daerah pemilihan akhirnya disetujui. Usul itu kemudian beralih ke Senat negara bagian, di mana para anggota Partai Demokrat, mengikuti kolega mereka di DPR Texas, mencoba menggagalkannya dengan cara naik pesawat ke Albuquerque, New Mexico. Mereka tetap di sana selama sebulan lebih, sampai Senator John Whitmire (kemudian dijuluki "Quitmire") menyerah dan pulang ke Austin. Ketika usul itu akhirnya disahkan, DeLay datang dari Washington untuk mengawasi proses rekonsiliasi, yang menghasilkan rencana perubahan lebih radikal lagi. Seorang ajudan anggota kongres dari Partai Republik Joe Barton mengakui dalam e-mail bahwa itu "peta paling agresif yang pernah saya lihat. Seharusnya itu memastikan Republik tetap menguasai DPR, apa pun kondisi di tingkat nasional." Rencana perubahan daerah pemilihan itu memang bejalan dengan sempurna. Enam kursi kongres dari Texas berpindah tangan dari Demokrat ke Republik pada 2004, membantu mempertahankan kendali Republik atas DPR.

Di samping menurunnya sikap menahan diri, masa kepresidenan Bush juga menyaksikan tantangan terhadap norma saling toleransi. Presiden Bush masih layak dipuji karena tak mempertanyakan patriotisme para pesaingnya di Partai Demokrat, bahkan ketika histeria anti-Muslim sesudah serangan 11 September menciptakan kesempatan berbuat demikian. Namun para komentator Fox News dan pembaca acara bincang-bincang radio yang berpengaruh menggunakan momen itu

untuk menyiratkan bahwa orang-orang Partai Demokrat tak punya patriotisme. Para komentator mulai menghubungkan Partai Demokrat ke Al-Qaeda—seperti dilakukan Rush Limbaugh pada 2006, ketika menuduh Senator Patrick Leahy “angkat senjata untuk Al-Qaeda” sesudah Leahy menanyi calon hakim agung Samuel Alito mengenai penggunaan penyiksaan oleh pemerintahan Bush.

Di antara para agen intoleransi partisan tergiat pada awal 2000-an, ada Ann Coulter. Coulter menulis serangkaian buku laris yang menyerang kelompok liberal dan Partai Demokrat dengan gaya McCarthy. Judul buku-buku itu sudah menjelaskan isinya: *Slander* (2002); *Treason* (2003); *Godless* (2006); *Guilty* (2009); *Demonic* (2011); *Adios, America!* (2015). *Treason*, diterbitkan sekitar masa invasi AS ke Irak, membela Joseph McCarthy dan menggunakan taktik McCarthy. Buku itu mengklaim bahwa anti-Amerikanisme adalah “sesuatu yang ada dalam keseluruhan pandangan [liberal]” dan menuduh kelompok liberal telah melakukan “pengkhianatan lima puluh tahun” selama Perang Dingin. Waktu mempromosikan *Treason*, Coulter menyatakan, “Ada jutaan tersangka di sini ... Saya menuduh Partai Demokrat secara keseluruhan.” Buku itu ada di daftar buku laris *New York Times* selama tiga belas minggu.

Pemilihan presiden 2008 adalah tonggak penting dalam intoleransi partisan. Melalui ekosistem media sayap kanan—termasuk Fox News, saluran berita TV kabel yang paling banyak ditonton—calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama, digambarkan sebagai Marxis, anti-Amerika, dan sebenarnya Muslim. Kampanye itu bahkan berusaha mengaitkan Obama dengan orang yang disebutnya “teroris” seperti Bill Ayers, seorang profesor di kawasan Chicago yang pernah aktif di Weather Underground pada awal 1970-an (Ayers pernah mengadakan pertemuan untuk Obama pada 1995 sewaktu dia bersiap berkampanye untuk meraih kursi Senat di Illinois). Program Fox News *Hannity & Colmes* membahas kisah Ayers di setidaknya enam puluh satu episode selama kampanye 2008.

Namun yang lebih menjadi persoalan dalam kampanye 2008 adalah karena retorika intoleransi media sayap kanan dipakai oleh para

politikus terkemuka Partai Republik. Tom DeLay, misalnya, menyatakan bahwa "kecuali Obama bisa membuktikan saya keliru, saya nyatakan dia Marxis," sedangkan Steve King, seorang anggota kongres dari Partai Republik asal Iowa, menyebut Obama "anti-Amerika" dan mengingatkan bahwa Obama bakal membawa Amerika ke dalam "kediktatoran totaliter". Walau calon presiden dari Partai Republik John McCain tidak menggunakan retorika demikian, dia tetap memilih calon wakil presiden Sarah Palin yang menggunakannya. Palin, menggunakan kisah Bill Ayers, menyatakan bahwa Obama telah "main-main dengan teroris". Ketika berkampanye, Palin berkata kepada pendukungnya bahwa Obama "meluncurkan karier politiknya dari rumah teroris dalam negeri!" lalu melanjutkan: "Dia bukan orang yang memandang Amerika seperti cara kalian dan saya memandang Amerika.... Saya takut dia memandang Amerika begitu tak sempurna sampai-sampai mau bekerja sama dengan mantan teroris dalam negeri yang telah mengincar negaranya sendiri." Pidato bernuansa rasis Palin memicu seruan "Pengkhianat!" "Teroris!" dan bahkan "Bunuh dia!" dari kerumunan penonton.

Kemenangan Barack Obama di pemilihan presiden 2008 menghidupkan kembali harapan akan kembalinya politik beradab. Pada malam sesudah pemilihan presiden, selagi dia mengajak keluarganya ke atas panggung di Chicago, sang presiden terpilih berbicara dengan murah hati, memberi selamat kepada McCain yang memiliki karier heroik dan banyak berjasa bagi Amerika Serikat. Sebelumnya, di Phoenix, Arizona, McCain memberi pidato ucapan selamat, menyebut Obama sebagai orang baik yang mencintai negara, dan mendoakan "Semoga berhasil". Rekonsiliasi pasca-pemilu seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tak beres di Phoenix. Waktu McCain menyebut Obama, penonton mencibir keras-keras, memaksa sang senator Arizona menyuruh mereka diam. Banyak yang menoleh ke Sarah Palin, yang berdiri diam di samping. Walau panggung adalah milik McCain malam itu, permintaan tradisionalnya kepada Partai Republik untuk "menjembatani perbedaan" dengan presiden baru tampak tidak didengar mereka yang hadir.

Bukannya menghadirkan era baru toleransi dan kerja sama, masa kepresidenan Obama ditandai kenaikan ekstremisme dan perang partisan. Tantangan terhadap legitimasi Presiden Obama, yang diawali di kalangan penulis konservatif pinggiran, tokoh acara radio dan TV, dan penulis blog, segera mewujudkan menjadi gerakan politik massa: Tea Party, yang mulai berhimpun hanya beberapa minggu sesudah pelantikan Presiden Obama. Walau Tea Party membingkai misinya dalam gagasan tradisional konservatif seperti pemerintahan terbatas, pajak rendah, dan penolakan atas reformasi jaminan kesehatan, perlawanannya terhadap Obama jauh lebih kejam. Perbedaannya? Tea Party mempertanyakan hak Presiden Obama menjadi presiden.

Dua hal yang melanggar norma lama terus ada di wacana Tea Party. Salah satunya adalah bahwa Presiden Obama mengancam demokrasi. Beberapa hari sesudah Obama terpilih, anggota kongres asal Georgia Paul Broun memperingatkan akan datangnya kediktatoran seperti Jerman Nazi atau Uni Soviet. Belakangan Broun mengetwit, "Bapak Presiden, Anda tak percaya Konstitusi. Anda percaya sosialisme." Anggota Tea Party dari Iowa Joni Ernst, yang kemudian terpilih menjadi anggota Senat AS, mengklaim bahwa Presiden Obama "telah menjadi diktator".

Yang kedua adalah bahwa Barack Obama bukan "orang Amerika sejati". Selama kampanye 2008, Sarah Palin telah menggunakan ungkapan "orang Amerika sejati" untuk menjabarkan para pendukungnya (sebagian besarnya berkulit putih dan Kristen). Itu menjadi pusat kampanye Tea Party melawan Obama, selagi para pengikut Tea Party berkali-kali menegaskan bahwa Obama tak cinta Amerika atau memegang nilai-nilai Amerika. Menurut aktivis Tea Party dan pembawa acara radio Laurie Roth:

Ini bukan pergeseran ke Kiri seperti Jimmy Carter atau Bill Clinton. Ini bentrok antar-pandangan. Kita sedang melihat bentrok antar-pandangan di Gedung Putih. Seorang Muslim sekuler yang tidak mau mengaku, tapi tetap saja Muslim. Dia bukan Kristen. Kita melihat seorang Komunis Sosialis di Gedung Putih, berpura-pura jadi orang Amerika.

E-mail mengirim desas-desus dan hasutan secara massal di kalangan Tea Party, termasuk satu foto Presiden Obama membawa buku *The Post-American World* karya jurnalis CNN Fareed Zakaria. Berikut isi e-mailnya: *"INI AKAN BIKIN DARAH ANDA BEKU!!! Judul buku yang dibaca Obama adalah The Post-American World dan penulisnya seorang Muslim."*

Retorika itu tak terbatas di antara aktivis Tea Party. Para politikus Partai Republik juga mempertanyakan "ke-Amerika-an" Presiden Obama. Mantan anggota kongres dari Colorado Tom Tancredo menyatakan, "Saya tak percaya Barack Obama mencintai Amerika seperti yang saya cintai, yang didirikan para bapak pendiri." Newt Gingrich, yang mencoba kembali ke ajang politik dan berusaha menjadi calon presiden dari Partai Republik pada 2012, menyebut Obama "presiden anti-Amerika pertama". Dan di satu acara makan malam privat untuk menggalang dana bagi gubernur Wisconsin Scott Walker pada Februari 2015, mantan walikota New York City Rudy Giuliani mempertanyakan patriotisme sang presiden secara terbuka, berkata: "Saya tak percaya, dan saya tahu ini tidak enak dikatakan, tapi saya tak percaya presiden cinta Amerika."

Bila Tea Party menuduh Presiden Obama tak cinta Amerika, maka "gerakan *birther*" melangkah lebih jauh lagi, mempertanyakan apa benar Obama lahir di Amerika Serikat—sehingga menantang hak konstitusional Obama untuk menjadi presiden. Gagasan bahwa Obama tak lahir di Amerika Serikat pertama kali beredar di blog-blog selama kampanye Senat Obama pada 2004 dan muncul lagi pada 2008. Para politikus Partai Republik mendapati bahwa mempertanyakan kewarganegaraan Presiden Obama adalah cara gampang memancing semangat orang-orang di acara publik. Mereka pun mulai melakukannya. Anggota DPR dari Colorado Mike Coffman memberitahu pendukungnya, "Saya tak tahu apa Barack Obama benar lahir di Amerika Serikat.... Tapi saya tahu bahwa dalam hatinya, dia bukan orang Amerika. Dia benar-benar bukan orang Amerika." Setidaknya delapan belas senator dan anggota DPR dari Partai Republik disebut "pendukung *birther*" karena menolak menyangkal mitos itu. Senator Roy Blunt, James Inhofe, Richard Shelby,

dan David Vitter, mantan calon wakil presiden Sarah Palin, dan calon presiden 2012 Mike Huckabee semuanya pernah membuat pernyataan mendukung atau menyemangati kampanye *birther*.

Birther paling terkenal ialah Donald Trump. Pada musim semi 2011, selagi mempertimbangkan akan maju sebagai calon presiden di pemilu 2012, Trump berkata di acara *Today* bahwa dia "meragukan" apakah Presiden Obama benar warga negara AS yang terlahir di AS. "Saya punya orang-orang yang sedang mempelajarinya," kata Trump, "dan mereka tak percaya apa yang mereka temukan." Trump menjadi *birther* paling terkenal di Amerika, berkali-kali muncul di program berita televisi untuk menyeru sang presiden agar memperlihatkan akte kelahirannya. Dan ketika akte kelahiran Obama diperlihatkan kepada publik pada 2011, Trump menuding akte itu palsu. Walau Trump memilih tidak bersaing dengan Obama pada 2012, pertanyaannya mengenai kebangsaan Presiden Obama memberi dia perhatian media dan membuat dia disukai kelompok Tea Party di Partai Republik. Intoleransi itu berguna secara politis.

Serangan seperti itu punya riwayat panjang dan tak terpuji dalam sejarah Amerika. Henry Ford, Romo Coughlin, dan John Birch Society semuanya menggunakan bahasa serupa. Namun tantangan ke legitimasi Obama berbeda dalam dua hal. Pertama, tantangan itu tak terbatas di pinggir, tapi justru diterima secara luas oleh para pemilih Republik. Menurut satu jajak pendapat Fox News tahun 2011, 37 persen pemilih Republik percaya Presiden Obama tak lahir di Amerika Serikat, dan 63 persen berkata mereka meragukan asal-usul Obama. Empat puluh tiga persen pemilih Republik mengaku percaya Obama itu Muslim di jajak pendapat CNN/ORC, dan satu jajak pendapat *Newsweek* mendapati bahwa mayoritas pemilih Republik percaya Presiden Obama mengutamakan kepentingan Muslim ketimbang kepentingan orang beragama lain.

Kedua, tak seperti episode-episode ekstremisme terdahulu, gelombang itu mencapai lapisan atas Partai Republik. Dengan kekecualian periode McCarthy, dua partai besar biasanya menjaga intoleransi ter-

hadap satu sama lain selama seabad lebih. Baik Romo Coughlin maupun John Birch Society tak didengar para pemimpin tertinggi partai. Namun serangan terbuka terhadap legitimasi Presiden Obama (dan belakangan Hillary Clinton) dilakukan oleh politikus nasional terkemuka. Pada 2010 Sarah Palin menyarankan kepada Partai Republik agar "menyerap sebanyak mungkin gerakan Tea Party." Partai Republik melakukan itu. Para senator, gubernur, dan bahkan calon presiden Partai Republik meniru bahasa kelompok pinggiran, dan diikuti para donor Partai Republik yang memandang gerakan Tea Party sebagai kesempatan untuk mendorong Partai Republik bersikap makin keras terhadap pemerintahan Obama. Organisasi-organisasi berdana besar seperti Freedom Works dan Americans for Prosperity dan komite-komite aksi politik seperti Tea Party Express dan Tea Party Patriots mensponsori lusinan calon Partai Republik. Pada 2010, lebih dari seratus calon yang didukung Tea Party berusaha meraih kursi Kongres, dan empat puluh lebih terpilih. Pada 2011, Kaukus Tea Party DPR punya enam puluh anggota, dan pada 2012, orang-orang yang ramah terhadap Tea Party ikut bersaing menjadi calon presiden dari Partai Republik. Pada 2016, calon presiden dari Partai Republik adalah seorang *birther*, ditetapkan di konvensi nasional partai di mana para pemimpin Partai Republik menyebut pesaing mereka di Partai Demokrat sebagai kriminal dan memimpin seruan "Penjarakan dia".

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa, tokoh-tokoh Partai Republik—termasuk yang akan menjadi presiden—terang-terangan meninggalkan norma saling toleransi, didorong kelompok pinggiran yang tak lagi ada di pinggiran. Pada akhir masa kepresidenan Obama, banyak orang Partai Republik berpandangan bahwa pesaing mereka di Partai Demokrat itu anti-Amerika atau mengancam cara hidup Amerika. Itu berbahaya. Ekstremisme seperti demikian mendorong politikus meninggalkan sikap menahan diri. Bila Barack Obama adalah "ancaman terhadap supremasi hukum", seperti dikatakan Senator Ted Cruz, maka penunjukan hakim oleh Obama mesti dihadap dengan segala cara.

Meningkatnya intoleransi partisan pun menyebabkan berkurangnya

sikap menahan diri secara kelembagaan selama masa Obama. Tak lama sesudah Presiden Obama terpilih, sekelompok anggota DPR muda, dipimpin Kevin McCarthy, Eric Cantor, dan Paul Ryan, mengadakan serangkaian pertemuan untuk mengembangkan strategi guna menghadapi pemerintahan baru. Para "Young Guns" itu memutuskan untuk membuat Partai Republik menjadi "Partai Tidak". Amerika Serikat sedang berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Besar, namun para anggota legislatif Partai Republik berencana *tidak* bekerja sama dengan pemerintahan baru. Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell menyuarakan sentimen itu ketika menyatakan "hal paling penting yang kami ingin capai [di Senat] adalah membuat Presiden Obama hanya menjabat satu kali masa jabatan." McConnell juga mencoba menghalangi. Rancangan undang-undang pertama yang diterima Senat pada Januari 2009 adalah Public Land Management Act yang biasa-biasa saja—aturan pelestarian bipartisan untuk mengamankan delapan ratus ribu hektar alam liar di sembilan negara bagian. Seolah mau mengirim pesan, Partai Republik melakukan *filibuster* terhadap rancangan undang-undang itu.

Perilaku tersebut menjadi praktik standar. Hadangan Senat meningkat sesudah 2008. "Jeda" Senat, yang secara tradisional digunakan untuk menunda debat di sidang sampai seminggu agar para senator punya waktu lebih lama untuk bersiap, menjadi "tak terbatas atau berubah jadi veto permanen". Antara 2007 dan 2012, 385 *filibuster* dilakukan—sama dengan jumlah total *filibuster* dalam tujuh dasawarsa antara Perang Dunia I dan akhir masa pemerintahan Reagan. Dan orang-orang Partai Republik di Senat terus menggunakan proses persetujuan atas pengajuan hakim sebagai alat partisan: tingkat penerimaan hakim yang diajukan presiden, di atas 90 persen pada 1980-an, jatuh menjadi di bawah 50 persen pada masa Presiden Obama.

Partai Demokrat menanggapi dengan melanggar norma juga. Pada November 2013, orang-orang Partai Demokrat di Senat mengadakan pemungutan suara untuk menghapuskan *filibuster* terhadap sebagian besar pengajuan hakim oleh presiden, termasuk hakim federal (tapi

bukan hakim agung), suatu langkah yang sangat ekstrem sampai-sampai disebut secara luas sebagai "pilihan nuklir". Para senator Republik mengkritik "penggunaan kekuasaan politik mentah" Demokrat, tapi Presiden Obama membelanya, menyatakan bahwa *filibuster* telah berubah menjadi suatu "alat penghalang secara serampangan" dan berkata bahwa "pola penghadangan hari ini ... tidak normal; bukan ini yang dibayangkan para pendiri negara."

Presiden Obama juga menanggapi dengan melanggar norma—dalam bentuk tindakan eksekutif sepihak. Pada Oktober 2011, sang presiden menyampaikan sesuatu yang menjadi mantranya untuk mencapai tujuan kebijakan: "Kami tak bisa menunggu Kongres yang makin tak berfungsi untuk bekerja," katanya kepada audiens di Nevada. "Kalau mereka tak mau bergerak, saya akan bergerak." Obama mulai menggunakan wewenang eksekutif dalam cara yang boleh jadi dia tak harapkan sebelum menjabat. Pada 2010, di hadapan kongres yang gagal menyepakati satu rancangan undang-undang energi, dia mengeluarkan suatu "memorandum eksekutif" yang memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah menaikkan standar efisiensi bahan bakar untuk semua mobil. Pada 2012, menanggapi ketidakmampuan Kongres mengesahkan reformasi imigrasi, dia mengumumkan tindakan eksekutif untuk menghentikan deportasi imigran ilegal yang datang ke Amerika Serikat sebelum umur enam belas dan sedang bersekolah, atau lulusan SMA, atau veteran militer. Pada 2015, Presiden Obama menanggapi penolakan Kongres mengesahkan undang-undang untuk melawan perubahan iklim dengan mengeluarkan perintah eksekutif kepada semua lembaga federal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Karena tak bisa mendapat persetujuan Senat untuk perjanjian nuklir dengan Iran, pemerintahan Obama merundingkan suatu "kesepakatan eksekutif", yang tidak memerlukan persetujuan Senat karena bukan merupakan perjanjian formal. Tindakan sang presiden tidak keluar dari batas konstitusional, tapi dengan bertindak sepihak untuk mencapai tujuan yang telah dihalangi Kongres, Presiden Obama melanggar norma menahan diri.

Upaya Presiden Obama melangkahi Kongres memicu eskalasi lebih lanjut. Pada Maret 2015, para pemimpin fraksi Republik di Senat secara terbuka mendorong negara-negara bagian AS untuk menentang otoritas presiden. Di satu kolom di *Lexington Herald Leader*, Mitch McConnell mengajak negara-negara bagian mengabaikan perintah Obama untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Itu suatu pelemahan otoritas federal yang luar biasa. Tahun berikutnya, para anggota legislatif negara bagian Arizona memperdebatkan dan nyaris mengesahkan satu rancangan undang-undang yang melarang pemerintah negara bagian menggunakan pegawai atau sumber dayanya untuk menegakkan perintah eksekutif yang tak disahkan lewat pemungutan suara di Kongres. Seperti kata tajuk rencana *New York Times*, "Kedengarannya seperti wacana separatis John Calhoun pada 1828, South Carolina Exposition and Protest."

Tiga peristiwa dramatis selama masa kepresidenan Obama mengungkapkan betapa parahnya erosi norma menahan diri. Yang pertama adalah krisis tahun 2011 mengenai batas utang federal. Karena kegagalan menaikkan batas atas utang dapat menyebabkan pemerintah AS pailit, menghancurkan penilaian kredit Amerika dan berpotensi menggombang-bandingkan ekonomi, menurut teori Kongres dapat menggunakan batas utang sebagai "sandera", menolak menaikkannya kecuali kalau presiden memenuhi permintaan tertentu. Sikap luar biasa mendesak itu tak pernah dipertimbangkan serius—sebelum 2011. Menaikkan batas atas utang biasanya adalah praktik bipartisan sejak dulu: antara 1960 dan 2011 batas atas utang sudah dinaikkan 78 kali, 49 kali di bawah presiden dari Partai Republik dan 29 kali di bawah Demokrat. Walau prosesnya sering sengit, para pemimpin kedua partai tahu bahwa itu hanyalah lagak politik.

Perubahan terjadi sesudah Partai Republik yang didorong sekelompok anggota dewan yang didukung Tea Party mengendalikan Kongres pada 2011. Mereka bukan hanya bersedia menggunakan batas utang sebagai sandera; banyak di antara mereka yang bersedia menghapuskannya—"meruntuhkan keseluruhan sistem"—bila tuntutan mereka, yaitu pemotongan pengeluaran secara dramatis, tak dipenuhi. Dua senator

yang didukung Tea Party, Pat Toomey (Pennsylvania) dan Mike Lee (Utah) secara terbuka menyerukan pailit bila Presiden Obama tak mau memenuhi permintaan mereka. Anggota Kongres Jason Chaffetz berkata sesudahnya, "Kami tak bercanda ... kami bakal benar-benar menghapuskannya." Walau kesepakatan pada saat terakhir mencegah pemerintah pailit, namun kerusakan besar sudah terjadi. Pasar menanggapi dengan buruk, dan Standard & Poor's menurunkan penilaian kredit Amerika untuk pertama kali dalam sejarah.

Pada Maret 2015 ada lagi satu peristiwa yang baru pertama terjadi, ketika senator Arkansas Tom Cotton dan empat puluh enam senator Partai Republik lain menulis surat terbuka untuk para pemimpin Iran, bersikeras menyatakan bahwa Presiden Obama tak berwenang merundingkan kesepakatan terkait program nuklir Iran. Para senator Republik, yang menentang kesepakatan dengan Iran dan marah karena keputusan Obama menggunakan "kesepakatan eksekutif" ketimbang perjanjian resmi, mengintervensi dalam perundingan diplomatik, yang sejak dulu adalah wilayahnya cabang eksekutif. Senator Florida Bill Nelson, seorang Demokrat moderat, menyebut surat itu "bikin melongo.... Saya tak bisa tak memikirkan, apa saya sendiri bakal menandatangani surat serupa pada masa Presiden George W. Bush? Saya tak bakal terpikir begitu." Cotton dan kawan-kawan seenaknya mencoba melemahkan wewenang presiden yang sedang menjabat.

Momen pelanggaran norma ketiga adalah penolakan Senat menerima pengajuan Merrick Garland sebagai hakim agung oleh Presiden Obama pada 2016. Perlu diulang, sejak Rekonstruksi belum pernah terjadi seorang presiden ditolak pengajuan hakim agungnya sebelum pemilihan penggantinya. Namun ancaman penghadangan tak berhenti di sana. Menjelang pemilihan umum 2016, ketika diyakini secara luas bahwa Hillary Clinton bakal menang, beberapa senator Partai Republik, termasuk Ted Cruz, John McCain, dan Richard Burr, berjanji akan menolak semua calon hakim agung yang diajukan Clinton selama empat tahun, efektif memperkecil jumlah hakim agung menjadi delapan. Burr, senator dari North Carolina, memberitahu para sukarelawan

Republik dalam pertemuan tertutup bahwa "bila Hillary Clinton menjadi presiden, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan bahwa empat tahun lagi kita masih punya kursi kosong di Mahkamah Agung." Walau Konstitusi tak menetapkan ukuran Mahkamah Agung, jumlah sembilan hakim agung sudah lama menjadi tradisi. Partai Republik dan Demokrat sama-sama pernah membela otonomi Mahkamah Agung terhadap tindakan berlebihan Presiden Roosevelt pada 1937. Itu sekarang tak terbayangkan. Walau Ted Cruz mengaku ada "preseden sejarah" untuk mengubah ukuran Mahkamah Agung, preseden itu sudah mati tak lama setelah Perang Saudara AS. Inisiatif Cruz bakal memutuskan satu norma berumur 147 tahun.

Dengan taktik seperti itu, Partai Republik telah mulai berperilaku seperti partai politik antisistem. Menjelang akhir masa kepresidenan Obama, pagar lunak demokrasi mulai rapuh.

Andaikan, dua puluh lima tahun lalu, seseorang menjabarkan kepada Anda suatu negara di mana calon presiden mengancam akan memenjarakan pesaingnya, lawan politik menuduh pemerintah mengakali pemilu atau membentuk kediktatoran, dan partai menggunakan posisi mayoritas di badan legislatif untuk memakzulkan presiden dan mencuri posisi hakim agung, boleh jadi Anda terpikir Ekuador atau Romania. Barangkali Anda tak bakal memikirkan Amerika Serikat.

Di balik buyarnya norma-norma dasar saling toleransi dan menahan diri, ada sindrom polarisasi partisan intens. Walau awalnya adalah radikalisasi Partai Republik, akibat polarisasi itu telah dirasakan di seluruh sistem politik Amerika. Penghentian pemerintahan, penyanjeraan legislatif, perubahan daerah pemilihan di luar jadwal, dan penolakan terhadap pengajuan calon hakim agung bukan lagi kejadian luar biasa. Selama seperempat abad terakhir, Partai Demokrat dan Republik telah berubah menjadi bukan hanya dua partai yang bersaing, mewakili kubu liberal dan konservatif. Para pemilih kedua partai kini terbelah dalam hal ras, agama, geografi, dan bahkan "cara hidup".

Pertimbangkan temuan luar biasa berikut: Pada 1960, para ahli

ilmu politik bertanya kepada warga Amerika Serikat, bagaimana perasaan mereka bila anak mereka menikah dengan seseorang yang memilih partai politik yang beda dengan mereka. Empat persen pemilih Demokrat dan lima persen pemilih Republik menyatakan mereka bakal "tak suka". Sementara itu pada 2010, 33 persen pemilih Demokrat dan 49 persen pemilih Republik menyatakan "tak suka" atau "sangat tak suka" dengan pernikahan lintas partai. Menjadi pendukung Partai Demokrat atau Republik kini bukan hanya afiliasi partisan, melainkan identitas. Survei tahun 2016 yang dilaksanakan Pew Foundation mendapati bahwa 49 persen pemilih Republik dan 55 persen pemilih Demokrat berkata partai yang bukan pilihan mereka membuat mereka "takut". Di antara orang Amerika yang terlibat politik, jumlahnya lebih tinggi lagi—70 persen anggota Partai Demokrat dan 62 persen anggota Partai Republik berkata mereka hidup dalam ketakutan terhadap partai lain.

Survei-survei itu menunjukkan kebangkitan suatu fenomena berbahaya dalam perpolitikan Amerika Serikat: permusuhan partisan yang kuat. Akar fenomena itu berada di pergeseran partisan jangka panjang yang mulai terjadi pada 1960-an. Selama sebagian besar abad ke-20, partai-partai Amerika adalah "tenda besar" ideologis, masing-masing meliputi konstituen yang beragam dan kisaran pandangan politik yang lebar. Partai Demokrat mewakili koalisi New Deal beranggotakan kelompok liberal, serikat buruh, imigran Katolik generasi kedua dan ketiga, dan orang Afrika-Amerika, tapi juga mewakili orang kulit putih konservatif di AS Selatan. Sementara itu Partai Republik mencakup kelompok liberal di Timur Laut sampai konservatif di Barat Tengah dan Barat. Kelompok Kristen Evangelis ada di kedua partai, dan sedikit lebih banyak di antara mereka yang mendukung Demokrat—jadi kedua partai tak dapat saling tuding "tanpa Tuhan".

Karena kedua partai amat heterogen di dalam, maka polarisasi antara keduanya jauh lebih rendah daripada sekarang. Orang-orang Partai Republik dan Demokrat di Kongres berbeda pendapat di isu-isu seperti pajak dan pembelanjaan, peraturan pemerintah, dan serikat

buruh, tapi kedua partai sependapat mengenai isu ras yang berpotensi meledak. Walau kedua partai berisi faksi yang mendukung hak sipil, perlawanan dari Demokrat AS selatan dan kendali strategis atas sistem komite Kongres membuat isu ras tak masuk agenda. Keragaman internal itu mengurangi konflik. Bukannya memandang lawan sebagai musuh, Partai Republik dan Demokrat sering menemukan kesamaan. Kelompok liberal Demokrat dan Republik sering sama-sama memberi suara mendukung hak sipil di Kongres, sementara Demokrat selatan dan Republik utara sayap kanan membuat "koalisi konservatif" di Kongres untuk menghadangnya.

Gerakan hak sipil, yang berpuncak di Civil Rights Act 1964 dan Voting Rights Act 1965, mengakhiri tatanan partisan tersebut. Berakhirnya tatanan partisan liberal-konservatif lintas partai bukan hanya mendemokratiskan AS Selatan pada akhirnya dengan memberi hak suara kepada orang kulit hitam dan mengakhiri kekuasaan partai tunggal, melainkan juga mempercepat pergeseran sistem partai jangka panjang yang akibatnya masih terasa sampai sekarang. Civil Rights Act, yang diterima Presiden Lyndon Johnson dari Partai Demokrat dan ditolak calon presiden tahun 1964 dari Partai Republik Barry Goldwater, membuat Partai Demokrat menjadi partai pendukung hak sipil dan Partai Republik menjadi partai pendukung status quo kulit putih. Pada dasawarsa-dasawarsa berikutnya, orang-orang kulit putih AS Selatan makin banyak pindah ke Partai Republik. Daya tarik rasial "Strategi Selatan" Nixon, dan kemudian pesan-pesan terselubung Ronald Reagan mengenai ras, menyerukan kepada para pemilih bahwa Partai Republik adalah rumah bagi kelompok konservatif rasial kulit putih. Pada akhir abad ke-20, daerah yang tadinya basis Partai Demokrat berubah menjadi basis Partai Republik. Pada waktu yang sama, orang-orang kulit hitam di selatan—yang untuk pertama kalinya bisa memilih sesudah hampir seabad—berhimpun di Partai Demokrat, seperti banyak orang liberal utara pendukung hak sipil yang tadinya mendukung Partai Republik. Selagi AS selatan berubah menjadi basis Republik, AS timur laut menjadi biru, warna Demokrat.

Pergeseran pasca-1965 juga mengawali suatu proses pemilahan pemilih berdasarkan ideologi. Untuk pertama kali dalam hampir seabad, sikap partisan dan ideologi menjadi sejalan, Partai Republik menjadi secara umum konservatif dan Partai Demokrat menjadi secara umum liberal. Menginjak tahun 2000-an, Partai Demokrat dan Republik bukan lagi "tenda besar" ideologis. Dengan lenyapnya kelompok konservatif Demokrat dan liberal Republik, kesamaan kepentingan antarpartisipasi pelan-pelan menghilang. Setelah sebagian besar senator dan anggota DPR punya kepentingan sama dengan orang-orang separtai dan bukan dengan anggota partai lawan, mereka jadi lebih jarang bekerja sama dengan anggota partai lain dan konsisten memberi suara sejalan dengan partai sendiri. Selagi pemilih dan calon yang dipilih mengelompok menjadi "kubu-kubu" yang makin seragam, perbedaan ideologi antarpartisipasi tumbuh makin mencolok.

Namun pemilahan pemilih Amerika Serikat menjadi Demokrat liberal dan Republik konservatif tak cukup untuk menjelaskan besarnya permusuhan partisan yang muncul di Amerika. Itu juga tak menjelaskan mengapa polarisasinya begitu asimetris, menggeser Partai Republik lebih jauh ke kanan dibanding Partai Demokrat ke kiri. Partai-partai yang terpilah secara ideologis tak mesti memunculkan "rasa takut dan benci" yang menggerus norma saling toleransi, yang menyebabkan politikus mulai mempermasalahkan legitimasi pesaing. Pemilih terbelah secara ideologis di Britania, Jerman, dan Swedia, tapi di semua negara itu tak ada kebencian partisan seperti yang kita lihat sekarang di Amerika Serikat.

Pergeseran telah melampaui liberal lawan konservatif. Dasar sosial, etnis, dan budaya untuk sikap partisan juga sudah berubah secara dramatis, memunculkan partai-partai yang bukan hanya mewakili berbagai pendekatan terhadap kebijakan melainkan komunitas, budaya, dan nilai berbeda. Kita sudah menyebut salah satu pendorong besarnya gerakan hak sipil. Namun keragaman etnis Amerika tidak terbatas di hak suara untuk orang kulit hitam saja. Sejak 1960-an, Amerika Serikat mengalami satu gelombang imigrasi besar, pertama-tama dari Amerika

Latin dan kemudian dari Asia, yang telah secara dramatis mengubah peta demografi negara. Pada 1950-an, orang bukan kulit putih hanya 10 persen dari penduduk AS. Pada 2014, orang bukan kulit putih merupakan 38 persen penduduk AS, dan Biro Sensus AS memproyeksikan bahwa pada 2044 mayoritas penduduk AS adalah orang bukan kulit putih.

Bersama hak suara bagi orang kulit hitam, imigrasi telah mengubah partai-partai politik Amerika. Para pemilih baru itu sebagian besar mendukung Partai Demokrat. Suara Demokrat dari kalangan bukan kulit putih naik dari 7 persen pada 1950-an ke 44 persen pada 2012. Sementara itu, pemilih Republik masih hampir 90 persen berkulit putih pada 2000-an. Jadi selagi Demokrat makin menjadi partainya minoritas etnis, Partai Republik tetap menjadi partai yang hampir seluruhnya berkulit putih.

Partai Republik juga telah menjadi partai orang Kristen evangelis. Kelompok evangelis masuk politik secara besar-besaran pada akhir 1970-an, sebagian besar termotivasi putusan Mahkamah Agung *Roe vs Wade* tahun 1973 yang melegalkan aborsi. Diawali Ronald Reagan pada 1980, Partai Republik merangkul kelompok Kristen Kanan dan memosisikan diri makin pro-evangelis, antara lain menentang aborsi, mendukung doa di sekolah, dan belakangan menentang pernikahan gay. Kelompok evangelis kulit putih—yang tadinya cenderung ke Partai Demokrat pada 1960-an—mulai memberi suara untuk Partai Republik. Pada 2016, 76 persen kelompok evangelis kulit putih mengaku sebagai pemilih Partai Republik. Sementara itu pemilih Demokrat makin sekuler. Persentase orang kulit putih pemilih Demokrat yang ke gereja secara teratur turun dari hampir 50 persen pada 1960-an menjadi di bawah 30 persen pada 2000-an.

Itu perubahan yang luar biasa. Seperti ditunjukkan ahli ilmu politik Alan Abramowitz, pada 1950-an orang Kristen berkulit putih yang menikah adalah mayoritas—hampir 80 persen—pemilih Amerika Serikat, terbagi hampir rata di antara kedua partai. Pada 2000-an, orang Kristen berkulit putih yang menikah hanya 40 persen pemilih, dan terkonsentrasi di Partai Republik. Dengan kata lain, kedua partai sekarang

terbelah berdasarkan ras dan agama—dua isu pembelah yang cenderung menimbulkan intoleransi dan permusuhan lebih besar dibanding isu kebijakan tradisional seperti pajak dan belanja pemerintah.

Maka, pada 2000-an pemilih Partai Demokrat dan Republik, dan para politikus yang mewakili mereka, lebih terbelah daripada dalam abad sebelumnya. Namun mengapa sebagian besar pelanggaran norma dilakukan oleh Partai Republik?

Pertama, perubahan bentang media berdampak lebih kuat ke Partai Republik. Pemilih Republik lebih mengandalkan media partisan dibanding pemilih Demokrat. Pada 2010, 69 persen pemilih Republik adalah penonton Fox News. Dan pembawa acara bincang-bincang radio terkenal seperti Rush Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage, Mark Levin, dan Laura Ingraham, yang semuanya membantu melegitimasi penggunaan wacana tak santun, tak punya tandingan di kalangan liberal.

Bangkitnya media sayap kanan juga memengaruhi para pejabat dari Partai Republik. Selama pemerintahan Obama, para komentator Fox News dan tokoh radio sayap kanan hampir seragam memegang posisi "tanpa kompromi", dengan ganas menyerang tiap politikus Partai Republik yang menyimpang dari jalur partai. Ketika wakil California dari Partai Republik, Darrell Issa, menyatakan bahwa Partai Republik dapat mencapai lebih banyak agendanya bila bersedia bekerja sama sekali-sekali dengan Presiden Obama, Rush Limbaugh memaksa Issa menarik kembali klaimnya di muka umum dan bersumpah setia ke agenda penghadangan. Seperti dikatakan mantan Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, Trent Lott: "Bila kita menyimpang sedikit saja dari posisi kanan ekstrem, kita dihajar media konservatif."

Posisi garis keras diperkuat oleh kelompok kepentingan berdana besar. Pada akhir 1990-an, organisasi-organisasi seperti Americans for Tax Reform pimpinan Grover Norquist dan Club for Growth menjadi suara terkemuka di Partai Republik, menarik para politikus Republik menuju posisi yang lebih kaku secara ideologis. Norquist menuntut para

anggota kongres dari Partai Republik menandatangani surat perjanjian "tanpa pajak", intinya memaksa mereka bersikap menghalangi. Sebagian berkat pelanggaran aturan pembiayaan kampanye pada 2010, kelompok-kelompok luar seperti Americans for Prosperity dan American Energy Alliance—banyak di antaranya merupakan bagian jejaring keluarga miliarder Koch—mendapat pengaruh besar di Partai Republik selama masa Obama. Pada 2012 saja, keluarga Koch menanggung biaya pemilu sekitar \$400 juta. Bersama Tea Party, jejaring Koch dan organisasi-organisasi lain yang serupa membantu terpilihnya generasi baru Partai Republik yang menganggap *kompromi* sebagai kata kotor. Partai dengan inti yang dikuasai donor dan kelompok penekan juga lebih rentan terhadap kekuatan ekstremis.

Namun bukan hanya media dan kepentingan luar yang telah mendorong Partai Republik menuju ekstremisme. Perubahan sosial dan budaya juga berperan besar. Tak seperti Partai Demokrat, yang telah tumbuh menjadi makin beragam dalam beberapa puluh tahun terakhir, Partai Republik tetap seragam secara budaya. Itu penting karena para pemilih inti partai itu, orang-orang kulit putih Protestan, bukan sembarang konstituen—selama hampir dua abad, mereka merupakan mayoritas pemilih AS dan dominan dalam politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat Amerika. Kini orang kulit putih Protestan menjadi minoritas pemilih—dan proporsi mereka makin kecil. Mereka pun bercokol di Partai Republik.

Dalam esai tahun 1964 "The Paranoid Style in American Politics", ahli sejarah Richard Hofstadter menjabarkan fenomena "kegelisahan status" (*status anxiety*), yang dia percayai paling mungkin muncul ketika status sosial, identitas, dan rasa terlibat suatu kelompok dianggap terancam keberadaannya. Itu menyebabkan gaya politik yang "terlalu panas, terlalu curiga, terlalu agresif, membesar-besarkan, dan apokaliptik". Setengah abad sesudah publikasinya, esai Hofstadter boleh jadi makin relevan. Perjuangan melawan kemerosotan dari status mayoritas menjadi sebagian besar alasan yang mengobarkan rasa permusuhan kuat khas kelompok Kanan Amerika. Bukti jajak pendapat memberi kesan

bahwa banyak pendukung Tea Party Republik berpandangan bahwa negara tempat mereka tumbuh "sedang berubah, terancam oleh pesatnya perubahan wajah apa yang mereka percayai sebagai Amerika 'sejati'." Mengutip judul buku karya ahli sosiologi Arlie Hochschild, mereka memandang diri sendiri sebagai "orang asing di negeri sendiri".

Persepsi itu boleh jadi menjelaskan bangkitnya wacana yang membedakan "orang Amerika sejati" dengan mereka yang dikaitkan dengan kelompok liberal dan Partai Demokrat. Bila definisi "orang Amerika sejati" dibatasi hanya bagi mereka yang lahir di Amerika Serikat, berbahasa Inggris, berkulit putih, dan beragama Kristen, maka gampang saja melihat bagaimana "orang Amerika sejati" bisa memandang golongannya merosot. Seperti dikatakan Ann Coulter, "Pemilih Amerika bukan bergerak ke kiri—melainkan menciut." Persepsi di antara banyak pendukung Tea Party Republik bahwa Amerika mereka menghilang membantu kita mengerti daya tarik slogan-slogan seperti "Take Our Country Back" atau "Make America Great Again". Bahaya bujukan semacam itu adalah karena mengecap pendukung Partai Demokrat sebagai *bukan* orang Amerika sejati adalah serangan langsung ke sikap saling toleransi.

Para politikus Partai Republik dari Newt Gingrich sampai Donald Trump belajar bahwa dalam suatu masyarakat yang terpolarisasi, memperlakukan pesaing sebagai musuh bisa berguna—dan bahwa anggapan politik sebagai perang bisa menarik bagi mereka yang takut kehilangan banyak hal. Namun perang selalu ada harganya. Serangan gencar terhadap norma saling toleransi dan menahan diri—sebagian besar, meski tidak semua, oleh Partai Republik—telah menggerus pagar lunak yang sudah lama melindungi kita dari jenis pertarungan partisan sampai mati yang telah menghancurkan demokrasi di bagian dunia lain. Ketika Donald Trump mulai menjabat pada Januari 2017, pagar itu masih ada, tapi lebih lemah daripada abad kemarin—dan keadaan akan memburuk.

8

Tahun Pertama Trump: Rapor Otoriter

Tahun pertama Donald Trump menjabat mengikuti skenario yang lazim. Seperti Alberto Fujimori, Hugo Chávez, dan Recep Tayyip Erdoğan, sang presiden baru Amerika memulai masa jabatannya dengan melancarkan serangan retorik sengit ke lawan-lawannya. Dia menyebut media "musuh rakyat Amerika", mempertanyakan legitimasi hakim, dan mengancam memotong pendanaan federal ke kota-kota besar. Serangan-serangan itu jelas memicu rasa gusar, kaget, dan marah di seluruh sisi perpolitikan. Para jurnalis jadi berada di garis depan, mengungkap—juga memicu—perilaku pelanggaran norma oleh presiden. Penelitian Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy mendapati bahwa saluran-saluran berita utama "tak kenal ampun" dalam meliput seratus hari pertama pemerintahan Trump. Dari berita bernada jernih, penelitian itu mendapati 80 persennya negatif—jauh lebih tinggi daripada Clinton (60 persen), George W. Bush (57 persen), dan Obama (41 persen).

Para pejabat pemerintahan Trump pun segera merasa terkepung. Tak pernah satu minggu berlalu tanpa liputan pers yang setidaknya 70 persen negatif. Dan di tengah beredarnya desas-desus mengenai kaitan kampanye Trump dan Rusia, seorang ahli hukum khusus terkemuka, Robert Mueller, ditunjuk untuk mengawasi penyelidikan atas kasus tersebut. Baru beberapa bulan menjabat, Presiden Trump sudah meng-

hadapi isu pemakzulan. Namun dia tetap mendapat dukungan basisnya, dan seperti para demagog terpilih lain, dia berusaha bertahan. Dia menyatakan bahwa pemerintahannya diserang kekuatan-kekuatan besar dan mapan, dan dia memberitahu para lulusan Akademi Penjaga Pantai AS bahwa "tak ada politikus dalam sejarah, dan saya mengatakan ini dengan amat yakin, yang telah diperlakukan dengan lebih buruk atau lebih tak adil." Maka pertanyaannya adalah bagaimana Trump bakal menanggapi. Apakah seorang presiden yang tadinya orang luar lalu merasa diserang secara tak adil bakal memukul balik dengan keras, seperti yang terjadi di Peru dan Turki?

Presiden Trump menunjukkan naluri otoriter dengan jelas selama tahun pertamanya menjabat. Di Bab 4, kami menyajikan tiga strategi pemimpin otoriter hasil pemilu untuk konsolidasi kekuasaan: menangkap wasit, menyingkirkan pemain-pemain kunci, dan mengubah aturan agar merugikan lawan. Trump mencoba *ketiganya*.

Presiden Trump menunjukkan permusuhan mencolok terhadap para wasit—penegak hukum, intelijen, badan etika, dan pengadilan. Tak lama sesudah dilantik, dia berusaha memastikan bahwa para kepala badan intelijen AS, termasuk FBI, CIA, dan National Security Agency, bakal setia secara pribadi kepada dia, rupanya dengan harapan menggunakan badan-badan itu sebagai perisai untuk melindungi diri dari penyelidikan terhadap dugaan hubungan dengan Rusia dalam kampanyenya. Selama minggu pertama menjabat, Presiden Trump memanggil Direktur FBI James Comey untuk makan malam empat mata di Gedung Putih, di mana menurut Comey sang presiden meminta dia berjanji setia. Belakangan Trump dilaporkan menekan Comey agar menghentikan penyelidikan terhadap mantan direktur keamanan nasional Trump, Michael Flynn; mendesak Direktur National Intelligence Daniel Coats dan Direktur CIA Mike Pompeo untuk mengintervensi penyelidikan Comey, dan secara pribadi meminta Coats dan kepala NSA Michael Rogers untuk mengeluarkan pernyataan menyangkal adanya kolusi apa pun dengan Rusia (keduanya menolak).

Presiden Trump juga mencoba menghukum atau membersihkan lembaga-lembaga yang bertindak independen. Yang paling terkenal, dia membebastugaskan Comey sesudah jelas bahwa Comey tak bisa ditekan agar melindungi pemerintahan, dan malah memperluas penyelidikan terkait Rusia. Sepanjang sejarah FBI selama delapan puluh dua tahun, hanya satu kali seorang presiden memecat direktur biro itu sebelum masa jabatan sepuluh tahun sang direktur habis—dan dalam kasus itu, pemecatan merupakan tanggapan terhadap pelanggaran etika yang jelas dan didukung kedua partai.

Pemecatan Comey bukan satu-satunya serangan Presiden Trump terhadap wasit yang menolak membelanya secara pribadi. Trump telah mencoba menjalin hubungan pribadi dengan Jaksa Agung AS Preet Bharara yang berada di Manhattan, ketika penyelidikan mengenai pencucian uang konon mengancam lingkaran dalam Trump; ketika Bharara, seorang tokoh antikorupsi yang dihormati, melanjutkan penyelidikan, presiden mencopot dia. Sesudah Jaksa Agung Jeff Sessions mengundurkan diri dari penyelidikan Rusia dan wakilnya, Rod Rosenstein, menunjuk mantan Direktur FBI Robert Mueller yang dihormati sebagai ahli hukum khusus untuk mengawasi penyelidikan, Trump mempermalukan Sessions di depan umum, konon agar Sessions mengundurkan diri. Para pengacara Gedung Putih bahkan melancarkan upaya mencari-cari kesalahan Mueller, mengorek konflik kepentingan yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan atau menyingkirkan Mueller. Pada akhir 2017, banyak sekutu Trump terang-terangan menyerukan pemecatan Mueller, dan ada kekhawatiran luas bahwa Trump bakal segera melakukan itu.

Upaya Presiden Trump menggagalkan penyelidikan independen menyerupai serangan terhadap wasit yang biasa dilihat di negara-negara kurang demokratis—contohnya, pemecatan Jaksa Agung Venezuela Luisa Ortega, yang ditunjuk *chavista* tapi menyatakan independensi dan mulai menyelidiki korupsi dan penyalahgunaan di pemerintahan Maduro. Walau masa jabatan Ortega baru berakhir pada 2021 dan dia hanya bisa diberhentikan secara legal oleh badan legislatif (yang

dikuasai oposisi), Majelis Konstituante yang ditunjuk secara meragukan oleh pemerintah memecat Ortega pada Agustus 2017.

Presiden Trump juga menyerang hakim yang putusannya bertenangan dengan dia. Sesudah Hakim James Robart di Pengadilan Banding AS Wilayah Ke-9 menghalangi pelarangan perjalanan oleh pemerintahan Trump, Trump berbicara mengenai "pendapat seorang hakim, yang intinya mencabut penegakan hukum dari negara kita." Dua bulan kemudian, ketika pengadilan yang sama untuk sementara menghalangi penghentian dana federal untuk kota-kota suaka, Gedung Putih mencela putusan itu sebagai serangan terhadap supremasi hukum oleh seorang "hakim yang tak dipilih". Trump sendiri menanggapi dengan mengancam membubarkan Wilayah Ke-9.

Presiden menyerang badan yudikatif secara tak langsung pada Agustus 2017 ketika dia memberi ampunan terhadap mantan *sheriff* Arizona yang kontroversial, Joe Arpaio, yang didakwa melanggar perintah pengadilan federal untuk menghentikan tindakan mencurigai orang berdasarkan ras. Arpaio sekutu politik dan pahlawan bagi banyak pendukung Trump yang anti-imigran. Seperti telah kita catat, kekuasaan konstitusional eksekutif untuk memberi pengampunan (grasi, amnesti, dll.) tidak dibatasi, tapi para presiden sepanjang sejarah menggunakannya dengan amat terbatas, dengan meminta saran dari Departemen Kehakiman dan tak pernah memberi pengampunan untuk melindungi diri atau kepentingan politik. Presiden Trump terang-terangan melanggar norma-norma itu. Dia bukan hanya tak berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman, melainkan juga memberi pengampunan politis—tindakan itu populer di kalangan pendukungnya. Langkah Trump tersebut memperkuat ketakutan bahwa sang presiden bakal kelak mengampuni diri sendiri dan lingkaran dalamnya—sesuatu yang konon sedang diujicoba para pengacaranya. Langkah seperti itu bakal menjadi serangan untuk pertama kali terhadap kemerdekaan yudikatif. Seperti dikatakan ahli konstitusi Martin Redish, "Bila presiden bisa mengamankan anak buahnya dengan cara demikian, maka pengadilan akan kehilangan wewenang berarti efektif untuk melindungi hak konstitusional terhadap invasi oleh cabang eksekutif."

Pemerintahan Trump juga pada akhirnya melabrak Office of Government Ethics (OGE, Kantor Etika Pemerintah), satu lembaga pengawas independen yang dihormati oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya walaupun tak punya gigi secara hukum. Menghadapi banyak konflik kepentingan akibat urusan bisnis Trump, direktur OGE Walter Shaub berkali-kali mengkritik sang presiden terpilih selama masa transisi. Pemerintahan menanggapi dengan melancarkan serangan ke OGE. Ketua Pengawasan DPR Jason Chaffetz, seorang sekutu Trump, bahkan menceletuk akan menyelidiki Shaub. Pada Mei, para pejabat pemerintah mencoba memaksa OGE menghentikan penyelidikan terhadap penunjukan para mantan pelobi oleh Gedung Putih. Shaub yang diganggu dan diabaikan Gedung Putih lantas mengundurkan diri, meninggalkan apa yang disebut jurnalis Ryan Lizza "OGE rusak".

Perilaku Presiden Trump terhadap pengadilan, penegakan hukum, lembaga intelijen, dan lembaga independen lainnya khas pemimpin otoriter. Dengan terang-terangan dia berbicara akan menggunakan Departemen Kehakiman dan FBI untuk mengincar orang-orang Partai Demokrat, termasuk Hillary Clinton. Dan pada akhir 2017, Departemen Kehakiman mempertimbangkan menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki Clinton. Namun meski melakukan pembersihan dan ancaman, pemerintahan Trump tak dapat menangkap wasit. Trump tak menggantikan Comey dengan loyalisnya, sebagian karena langkah itu diveto oleh orang-orang Partai Republik di Senat. Demikian juga, orang-orang Republik di Senat menolak upaya Trump mengganti Jaksa Agung Sessions. Sang presiden masih punya banyak pertempuran untuk dihadapi.

— — — —

Pemerintahan Trump juga berusaha meminggirkan pemain-pemain penting di sistem politik. Serangan retorik Presiden Trump terhadap pengkritik di media adalah contohnya. Tuduhan berulang-ulang bahwa saluran media seperti *New York Times* dan CNN menyiarkan "berita palsu" dan bersekongkol melawan dia pasti tampak familiar bagi mereka

yang mempelajari otoritarianisme. Dalam satu cuitan pada Februari 2017, Trump menyebut media sebagai "musuh rakyat Amerika", istilah yang menurut pengkritik meniru istilah yang digunakan oleh Stalin dan Mao. Retorika Trump sering mengancam. Beberapa hari sesudah cuitan "musuh rakyat", Trump berkata kepada Komite Aksi Politik Konservatif:

Saya cinta Amendemen Ke-1; tidak ada yang lebih mencintainya daripada saya. Tidak ada. ... Tapi seperti Anda sekalian lihat selama kampanye, bahkan sampai sekarang, berita palsu tidak menyampaikan kebenaran.... Saya bilang [media] tidak mewakili rakyat. Tidak pernah akan mewakili rakyat, dan kita akan lakukan sesuatu terhadapnya.

Lakukan apa, tepatnya? Bulan berikutnya, Presiden Trump kembali ke janji kampanyenya untuk "membuka hukum pencemaran nama baik", mengetwit bahwa *New York Times* telah "membikin malu dunia media. Salah menggambarkan saya selama dua tahun penuh. Ubah hukum pencemaran nama baik?" Ketika ditanya seorang reporter apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan perubahan itu, Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus berkata, "Saya pikir itu sesuatu yang sudah kami jajaki." Presiden Ekuador Rafael Correa menggunakan pendekatan itu. Gugatan pencemaran nama baik dengan ganti rugi jutaan dolar dan pemenjaraan jurnalis karena gugatan tersebut berefek mengerikan bagi media. Walau Trump menarik lagi isu pencemaran nama baik, dia melanjutkan ancaman. Pada Juli, dia melakukan retwit klip video rekayasa dengan bahan acara gulat WWE yang menampilkan dia menubruk dan kemudian menonjok seseorang dengan wajah ditutup logo CNN.

Presiden Trump juga mempertimbangkan menggunakan lembaga regulator pemerintah untuk melawan perusahaan media yang tak ramah. Selama kampanye 2016, dia telah mengancam Jeff Bezos, pemilik *Washington Post* dan Amazon, dengan gugatan anti-trust, mengetwit: "Bila saya jadi presiden, oh, mereka akan dapat masalah." Dia juga mengancam akan mengganjal merger Time Warner (perusahaan induk CNN) dan AT&T, lalu pada bulan-bulan pertama masa kepresidenannya, ada laporan bahwa para penasihat Gedung Putih mempertimbangkan

menggunakan wewenang anti-*trust* pemerintah sebagai sarana menekan CNN. Dan terakhir, pada Oktober 2017 Trump menyerang NBC dan jejaring media lain dengan mengancam "akan meninjau kembali lisensi mereka".

Ada satu bidang di mana pemerintahan Trump bukan sekadar mengancam, melainkan sudah mencoba menggunakan mekanisme pemerintah untuk menghukum pengkritik. Pada minggu pertama menjabat, Presiden Trump menandatangani satu perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada lembaga federal untuk menahan pendanaan untuk "kota-kota suaka" yang menolak bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penindakan imigran gelap. "Kalau harus," katanya pada Februari 2017, "kita akan hentikan pendanaannya." Rencana itu mengingatkan kita kepada pemerintah Chávez yang berkali-kali mencopot kendali pemerintah kota yang dipegang oposisi atas rumah sakit, polisi, pelabuhan, dan infrastruktur lokal lain. Namun tak seperti sang presiden Venezuela, Presiden Trump bisa dihalangi pengadilan.

Walau Presiden Trump telah melancarkan perang kata-kata terhadap media dan pengkritik lain, kata-kata itu tidak (belum) mengarah ke tindakan. Belum ada jurnalis ditahan, dan belum ada media yang mengubah cara pemberitaan karena ditekan pemerintah. Upaya Trump mengubah aturan main agar menguntungkan dirinya telah lebih mengkhawatirkan. Pada Mei 2017, dia menyerukan perubahan atas apa yang dia sebut aturan Senat "kuno", termasuk penghapusan *filibuster*, yang bakal memperkuat mayoritas Partai Republik dengan mengorbankan minoritas Partai Demokrat. Orang-orang Partai Republik di Senat memang menghapuskan *filibuster* untuk pengajuan hakim agung, membuka jalan bagi Neil Gorsuch naik ke Mahkamah Agung, tapi mereka menolak gagasan menghapuskan *filibuster* sepenuhnya.

Inisiatif yang barangkali paling antidemokrasi yang telah dilakukan pemerintahan Trump adalah pembentukan Komisi Penasihat Presiden Mengenai Integritas Pemilihan Umum, diketuai Wakil Presiden Mike Pence tapi dijalankan oleh wakilnya, Kris Kobach. Untuk mengerti dam-

pak potensialnya, ingat bahwa Civil Rights Act dan Voting Rights Act memicu pergeseran besar dalam identifikasi partai: Partai Demokrat menjadi perwakilan utama pemilih minoritas serta imigran generasi pertama dan kedua, sedangkan pemilih Partai Republik tetap didominasi orang kulit putih. Karena proporsi minoritas di kalangan pemilih membesar, maka perubahan itu menguntungkan Partai Demokrat, persepsi yang diperkuat kemenangan Barack Obama pada 2008 berkat partisipasi minoritas yang lebih tinggi daripada biasanya.

Beberapa pemimpin Partai Republik yang merasa terancam memberi tanggapan yang mengingatkan akan AS Selatan zaman Jim Crow: mempersulit warga negara minoritas miskin memberi suara. Karena pemilih minoritas miskin umumnya memilih Partai Demokrat, maka cara-cara yang mengurangi partisipasi di kalangan itu bisa mengubah arena sehingga menguntungkan Partai Republik. Itu bakal dilakukan melalui aturan identifikasi pemilih yang ketat—misalnya mewajibkan pemilih menunjukkan surat izin mengemudi atau kartu identitas lain yang ada fotonya dan dikeluarkan pemerintah ketika datang di tempat pemungutan suara.

Dorongan untuk aturan kartu identitas pemilih didasari satu klaim palsu: bahwa kecurangan pemilih terjadi secara luas di Amerika Serikat. Semua penelitian yang bisa diandalkan telah menyimpulkan bahwa tingkat kecurangan semacam itu di Amerika Serikat rendah. Namun Partai Republik mulai mendesak agar masalah yang sebenarnya tak ada itu diatasi. Dua negara bagian pertama yang memberlakukan aturan identitas pemilih adalah Georgia dan Indiana, keduanya pada 2005. Anggota kongres asal Georgia John Lewis, yang lama menjadi pemimpin gerakan hak sipil, menjabarkan aturan negara bagiannya sebagai "pajak suara zaman modern". Diperkirakan 300.000 pemilih Georgia tak punya dokumen identitas yang diperlukan, dan orang Afrika-Amerika lima kali lipat lebih mungkin tak memilikinya dibanding orang kulit putih. Aturan identitas pemilih Indiana, yang disebut Hakim Terence Evans dari Pengadilan Banding Wilayah Ke-7 "upaya tak terselubung untuk mencegah orang-orang tertentu yang dipercaya cenderung ke

Partai Demokrat untuk datang memberi suara” digugat ke Mahkamah Agung, namun gugatannya ditolak pada 2008. Sesudahnya, aturan identitas pemilih bermunculan di mana-mana. Di tiga puluh tujuh negara bagian, rancangan undang-undang identitas pemilih diajukan antara 2010 dan 2012, dan pada 2016 sudah ada lima belas negara bagian mengesahkan aturan identitas pemilih, walau hanya sepuluh yang sudah menerapkannya dalam pemilu.

Aturan seperti itu hanya disahkan di negara-negara bagian yang badan legislatifnya dikendalikan Partai Republik, dan di semua negara bagian itu kecuali Arkansas, gubernurnya juga dari Partai Republik. Tak ada keraguan bahwa pemilih minoritas adalah sasaran utamanya. Aturan identitas pemilih hampir pasti berdampak jauh lebih besar ke pemilih minoritas miskin: Menurut satu penelitian, 37 persen orang Afrika-Amerika dan 27 persen orang Latino tidak punya surat izin mengemudi yang valid, dibanding hanya 16 persen orang kulit putih. Satu penelitian Brennan Center for Justice memperkirakan bahwa 11 persen warga Amerika Serikat (dua puluh satu juta orang yang memenuhi syarat pemilih) tidak memiliki dokumen identitas dengan foto yang dikeluarkan pemerintah, dan bahwa di antara warga Afrika-Amerika, proporsinya adalah 25 persen.

Dari sebelas negara bagian dengan partisipasi pemilih berkulit hitam terbesar pada 2008, tujuh memakai aturan identitas yang lebih ketat, dan dari dua belas negara bagian yang mengalami pertumbuhan populasi Hispanik tertinggi antara 2000 dan 2010, sembilan mengesahkan aturan yang menyulitkan pemberian suara. Para ahli baru mulai meneliti dampak aturan identitas pemilih, dan sebagian besar penelitian hanya menemukan efek biasa-biasa saja terhadap partisipasi. Namun efek biasa-biasa saja bisa menentukan apabila hasilnya ketat, terutama bila aturan itu diterapkan secara luas.

Itulah tepatnya yang diharapkan terjadi oleh Komisi Penasihat Presiden Mengenai Integritas Pemilihan Umum. Kepala *de facto* Komisi, Kris Kobach, telah disebut sebagai “penganjur utama pembatasan hak suara” Amerika. Sebagai Sekretaris Negara Bagian Kansas, Kobach

telah membantu pengesahan salah satu aturan identitas pemilih paling ketat se-AS. Kobach menganggap Donald Trump sekutu yang berguna. Selama kampanye 2016, Trump mengeluh bahwa pemilu "diotak-atik", dan sesudahnya dia mengeluarkan pernyataan luar biasa bahwa dia telah "menang dalam pemungutan suara rakyat bila jutaan suara ilegal dicoret." Dia mengulang pernyataan itu di satu pertemuan dengan para pemimpin kongres, berkata bahwa ada tiga sampai lima juta suara ilegal. Pernyataannya tak berdasar: Suatu proyek pemantauan pemilu nasional yang dipimpin organisasi media ProPublica tak menemukan bukti rekayasa. Reporter *Washington Post* Philip Bump mencari-cari kasus rekayasa terdokumentasi di Nexis pada 2016 dan hanya menemukan empat.

Namun obsesi Presiden Trump dengan "kemenangan" dalam pemungutan suara rakyat cocok dengan tujuan Kobach. Kobach mendukung pernyataan Trump, menyatakan bahwa Trump "benar-benar tepat" dalam menyatakan bahwa jumlah suara ilegal melebihi selisih kemenangan Clinton. (Belakangan Kobach berkata bahwa "kita barangkali tak akan pernah tahu" siapa yang menang di pemungutan suara rakyat.) Kobach mendapat perhatian Trump, turut meyakinkan Trump untuk membentuk Komisi, dan ditunjuk untuk menjalankannya.

Kegiatan awal Komisi memberi kesan bahwa tujuannya adalah pembatasan pemilih. Pertama-tama, Komisi mengumpulkan cerita rekayasa pemilu dari seantero negara, yang dapat menyediakan amunisi politik untuk inisiatif pembatasan pemilih tingkat negara bagian, atau barangkali untuk upaya membatalkan undang-undang "Motor Voter" 1993, yang mempermudah proses registrasi pemilih di seantero Amerika Serikat. Komisi boleh dikata disiapkan untuk berperan sebagai corong nasional upaya Republik mengesahkan aturan identitas pemilih yang lebih ketat. Kedua, Komisi bertekad mendorong atau memudahkan pembersihan daftar pemilih tingkat negara bagian, yang menurut riset pasti bakal mencoret banyak pemilih sah. Komisi sudah mulai berusaha melakukan cek silang daftar pemilih setempat untuk menemukan kasus-kasus pendaftaran ganda, di mana orang terdaftar di lebih dari

satu negara bagian. Ada juga laporan bahwa Komisi berencana menggunakan data Homeland Security mengenai pemegang *green card* dan visa untuk mencari orang-orang bukan warga negara yang tercatat di daftar pemilih. Risikonya, seperti ditunjukkan satu penelitian, adalah bahwa jumlah kesalahan—karena keberadaan banyak orang dengan nama dan tanggal lahir sama—akan jauh lebih besar daripada jumlah registrasi ilegal yang ditemukan.

Upaya menyulitkan pemberian suara pada dasarnya antidemokrasi, dan punya sejarah tercela di Amerika Serikat. Walau upaya pembatasan pemilih zaman sekarang tidak sejauh yang pernah dilakukan orang-orang Partai Demokrat AS selatan pada akhir abad ke-19, tetap saja upaya itu signifikan. Karena lebih banyak memengaruhi pemilih minoritas miskin, yang banyak memilih Partai Demokrat, aturan identitas pemilih ketat cenderung menguntungkan Partai Republik dalam pemilu.

Komisi Integritas Pemilu Trump tidak melaksanakan reformasi nyata pada 2017, dan permintaannya atas informasi pemilih ditolak secara luas oleh negara-negara bagian. Namun bila melanjutkan terus proyeknya tanpa dihalangi, Komisi Integritas Pemilu berpotensi menimbulkan kerusakan nyata terhadap proses pemilu Amerika Serikat.

— — —

Dalam banyak cara, Presiden Trump mengikuti skenario pemimpin otoriter hasil pemilu selama tahun pertama menjabat. Dia berusaha menangkap wasit, menyingkirkan pemain-pemain kunci yang bisa menghalangi, dan mengubah aturan main. Namun sang presiden masih lebih banyak bicara daripada bertindak, dan ancaman-ancaman terbesarnya belum diwujudkan. Inisiatif-inisiatif antidemokrasi mere-sahkan, termasuk mengisi FBI dengan loyalis dan menghambat penyelidikan Mueller, digagalkan oleh penentangan Partai Republik dan kesalahan dirinya sendiri. Satu inisiatif penting—Komisi Penasihat Mengenai Integritas Pemilu—baru saja dimulai, jadi dampaknya masih sukar dinilai. Maka secara keseluruhan Presiden Trump berkali-kali

menyerempet pagar seperti pengemudi yang sembrono, tapi belum sampai menerobos pagar. Meski jelas mengkhawatirkan, hanya sedikit langkah mundur nyata yang terjadi pada 2017. Kami belum melewati batas menuju otoritarianisme.

Memang masih dini. Kemunduran demokrasi sering terjadi berangsur-angsur, efeknya terasa perlahan. Kalau membandingkan tahun pertama Trump menjabat dengan para calon pemimpin otoriter lain, gambarnya campur aduk. Tabel 3 menunjukkan daftar sembilan negara di mana pemimpin berpotensi otoriter meraih kekuasaan melalui pemilu. Di beberapa negara, termasuk Ekuador dan Rusia, langkah mundur sudah tampak selama tahun pertama. Sementara itu, di Peru di bawah Fujimori dan Turki di bawah Erdoğan, awalnya tak ada langkah mundur. Fujimori terlibat dalam perang kata-kata sengit selama tahun pertamanya sebagai presiden, tapi tidak menyerang lembaga-lembaga demokrasi sampai hampir dua tahun menjabat. Kerusakan demokrasi terjadi lebih lambat lagi di Turki.

Nasib demokrasi selama sisa masa kepresidenan Trump akan bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah perilaku para pemimpin Partai Republik. Lembaga-lembaga demokrasi amat bergantung pada kesediaan partai berkuasa untuk membelanya—bahkan terhadap para pemimpinnya sendiri. Gagalnya rencana Roosevelt mengotak-atik pengadilan dan jatuhnya Nixon sebagian dimungkinkan ketika anggota-anggota penting partai presiden sendiri—Demokrat dalam kasus Roosevelt dan Republik dalam kasus Nixon—memutuskan untuk bangkit dan menentang dia. Baru-baru ini, di Polandia, upaya pemerintah Partai Kebenaran dan Keadilan untuk membongkar pengawasan dan perimbangan mengalami kemunduran ketika Presiden Andrzej Duda, seorang anggota Partai Kebenaran dan Keadilan, memveto dua rancangan undang-undang yang bakal memungkinkan pemerintah mengosongkan mahkamah agung lalu mengisinya kembali. Sementara itu, di Hungaria, Perdana Menteri Viktor Orbán menghadapi perlawanan kecil dari partai Fidesz yang berkuasa selagi dia menjadi makin otoriter.

Tabel 3: Rapor Otoriter Sesudah Satu Tahun

Negara	Pemimpin	Tanggal Mulai	Menangkap Wasit	Menyingkirkan Pemain	Mengubah Aturan	Perubahan Rezim
Argentina	Juan Perón	Juni 1946	YA	TIDAK	TIDAK	Otoriter
Ekuador	Rafael Correa	Januari 2007	YA	YA	YA	Agak otoriter
Hungaria	Viktor Orbán	Mei 2010	TERBATAS	TIDAK	TIDAK	Agak otoriter
Italia	Silvio Berlusconi	Juni 2001	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Demokratis
Peru	Alberto Fujimori	Juli 1990	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Otoriter
Peru	Ollanta Humala	Juli 2011	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Demokratis
Polandia	Jaroslav Kaczyński	November 2015	YA	TIDAK	TIDAK	Agak otoriter
Rusia	Vladimir Putin	Mei 2000	TIDAK	YA	TIDAK	Sangat otoriter
Turki	Recep Erdoğan	Maret 2003	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Otoriter
Venezuela	Hugo Chávez	Februari 1999	YA	YA	YA	Otoriter

Relasi antara Donald Trump dan partainya juga penting, terutama mengingat kendali Partai Republik atas kedua kamar Kongres. Para pemimpin Partai Republik dapat memilih tetap setia. Loyalis aktif bukan sekadar mendukung presiden, melainkan membela bahkan langkahnya yang paling kontroversial di depan umum. Loyalis pasif menghilang dari sorotan publik ketika skandal meledak, tapi masih mendukung presiden. Loyalis kritis mencoba melakukan keduanya: boleh jadi mereka di depan umum menjaga jarak dari perilaku terburuk presiden, tapi mereka tak melakukan tindakan (contohnya, memberi suara di Kongres) yang akan melemahkan, apalagi menjatuhkan, presiden. Menghadapi penyalahgunaan kekuasaan presiden, tanggapan mana pun akan memungkinkan otoritarianisme.

Pendekatan kedua adalah pengurungan (*containment*). Orang-orang Partai Republik yang menggunakan strategi ini boleh jadi mendukung presiden di banyak isu, dari penunjukan hakim sampai reformasi pajak dan jaminan kesehatan, tapi menarik garis di perilaku yang mereka anggap berbahaya. Sikap ini bisa sukar dipertahankan. Sebagai anggota partai yang sama, mereka bisa untung bila presiden berhasil—namun mereka menyadari bahwa presiden dapat benar-benar merusak lembaga-lembaga dalam jangka panjang. Mereka bekerja sama dengan presiden kalau bisa, sambil pada waktu yang sama bertindak untuk memastikan presiden tak menyalahgunakan kekuasaan, membiarkan presiden tetap menjabat tapi berharap bisa mengekang dia.

Terakhir, pada prinsipnya para pemimpin kongres dapat mengajukan pemakzulan presiden. Itu bakal merugikan secara politis bagi mereka. Menjatuhkan presiden dari partai sendiri bukan hanya berisiko mendatangkan tuduhan sebagai pengkhianat dari sesama partisan (contoh, bayangkan tanggapan Sean Hannity dan Rush Limbaugh), melainkan juga berisiko merusak agenda legislatif partai. Langkah itu bakal merugikan prospek jangka pendek partai di pemilu, seperti yang terjadi sesudah pengunduran diri Nixon. Namun bila ancaman dari presiden cukup besar (atau perilaku presiden mulai merugikan partai itu sendiri), para pemimpin partai bisa menganggap perlu menjatuhkan teman sendiri.

Selama tahun pertama Presiden Trump menjabat, Partai Republik menanggapi penyalahgunaan kekuasaan presiden dengan campuran kesetiaan dan pengurungan. Awalnya, kesetiaan mendominasi. Namun sesudah presiden memecat James Comey pada Mei 2017, beberapa senator Republik beralih ke pengurungan, menegaskan bahwa mereka tak bakal setuju kalau pengganti Comey adalah loyalis Trump. Para senator Republik juga berusaha memastikan bahwa penyelidikan independen terhadap keterlibatan Rusia dalam pemilu 2016 terus berjalan. Beberapa di antara mereka diam-diam mendorong Departemen Kehakiman agar menunjuk jaksa khusus, dan banyak di antara mereka menerima penunjukan Robert Mueller. Ketika muncul laporan bahwa Gedung Putih sedang mencari cara mencopot Mueller, dan ketika beberapa loyalis Trump menyerukan pencopotan Mueller, senator-senator penting Republik, termasuk Susan Collins, Bob Corker, Lindsey Graham, dan John McCain, tampil untuk menentang. Dan ketika Presiden Trump mau memecat Jaksa Agung Jeff Sessions, yang setelah menarik diri tidak dapat memecat Mueller, para senator Republik membela Sessions. Ketua Komite Kehakiman Senat Chuck Grassley berkata dia tak bakal mengadakan acara dengar pendapat untuk penggantinya apabila Sessions dipecat.

Walau Senator Graham, McCain, dan Corker tidak bisa dibilang bergabung dengan oposisi (masing-masing biasa memberi suara mendukung Trump dalam setidaknya 85 persen kesempatan), mereka melakukan langkah-langkah penting untuk mengekang presiden. Belum ada pemimpin Partai Republik yang berusaha mencopot presiden pada 2017, tapi seperti dikatakan jurnalis Abigail Tracy, beberapa di antara mereka tampak "sudah menentukan garis batas".

Faktor lain yang memengaruhi nasib demokrasi Amerika Serikat adalah pendapat publik. Bila calon pemimpin otoriter tak bisa beralih ke militer atau mengorganisasi kekerasan berskala besar, maka mereka mesti menemukan cara lain membujuk sekutu untuk mendukung atau pengkritik untuk mundur atau menyerah. Dukungan publik adalah alat yang berguna untuk tujuan itu. Kalau seorang pemimpin hasil

pemilu menikmati, katakanlah, dukungan publik 70 persen, maka para pengkritik jadi berubah haluan, liputan media jadi bersahabat, hakim makin enggan membuat putusan merugikan pemerintah, dan bahkan politikus pesaing yang khawatir bahwa sikap oposisi keras akan membuatnya terkucil jadi cenderung diam. Sementara itu, kalau dukungan terhadap pemerintah rendah, media dan oposisi jadi makin berani, hakim bisa menantang presiden, dan sekutu membelot. Fujimori, Chávez, dan Erdoğan semuanya menikmati ketenaran besar ketika memulai serangan terhadap lembaga demokrasi.

Untuk mengerti bagaimana dukungan publik dapat memengaruhi kepresidenan Trump, tanya kepada diri sendiri: Bagaimana bila seluruh Amerika Serikat seperti West Virginia? West Virginia adalah negara bagian yang paling pro-Trump. Menurut jajak pendapat Gallup, dukungan untuk Presiden Trump di sana rata-rata 60 persen pada paragraf pertama 2017, dibanding tingkat dukungan nasional, 40 persen. Karena populernya sang presiden di sana, oposisi layu di West Virginia—bahkan di kalangan Partai Demokrat. Senator Demokrat dari West Virginia, Joe Manchin, memberi suara mendukung Presiden Trump dalam 54 persen kesempatan selama Agustus 2017, lebih banyak daripada senator Demokrat lain. *The Hill* menyebut Manchin sebagai salah satu dari "10 Sekutu Terbesar Trump di Kongres". Gubernur negara bagian itu dari Partai Demokrat, Jim Justice, melangkah lebih jauh: Dia pindah partai. Sambil merangkul Presiden Trump di satu acara kampanye, Justice bukan hanya memuji Trump sebagai "orang baik" dengan "gagasan nyata" melainkan juga menolak penyelidikan keterlibatan Rusia, menyatakan: "Bukankah kita sudah cukup banyak tahu mengenai Rusia?" Bila anggota Partai Demokrat di seantero AS berperilaku seperti di West Virginia, maka Presiden Trump bakal menghadapi sedikit perlawanan—bahkan dalam isu campur tangan asing di pemilu.

Makin tinggi tingkat dukungan bagi Presiden Trump, makin berbahaya dia. Ketenaran Trump akan bergantung kepada kondisi ekonomi, juga peristiwa-peristiwa yang kebetulan terjadi. Peristiwa yang menunjukkan ketidakbecusan pemerintah, seperti tanggapan pemerintahan

Bush yang payah terhadap Badai Katrina 2005, bisa menggerus dukungan publik. Namun perkembangan lain, seperti ancaman keamanan, bisa menaikannya.

Itu membawa kita ke satu faktor terakhir yang membentuk kemampuan Presiden Trump merusak demokrasi: krisis. Krisis keamanan besar—perang atau serangan teroris berskala besar—adalah pengubah permainan dalam politik. Krisis hampir selalu menaikkan dukungan kepada pemerintah. Terakhir kali Amerika Serikat mengalami satu krisis keamanan besar, serangan teroris 9/11 pada 2001, dukungan kepada Presiden Bush meroket jadi 90 persen. Kepopuleran cenderung menurunkan batasan terhadap kekuasaan presiden. Warga jadi lebih mungkin menoleransi, bahkan mendukung, cara-cara otoriter bila mereka khawatir akan keamanan. Dan bukan hanya warga biasa yang menanggapi dengan cara demikian. Hakim jadi enggan menghalangi perluasan kekuasaan presiden di tengah krisis, ketika keamanan nasional dipandang terancam. Menurut ahli ilmu politik William Howell, pembatasan kelembagaan untuk Presiden Bush hilang sesudah serangan 9/11, memperkenalkan Bush "berbuat apa pun yang dia mau untuk mendefinisikan dan menanggapi krisis."

Oleh karena itu, krisis keamanan adalah momen berbahaya bagi demokrasi. Pemimpin yang bisa "berbuat apa pun yang dia mau" bisa membuat kerusakan besar di lembaga-lembaga demokrasi. Seperti telah kita lihat, itu persisnya yang dilakukan pemimpin-pemimpin seperti Fujimori, Putin, dan Erdoğan. Bagi calon pemimpin otoriter yang merasa dikepung lawan dan dikekang lembaga demokrasi, krisis membuka jendela kesempatan.

Di Amerika Serikat pun krisis keamanan telah memperkenalkan perluasan kekuasaan eksekutif, dari pembatalan *habeas corpus* oleh Lincoln, penahanan warga Amerika keturunan Jepang oleh Roosevelt, sampai USA PATRIOT Act zaman Bush. Namun ada satu perbedaan penting. Lincoln, Roosevelt, dan Bush berkomitmen ke demokrasi, dan pada akhirnya mereka bersikap menahan diri dalam menggunakan wewenang luas yang diberikan untuk menghadapi krisis.

Sementara itu, Donald Trump jarang menunjukkan sikap menahan diri di konteks apa pun. Peluang konflik terjadi pada masa kepresidenannya juga lumayan. Sebenarnya peluang konflik selalu lumayan bagi semua presiden—Amerika Serikat terlibat perang darat atau mengalami serangan teroris besar dalam masa jabatan enam dari dua belas presiden terpilihnya yang terakhir. Namun mengingat kesembronoan kebijakan luar negeri Presiden Trump, risikonya sekarang tinggi. Kami khawatir bahwa bila Trump memancing perang atau serangan teroris, dia bakal memanfaatkan krisis itu sepenuhnya—menggunakannya untuk menyerang lawan politik dan membatasi kebebasan-kebebasan yang dianggap wajar oleh orang Amerika. Menurut pandangan kami, skenario itu adalah bahaya terbesar yang dihadapi demokrasi Amerika hari ini.

Kalaupun Presiden Trump tidak langsung membongkar lembaga-lembaga demokrasi, pelanggaran norma oleh dia hampir pasti merusak lembaga demokrasi. Seperti telah ditulis David Brooks, Presiden Trump telah "menabrak standar perilaku yang pernah mengatur kehidupan publik." Partainya malah memberi imbalan berupa posisi calon presiden. Ketika menjabat, dia terus melanggar norma sehingga memperlebar kisaran perilaku presiden yang bisa diterima, sehingga taktik yang dulu dianggap menyimpang dan tak layak, seperti berbohong dan merisak, jadi banyak dipakai para politikus.

Pelanggaran norma oleh presiden tidak selalu buruk. Banyak pelanggaran yang tak berbahaya. Pada Januari 1977, Jimmy Carter mengejutkan polisi, pers, dan 250.000 orang Amerika yang hadir untuk menyaksikan pelantikannya ketika dia dan istrinya *berjalan kaki* sejauh dua setengah kilometer dari Capitol ke Gedung Putih. *New York Daily News* menjabarkan keputusan Carter meninggalkan "limosin tertutup berpelindung" sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi, tidak seperti kebiasaan". Sesudahnya, *New York Times* menyebut ada "kebiasaan informal" bagi presiden terpilih untuk setidaknya keluar limosin berpelindung selama parade pelantikan untuk menunjukkan bahwa dia "presiden rakyat".

Pelanggaran norma juga bisa menyebabkan demokratisasi: Dalam pemilihan presiden 1840, William Henry Harrison melanggar tradisi dengan berkampanye langsung di tengah pemilih. Norma yang berlaku sebelumnya adalah para calon presiden menghindari berkampanye, menjaga kesan fiktif seperti politikus Romawi kuno Cincinnatus bahwa mereka tak menginginkan kekuasaan secara pribadi—tapi membatasi kemampuan pemilih mengenal mereka.

Atau contoh lain: Pada 1901, satu siaran pers rutin Gedung Putih dikeluarkan atas nama presiden baru Theodore Roosevelt, menyatakan, "Booker T. Washington dari Tuskegee, Alabama, makan malam bersama Presiden tadi malam." Meski para pemimpin politik berkulit hitam terkemuka sebelumnya pernah mengunjungi Gedung Putih, makan malam bersama seorang tokoh politik terkenal berkulit hitam adalah pelanggaran "etiket sosial yang lazim waktu itu yaitu dominasi kulit putih", seperti dijabarkan seorang ahli sejarah. Tanggapan sengit langsung datang. Satu koran menyebutnya "kesalahan paling tercela yang pernah dilakukan warga Amerika Serikat". Senator William Jennings Bryan berkomentar, "Diharapkan mereka berdua [Roosevelt dan Washington] sesudah berpikir panjang akan menyadari kebijanya meninggalkan niat mereka menghapus batas antarras." Menghadapi penentangan, lembaga pers Gedung Putih awalnya menyangkal peristiwa itu terjadi, kemudian berkata "hanya" makan siang, lalu membelanya dengan mengatakan setidaknya tak ada perempuan yang hadir.

Karena nilai-nilai masyarakat berubah seiring waktu, pelanggaran norma oleh presiden tak bisa dihindari—malah bisa disukai. Namun pelanggaran norma oleh Donald Trump dalam tahun pertamanya menjabat berbeda secara mendasar dari yang dilakukan para pendahulunya. Pertama, dia melanggar norma kambuhan. Belum pernah ada presiden yang melanggar begitu banyak aturan tak tertulis dengan begitu cepat. Banyak yang remeh—Presiden Trump melanggar tradisi Gedung Putih yang berumur 150 tahun karena tak punya hewan peliharaan. Yang lain lebih serius. Pidato pertama Trump sesudah pelantikan, misalnya, lebih kelam daripada biasanya pidato pertama (contohnya, dia menyebut

"American carnage" "pembantaian Amerika"), sehingga mantan Presiden George W. Bush saja sampai berkomentar: "That was some weird shit." "Aneh benar itu."

Namun yang benar-benar membuat Presiden Trump berbeda dengan para pendahulunya adalah kesediaannya menantang aturan tak tertulis yang berakibat lebih besar, termasuk norma-norma yang penting bagi kesehatan demokrasi. Di antaranya adalah norma lama untuk memisahkan urusan pribadi dan publik, seperti yang terkait nepotisme. Undang-undang yang ada melarang presiden menunjuk anggota keluarga dalam kabinet atau posisi di badan negara, tapi tidak mencakup posisi staf Gedung Putih. Maka ketika Trump menunjuk putrinya Ivanka dan menantunya Jared Kushner sebagai penasihat, itu secara teknis legal—tapi tak sesuai semangat hukum.

Ada norma-norma yang mengatur konflik kepentingan presiden. Karena presiden tak boleh menggunakan jabatan publik untuk memperkaya diri, maka mereka yang memiliki bisnis harus memisahkan diri dari bisnis itu sebelum menjabat. Namun hukum yang mengatur pemisahan itu ternyata lemah. Pejabat pemerintah secara teknis tak diwajibkan melepas kepemilikan terhadap perusahaan, hanya perlu mengundurkan diri dari posisi membuat keputusan yang memengaruhi kepentingan mereka. Namun biasanya para pejabat pemerintah melepas kepemilikan untuk menghindari kemungkinan dituduh berlaku curang. Presiden Trump tak melakukan itu, meski jelas-jelas punya konflik kepentingan. Dia memberi kendali perusahaan-perusahaannya ke putra-putranya, dalam langkah yang dianggap kurang memadai oleh para pejabat etika pemerintahan. Kantor Etika Pemerintahan melaporkan menerima 39.105 keluhan publik yang melibatkan konflik kepentingan pemerintahan Trump antara 1 Oktober 2016 dan 31 Maret 2017, kenaikan besar sekali dibanding periode yang sama pada 2008–2009 (waktu Presiden Obama mulai menjabat), ketika hanya 733 keluhan yang diterima.

Presiden Trump juga melanggar norma-norma inti demokrasi ketika secara terbuka mempertanyakan legitimasi pemilu. Walau klaim

"jutaan" pemilih ilegal ditolak oleh para pengecek fakta, dicela politikus kedua partai, dan dianggap tak berdasar oleh para ahli ilmu sosial, sang presiden baru mengulang-ulang klaim itu secara pribadi maupun di depan umum. Dalam seabad lebih tak ada politikus besar yang telah mempertanyakan integritas proses pemilu Amerika—termasuk Al Gore, yang kalah di Mahkamah Agung dalam satu pemilu terketat yang pernah terjadi.

Tuduhan palsu penipuan bisa merusak kepercayaan rakyat terhadap pemilihan umum—dan kalau rakyat tak percaya proses pemilihan umum, maka mereka sering jadi kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi juga. Di Meksiko, sesudah calon presiden Andrés Manuel López Obrador yang kalah bersikeras bahwa dia dicurangi dalam pemilu 2006, kepercayaan terhadap sistem pemilu Meksiko menurun. Jajak pendapat sebelum pemilihan presiden Meksiko 2012 mendapati bahwa 71 persen orang Meksiko percaya kecurangan bisa terjadi. Di Amerika Serikat, angka-angkanya lebih dramatis. Dalam survei yang dilaksanakan sebelum pemilu 2016, 84 persen pemilih Republik berkata mereka percaya "sejumlah besar" kecurangan terjadi dalam pemilu Amerika, dan hampir 60 persen pemilih Republik berkata percaya imigran ilegal bakal "berbondong-bondong ikut memilih" pada November. Keraguan itu bertahan sampai pemilu selesai. Menurut satu jajak pendapat Morning Consult/Politico pada Juli 2017, 47 persen pemilih Republik percaya Trump sebenarnya menang di pemungutan suara rakyat, dibanding 40 persen yang percaya Hillary Clinton menang. Dengan kata lain, hampir separuh dari semua orang yang mengaku pendukung Republik berkata mereka percaya pemilu Amerika Serikat direayasa. Kepercayaan seperti itu bisa berdampak. Survei yang dilakukan pada Juni 2017 bertanya, "Bila Donald Trump mengatakan bahwa pemilihan presiden 2020 harus ditunda sampai negara bisa memastikan bahwa hanya warga Amerika yang berhak memilih-lah yang bisa memilih, apakah Anda mendukung atau menentang penundaan pemilu? Lima puluh dua persen pendukung Republik berkata bakal mendukung penundaan.

Presiden Trump juga meninggalkan aturan-aturan dasar kesantunan

politik. Dia melanggar norma rekonsiliasi pasca-pemilu dengan terus menyerang Hillary Clinton. Dia juga melanggar aturan tak tertulis bahwa presiden yang menjabat sebaiknya tak menyerang pendahulunya. Pada 6:35 pagi, 4 Maret 2017, Presiden Trump mengetwit, "Parah! Baru tahu bahwa Obama 'menyadap' saya di Trump Tower sebelum saya menang. Tidak ketemu apa-apa. Ini McCarthyisme!" Dilanjutkan setengah jam kemudian dengan: "Serendah apa sih Obama sampai *tapp* [*sic*, menyadap] telepon saya selama proses pemilu yang sakral. Ini Nixon/Watergate. Parah (atau sakit) dia!"

Barangkali pelanggaran norma oleh Presiden Trump yang paling terkenal adalah berbohong. Gagasan bahwa presiden harus berkata jujur itu tak kontroversial di politik Amerika. Seperti sering dikatakan konsultan politik Republik Whit Ayers kepada klien-kliennya, calon yang berusaha membangun kredibilitas mesti "jangan menyangkal yang tak bisa disangkal" dan "jangan berbohong". Dengan adanya norma itu, para politikus biasanya menghindari berbohong dengan mengubah topik debat, menggeser pertanyaan sulit, atau hanya menjawab sebagian. Kebiasaan Presiden Trump, yaitu ngomong semaunya, tidak pernah dilakukan presiden-presiden terdahulu. Kecenderungan itu sudah tampak selama kampanye 2016. *PolitiFact* mencatat 69 persen pernyataan publiknya "sebagian besar palsu" (21 persen), "palsu" (33 persen), atau "bohong" (15 persen). Hanya 17 persen tercatat "benar" atau "sebagian besarnya benar".

Trump terus berbohong sesudah menjadi presiden. Kala meneliti semua pernyataan publik Presiden Trump sejak menjabat, *New York Times* menunjukkan bahwa bahkan bila menggunakan ukuran konservatif—pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas palsu, bukan hanya tak jelas—Presiden Trump "mencapai sesuatu yang luar biasa": Dia membuat setidaknya satu pernyataan publik palsu atau menyesatkan pada setiap hari dalam empat puluh hari pertamanya menjabat. Tak ada kebohongan yang kelewat jelas. Presiden Trump mengaku mendapat kemenangan terbesar di Electoral College sejak Ronald Reagan (padahal George H.W. Bush, Clinton, dan Obama semuanya menang

lebih besar daripada dia); dia mengaku sudah menandatangani lebih banyak rancangan undang-undang dalam enam bulan pertama dibanding presiden-presiden lain (padahal tidak sebanyak beberapa presiden, termasuk George H.W. Bush dan Clinton). Pada Juli 2017 dia menyombong dengan berkata ketua Pramuka berkata bahwa dia telah "memberi pidato terhebat sepanjang masa kepada mereka", namun pernyataannya langsung dibantah organisasi Pramuka.

Presiden Trump sendiri tidak banyak dirugikan karena kebohongannya. Di lingkungan politik dan media di mana warga yang terlibat makin sering menyaring peristiwa-peristiwa melalui lensa partisan, para pendukungnya tak memandang dia sebagai tak jujur selama tahun pertama masa kepresidenannya. Namun konsekuensi ketidakjujuran Trump merugikan sistem politik Amerika Serikat. Warga punya hak asasi atas informasi dalam demokrasi. Tanpa informasi kredibel mengenai apa yang dilakukan para pemimpin terpilih, kita tak bisa menggunakan hak memilih secara efektif. Kalau presiden Amerika Serikat berbohong kepada publik, akses kita ke informasi kredibel terancam, dan kepercayaan terhadap pemerintah tergerus (mana bisa *tidak?*). Kalau warga tak percaya pemimpin hasil pemilu, maka dasar-dasar demokrasi perwakilan melemah. Nilai pemilihan umum berkurang ketika warga tak percaya pemimpin yang mereka pilih.

Yang membuat hilangnya kepercayaan itu lebih buruk adalah karena Presiden Trump meninggalkan norma dasar menghormati media. Pers independen adalah benteng lembaga demokrasi; tak ada demokrasi yang bisa hidup tanpanya. Semua presiden Amerika sejak Washington telah bertarung dengan media. Banyak di antara mereka yang secara pribadi benci media. Namun dengan sedikit kekecualian, presiden-presiden AS mengakui peran sentral media sebagai suatu lembaga demokrasi dan menghormati tempatnya di sistem politik. Para presiden yang benci media secara pribadi pun masih memberi penghormatan minimal dan bersikap santun kepada media di depan publik. Norma dasar itu memunculkan sejumlah aturan tak tertulis yang mengatur hubungan presiden dengan media. Beberapa di antaranya—seperti melambatkan

tangan ke arah para wartawan sebelum naik ke Air Force One—remeh, tapi yang lain, seperti mengadakan konferensi pers yang bisa dihadiri semua anggota korps pers Gedung Putih, lebih penting.

Hinaan publik Presiden Trump ke media dan bahkan jurnalis secara pribadi tidak pernah ada pendahulunya dalam sejarah AS modern. Dia menjabarkan media sebagai "termasuk manusia-manusia paling tak jujur di Bumi," dan berkali-kali menuduh media berita kritis seperti *New York Times*, *Washington Post*, dan CNN berbohong atau menyebarkan "berita palsu". Trump tak segan-segan menyerang pribadi. Pada Juni 2017 dia menyerang pembawa acara televisi Mika Brzezinski dan Joe Scarborough dalam serangkaian cuitan yang amat tajam:

Saya dengar @Morning_Joe yang *rating*-nya payah itu ngomong jelek tentang saya (tidak pernah nonton itu lagi). Lalu kenapa Mika Gila ber-IQ rendah, dan Joe Psiko, datang...

...ke Mar-a-Lago 3 malam berturut-turut menjelang Tahun Baru dan ngotot mau ikut saya. Dia masih berdarah gara-gara *face-lift*. Saya bilang tidak!

Bahkan Richard Nixon, yang secara pribadi memandang media sebagai "musuh", tak pernah melakukan serangan publik seperti itu. Untuk mencari perilaku serupa di belahan Bumi yang sama, kita mesti lihat Hugo Chávez dan Nicolás Maduro di Venezuela atau Rafael Correa di Ekuador.

Pemerintahan Trump juga melanggar norma mapan dengan memilih-milih reporter yang boleh dan tak boleh hadir di acara pers. Pada 24 Februari 2017, Sekretaris Pers Sean Spicer melarang reporter dari *New York Times*, CNN, *Politico*, *BuzzFeed*, dan *Los Angeles Times* menghadiri satu "obrolan" pers yang tak ditayangkan di televisi, sambil mengundang jurnalis dari media yang lebih kecil tapi lebih bersimpati seperti *Washington Times* dan One America News Network. Satu-satunya contoh terdahulu dari zaman modern adalah keputusan Nixon melarang *Washington Post* masuk Gedung Putih sesudah koran itu membeberkan skandal Watergate.

Pada 1993, Senator Daniel Patrick Moynihan (New York, Demokrat), seorang mantan ahli ilmu sosial, membuat pengamatan tajam: Manusia punya kemampuan terbatas untuk menghadapi orang yang berperilaku dalam cara-cara yang menyimpang dari standar bersama. Kalau aturan-aturan tak tertulis dilanggar berkali-kali, menurut pengamatan Moynihan, masyarakat punya kecenderungan untuk "melonggarkan kewajaran"—menggeser standar. Apa yang dulu dipandang tak normal berubah menjadi normal.

Moynihan menerapkan wawasan itu, secara kontroversial, ke kenaikan toleransi sosial di Amerika terhadap keluarga dengan orangtua tunggal, kenaikan angka pembunuhan, dan penyakit mental. Hari ini wawasan Moynihan berlaku bagi demokrasi Amerika. Walau penyimpangan politik—pelanggaran (aturan tak tertulis) kesantunan, penghormatan terhadap pers, *tidak berbohong*—tak diawali oleh Donald Trump, masa kepresidenannya mempercepat itu semua. Di bawah Presiden Trump, Amerika telah melonggarkan kewajaran. Kebiasaan presiden menggunakan hinaan pribadi, perisakan, dan kebohongan tak pelak lagi membantu normalisasi praktik-praktik itu. Cuitan Trump boleh jadi memicu kehebohan media, Partai Demokrat, dan beberapa orang Partai Republik, tapi keampuhan tanggapan mereka dikalahkan oleh banyaknya pelanggaran. Seperti diamati Moynihan, menghadapi banyaknya pelanggaran, kita kewalahan—lalu jadi tak peka. Kita jadi terbiasa dengan apa yang dulu kita anggap skandal.

Lagi pula, penyimpangan Trump ditoleransi oleh Partai Republik, sehingga jadi bisa diterima sebagian besar pemilih Partai Republik. Memang, banyak orang Partai Republik telah mencela perilaku terburuk Trump. Namun pernyataan sekali-sekali tidak cukup keras menghukum. Semua kecuali satu senator Republik memberi suara mendukung Presiden Trump pada setidaknya 85 persen kesempatan selama tujuh bulan pertama dia menjabat. Bahkan Senator Ben Sasse (Nebraska) dan Jeff Flake (Arizona), yang sering memprotes keras pelanggaran norma oleh presiden, memberi suara mendukung dia dalam 94 persen kesempatan. Tak ada strategi "pengurangan" untuk aliran cuitan ofensif

terus-menerus. Karena tak bersedia membayar harga politis berpisah jalan dengan presiden mereka, orang-orang Partai Republik jadi tak punya pilihan selain terus-menerus mengubah batas apa yang bisa dan tak bisa ditoleransi.

Itu akan buruk konsekuensinya bagi demokrasi Amerika Serikat. Serangan Presiden Trump terhadap norma-norma dasar sudah memperluas batas-batas perilaku politis yang bisa diterima. Boleh jadi kita sudah melihat beberapa konsekuensinya. Pada Mei 2017, Greg Gianforte, calon dari Republik untuk pemilihan khusus Kongres, membanting seorang reporter *The Guardian* yang bertanya kepada dia mengenai reformasi jaminan kesehatan. Gianforte didakwa melakukan penyerangan—tapi tetap menang pemilihan. Secara lebih umum, satu jajak pendapat YouGov untuk *The Economist* pada pertengahan 2017 mengungkapkan tingkat intoleransi tinggi terhadap media, terutama di antara pemilih Partai Republik. Ketika ditanya apakah mereka setuju atau tidak bila pengadilan diperbolehkan membredel media dengan alasan menyajikan informasi yang "bias atau tak akurat", 45 persen pemilih Republik yang ditanya berkata setuju, sedangkan yang tidak setuju hanya 20 persen. Di atas 50 persen pemilih Republik mendukung gagasan menerapkan denda untuk pemberitaan bias atau tak akurat. Dengan kata lain, mayoritas pemilih Republik berkata mendukung jenis represi media yang tahun-tahun ini terlihat di Ekuador, Turki, dan Venezuela.

Dua video perekrutan National Rifle Association dirilis pada musim panas 2017. Di video pertama, juru bicara NRA Dana Loesch berbicara mengenai Partai Demokrat dan penggunaan kekerasan:

Mereka menggunakan sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak bahwa presiden adalah Hitler baru. Mereka menggunakan bintang film dan penyanyi dan acara lawak dan acara penghargaan untuk mengulang-ulang narasi itu. Lalu mereka gunakan mantan presiden mereka untuk mendukung "perlawanan". Semuanya agar mereka turun ke jalan, berunjuk rasa, berteriak mengenai rasisme dan

seksisme dan xenofobia dan homofobia. Memecah jendela, membakar mobil, memblokir jalan dan bandara, menindas dan meneror orang taat hukum, sampai satu-satunya pilihan adalah mengerahkan polisi untuk menghentikan kegilaan. Dan kalau itu terjadi, mereka menggunakannya sebagai dalih untuk mengamuk. Satu-satunya cara untuk menghentikannya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara dan kebebasan kita, adalah melawan kekerasan kebohongan dengan tinju kebenaran.

Di video kedua, Loesch mengeluarkan peringatan kekerasan yang tak begitu terselubung terhadap *New York Times*:

Kami sudah muak dengan keangkuhan ... pernyataan kalian bahwa kalian ini jurnalisme berdasar kebenaran atau fakta. Anggap ini tembakan peringatan ke arah kalian..... Pendeknya, kami incar kalian.

NRA bukan organisasi kecil di pinggiran, mengaku punya lima juta anggota dan berhubungan erat dengan Partai Republik—Donald Trump dan Sarah Palin adalah anggotanya. Namun sekarang NRA menggunakan kata-kata yang dulu kita anggap amat menyimpang secara politis.

Norma-norma adalah pagar lembut demokrasi; kalau pagarnya rusak, kisaran perilaku politik yang bisa diterima melebar, memunculkan wacana dan aksi yang dapat mengancam demokrasi. Perilaku yang pernah dianggap tak terpikirkan di perpolitikan Amerika mulai biasa terjadi. Kalaupun Donald Trump tidak menabrak pagar keras demokrasi konstitusional Amerika Serikat, dia telah meningkatkan kemungkinan bahwa seorang presiden masa depan akan melakukan itu.

9

Menyelamatkan Demokrasi

Penulisan buku ini telah mengingatkan kami bahwa demokrasi Amerika tak seluar biasa seperti kita lazimnya percayai. Tak ada isi Konstitusi atau budaya AS yang membuat Amerika Serikat kebal terhadap kerusakan demokrasi. Amerika Serikat sudah pernah mengalami bencana politik dulu, ketika permusuhan antardaerah dan partisan membelah negara sehingga memicu perang saudara. Sistem konstitusional AS pulih; para pemimpin Partai Republik dan Demokrat mengembangkan norma dan praktik baru yang mendasari seabad lebih kestabilan politik. Namun kestabilan itu dibayar dengan diskriminasi ras dan kekuasaan otoriter partai tunggal di AS Selatan. Baru sesudah 1965 Amerika Serikat mengalami demokrasi penuh. Dan anehnya, proses itu memulai pergeseran mendasar di antara pemilih Amerika yang membuat partai-partai amat terpolarisasi. Polarisasi itu, yang lebih dalam daripada kapan pun sejak akhir Rekonstruksi, telah memicu wabah pelanggaran norma yang sekarang mengancam demokrasi AS.

Ada persepsi bahwa demokrasi sedang mundur di seluruh dunia. Venezuela. Thailand. Turki. Hungaria. Polandia. Larry Diamond, barangkali ahli demokrasi paling terkemuka di dunia, percaya kita telah memasuki masa resesi demokrasi. Kondisi internasional jelas kurang mendukung demokrasi sekarang, ketimbang pada tahun-tahun sesudah akhir Perang Dingin. Selama 1990-an, negara-negara demokrasi liberal Barat tak tertandingi dalam kekuatan militer, ekonomi, dan ideologis,

dan demokrasi gaya Barat dipandang secara luas sebagai "satu-satunya permainan di kota". Namun dua dasawarsa kemudian keseimbangan kekuasaan dunia telah bergeser. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyaksikan pengaruh globalnya terkikis, sementara Tiongkok dan Rusia tampak makin berpengaruh. Dan dengan kemunculan model-model otoriter baru di Rusia, Turki, Venezuela, dan tempat-tempat lain, sekarang demokrasi tampak tak lagi tak tergoyahkan. Mungkinkah krisis Amerika sebenarnya bagian gelombang kemunduran demokrasi global?

Kami ragu. Sebelum pemilihan Donald Trump, klaim-klaim mengenai resesi demokrasi global dibesar-besarkan. Walau kondisi internasional menjadi makin tak baik bagi demokrasi pada awal abad ke-21, negara-negara demokrasi yang ada telah terbukti kuat menghadapi tantangan itu. Jumlah negara demokrasi di dunia tak turun, malah tetap sejak memuncak sekitar tahun 2005. Yang mengalami kemunduran masuk berita dan menarik perhatian kita, tapi untuk mengimbangi Hungaria, Turki, dan Venezuela, kita punya Kolombia, Sri Lanka, dan Tunisia—negara-negara yang menjadi *makin* demokratis selama dasawarsa kemarin. Dan yang penting, sebagian besar negara demokrasi di dunia—dari Argentina, Brasil, Chile, dan Peru ke Yunani, Spanyol, Republik Ceko, dan Romania sampai Ghana, India, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Taiwan—tetap utuh sampai 2017.

Demokrasi Barat telah diganggu krisis kepercayaan dalam negeri pada tahun-tahun belakangan. Dengan lemahnya ekonomi, tumbuhnya keraguan terhadap Uni Eropa, dan bangkitnya partai-partai politik anti-imigran, ada banyak yang mesti dikhawatirkan di Eropa barat. Keberhasilan kelompok radikal kanan baru-baru ini dalam pemilu di Prancis, Belanda, Jerman, dan Austria misalnya telah menambah kekhawatiran mengenai kestabilan negara-negara demokrasi Eropa. Di Britania, debat Brexit membuat politik amat terpolarisasi. Pada November 2016, sesudah satu putusan pengadilan mewajibkan persetujuan parlemen untuk melanjutkan Brexit, *The Daily Mail* dengan agresif meniru bahasa Donald Trump, menyebut para hakim sebagai "Musuh

Rakyat". Dan pemerintahan Konservatif menyebut-nyebut klausa Henry VIII yang berpotensi memungkinkan Brexit berlanjut tanpa persetujuan parlemen sehingga membuat para pengkritik khawatir, termasuk beberapa orang di Partai Konservatif sendiri. Namun sejauh ini norma-norma dasar demokrasi tetap utuh di Eropa barat.

Kebangkitan Trump itu sendiri menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi global. Dari ambruknya Tembok Berlin sampai masa kepresidenan Obama, pemerintah AS terus menerapkan kebijakan luar negeri prodemokrasi secara luas. Ada banyak pengecualian: kapan pun kepentingan strategis Amerika dipertaruhkan, seperti di Tiongkok, Rusia, dan Timur Tengah, demokrasi hilang dari agenda. Namun di sebagian besar Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin, pemerintahan AS menggunakan tekanan diplomatik, bantuan ekonomi, dan alat kebijakan luar negeri lain untuk menentang otoritarianisme dan mendorong demokratisasi selama era pasca-Perang Dingin. Periode 1990–2015 boleh dikata seperempat abad paling demokratis di sejarah dunia—sebagian karena kekuatan-kekuatan Barat mendukung demokrasi secara luas. Boleh jadi itu kini berubah. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat tampak meninggalkan perannya sebagai promotor demokrasi untuk pertama kali sejak Perang Dingin. Pemerintahan Presiden Trump adalah pemerintahan AS yang paling tak prodemokrasi sejak zaman Nixon. Selain itu, Amerika sudah tak lagi menjadi model demokrasi. Negara yang presidennya menyerang pers, mengancam mau memenjarakan pesaing, dan menyatakan dia mungkin tak menerima hasil pemilu, tidak bisa membela demokrasi dengan kredibel. Para autokrat yang sedang dan akan berkuasa bisa jadi terdorong dengan keberadaan Trump di Gedung Putih. Jadi biarpun gagasan resesi demokrasi global masih berupa mitos sebelum 2016, masa kepresidenan Trump—bersama-sama dengan krisis Uni Eropa, kebangkitan Tiongkok, dan makin agresifnya Rusia—dapat membuatnya jadi kenyataan.

Kembali ke Amerika Serikat, kami melihat tiga kemungkinan masa depan untuk Amerika pasca-Trump. Yang pertama dan paling optimistis

adalah pemulihan demokrasi dengan cepat. Dalam skenario ini, Presiden Trump gagal secara politis: dia kehilangan dukungan masyarakat dan tak terpilih kembali, atau lebih dramatis, dia dimakzulkan atau dipaksa mengundurkan diri. Keruntuhan kepresidenan Trump dan kemenangan perlawanan anti-Trump membuat Partai Demokrat kuat, lalu kembali berkuasa dan membatalkan kebijakan-kebijakan Trump yang paling buruk. Bila Presiden Trump gagal cukup parah, ketidaksenangan publik bahkan bisa memicu reformasi yang memperbaiki mutu demokrasi, seperti yang terjadi sesudah Presiden Nixon mengundurkan diri pada 1974. Sesudah membayar harga mahal karena berhubungan dengan Trump, para pemimpin Partai Republik mungkin mengakhiri kedekatan mereka dengan politik ekstremis. Di skenario masa depan itu, reputasi Amerika di dunia bakal segera pulih. Masa Trump bakal diajarkan di sekolah, dikenang dalam film, dan disebut-sebut di karya sejarah sebagai era kesalahan tragis ketika bencana dihindari dan demokrasi Amerika selamat.

Itu jelas masa depan yang diharapkan banyak di antara kita. Namun kemungkinannya kecil. Ingat bahwa serangan terhadap norma-norma demokrasi lama—dan polarisasi yang mendasarinya—dimulai lama sebelum Donald Trump masuk ke Gedung Putih. Pagar lunak demokrasi Amerika sudah melemah selama puluhan tahun; sekadar mencopot Presiden Trump tidak akan secara ajaib memulihkannya. Walau masa kepresidenan Trump ujung-ujungnya boleh jadi dipandang sebagai penyimpangan sementara dengan sedikit bekas ke lembaga-lembaga AS, mengakhirinya barangkali tak cukup untuk memulihkan demokrasi yang sehat.

Kemungkinan masa depan kedua yang jauh lebih gelap: Presiden Trump dan Partai Republik terus unggul dengan mengandalkan daya tarik kulit putih nasionalis. Dalam skenario ini, Partai Republik pro-Trump bakal tetap menguasai jabatan presiden, kedua kamar Kongres, dan sebagian besar negara bagian, dan akhirnya menjadi mayoritas di Mahkamah Agung. Kemudian Partai Republik bakal menggunakan teknik-teknik main kasar konstitusional untuk membangun mayoritas

pemilih kulit putih yang tahan lama. Itu dapat dilakukan dengan kombinasi deportasi skala besar, pembatasan imigrasi, pembersihan daftar pemilih, dan penerapan aturan identitas pemilih yang ketat. Cara-cara merekayasa daftar pemilih bisa didampingi penghapusan *filibuster* dan aturan lain yang melindungi minoritas di Senat, supaya Partai Republik dapat memaksakan agenda biarpun hanya punya minoritas tipis. Cara-cara itu mungkin tampak ekstrem, tapi semuanya setidaknya pernah dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump.

Upaya untuk mendukung Partai Republik dengan merekayasa mayoritas kulit putih baru tentu saja bersifat amat antidemokrasi. Langkah-langkah seperti itu bakal memicu penolakan dari banyak pihak, termasuk kelompok progresif, minoritas, dan sebagian besar sektor swasta. Penolakan itu bisa meningkat menjadi konfrontasi dan bahkan konflik dengan kekerasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan represi oleh polisi dan tindakan main hakim sendiri—atas nama “hukum dan keteraturan”. Untuk merasakan bagaimana keadaan seperti itu bisa dibingkai, tonton video perekrutan NRA terbaru atau dengarkan bagaimana politikus Republik berbicara mengenai Black Lives Matter.

Skenario mimpi buruk seperti itu kecil kemungkinannya, tapi juga tak mustahil. Sukar menemukan contoh masyarakat di mana mayoritas etnis yang menyusut rela melepas status dominan tanpa perlawanan. Di Lebanon, kemerosotan demografis kelompok-kelompok Kristen dominan menyebabkan perang saudara lima belas tahun. Di Israel, ancaman demografis yang diciptakan oleh pendudukan *de facto* Tepi Barat mendorong negara itu menuju sistem politik yang telah dibandingkan dengan apartheid oleh dua mantan perdana menteri. Dan di Amerika Serikat sendiri, sesudah Rekonstruksi, Partai Demokrat di AS selatan menanggapi ancaman dari pemberian hak suara untuk orang kulit hitam dengan mencabut hak itu selama hampir seabad. Walau kelompok nasionalis kulit putih tetap minoritas di dalam Partai Republik, dorongan untuk memberlakukan aturan identitas pemilih ketat dan pembersihan daftar pemilih—dipimpin dua tokoh Republik berpengaruh, Jaksa Agung Jeff Sessions dan Wakil Ketua Komisi Integritas Pemilu Kris

Kobach—memberi kesan bahwa rekayasa pemilih ada di agenda Partai Republik.

Masa depan ketiga, yang menurut kami paling besar peluangnya, adalah polarisasi, makin banyak penyimpangan dari aturan politik tak tertulis, dan meningkatnya perang antarlembaga—dengan kata lain, demokrasi tanpa pagar solid. Presiden Trump dan Trumpisme boleh jadi gagal di skenario itu, tapi kegagalan itu tak berpengaruh banyak dalam mengurangi perpecahan antarpartisai atau membalikkan penurunan saling toleransi dan menahan diri.

Untuk melihat seperti apa politik tanpa pagar di Amerika Serikat, pertimbangkan North Carolina hari ini. North Carolina adalah negara bagian "ungu" klasik. Dengan ekonomi terdiversifikasi dan sistem universitas yang diakui secara internasional. North Carolina lebih kaya, urban, dan terdidik dibanding kebanyakan negara bagian AS selatan. Penduduknya juga beragam, sepertiganya adalah orang Afrika-Amerika, Asia-Amerika, dan Latino. Semua itu membuat North Carolina wilayah yang lebih ramah bagi Partai Demokrat dibanding negara-negara bagian Deep South lain. Pemilih di North Carolina mirip kondisi nasional: terbagiimbang antara Demokrat dan Republik, Demokrat dominan di kota-kota seperti Charlotte dan Raleigh-Durham sementara Republik dominan di desa-desa.

Negara bagian itu telah menjadi, sebagaimana kata-kata profesor hukum Duke Jedediah Purdy, "mikrokosmos politik hiper-partisan negara dan sikap saling tak percaya yang tumbuh." Selama dasawarsa kemarin, para partisan telah mempertengskarkan pembatasan aborsi oleh Partai Republik, penolakan Medicaid sebagai bagian Affordable Care Act oleh gubernur Republik, usul amendemen konstitusi untuk melarang pernikahan sesama jenis, dan yang paling terkenal, Public Facilities Privacy & Security Act 2016 ("Bathroom Bill") yang melarang pemerintah lokal membolehkan orang transgender menggunakan kamar mandi publik untuk jenis kelamin sesuai yang mereka pilih. Semua inisiatif itu memicu perlawanan keras. Seperti dikatakan seorang anggota Partai Republik veteran, politik negara bagian telah menjadi

”lebih terpolarisasi dan sengit daripada yang pernah saya lihat.... Dan saya pernah bekerja untuk Jesse Helms.”

Menurut sebagian besar laporan, terjerumusny North Carolina dalam perang politik habis-habisan dimulai sesudah Partai Republik meraih kendali atas dewan legislatif negara bagian pada 2010. Tahun berikutnya, dewan legislatif menyetujui satu rencana perubahan daerah pemilihan yang dipandang secara luas sebagai ”rekayasa rasial”—daerah pemilihan diatur sedemikian rupa sehingga mengumpulkan pemilih Afrika-Amerika ke segelintir daerah, sehingga mengurangi bobot elektoral mereka dan memaksimalkan perolehan kursi Republik. Pastor progresif William Barber, pemimpin gerakan Moral Mondays, menjabarkan daerah pemilihan baru sebagai ”daerah pemilihan apartheid”. Perubahan itu memungkinkan Partai Republik mendapatkan sembilan dari tiga belas kursi kongres dari negara bagian itu pada 2012—walau Partai Demokrat mendapat lebih banyak suara di seluruh negara bagian.

Sesudah Pat McCrory dari Partai Republik menang dalam pemilihan gubernur 2012, Partai Republik mengendalikan ketiga cabang pemerintahan dan mencoba menjaga dominasinya untuk jangka panjang. Dengan memegang kursi gubernur, kedua kamar legislatif, dan mayoritas di Mahkamah Agung negara bagian, para pemimpin Partai Republik meluncurkan serangkaian reformasi ambisius yang tampak dirancang untuk mengubah permainan politik. Mereka memulai dengan meminta akses ke data latar belakang pemilih di negara bagian. Dengan informasi itu, dewan legislatif mengesahkan serangkaian reformasi pemilu yang menyulitkan pemilih memberi suara. Mereka mengesahkan aturan identitas pemilih yang ketat, mengurangi kesempatan pemberian suara lebih dini, mengakhiri pra-registrasi untuk remaja umur enam belas dan tujuh belas, menghapus registrasi pada hari pemilihan, dan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara di beberapa *county* penting. Data baru memperkenankan Partai Republik merancang reformasi yang tampak mengincar warga Afrika-Amerika, dengan ”presisi tinggi” seperti dikatakan pengadilan banding federal. Dan ketika pengadilan banding membatalkan pelaksanaan aturan-aturan baru itu, Partai Republik meng-

gunakan kendali atas badan penyelenggara pemilu negara bagian untuk menerapkan sebagiannya.

Perang kelembagaan berlanjut sesudah Roy Cooper dari Partai Demokrat menang tipis atas McCrory dalam pemilihan gubernur 2016. McCrory menolak mengakui kekalahan selama hampir satu bulan, selagi Partai Republik menuduh ada rekayasa pemilih, tanpa dasar. Namun itu baru awalnya. Sesudah McCrory akhirnya mengaku kalah pada Desember 2016, Partai Republik mengadakan suatu "sidang istimewa kejutan" dewan legislatif negara bagian. Sebagai tanda betapa merosotnya kondisi politik, tersebar desas-desus akan terjadi "kudeta legislatif", di mana Partai Republik bakal menyerahkan kursi gubernur ke McCrory dengan mengeksploitasi satu undang-undang yang memperkenankan para legislator mengintervensi apabila hasil pemilihan gubernur dipermasalahkan.

Kudeta seperti itu tak terjadi, tapi dalam apa yang dijabarkan *New York Times* sebagai "perebutan kekuasaan yang kebablasan", sidang istimewa itu mengesahkan beberapa aturan yang mengurangi kekuasaan gubernur baru dari Demokrat. Senat memberi kepada dirinya sendiri wewenang untuk menyetujui penunjukan orang-orang di kabinet oleh gubernur, dan memperkuat gubernur Republik yang masih menjabat untuk mengubah posisi orang-orang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara menjadi pejabat tetap. Gubernur McCrory yang akan melepas jabatan dengan cepat memberi posisi tetap kepada hampir seribu staf gubernur yang dia tunjuk—intinya "menguasai" cabang eksekutif. Partai Republik lalu mengubah komposisi badan penyelenggara pemilu negara bagian, yang bertanggung jawab atas aturan lokal terkait perubahan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, syarat identitas pemilih, waktu pemungutan suara, dan penyebaran tempat pemungutan suara. Badan itu tadinya di bawah kendali gubernur yang menjabat, yang dapat memberi mayoritas kursi di sana kepada partainya; Partai Republik menciptakan sistem perwakilan partisan seimbang. Dalam langkah lain, ketua badan penyelenggara pemilu diduduki bergantian oleh wakil kedua partai tiap tahun; partai dengan keanggotaan terbesar kedua

(Republik) menjabat ketua pada tahun genap—tahun pemilu. Beberapa bulan kemudian, dewan legislatif mengadakan pemungutan suara untuk mengurangi jumlah hakim di pengadilan banding negara bagian menjadi tiga, efektif menghilangkan tiga posisi hakim yang ditunjuk Gubernur Cooper.

Walau daerah pemilihan yang diubah berdasarkan ras, aturan pemilihan 2013, dan reformasi badan penyelenggara pemilu belakangan dibatalkan pengadilan, pengesahan kesemuanya mengungkap bahwa Partai Republik bersedia memanfaatkan segala kemampuannya untuk melemahkan lawan politik. Anggota Kongres David Price, seorang Demokrat dari Chapel Hill, berkata bahwa krisis legislatif mengajari dia bahwa "demokrasi Amerika boleh jadi lebih rapuh daripada yang kita sadari."

North Carolina menawarkan kilas pandang mengenai seperti apakah politik tanpa pagar—dan kemungkinan masa depan Amerika. Jika pesaing partisan menjadi musuh, maka persaingan politik merosot menjadi perang, dan lembaga-lembaga kita menjadi senjata. Hasilnya adalah sistem yang terus-menerus berada di ambang krisis.

Skenario suram itu menyoroti satu pelajaran utama dalam buku ini: Ketika berjalan lancar, demokrasi Amerika mengandalkan dua norma yang kita sering anggap remeh—saling toleransi dan menahan diri secara kelembagaan. Memperlakukan pesaing sebagai lawan sah dalam perebutan kekuasaan dan tidak menggunakan segenap hak istimewa kelembagaan demi pertandingan yang adil tidaklah tertulis dalam Konstitusi Amerika Serikat. Namun tanpa keduanya, pengawasan dan pertimbangan konstitusional tidak akan bekerja seperti diharapkan. Ketika pemikir Prancis Baron de Montesquieu memelopori gagasan pembagian kekuasaan dalam karyanya tahun 1748 *De l'esprit des lois* (*Semangat Hukum*), dia tak banyak mengkhawatirkan apa yang sekarang kita sebut norma. Montesquieu percaya bahwa arsitektur keras lembaga-lembaga politik boleh jadi cukup untuk membatasi kekuasaan yang menjangkau terlalu jauh—bahwa rancangan konstitusi tak jauh

berbeda dengan suatu masalah teknik, tantangan pembangunan lembaga supaya ambisi dapat digunakan untuk menandingi sesama ambisi, biarpun para pemimpin politik tidaklah sempurna. Banyak pendiri Amerika Serikat percaya itu juga.

Sejarah cepat mengungkapkan bahwa para pendiri AS keliru. Tanpa inovasi seperti partai politik dan norma-norma yang menyertai, Konstitusi yang mereka buat dengan begitu cermat di Philadelphia tak bakal bertahan. Lembaga-lembaga bukan sekadar aturan formal, melainkan melingkupi pemahaman bersama atas perilaku pantas yang mendasari. Kejeniusan generasi pertama pemimpin politik Amerika Serikat bukanlah karena menciptakan lembaga-lembaga yang tanpa cacat, melainkan bahwa selain merancang lembaga-lembaga amat baik, mereka—secara bertahap dan susah payah—menetapkan satu set kepercayaan dan praktik bersama yang membantu lembaga-lembaga itu bekerja.

Sudah sering dikatakan bahwa kekuatan sistem politik Amerika Serikat terletak di apa yang disebut ahli ekonomi Swedia peraih Hadiah Nobel Gunnar Myrdal sebagai Kredo Amerika: prinsip kebebasan individual dan egalitarianisme. Kebebasan dan kesetaraan, yang ditulis di dokumen pendirian negara AS serta diulang-ulang di kelas, pidato, dan halaman tajuk rencana, adalah nilai-nilai yang menjustifikasi diri sendiri. Namun nilai-nilai itu tak terlaksana dengan sendirinya. Saling toleransi dan menahan diri secara kelembagaan adalah prinsip prosedural—memberitahu para politikus bagaimana harus berbuat, di luar batas hukum, untuk menjalankan fungsi lembaga-lembaga kita. Sebaiknya kita anggap nilai-nilai prosedural itu sebagai berada di pusat Kredo Amerika juga—karena tanpanya demokrasi AS tak bakal berjalan.

Itu besar dampaknya bagi cara warga menentang pemerintahan Trump. Sesudah pemilu 2016, banyak pembuat opini progresif menyimpulkan bahwa Partai Demokrat perlu "bertarung seperti Partai Republik". Bila Partai Republik akan melanggar aturan, kata argumen itu, maka Partai Demokrat tak punya pilihan selain memakai cara yang sama. Tetap menahan diri dan santun sementara pihak lain tak menahan diri, ibarat

petinju masuk ring dengan satu tangan terikat di punggung. Ketika menghadapi pengganggu yang bersedia menggunakan cara apa pun untuk menang, mereka yang bermain sesuai aturan berisiko kalah. Penolakan Partai Republik memperkenankan Presiden Obama mengisi kursi kosong di Mahkamah Agung membuat Partai Demokrat merasa dikerjai, terutama sesudah kemenangan Trump yang memastikan bahwa Partai Republik bakal mendapat apa yang diinginkannya. Ahli ilmu politik dan penulis David Faris membahas seruan untuk "bertarung dengan kotor":

Posisi negosiasi Partai Demokrat di segala isu... seharusnya sederhana sekali: Kalian beri kami Merrick Garland atau kalian mampus saja.... Tak hanya itu, tapi mereka seharusnya melakukan apa yang mesti dilakukan pada hari Antonin Scalia meninggal: Perjelas bahwa kali lain Demokrat mengendalikan Senat sementara Partai Republik memegang kursi kepresidenan ... akan ada harga amat tinggi yang harus dibayar untuk apa yang baru saja terjadi. Presiden Republik berikutnya dengan pemerintahan terbelah tak akan dapat apa-apa ... Nol persetujuan. Tidak satu pun hakim, bahkan di pengadilan distrik terendah. Tidak ada pemimpin kabinet. Tidak ada hukum.

Langsung sesudah terpilihnya Presiden Trump, beberapa orang progresif menyerukan tindakan untuk mencegah Trump menjabat. Di kolom berjudul "Buck Up, Democrats, and Fight Like Republicans", yang terbit sebulan *sebelum* pelantikan Trump, Dahlia Lithwick dan David S. Cohen menyayangkan Partai Demokrat yang "tak berbuat banyak untuk menghentikan dia". Walau kita "tak kekurangan teori hukum yang dapat menantang pelantikan Mr. Trump," tulis mereka, Partai Demokrat tak menempuh langkah itu. Lithwick dan Cohen berpendapat Partai Demokrat "seharusnya bertarung habis-habisan" untuk mencegah Donald Trump menjabat—mendorong penghitungan ulang dan penyelidikan kecurangan di Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin, berusaha memengaruhi Electoral College, bahkan mencoba membatalkan kemenangan Presiden Trump di pengadilan.

Pada hari pelantikan, beberapa orang Partai Demokrat memper-

tanyakan legitimasi Trump sebagai presiden. Anggota DPR Jerry McNerney dari California memboikot pelantikan, menyatakan bahwa pemilu "tak punya legitimasi" karena ada campur tangan Rusia; demikian juga, Anggota DPR John Lewis dari Georgia menyatakan bahwa dia tak menganggap Presiden Trump sebagai "presiden yang sah". Hampir tujuh puluh anggota DPR dari Demokrat memboikot pelantikan Trump.

Sesudah Trump berada di Gedung Putih, beberapa tokoh progresif menyeru kepada Partai Demokrat agar "meniru cara Partai Republik dan menghalangi semuanya." Contohnya, Markos Moulitsas, pendiri situs web *Daily Kos*, menyatakan bahwa "tidak ada yang bisa disetujui Senat tanpa harus dipertengkarkan Republik. Saya tak peduli walaupun urusannya hanya urusan doa pagi. Semuanya harus dipertengkarkan."

Beberapa orang Partai Demokrat bahkan segera mengangkat kemungkinan pemakzulan dini. Tak sampai dua minggu sesudah pelantikan Trump, anggota DPR Maxine Waters mengetwit, "keinginan terbesar saya [adalah] membawa @realDonaldTrump langsung ke pemakzulan". Pembicaraan mengenai pemakzulan makin ramai sesudah Direktur FBI James Comey dipecat, diperkuat menurunnya kepopuleran Trump, yang menaikkan harapan Demokrat meraih mayoritas di DPR yang diperlukan untuk mengawali proses pemakzulan. Dalam wawancara pada Mei 2017, Waters menyatakan, "Beberapa orang bahkan tak mau menyebut kata itu. Seolah gagasannya terlalu besar. Terlalu sulit dilakukan, terlalu banyak yang harus dipikirkan. Saya tak memandangnya seperti itu."

Menurut hemat kami, gagasan bahwa Partai Demokrat sebaiknya "bertarung seperti Partai Republik" keliru. Pertama, bukti dari negara lain memberi kesan bahwa strategi seperti itu sering malah menguntungkan pihak otoriter. Taktik bumi hangus sering merusak dukungan bagi oposisi karena membuat kelompok moderat takut. Dan taktik itu memperkokoh kekuatan pro-pemerintah, karena pembangkang di dalam partai yang berkuasa pun akan merapatkan barisan ketika menghadapi oposisi tanpa kompromi. Dan ketika oposisi bermain kotor, pemerintah jadi punya alasan untuk melakukan tindakan tegas.

Itulah yang terjadi di Venezuela di bawah Hugo Chávez. Walau beberapa tahun pertama masa kepresidenan Chávez demokratis, lawan-lawannya menganggap wacana populis Chávez mengerikan. Karena takut Chávez bakal menyetir Venezuela ke arah sosialisme gaya Kuba, mereka mencoba mencopot dia secepatnya—dan dengan segala cara. Pada April 2002, para pemimpin oposisi mendukung suatu kudeta militer, yang bukan hanya gagal melainkan merusak citra mereka sebagai demokrat. Oposisi tak kapok dan meluncurkan suatu pemogokan umum tanpa batas waktu pada Desember 2002, berusaha memberhentikan negara sampai Chávez mengundurkan diri. Pemogokan itu berlangsung selama dua bulan, merugikan Venezuela kira-kira \$4,5 miliar dan ujung-ujungnya gagal. Kekuatan anti-Chávez kemudian memboikot pemilu legislatif 2005, tapi itu hanya membuat *chavista* menguasai total Kongres. Ketiga strategi menjadi senjata makan tuan. Bukan hanya gagal menjatuhkan Chávez, melainkan juga mengurangi dukungan publik terhadap oposisi, membuat Chávez bisa mengecap para pesaingnya sebagai antidemokrasi, dan memberi alasan kepada pemerintah untuk melakukan pembersihan di militer, polisi, dan pengadilan, menangkap atau mengasingkan pembangkang, dan menutup media independen. Oposisi yang lemah dan kehilangan kredibilitas tak dapat menghentikan perubahan rezim sesudahnya menjadi otoriter.

Strategi oposisi di Kolombia di bawah Presiden Álvaro Uribe lebih berhasil. Uribe, yang terpilih pada 2002, melakukan perebutan kekuasaan yang tak jauh beda dengan yang dilakukan Chávez. Pemerintahannya menyerang pengkritik dengan mengecap mereka sebagai subversif dan teroris, memata-matai lawan dan jurnalis, mencoba melemahkan pengadilan, dan dua kali berusaha mengubah konstitusi agar bisa menjabat satu periode lagi. Sebagai tanggapan, tak seperti di Venezuela, oposisi Kolombia tak pernah mencoba menggulingkan Uribe melalui cara-cara di luar konstitusi. Sebaliknya, seperti ditunjukkan ahli ilmu politik Laura Gamboa, mereka memusatkan upaya ke kongres dan pengadilan. Itu menyulitkan Uribe mempertanyakan sifat demokratis lawan-lawannya atau mencari alasan untuk menindak mereka. Meski

ada penyalahgunaan oleh Uribe, perang kelembagaan gaya Venezuela tak terjadi, dan lembaga-lembaga demokrasi Kolombia tidak terancam. Pada Februari 2010, Mahkamah Konstitusi Kolombia menolak perpanjangan masa jabatan Uribe untuk yang ketiga kali, memaksa dia turun sesudah dua masa jabatan. Pelajarannya seperti ini: Kalau ada saluran kelembagaan, maka kelompok oposisi sebaiknya menggunakan saluran itu.

Kalaupun Partai Demokrat berhasil melemahkan atau mencopot Presiden Trump melalui taktik kasar, kemenangan itu bakal mahal—karena mereka akan mendapat demokrasi yang pagar pelindungnya sudah dilepas. Bila pemerintahan Trump takluk karena penghalangan, atau bila Presiden Trump dimakzulkan tanpa mufakat kuat bipartisan, maka efeknya adalah penguatan—dan barangkali percepatan—dinamika antipati partisan dan erosi norma yang membantu Trump meraih kekuasaan. Sampai sepertiga negara bakal memandang pemakzulan Trump sebagai rekayasa konspirasi besar sayap kiri—bahkan kudeta. Politik Amerika bakal terombang-ambing secara berbahaya.

Eskalasi seperti itu jarang berakhir baik. Bila Partai Demokrat tidak berusaha memulihkan norma-norma saling toleransi dan menahan diri, maka presiden berikut dari Partai Demokrat bisa menghadapi oposisi yang akan menggunakan segala cara untuk mengalahkannya. Dan bila perpecahan partisan makin dalam dan aturan-aturan tak tertulis terus dilanggar, rakyat Amerika Serikat bisa akhirnya memilih presiden yang bahkan lebih berbahaya daripada Trump.

Perlawanan terhadap perilaku otoriter pemerintahan Trump harus kuat, tapi sebaiknya berusaha melestarikan, bukan melanggar, aturan dan norma demokrasi. Kalau bisa, oposisi sebaiknya berpusat di Kongres, pengadilan, dan tentu saja pemilihan umum. Bila Trump kalah melalui lembaga demokrasi, maka itu akan memperkuat lembaga demokrasi.

Protes sebaiknya dipandang dengan cara yang sama. Protes publik adalah hak asasi dan kegiatan penting dalam demokrasi, tapi tujuan protes seharusnya membela hak dan lembaga, bukan merusak. Dalam satu penelitian penting mengenai efek protes warga kulit hitam pada

1960-an, ahli ilmu politik Omar Wasow mendapati bahwa protes tanpa kekerasan yang dipimpin orang kulit hitam memperkuat agenda hak sipil nasional di Washington dan memperluas dukungan publik terhadap agenda tersebut. Sementara itu, protes dengan kekerasan menyebabkan penurunan dukungan orang kulit putih dan boleh jadi membuat pemilu 1968 dimenangkan Nixon, bukan Humphrey.

Sebaiknya kita belajar dari sejarah kita sendiri. Kekuatan-kekuatan anti-Trump seharusnya membangun koalisi luas prodemokrasi. Pembangunan koalisi zaman sekarang sering kali berupa bersatunya kelompok-kelompok yang berpikiran seragam: sinagog progresif, masjid, paroki Katolik, dan gereja Presbyter bisa membentuk koalisi lintas agama untuk melawan kemiskinan atau intoleransi rasial; atau kelompok-kelompok Latino, agama, dan kebebasan sipil bisa membentuk koalisi untuk membela hak imigran. Koalisi kelompok-kelompok sepemikiran itu penting, tapi tak cukup untuk membela demokrasi. Koalisi paling efektif adalah yang mempersatukan kelompok-kelompok dengan pandangan tak seragam—bahkan saling bertentangan—di banyak isu. Koalisi semacam itu bukan dibangun di antara teman, melainkan di antara lawan. Maka koalisi efektif untuk membela demokrasi Amerika mungkin mengharuskan kelompok progresif bersekutu dengan eksekutif bisnis, pemimpin agama (khususnya evangelis kulit putih), dan kelompok Partai Republik di negara bagian "merah". Para pemimpin bisnis boleh jadi bukan sekutu alami aktivis Demokrat, tapi mereka punya alasan bagus untuk menentang pemerintah yang tak stabil dan suka melanggar aturan. Mereka juga bisa menjadi mitra kuat. Pikirkan gerakan boikot baru-baru ini yang diarahkan ke pemerintah negara bagian yang menolak menghormati hari ulang tahun Martin Luther King, Jr., terus mengibarkan bendera Konfederasi, atau melanggar hak gay atau transgender. Ketika bisnis besar bergabung dengan boikot progresif, boikot itu sering berhasil.

Membangun koalisi bukan hanya dengan sekutu alami itu sukar. Diperlukan kesediaan untuk mengesampingkan sejenak isu-isu yang sangat kita pedulikan. Bila kelompok progresif menggunakan sikap terhadap

isu seperti hak aborsi atau jaminan kesehatan dengan pembayar tunggal sebagai "tes litmus" keanggotaan koalisi, maka peluang membangun koalisi yang melibatkan kelompok evangelis dan eksekutif bisnis pendukung Republik akan jadi nol. Kita mesti memandang lebih jauh, menanggung yang biasanya kita tolak, dan berkompromi. Itu *bukan* berarti melupakan perjuangan yang penting bagi kita. Artinya adalah untuk sementara mengesampingkan perbedaan agar bisa menemukan kesamaan alasan moral.

Koalisi oposisi luas bakal bermanfaat besar. Pertama, koalisi itu bakal memperkuat pembela demokrasi ketika membujuk makin banyak anggota masyarakat Amerika. Daripada membatasi anti-Trumpisme ke kalangan progresif pendukung Partai Demokrat, Amerika yang lebih luas bisa dijangkau. Keterlibatan luas seperti itu penting untuk mengisolasi dan mengalahkan pemerintah otoriter.

Tambahan lagi, sementara koalisi anti-Trump sempit (kota, sekuler, progresif) bakal memperbesar perpecahan partisan, koalisi lebih luas bakal melemahkan dan barangkali membantu meredam perpecahan. Suatu gerakan politik yang mempersatukan—meski hanya sementara—pendukung Bernie Sanders dan pengusaha, kelompok evangelis dan feminis sekuler, serta pendukung Republik di kota kecil dan pendukung Black Lives Matter di kota besar, akan membuka saluran-saluran komunikasi melintas jurang besar yang telah menganga di antara dua kubu partisan utama di Amerika Serikat. Dan boleh jadi itu membantu membina hubungan lintas kelompok di masyarakat yang kekurangan hubungan semacam itu. Kalau perbedaan politik dalam suatu masyarakat bersifat saling silang, kita akan berada di kubu yang berbeda dengan orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Boleh jadi kita tak sepakat dengan tetangga kita mengenai aborsi, tapi sepakat dengan mereka mengenai jaminan kesehatan; boleh jadi kita tak suka pandangan tetangga lain mengenai imigrasi, tapi sepakat dengan dia mengenai perlu naiknya upah minimum. Persekutuan seperti itu membantu kita membangun dan memelihara norma saling toleransi. Ketika kita sekali-sekali setuju dengan lawan politik, maka kita lebih kecil kemungkinannya memandang mereka sebagai musuh bebuyutan.

Memikirkan cara melawan pelanggaran oleh pemerintahan Trump jelas penting. Namun masalah dasar yang dihadapi demokrasi Amerika tetaplah perpecahan partisan ekstrem—yang dikompori bukan hanya oleh perbedaan kebijakan, melainkan sumber yang lebih dalam, termasuk perbedaan ras dan agama. Polarisasi besar Amerika sudah ada sebelum masa kepresidenan Trump, dan besar kemungkinan akan bertahan sesudahnya.

Para pemimpin politik punya dua pilihan di hadapan polarisasi ekstrem. Pertama, mereka bisa menganggap perpecahan itu memang sebagaimana adanya, tapi mencoba mengatasinya melalui kerja sama dan kompromi tingkat elite. Itulah yang dilakukan para politikus Chile. Seperti kita lihat di Bab 5, konflik sengit antara Partai Sosialis dan Partai Demokrat Kristen turut merusak demokrasi Chile pada 1973. Rasa saling tak percaya antara kedua partai bertahan selama bertahun-tahun sesudahnya, mengalahkan ketidaksukaan bersama terhadap kediktatoran Pinochet. Pemimpin Sosialis yang terasing, Ricardo Lagos, yang mengajar di University of North Carolina, mengenang bahwa ketika mantan presiden dari Partai Demokrat Kristen Eduardo Frei Montalva mengunjungi universitas itu pada 1975, dia tak mau berbicara dengan Frei—sehingga tak masuk kerja dengan alasan sakit.

Namun akhirnya para politikus mulai saling bicara. Pada 1978, Lagos kembali ke Chile dan diundang makan malam oleh mantan senator dari Partai Demokrat Kristen Tomás Reyes. Keduanya mulai sering bertemu. Pada waktu yang sama, pemimpin Partai Demokrat Kristen Patricio Aylwin menghadiri pertemuan para pengacara dan akademikus dari berbagai latar belakang partisan, banyak di antaranya yang pernah saling bertemu di ruang sidang ketika membela tahanan politik. Pertemuan "Grup 24" itu hanyalah acara makan malam santai di rumah anggota-anggotanya, tapi menurut Aylwin, pertemuan-pertemuan itu "membangun rasa saling percaya di antara kami yang dulunya berseteru." Akhirnya percakapan itu berbuah. Pada Agustus 1985, Partai Demokrat Kristen, Partai Sosialis, dan sembilan belas partai lain berkumpul di Klub Lingkar Spanyol yang elegan di Santiago dan menandatangani

Persetujuan Nasional Transisi ke Demokrasi Penuh. Persetujuan itu membentuk dasar untuk koalisi *Concertación de Partidos por la Democracia* (Konsertasi Partai untuk Demokrasi). Koalisi membangun praktik "politik musyawarah mufakat", di mana keputusan-keputusan penting dirundingkan oleh para pemimpin Partai Sosialis dan Partai Demokrat Kristen. Berhasil. *Concertación* bukan hanya menjatuhkan Pinochet lewat satu referendum pada 1988, melainkan juga meraih kursi kepresidenan pada 1989 dan mempertahankannya selama dua dasawarsa.

Concertación mengembangkan gaya pemerintahan yang berbeda jauh dengan perpolitikan 1970-an Chile. Karena takut konflik kembali muncul dan mengancam demokrasi baru Chile, para pemimpinnya mengembangkan praktik kerja sama informal—yang orang Chile sebut "demokrasi persetujuan"—di mana presiden berkonsultasi dengan pemimpin semua partai sebelum mengajukan rancangan undang-undang ke kongres. Konstitusi 1980 Pinochet telah membuat eksekutif menjadi dominan dengan wewenang menetapkan anggaran secara kurang lebih sepihak, tapi Presiden Aylwin, dari Partai Demokrat Kristen, banyak berbicara dengan Partai Sosialis dan partai-partai lain sebelum mengajukan rancangan anggaran negara. Dia juga tidak hanya bicara dengan sekutunya. Aylwin juga merundingkan legislasi dengan partai-partai sayap kanan yang tadinya mendukung kediktatoran dan membela Pinochet. Menurut ahli ilmu politik Peter Siavelis, norma-norma baru "membantu menahan konflik yang berpotensi merusak kestabilan di dalam koalisi maupun antara koalisi dan oposisi. Chile telah menjadi salah satu demokrasi paling stabil dan berhasil di Amerika Latin selama tiga dasawarsa terakhir.

Kami sangsi Partai Demokrat dan Partai Republik AS bisa mengikuti jejak Chile. Gampang saja bagi para politikus untuk meratapi ketiadaan kesantunan dan kerja sama, atau bernostalgia mengenai sikap bipartisan zaman dulu. Namun penciptaan norma adalah kerja bersama—hanya bisa terjadi ketika cukup banyak pemimpin menerima dan bermain sesuai aturan tak tertulis baru. Biasanya itu terjadi ketika para

pemimpin politik dari berbagai latar belakang sudah memandang jurang dan menyadari bahwa bila mereka tak menemukan cara mengatasi polarisasi, maka demokrasi akan mati. Sering kali yang dipertaruhkan baru terlihat jelas sesudah para politikus mengalami trauma kediktatoran penuh kekerasan seperti di Chile atau perang saudara seperti di Spanyol.

Pilihan selain belajar bekerja sama meski ada polarisasi adalah menanggulangi polarisasi itu. Di Amerika Serikat, para ahli ilmu politik telah mengajukan sejumlah reformasi pemilu—mengakhiri rekayasa daerah pemilihan, pemilihan pendahuluan terbuka, mewajibkan pemberian suara, perubahan aturan pemilihan anggota Kongres, dan lain-lain—yang bisa mengurangi permusuhan partisan di Amerika. Namun bukti keampuhannya belum jelas. Kami pikir lebih baik memusatkan perhatian ke dua kekuatan yang mendorong polarisasi Amerika: perubahan kondisi ras dan agama, dan pertumbuhan kesenjangan ekonomi. Kami percaya bahwa untuk menangani dasar-dasar sosial itu dibutuhkan pergeseran dalam hal apa yang diwakili partai-partai politik Amerika.

Partai Republik telah menjadi pendorong utama perpecahan antarpartai. Sejak 2008, Partai Republik beberapa kali berperilaku seperti partai antisistem dengan menghalang-halangi, bermusuhan secara partisan, dan berposisi ekstrem dalam hal kebijakan. Pergerakannya selama dua puluh lima tahun ke kanan dimungkinkan oleh kekosongan inti organsasinya. Selama seperempat abad terakhir, struktur kepemimpinan Partai Republik telah menjadi kopong—awalnya karena kebangkitan kelompok-kelompok luar berdana besar (seperti Americans for Tax Freedom, Americans for Prosperity, dan sebagainya) yang kemampuan menggalang dananya membuat mereka sedikit banyak mendikte agenda kebijakan banyak pejabat terpilih dari Partai Republik; juga karena makin besarnya pengaruh Fox News dan media sayap kanan lain. Penyumbang kaya di luar partai seperti Koch bersaudara dan tokoh-tokoh berpengaruh di media lebih menekan para pejabat terpilih dari Partai Republik dibanding kepemimpinan Partai Republik sendiri. Partai Republik masih menang pemilu di seantero negara,

tapi apa yang dulu disebut "tatanan mapan" Republik sekarang sudah menjadi hampa. Kehampaan itu telah membuat partai tersebut rawan diambil alih ekstremis.

Untuk mengurangi polarisasi, Partai Republik harus direformasi, atau sekalian dirombak. Pertama, Partai Republik mesti membangun kembali tatanannya. Artinya meraih kembali kendali kepemimpinan di empat bidang penting: keuangan, organisasi akar rumput, penyampaian pesan, dan pemilihan calon. Bila pemimpin partai bisa membebaskan diri dari ikatan penyumbang dari luar dan media sayap kanan, barulah Partai Republik bisa mentransformasi diri. Yang dibutuhkan adalah perubahan besar: Partai Republik mesti meminggirkan unsur-unsur ekstremis; mesti membangun basis pemilih yang lebih beragam, supaya tak lagi sangat bergantung kepada basis Kristen kulit putih yang menyusut; dan mesti mencari cara untuk menang pemilu tanpa memanfaatkan nasionalisme kulit putih, atau apa yang disebut Senator Jeff Flake (Republik, Arizona) sebagai "mabuk populisme, nativisme, dan demagogisme."

Perombakan partai tengah-kanan besar Amerika adalah tugas besar, tapi transformasi semacam itu ada contohnya dalam sejarah—bahkan dalam keadaan yang lebih menantang. Dan keberhasilan reformasi partai konservatif telah membantu kelahiran kembali demokrasi. Satu kasus dramatis adalah demokratisasi Jerman Barat sesudah Perang Dunia II. Di tengah prestasi itu ada satu perkembangan yang kurang diapresiasi: pembentukan Christlich Demokratische Union (CDU, Uni Kristen Demokratis) tengah-kanan dari puing tradisi konservatif dan sayap kanan yang sebelumnya terpuruk.

Sebelum 1940-an, Jerman tak pernah punya partai konservatif yang tertata baik dan berhasil dalam pemilu, di satu sisi, juga moderat dan demokratis di sisi lain. Konservativisme Jerman selalu diganggu perpecahan internal dan kelemahan organisasi. Khususnya, perbedaan besar antara kelompok konservatif Protestan dan Katolik menciptakan kehampaan di tengah-kanan yang dapat dieksploitasi kekuatan ekstremis dan otoriter. Dinamika itu mencapai titik nadir ketika Hitler meraih kekuasaan.

Sesudah 1945, kubu tengah-kanan Jerman dibangun kembali di atas dasar yang berbeda. CDU memisahkan diri dari kelompok ekstremis dan otoriter—para pendirinya terutama adalah tokoh konservatif (seperti Konrad Adenauer) dengan kredibilitas anti-Nazi “tak dipertanyakan”. Dokumen pendirian partai itu menjelaskan bahwa CDU benar-benar menentang rezim sebelumnya berikut segala bagiannya. Pemimpin CDU Andreas Hermes menjelaskan skala perbedaan itu ketika berkomentar pada 1945: “Dunia lama telah tenggelam dan kami ingin membangun dunia baru....” CDU menawarkan visi jelas masa depan demokratis bagi Jerman: suatu masyarakat “Kristen” yang menolak kediktatoran serta menerima kebebasan dan toleransi.

CDU juga memperluas basis pemilih, dengan merekrut orang Katolik dan Protestan. Itu tidak mudah. Namun trauma Nazisme dan Perang Dunia II meyakinkan para pemimpin konservatif Katolik dan Protestan untuk melampaui perbedaan lama yang dulu memecah-belah masyarakat Jerman. Seperti dikatakan satu pemimpin CDU daerah, “Kolaborasi akrab orang Katolik dan Protestan, yang terjadi di penjara dan kamp konsentrasi, mengakhiri konflik lama dan membangun jembatan.” Selagi para pemimpin baru Katolik dan Protestan di CDU mengunjungi rumah-rumah Katolik dan Protestan selama tahun-tahun pendiriannya, 1945–46, mereka membangun partai tengah-kanan baru yang kemudian membentuk kembali masyarakat Jerman. CDU menjadi satu tiang demokrasi Jerman pasca-Perang Dunia II.

Amerika Serikat berperan besar dalam mendorong pembentukan CDU. Maka sungguh ironislah bila orang Amerika sekarang mesti belajar dari upaya sukses tersebut untuk menyelamatkan demokrasinya sendiri. Agar jelas: Kami tak menyamakan Donald Trump atau Partai Republik dengan Nazi Jerman. Namun keberhasilan pembangunan kembali kubu tengah-kanan Jerman memberi beberapa pelajaran berguna bagi Partai Republik. Tak berbeda dengan rekannya di Jerman, Partai Republik hari ini mesti mengeluarkan para ekstremis dari barisan, memisahkan diri dengan tegas dari orientasi otoriter dan nasionalis kulit putih pemerintahan Trump, dan mencari cara untuk memperluas basis pemilih

partai di luar orang kulit putih Kristen. CDU bisa menawarkan model: Bila Partai Republik mau meninggalkan nasionalisme kulit putih dan memperlunak ideologi pasar bebas ekstremnya, maka daya tarik konservatif religius luas dapat memungkinkannya membangun basis pemilih kuat, misalnya di antara pemeluk Protestan dan Katolik, sambil berpotensi menarik cukup banyak pemilih dari kalangan minoritas.

Tentu saja, pembangunan kembali konservatisme Jerman terjadi sesudah bencana besar. CDU tak punya pilihan selain membangun lagi dari awal. Pertanyaan bagi Partai Republik sekarang adalah apakah pembangunan kembali itu bisa terjadi sebelum terjadi krisis lebih parah. Bisakah para pemimpin mengerahkan wawasan dan keberanian politik untuk meluruskan kembali partai politik yang makin lama makin salah fungsi sebelum telanjur terjadi terlalu banyak kerusakan, ataukah kita butuh bencana agar perubahan terjadi?

Walaupun bukan menjadi pendorong utama polarisasi parah di Amerika, Partai Demokrat tetap dapat berperan untuk mengurangnya. Beberapa anggota Partai Demokrat telah mengusulkan agar partai memusatkan perhatian untuk meraih kembali suara kelas pekerja kulit putih, atau pemilih kulit putih yang bukan lulusan perguruan tinggi. Itu satu tema besar sesudah kekalahan traumatis Hillary Clinton pada 2016. Bernie Sanders dan beberapa tokoh moderat berpendapat bahwa Partai Demokrat harus meraih kembali para pemilih kerah biru yang meninggalkannya di Rust Belt, Appalachia, dan tempat-tempat lain. Untuk itu, banyak penentu opini berpendapat bahwa Partai Demokrat perlu menjauhi imigran dan apa yang disebut politik identitas—satu istilah rancu yang sering meliputi promosi keragaman etnis dan baru-baru ini inisiatif antikekerasan polisi, seperti Black Lives Matter. Di satu kolom *New York Times*, Mark Penn dan Andrew Stein mendorong Partai Demokrat agar meninggalkan "politik identitas" dan memoderatkan sikap terhadap imigrasi untuk meraih kembali suara kelas pekerja kulit putih. Walau jarang disuarakan, pesan intinya seperti ini: Partai Demokrat mesti mengurangi pengaruh minoritas etnis untuk meraih kembali kelas pekerja kulit putih.

Strategi seperti itu boleh jadi mengurangi polarisasi partisan. Bila Partai Demokrat mau meninggalkan tuntutan minoritas etnis atau menaruhnya di bagian bawah agenda, maka hampir pasti partai itu akan meraih kembali sebagian pemilih kulit putih berpenghasilan rendah dan menengah. Boleh dikata Partai Demokrat bakal kembali ke sosoknya pada 1980-an dan 1990-an—partai yang wajah publiknya sebagian besar berkulit putih, dan konstituen minoritas masih menjadi mitra junior. Partai Demokrat bakal secara harfiah mirip dengan pesaingnya, Partai Republik. Dan selagi Demokrat bergerak mendekati posisi Trump terhadap imigrasi dan kesetaraan ras (artinya mengurangi penerimaan atas keduanya), maka Demokrat bakal tampak kurang mengancam bagi basis pemilih Republik.

Kami pikir itu gagasan yang buruk sekali. Berusaha mengurangi pengaruh kelompok minoritas di partai—dan kami anggap ini penting—adalah cara yang salah untuk mengurangi polarisasi. Cara itu bakal mengulangi beberapa kesalahan Amerika Serikat yang paling memalukan. Pendirian Republik Amerika Serikat tidak menghapuskan dominasi rasial, yang akhirnya mengarah ke Perang Saudara. Ketika Partai Demokrat dan Republik akhirnya berdamai sesudah Rekonstruksi yang gagal, perdamaian keduanya kembali didasari peminggiran ras. Reformasi 1960-an memberi kesempatan ketiga kepada Amerika Serikat untuk membangun demokrasi multietnis murni. Kita wajib berhasil, meski tugasnya luar biasa sukar. Seperti ditulis kolega kami Danielle Allen:

Kenyataan sederhananya, dunia belum pernah membangun satu demokrasi multietnis di mana tidak ada kelompok etnis tertentu menjadi mayoritas dan kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi yang memberdayakan semuanya telah dicapai.

Itulah tantangan besar bagi Amerika. Kita tak bisa menghindarinya.

Namun ada cara-cara lain bagi Partai Demokrat untuk membantu merombak bentang politik. Intensitas permusuhan partisan di Amerika hari ini mencerminkan gabungan pengaruh bukan hanya tumbuhnya keragaman etnis, melainkan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi,

tak naiknya gaji di paruh bawah kisaran penghasilan, dan bertambahnya kesenjangan ekonomi. Polarisasi partisan yang bernuansa rasial hari ini mencerminkan kenyataan bahwa keragaman etnis naik selama periode melambatnya pertumbuhan ekonomi AS (1975 hingga sekarang), terutama bagi mereka di ujung bawah distribusi penghasilan. Bagi banyak orang Amerika, perubahan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir telah mendatangkan pengurangan keamanan pekerjaan, jam kerja lebih panjang, lebih sedikit prospek mobilitas ke atas, dan akibatnya bertambahnya ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan memicu polarisasi. Maka satu cara menghadapi perpecahan partisan yang makin besar adalah dengan serius menangani masalah kebutuhan dasar bagian-bagian populasi yang lama terabaikan—apa pun etnisnya.

Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menghadapi kesenjangan ekonomi bisa menyebabkan atau meredakan polarisasi, tergantung cara mengorganisasinya. Tak seperti di banyak negara demokrasi maju lain, di Amerika Serikat kebijakan sosial terutama mengandalkan uji penghasilan—tunjangan hanya diberikan kepada mereka yang penghasilannya berada di bawah batas tertentu atau memenuhi syarat lain. Program dengan syarat demikian menciptakan persepsi di kalangan kelas menengah bahwa hanya orang miskin yang mendapat manfaat dari kebijakan sosial. Dan karena ras dan kemiskinan sepanjang sejarah bertumpang tindih di Amerika Serikat, kebijakan tersebut bisa jadi bernuansa rasial. Para penentang kebijakan sosial biasa menggunakan retorika ras untuk mengecam program bantuan bagi rakyat miskin—seperti misalnya Ronald Reagan menyebut-nyebut “welfare queens” dan “young bucks” mereka yang membeli steak dengan kupon makanan. *Welfare* (jaminan sosial) menjadi istilah buruk di Amerika karena ada persepsi bahwa penerimanya tak layak menerima itu.

Sementara itu, agenda kebijakan sosial yang mengesampingkan syarat penghasilan dan bersifat lebih universal seperti yang ditemukan di Eropa utara dapat berefek memoderatkan politik. Kebijakan sosial yang menguntungkan semua orang—Social Security dan Medicare adalah contoh bagusnya—dapat membantu mengurangi ketidakpuasan, mem-

bangun jembatan untuk menghubungkan berbagai bagian masyarakat pemilih Amerika, dan memastikan dukungan sosial bagi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan penghasilan tanpa memberi bahan untuk serangan rasial. Asuransi kesehatan komprehensif adalah contoh bagus. Contoh lain adalah kenaikan upah minimum yang jauh lebih agresif, atau penghasilan dasar universal—suatu kebijakan yang pernah dipertimbangkan serius, dan bahkan diajukan ke Kongres, oleh pemerintahan Nixon. Contoh lain adalah “kebijakan keluarga”, atau program yang memberikan cuti digaji kepada orangtua, penitipan anak bersubsidi bagi orangtua bekerja, dan pendidikan anak usia dini untuk hampir semua orang. Anggaran Amerika Serikat untuk keluarga kini hanya sepertiga rata-rata negara maju, setara dengan Meksiko dan Turki. Terakhir, Partai Demokrat dapat mempertimbangkan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih komprehensif, seperti pelatihan kerja lebih luas, subsidi gaji bagi pemberi kerja untuk melatih pekerja, program bekerja sambil belajar bagi siswa SMA dan kolese komunitas, dan tunjangan transportasi bagi pegawai yang rumahnya jauh. Kebijakan-kebijakan seperti itu bukan hanya berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi yang mengompori ketidakpuasan dan polarisasi, melainkan juga dapat membantu pembangunan koalisi luas tahan lama yang mengubah arah perpolitikan Amerika.

Membuat kebijakan untuk menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi tentu saja sukar secara politis—sebagian karena polarisasi (dan kebuntuan kelembagaan yang disebabkan) yang justru mau diatasi dengan kebijakan itu. Dan kami tidak menganggap enteng rintangan dalam membangun koalisi multiras—yang mencakup minoritas rasial *dan* orang kulit putih kelas pekerja. Kami tak bisa memastikan bahwa kebijakan universal bakal menjadi dasar koalisi seperti itu—selain bahwa kebijakan demikian lebih mungkin melakukan demikian daripada program-berdasar-penghasilan yang ada sekarang. Namun, walau sukar, Partai Demokrat tetap wajib menghadapi isu kesenjangan. Bagaimanapun, isu itu bukan sekadar persoalan keadilan sosial. Kesehatan demokrasi bergantung padanya.

Kala membandingkan keadaan Amerika Serikat sekarang dengan krisis demokrasi di bagian dunia lain dan zaman lain, jelaslah bahwa Amerika tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Sistem konstitusional Amerika, walau lebih tua dan kokoh daripada yang lainnya sepanjang sejarah, rentan terhadap ancaman yang telah membunuh demokrasi di tempat lain. Maka, ujung-ujungnya demokrasi Amerika bergantung pada warga Amerika Serikat. Tak ada satu pemimpin politik yang bisa mengakhiri suatu demokrasi; demikian juga, tak ada satu pemimpin yang bisa menyelamatkan suatu demokrasi. Demokrasi adalah usaha bersama. Nasibnya bergantung pada kita semua.

Pada hari-hari tergelap Perang Dunia II, ketika masa depan Amerika Serikat itu sendiri terancam, penulis E.B. White diminta oleh Dewan Penulis Perang Pemerintah Federal AS untuk menulis jawaban singkat terhadap pertanyaan "Apa itu demokrasi?" Jawabannya tak aneh-aneh, tapi menginspirasi:

Dewan tentu saja tahu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah antrean yang terbentuk di sebelah kanan. Demokrasi adalah "jangan" dalam "jangan saling dorong". Demokrasi adalah lubang di kantong yang pelan-pelan mengucurkan serbuk gergaji; demokrasi adalah lekukan di topi. Demokrasi adalah kecurigaan berulang bahwa lebih daripada separuh orang itu benar pada lebih daripada separuh waktu. Demokrasi adalah rasa privasi di bilik suara, rasa kebersamaan di perpustakaan, rasa vitalitas di mana-mana. Demokrasi adalah surat kepada editor. Demokrasi adalah skor pada awal babak kesembilan. Demokrasi adalah gagasan yang belum dibantah, lagu yang kata-katanya belum buruk. Demokrasi adalah mustard di hot dog dan krim di kopi jatah. Demokrasi adalah permintaan dari Dewan Perang, pada tengah pagi dalam perang, yang ingin tahu apa itu demokrasi.

Egalitarianisme, kesantunan, rasa kebebasan, dan tujuan bersama yang digambarkan E.B. White adalah inti demokrasi Amerika pertengahan abad ke-20. Hari ini visi tersebut sedang diserang, bukan hanya di Amerika Serikat, melainkan di seluruh dunia Barat yang maju. Mengembalikan ideal demokrasi liberal zaman kemarin tidaklah cukup untuk

menghidupkan kembali demokrasi Barat hari ini. Kita bukan hanya mesti memulihkan norma-norma demokrasi, melainkan juga memperluasnya ke seluruh masyarakat yang makin beragam. Itu tantangan besar: Hanya sedikit masyarakat dalam sejarah yang berhasil menjadi multiras sekaligus sepenuhnya demokratis. Tapi ada contohnya—dan harapan. Di Britania dan Skandinavia seabad lalu, kelas pekerja berhasil masuk ke sistem demokrasi liberal—perkembangan yang dianggap mustahil oleh banyak orang hanya beberapa puluh tahun sebelumnya. Dan di Amerika Serikat, gelombang imigran terdahulu—orang Katolik Italia dan Irlandia, Yahudi Eropa Timur—berhasil diserap ke dalam kehidupan demokratis, meski banyak yang memprediksi sebaliknya. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi bisa diselaraskan dengan keragaman. Itu tantangan yang kita hadapi. Generasi-generasi terdahulu di Eropa dan Amerika membuat pengorbanan-pengorbanan besar untuk membela lembaga-lembaga demokrasi dari ancaman kuat dari luar. Generasi kita, yang tumbuh sudah dalam demokrasi, menghadapi tugas yang berbeda: Kita mesti mencegahnya mati dari dalam.

Ucapan Terima Kasih

Kami tak mungkin dapat menulis buku ini tanpa kolaborasi sekelompok mahasiswa yang menjadi asisten riset. Kami amat berterima kasih kepada Fernando Bizzarro, Kaitlyn Chriswell, Jasmine Hakimian, David Ifkovits, Shiro Kuriwaki, Martin Liby Troein, Manuel Meléndez, Brian Palmiter, Justin Pottle, Matt Reichert, Briita van Staalduinen, Aaron Watanabe, dan Selena Zhao. Terima kasih khusus kepada David Ifkovits dan Justin Pottle atas kerja bagus mereka di catatan akhir. Hasil riset para mahasiswa tersebut ada di seluruh buku ini. Kami harap mereka bisa melihat diri mereka di dalamnya.

Gagasan-gagasan dalam buku ini berasal dari banyak percakapan dengan kawan dan kolega. Kami terutama berterima kasih kepada Daniel Carpenter, Ryan Enos, Gretchen Helmke, Alisha Holland, Daniel Hopkins, Jeff Kopstein, Evan Lieberman, Robert Mickey, Eric Nelson, Paul Pierson, Pia Raffler, Kenneth Roberts, Theda Skocpol, Dan Slater, Todd Washburn, dan Lucan Ahmad Way atas kesediaan mereka mendengar, mendebat, dan mengajari kami. Terima kasih khusus kepada Larry Diamond, Scott Mainwaring, Tarek Masoud, John Sides, dan Lucan Ahmad Way yang membaca versi awal naskah.

Kami berutang budi kepada agen kami, Jill Kneerim, untuk banyak hal. Jill menggagas proyek buku ini dan membimbing kami melaluinya dari awal sampai akhir. Dia telah menjadi sumber dorongan yang benar-benar diperlukan dan saran bijak—juga mengedit dengan hebat.

Kami berterimakasih kepada editor kami di Crown Publishers, Amanda Cook, karena kepercayaannya terhadap kami, juga kesabaran dan kegigihan untuk mengusahakan pembuatan buku yang bisa dibaca karya dua ahli ilmu politik. Kami juga berterima kasih kepada Meghan Houser, Zach Phillips, Kathleen Quinlan, dan Penny Simon di Crown atas kerja keras dan dukungan sabar mereka, juga Molly Stern untuk energi besar yang dia berikan kepada proyek ini.

Steve berterima kasih kepada para anggota Soccer Dads Club (Chris, Jonathan, dan Todd) atas rasa humor mereka yang selalu bagus, juga dukungan (tentu termasuk wawasan politik mereka).

Terakhir, kami amat berterima kasih kepada keluarga kami. Steve berterima kasih kepada Liz Mineo dan Alejandra Mineo-Levitsky, dua orang yang paling penting. Daniel berterima kasih kepada Suriya, Talia, dan Lilah Ziblatt untuk antusiasme dan kesabaran tanpa akhir. Daniel juga berterima kasih kepada ayahnya, David Ziblatt, atas percakapan, wawasan, kemitraan intelektual, dan inspirasi terus-menerus.

Catatan Akhir

PENGANTAR

- ix **dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata:** Dua ahli konstitusi, Aziz Huq dan Tom Ginsburg, menyebut bentuk kerusakan demokrasi itu "regresi konstitusional". Lihat Aziz Huq & Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *UCLA Law Review* 65 (2018); juga Ellen Lust & David Waldner, *Unwelcome Change: Understanding, Evaluating, and Extending Theories of Democratic Backsliding* (Washington, DC: U.S. Agency for International Development, 2015).
- ix **satu-satunya antibiotik yang kami punya:** Bart Jones, *Hugo!: The Hugo Chávez Story from Mud Hut to Perpetual Revolution* (Hanover, NH: Steerforth Press, 2007), hlm. 225.
- xi **Kediktatoran yang mencolok:** Steven Levitsky & Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War* (New York: Cambridge University Press, 2010); juga Scott Mainwaring & Aníbal Pérez-Liñán, *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall* (New York: Cambridge University Press, 2014).
- xi **melainkan pemerintah hasil pemilu:** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 36.
- xi **Banyak yang percaya:** Latinobarómetro, diakses 16 Maret 2017, <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (Pertanyaan: Demokrasi -> Skala [negara] demokratis).
- xv **telah memicu reaksi keras:** Robert Mickey, Steven Levitsky, & Lucan Ahmad Way, "Is America Still Safe for Democracy?," *Foreign Affairs*, Mei/Juni 2017, hlm. 20–29.

BAB 1: PERSEKUTUAN PENENTU NASIB

- 1 **Benito Mussolini tiba di Roma:** Simonetta Falasca-Zamponi, *Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy* (Berkeley: University of California Press, 1997), hlm. 1.
- 2 **"Saya datang dari medan perang":** Robert Paxton, *The Anatomy of Fascism* (New York: Vintage, 2004), hlm. 90.
- 2 **Di perhentian kereta terakhir:** Falasca-Zamponi, *Fascist Spectacle*, hlm. 2.
- 2 **zaman baru Fasis:** Ibid.
- 4 **"Kita sudah pegang dia":** Dikutip dalam Richard Evans, *The Coming of the Third Reich* (New York: Penguin, 2003), hlm. 308.
- 4 **"persekutuan penentu nasib":** Hermann Beck, *The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933: The Machtergreifung in a New Light* (New York: Berghahn Press, 2011). Lihat juga Daniel Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- 5 **"blok borjuis":** Alexander De Grand, *The Hunchback's Tailor: Giovanni Giolitti and Liberal Italy from the Challenge of Mass Politics to the Rise of Fascism* (Westport, CT: Praeger, 2001), hlm. 241–42.
- 6 **"Sukar meminta":** Diambil dari Cristina Marcano & Alberto Barrera Tyszka, *Hugo Chávez* (New York: Random House, 2004), hlm. 304.
- 7 **kepergian Caldera dan kampanye anti-kemapanan yang terjadi sesudahnya:** Lihat José E. Molina, "The Unraveling of Venezuela's Party System," dalam *The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela*, ed. Jennifer L. McCoy & David J. Myers (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), hlm. 162.
- 7 **"Menuju kekuasaan":** Dikutip dalam Jones, *Hugo!*, hlm. 186.
- 7 **dia memandang Chávez hanya akan terkenal sebentar:** Ibid, hlm. 189.
- 7 **dengan mencabut semua tuntutan:** Marcano & Barrera Tyszka, *Hugo Chávez*, hlm. 107.
- 8 **Dia hanya berdiri murung:** Jones, *Hugo!*, hlm. 226.
- 8 **"Tak seorang pun berpikir bahwa Mr. Chávez":** Dikutip dalam Marcano & Barrera Tyszka, *Hugo Chávez*, hlm. 107.
- 8 **"Saya telah melakukan":** Dikutip dalam Larry Eugene Jones, "The

- Greatest Stupidity of My Life': Alfred Hugenberg and the Formation of the Hitler Cabinet, January 1933," *Journal of Contemporary History* 27, no. 1 (1992), hlm. 63–87.
- 9 **survei Latinobarómetro 1998:** Sumber: Latinobarómetro, diakses 16 Maret 2017, <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>.
 - 10 **"tes litmus":** Juan J. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), hlm. 29–30.
 - 10 **Berdasarkan karya Linz:** Lihat *ibid.*, hlm 27–38.
 - 11 **Kelimana:** Steven Levitsky & James Loxton, "Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes," *Democratization* 20, no. 1 (2013).
 - 13 **"menjaga jarak":** Nancy Bermeo, *Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry and the Breakdown of Democracy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), hlm. 238.
 - 13 **Sayap pemuda AVF:** Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, hlm. 344.
 - 13 **Hilangnya 25.000 anggota:** *Ibid.*
 - "13 **lebih dekat ke ekstremis:** Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*, pp. 32–33.
 - 14 **"bergabung dengan lawan-lawan":** *Ibid.*, hlm. 37.
 - 15 **para pemimpin Partai:** Giovanni Capoccia, *Defending Democracy: Reactions to Extremism in Interwar Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005), hlm. 121.
 - 15 **Front Katolik Muda dibentuk:** *Ibid.*, hlm. 120.
 - 16 **Partai Katolik mendukung:** *Ibid.*, hlm. 121.
 - 16 **Penentuannya tak mudah:** *Ibid.*, hlm. 122–23.
 - 16 **ketika tampak bahwa Partai Sosialis:** *Ibid.*, hlm. 121.
 - 17 **Gerakan Lapua ekstrem kanan:** Risto Alapuro & Erik Allardt, "The Lapua Movement: The Threat of Rightist Takeover in Finland, 1930–32," dalam *The Breakdown of Democratic Regimes: Europe*, ed. Juan J. Linz & Alfred Stepan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), hlm. 130.
 - 17 **Gerakan Lapua ingin:** *Ibid.*
 - 17 **Awalnya, para politikus dari:** Bermeo, *Ordinary People in Extraordinary Times*, hlm. 240; Alapuro & Allardt, "The Lapua Movement," hlm. 130–31.

- 17 **P.E. Svinhufvud, seorang konservatif:** Alapuro & Allardt, "The Lapua Movement," hlm. 130–31.
- 17 **Gerakan Lapua melanjutkan:** Bermeo, *Ordinary People in Extraordinary Times*, hlm. 240.
- 17 **preman Lapua menculik:** Alapuro & Allardt, "The Lapua Movement," hlm. 130.
- 17 **Gerakan Lapua juga mengadakan:** Ibid., hlm. 133.
- 17 **sebagian besar Partai Persatuan Agraria:** Bermeo, *Ordinary People in Extraordinary Times*, hlm. 240.
- 17 **Bahkan sang presiden konservatif:** Ibid., hlm. 241.
- 17 **Gerakan Lapua terkucil:** Ibid., hlm. 241.
- 18 **"bukan dengan semangat":** "Bürgerlicher Aufruf für Van der Bellen" (Permintaan Warga Kepada Van der Bellen), *Die Presse*, 14 Mei 2016, <http://diepresse.com/home/innenpolitik/bpwahl/4988743/Buergerlicher-Aufruf-fuer-Van-der-Bellen>.
- 19 **keputusan itu sampai memecah-belah keluarga:** Wawancara dengan penulis, 16 Maret 2017.

BAB 2: MENJAGA GERBANG DEMOKRASI DI AMERIKA

- 21 **ekstremis sudah lama bertebaran di arena politik Amerika:** Seymour Martin Lipset & Earl Raab, *The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790–1970* (New York: Harper & Row, 1970), hlm. 152.
- 21 **menjadikan Mussolini "Tokoh Minggu Ini":** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 170–71.
- 21 **"pernah terjadi di radio":** Dikutip dalam Alan Brinkley, *Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin & the Great Depression* (New York: Vintage Books, 1983), hlm. 119.
- 21 **Dia berpidato dalam stadion dan auditorium penuh penonton:** Ibid., hlm. 83, 175–77.
- 21 **berjejer di sepanjang jalan untuk melihat dia:** Ibid., hlm. 119. Bahkan pada 1938, satu jajak pendapat Gallup mendapati bahwa 27 persen orang Amerika setuju dengan Romo Coughlin, sementara 32 persen tak setuju (Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 171–73).

- 22 **"demagog besar pada zamannya":** Arthur M. Schlesinger Jr., *The Age of Roosevelt: The Politics of Upheaval, 1935–1936* (Boston: Houghton Mifflin, [1960] 2003), hlm. viii, 68.
- 22 **seorang ahli pidato berbakat:** Richard D. White Jr., *Kingfish: The Reign of Huey P. Long* (New York: Random House, 2006), hlm. 45, 99, 171; Brinkley, *Voices of Protest*, hlm. 69.
- 22 **campuran sogokan dan ancaman:** Schlesinger, *The Age of Roosevelt*, hlm. 62; White, *Kingfish*, hlm. 248–53; William Ivy Hair, *The Kingfish and His Realm: The Life and Times of Huey P. Long* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1991), hlm. 276–80.
- 22 **"Akulah konstitusinya sekarang":** White, *Kingfish*, hlm. 45.
- 22 **"diktator sejati pertama":** Dikutip dalam *ibid.*, hlm. 253.
- 22 **manajer kampanye Franklin Roosevelt:** *Ibid.*, hlm. 352.
- 22 **lebih banyak surat dibanding gabungan semua senator lain:** *Ibid.*, hlm. 198.
- 22 **hampir delapan juta nama:** Robert E. Snyder, "Huey Long and the Presidential Election of 1936," *Louisiana History* 16, no. 2 (Musim Semi 1975), hlm. 123; White, *Kingfish*, hlm. 198.
- 22 **mencalonkan diri sebagai presiden:** Brinkley, *Voices of Protest*, hlm. 81; Hair, *The Kingfish and His Realm*, hlm. 306–7.
- 22 **"Aku bisa hadapi Roosevelt":** Snyder, "Huey Long and the Presidential Election of 1936," hlm. 128.
- 22 **Roosevelt memandang Long sebagai ancaman serius:** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 209, 224.
- 22 **Senator Joseph McCarthy:** *Ibid.*, hlm. 21.
- 23 **mendapat 40 persen:** *Ibid.*, hlm. 237.
- 23 **"membenci yang berkuasa":** Arthur T. Hadley, *The Invisible Primary* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1976), hlm. 238; Jody Carlson, *George C. Wallace and the Politics of Powerlessness: The Wallace Campaigns for the Presidency, 1964–1976* (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1981), hlm. 6.
- 23 **"Apa sih Konstitusi itu?":** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 355–56.
- 23 **kelas pekerja:** Dan T. Carter, *The Politics of Rage: George Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the Transformation of American Politics*, Second Edition (Baton Rouge: Louisiana State University Press,

- 2000), hlm. 344–52; Stephan Leshner, *George Wallace: American Populist* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1994), hlm. 276–78; Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 345–57.
- 23 **pencalonan Wallace sebagai presiden:** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 21.
- 23 **upaya pembunuhan:** Carlson, *George C. Wallace and the Politics of Powerlessness*, hlm. 149.
- 24 **"ruang belakang penuh asap rokok":** Laporan mengenai konvensi 1920 itu didasari dua sumber: Francis Russell, *The Shadow of Blooming Grove: Warren G. Harding in His Times* (New York: McGraw-Hill, 1968), hlm. 379–81; dan John Morello, *Selling the President, 1920: Albert D. Lasker, Advertising, and the Election of Warren G. Harding* (Westport, CT: Praeger, 2001), hlm. 41–43.
- 24 **"Tak seorang pun berbicara mengenai Harding":** Russell, *The Shadow of Blooming Grove*, hlm. 376.
- 25 **Dalam demokrasi parlementer:** Lihat David Samuels & Matthew Shugart, *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior* (New York: Cambridge University Press, 2010).
- 26 **"dan akhirnya jadi tiran":** Alexander Hamilton, Federalist 1.
- 26 **alat penyaringan:** James W. Ceaser, *Presidential Selection: Theory and Development* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), hlm. 64.
- 26 **"Pemilihan langsung":** Dikutip dalam Robert Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, Second Edition (New Haven, CT: Yale University Press, 2003), hlm. 76.
- 27 **"penyaring":** James W. Ceaser, *Reforming the Reforms: A Critical Analysis of the Presidential Selection Process* (Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1982), hlm. 84–87.
- 28 **Biasanya mereka mengikuti instruksi:** Ibid., hlm. 19–21.
- 28 **Namun perubahan yang dihasilkan hanya sedikit:** Ibid., hlm. 23.
- 28 **penjaga gerbang kepresidenan:** Ibid., hlm. 27.
- 29 **"tinjauan sejawat":** Lihat misalnya Nelson W. Polsby, *Consequences of Party Reform* (New York: Oxford University Press, 1983), hlm. 169–70.
- 29 **Mereka telah bekerja bersama para calon:** Austin Ranney, Testimony Before the Senate Committee on Rules and Administration, 10 September 1980. Dikutip dalam Ceaser, *Reforming the Reforms*, hlm. 96.

- 29 **pujian dari kaum rasis sedunia:** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 111.
- 29 **dipuji Adolf Hitler:** Untuk lebih banyak mengenai hubungan Henry Ford dan rezim Nazi, lihat Neil Baldwin, *Henry Ford and the Jews: The Mass Production of Hatred* (New York: Public Affairs, 2002).
- 29 **Ford juga tokoh yang dikagumi:** Lihat Reynold M. Wik, *Henry Ford and Grassroots America* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972).
- 29 **"anak petani miskin yang jadi masyhur":** Ibid., hlm. 8–10, 42, 167.
- 30 **"Keranjingan Ford":** Ibid., hlm. 162, 172–73.
- 30 **Selagi hasilnya masuk:** "Ford Leads in Presidential Free-for-All," *Collier's*, 26 Mei 1923, hlm. 7; "Politics in Chaos as Ford Vote Grows," *Collier's*, 23 Juni 1923, hlm. 8.
- 30 **"orang terpenting di politik Amerika":** "Ford First in Final Returns," *Collier's*, 14 Juli 1923, hlm. 5.
- 31 **"mekanisme seleksi":** Edward Lowry, "Dark Horses and Dim Hopes," *Collier's*, 10 November 1923, hlm. 12.
- 31 **"Sangat lucu":** Dikutip di Wik, *Henry Ford and Grassroots America*, hlm. 162.
- 31 **"Boleh jadi akan ada perang atau krisis":** "If I Were President," *Collier's*, 4 Agustus 1923, hlm. 29.
- 32 **terkucil dari sesama anggota Senat:** Brinkley, *Voices of Protest*, hlm. 75–77; Hair, *The Kingfish and His Realm*, hlm. 268–69; White, *Kingfish*, hlm. 191.
- 32 **kecil kemungkinannya menang:** Snyder, "Huey Long and the Presidential Election of 1936," hlm. 131–33.
- 32 **Wallace mengejutkan para pakar:** Carlson, *George C. Wallace and the Politics of Powerlessness*, hlm. 33–36.
- 32 **hampir 40 persen orang Amerika:** Lipset & Raab, *The Politics of Unreason*, hlm. 21.
- 32 **tak bakal mendukung pencalonannya:** Stephen Leshner, *George Wallace: American Populist* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1994), hlm. 387–88; Carlson, *George C. Wallace and the Politics of Powerlessness*, hlm. 71.
- 32 **"kemurnian rasial":** Lynne Olson, *Those Angry Days: Roosevelt, Lindbergh, and America's Fight over World War II, 1931–1941* (New York: Random House, 2014), pp. 18–20, 72.

- 33 **Pidatonya menarik banyak orang:** A. Scott Berg, *Lindbergh* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1998), hlm. 410.
- 33 **"Orang biasa berkata":** Olson, *Those Angry Days*, hlm. 442.
- 33 **senator Idaho William Borah:** Berg, *Lindbergh*, hlm. 398.
- 34 **"Tuhan mungkin telah menarik berkah-Nya":** Dikutip di Norman Mailer, *Miami and the Siege of Chicago* (New York: Random House, 1968), hlm. 7.
- 34 **"pemimpin partai, pemimpin serikat, dan orang dalam lainnya":** Marty Cohen, David Karol, Hans Noel, & John Zaller, *The Party Decides: Presidential Nominations Before and After Reform* (Chicago: University of Chicago Press, 2008), hlm. 1.
- 35 **"Di Amerika Serikat":** "A Look Back at the 1968 Democratic Convention," <https://www.youtube.com/watch?v=aUKzSsVmnpY>, diakses 11 Mei 2017.
- 35 **"Obat untuk penyakit demokrasi":** Democratic National Committee, *Mandate for Reform* (Washington, DC, Democratic National Committee, April 1970), hlm. 14.
- 35 **"Kecuali kalau ada perubahan, konvensi berikutnya":** Dikutip dalam Ceaser, *Presidential Selection*, hlm. 273.
- 35 **"anti-politik jalanan":** Democratic National Committee, *Mandate for Reform*, hlm. 49.
- 35 **perwakilan perempuan serta minoritas:** Ceaser, *Presidential Selection*, hlm. 237.
- 36 **"perubahan terbesar" ... "proses politik paling terbuka":** Kedua kutipan diambil dari David E. Price, *Bringing Back the Parties* (Washington, DC: Congressional Quarterly, 1984), hlm. 149–50.
- 36 **panas dan memecah-belah:** Pada 1972, posisi calon presiden Demokrat hampir diraih George Wallace, dan yang akhirnya dicalonkan, George McGovern, kalah besar dari Richard Nixon. Pada 1976, posisi calon presiden didapat Jimmy Carter, relatif orang luar, dan pada 1980 Presiden Carter menghadapi tantangan pemilihan pendahuluan yang berat dari Senator Edward Kennedy.
- 36 **"memicu kebencian massal":** Nelson W. Polsby & Aaron Wildavsky, *Presidential Elections* (New York: The Free Press, 1968), hlm. 230.
- 37 **Calon mana pun yang mau:** Cohen, Karol, Noel, & Zaller, *The Party Decides*, hlm. 175–79.

- 37 **"pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan":** Hadley, *The Invisible Primary*.
- 37 **"sesungguhnya terpilih":** Ibid., hlm. xiii.

BAB 3: PELEPASAN KEKUASAAN PARTAI REPUBLIK

- 38 **juga dibuka bagi orang luar murni:** Yang kami maksud "orang luar" adalah calon yang tak pernah memegang jabatan hasil pemilu atau dalam kabinet. Kami memperhitungkan semua calon yang ikut serta dalam pemilihan pendahuluan atau namanya dipertimbangkan di konvensi. Kami berterima kasih kepada Fernando Bizzarro atas bantuannya dalam mengumpulkan data.
- 39 **melangkahi "pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan":** Untuk penjelasan rinci mengenai mengapa itu terjadi, lihat Cohen, Karol, Noel, & Zaller, *The Party Decides*.
- 40 **bandar Las Vegas:** James Ceaser, Andrew Busch, & John Pitney Jr., *Defying the Odds: The 2016 Elections and American Politics* (Washington, DC: Rowman & Littlefield, 2017), hlm. 69.
- 40 **"jauh lebih kecil daripada 20 persen":** Nate Silver, "Dear Media: Stop Freaking Out About Donald Trump's Polls," *FiveThirtyEight*, 23 November 2015, <http://fivethirtyeight.com/features/dear-media-stop-freaking-out-about-donald-trumps-polls/>.
- 40 **putusan Citizens United:** Marty Cohen, David Karol, Hans Noel, & John Zaller, "Party Versus Faction in the Reformed Presidential Nominating System", *PS* (Oktober 2016), hlm. 704–5; Theda Skocpol & Alex Hertel-Fernandez, "The Koch Network and Republican Party Extremism," *Perspectives on Politics* 14, no. 3 (2016), hlm. 681–99.
- 41 **ledakan media alternatif:** Ibid., hlm. 705.
- 41 **Sementara jalur menuju ketenaran nasional:** Ibid., hlm: 703–4.
- 41 **"kompleks hiburan konservatif":** David Frum, "The Great Republican Revolt," *The Atlantic*, 9 September 2015.
- 41 **meradikalkan pemilih konservatif:** Lihat Matthew Levendusky, *How Partisan Media Polarize America* (Chicago: University of Chicago Press, 2013); Cass R. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017).

- 41 **Walau ada banyak faktor yang menyebabkan:** Lihat John Sides, Michael Tesler, & Lynn Vavreck, *Identity Crisis: The 2016 Presidential Campaign and the Battle for the Meaning of America* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018).
- 42 **lebih banyak dukungan daripada Trump:** "The Endorsement Primary," *FiveThirtyEight*, 7 Juni 2016, <https://projects.fivethirtyeight.com/2016-endorsement-primary/>.
- 42 **belum mendapat satu pun dukungan:** Ibid.
- 42 **Ketika musim pemilihan pendahuluan berakhir:** Ibid.
- 42 **Trump mendapat simpati:** Di Partai Republik, dibanding pendukung calon-calon lain, pendukung Trump dua kali lebih banyak yang menyebut Breitbart News sebagai sumber berita utama. Lihat Pew Research Center, "Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election News," 18 Januari 2017, hlm. 3, 5.
- 43 **cara-cara baru menggunakan media lama:** Lihat Sides, Tesler, & Vavreck, *Identity Crisis*, Bab 4.
- 43 **"unik yang sesuai dengan zaman digital":** Nathaniel Persily, "The 2016 U.S. Election: Can Democracy Survive the Internet?," *Journal of Democracy*, April 2017, hlm. 67.
- 43 **liputan media gratis yang bernilai setara \$2 miliar:** Ibid.
- 44 **"kekacauan besar":** "Why the Never Trump Movement Failed at the Republican National Convention," ABCNews.com, 20 Juli 2016.
- 45 **Tingkat rekayasa suara:** Mengenai rekayasa pemilu di Amerika Serikat secara umum, lihat Richard L. Hasen, *The Voting Wars: From Florida 2000 to the Next Election Meltdown* (New Haven, CT: Yale University Press, 2012), dan Lorraine C. Minnite, *The Myth of Voter Fraud* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010). Mengenai tiadanya rekayasa di pemilu 2016, lihat Jessica Huseman & Scott Klein, "There's No Evidence Our Election Was Rigged," ProPublica, 28 November 2016.
- 45 **imigran ilegal dan orang mati:** Darren Samuelsohn, "A Guide to Donald Trump's 'Rigged' Election," *Politico*, 25 Oktober 2016.
- 45 **"Bantu Saya Stop Si Curang Hillary":** Ibid.
- 45 **"Kita sebaiknya hati-hati":** Jeremy Diamond, "Trump: 'I'm Afraid the Election's Going to Be Rigged,'" CNN.com, 2 Agustus 2016.
- 45 **"Tentu saja ada rekayasa suara skala besar":** "U.S. Election 2016: Trump Says Election 'Rigged at Polling Places,'" BBC.com, 17 Oktober 2016.

- 46 **"menjungkirbalikkan semuanya":** "Donald Trump, Slipping in Polls, Warns of 'Stolen Election,'" *New York Times*, 14 Oktober 2016.
- 46 **pemilu bisa direkayasa:** "Poll: 41 Percent of Voters Say Election Could Be Stolen from Trump," *Politico*, 17 Oktober 2016.
- 46 **"birther":** "14 of Trump's Most Outrageous Birther Claims—Half from After 2011," CNN.com, 16 September 2016.
- 46 **"harus dipenjara":** Lisa Hagen, "Trump: Clinton 'Has to Go to Jail,'" *The Hill*, 12 Oktober 2016.
- 47 **menawarkan membayar biaya pengacara:** "Donald Trump Says He May Pay Legal Fees of Accused Attacker from Rally," *New York Times*, 13 Maret 2016.
- 47 **Berikut beberapa contoh:** "Don't Believe Donald Trump Has Incited Violence at Rallies? Watch This Video," *Vox*, 12 Maret 2016, <https://www.vox.com/2016/3/12/11211846/donald-trump-violence-rallies>.
- 48 **"Amandemen Kedua":** "Donald Trump Suggests 'Second Amendment People' Could Act Against Hillary Clinton," *New York Times*, 9 Agustus 2016.
- 48 **jaksa khusus untuk menyelidiki Hillary Clinton:** "Trump: Clinton 'Has to Go to Jail,'" CNN.com, 13 Oktober 2016.
- 48 **"Bila saya jadi presiden":** "Donald Trump Threatens to Rewrite Libel Laws to Make It Easier to Sue the Media," *Business Insider*, 26 Februari 2016.
- 48 **"adakan pasal pencemaran nama baik":** Ibid.
- 51 **"kolusi ideologis":** Definisi "penyerahan tanggung jawab kolektif" dan diskusi yang mengikutinya didasari penelitian ahli sosiologi Ivan Ermakoff atas Jerman dan Prancis antara dua perang dunia, berjudul *Ruling Oneself Out: A Theory of Collective Abdications* (Durham, NC: Duke University Press, 2008).
- 51 **kala menghadapi calon pemimpin otoriter:** Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 37.
- 51 **politikus sayap kanan mendukung rival ideologis:** Untuk data pemilihan umum yang mendukungnya di pemilihan presiden Prancis 2017, lihat "French Election Results: Macron's Victory in Charts," *Financial Times*, 9 Mei 2017. <https://www.ft.com/content/62d782d6-31a7-11e7-9555-23ef563ecf9a>.
- 52 **Republikan 1:** <https://www.hillaryclinton.com/briefing/updates/2016>

/09/29/number-of-prominent-republicans-and-independents-backing-hillary-clinton-grows/, diakses 20 Mei 2017.

- 52 **Republikan 2:** Ibid.
- 52 **Republikan 3:** Ibid.
- 52 **William Pierce:** Ibid.
- 52 **Tokoh-tokoh Republik yang mendukung Hillary Clinton:** "78 Republican Politicians, Donors, and Officials Who Are Supporting Hillary Clinton," *Washington Post*, 7 November 2016.
- 53 **Di Prancis, diperkirakan separuh:** "French Election Results: Macron's Victory in Charts," *Financial Times*, 9 Mei 2017 [lihat gambar: "How Allegiances Shifted from the First to the Second Round of Voting in the French Presidential Election"].
- 53 **makin terpecah menjadi pendukung Republik dan Demokrat:** Alan Abramowitz, *The Polarized Public? Why American Government Is So Dysfunctional* (New York: Pearson, 2012); "Partisanship and Political Animosity in 2016," Pew Research Center, 22 Juni 2016, <http://www.people-press.org/2016/06/22/partisanship-and-political-animosity-in-2016/>.
- 54 **memprediksi persaingan ketat:** John Sides, Michael Tesler, & Lynn Vavreck, "The 2016 U.S. Election: How Trump Lost and Won," *Journal of Democracy* 28, no. 2 (April 2017), hlm. 36–37; Sides, Tessler, & Vavreck, *Identity Crisis*, Bab 2.

BAB 4: MENUMBANGKAN DEMOKRASI

- 55 **dia membuat partai sendiri dan maju dari partai itu:** Gregory Schmidt, "Fujimori's 1990 Upset Victory in Peru: Rules, Contingencies, and Adaptive Strategies," *Comparative Politics* 28, no. 3 (1990), hlm. 321–55.
- 55 **Dia kekurangan dana:** Luis Jochamowitz, *Ciudadano Fujimori: La Construcción de un Político* (Lima: Peisa, 1993), hlm. 259–63.
- 56 **Namun dia tidak punya gagasan jelas:** Charles Kenney, *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2004), hlm. 126–27; juga Susan C. Stokes, *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America* (New York: Cambridge University Press, 2001), hlm. 69–71.

- 56 **Fujimori tadinya gencar menyerang:** Lihat Kenneth Roberts, "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America," *World Politics* 48, no. 1 (Januari 1995), hlm. 82–116.
- 56 **Kongres tidak menghasilkan satu pun undang-undang:** Gregory Schmidt, "Presidential Usurpation or Congressional Preference? The Evolution of Executive Decree Authority in Peru," dalam *Executive Decree Authority*, ed. John M. Carey & Matthew S. Shugart (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 124; Kenney, *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America*, hlm. 131–32.
- 56 **melainkan juga tidak sabaran:** Yusuke Murakami, *Perú en la era del Chino: La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012), hlm. 282; Maxwell A. Cameron, "The *Eighteenth Brumaire* of Alberto Fujimori," dalam *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy*, ed. Maxwell Cameron & Philip Mauceri (University Park: Pennsylvania State University Press, 1997), hlm. 54–58; Cynthia McClintock, "La Voluntad Política Presidencial y la Ruptura Constitucional de 1992 en el Perú," dalam *Los Enigmas del Poder: Fujimori 1990–1996*, ed. Fernando Tuesta Soldevilla (Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1996).
- 56 **"mengundang Ketua Senat":** McClintock, "La Voluntad Política Presidencial y la Ruptura Constitucional," hlm. 65.
- 56 **"penipu tak produktif":** Catherine Conaghan, *Fujimori's Peru: Deception in the Public Sphere* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005), hlm. 30.
- 56 **"serigala" dan "bajingan":** Kenney, *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America*, hlm. 132.
- 56 **dia mulai melangkahi Kongres:** Schmidt, "Presidential Usurpation or Congressional Preference?," hlm. 118–19.
- 57 **"kaku" dan "membatasi":** Cameron, "The *Eighteenth Brumaire* of Alberto Fujimori," hlm. 55.
- 57 **"Kita negara yang sebenarnya selalu":** Conaghan, *Fujimori's Peru*, hlm. 30.
- 57 **Kaisar Jepang:** McClintock, "La Voluntad Política Presidencial y la Ruptura Constitucional," hlm. 65.
- 57 **"Bisakah Fujimori diturunkan?":** Kenney, *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America*, hlm. 146.

- 58 **"Presiden bakal membunuh Kongres":** Cameron, *"The Eighteenth Brumaire of Alberto Fujimori,"* hlm. 55; Kenney, *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America*, hlm. 56–57, 172–76, 186.
- 58 **"babi busuk" dan "oligark kotor":** Jones, *Hugo!*, hlm. 1.
- 58 **"musuh" dan "pengkhianat":** Kirk Hawkins, *Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 61.
- 58 **hakim yang membuat putusan yang menentang dia sebagai "komunis":** "Silvio Berlusconi Says Communist Judges Out to Destroy Him," Reuters, 20 Oktober 2009.
- 58 **menyebut media "musuh besar politik":** "Assaults on Media Make Ecuador an Odd Refuge," *The Age*, 21 Juni 2012, <http://www.theage.com.au/federal-politics/political-news/assaults-on-media-make-ecuador-an-odd-refuge-20120620-20okw.html?deviceType=text>.
- 58 **menuduh jurnalis menyebarkan "terorisme":** Ahmet Sik, "Journalism Under Siege," EnglishPen, 2016, https://www.englishpen.org/wp-content/uploads/2016/03/JournalismUnderSiege_FINAL.pdf.
- 59 **"oposisi, halangan, dan provokasi":** Joseph Page, *Perón* (New York: Random House, 1983), hlm. 162–65.
- 59 **"ketidaklayakan mental":** Jones, *Hugo!*, hlm. 309.
- 61 **Orbán mengisi Kejaksaan:** János Kornai, "Hungary's U-Turn: Retreating from Democracy," *Journal of Democracy* 26, no. 43 (Juli 2015), hlm. 35.
- 61 **memvideokan ratusan politikus oposisi:** Maxwell A. Cameron, "Endogenous Regime Breakdown: The Vladivideo and the Fall of Peru's Fujimori," dalam *The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Peru*, ed. Julio F. Carrión (University Park: Pennsylvania State University Press, 2006).
- 61 **mengirim uang bulanan:** Conaghan, *Fujimori's Peru*, hlm. 167; dan Cameron, "Endogenous Regime Breakdown," hlm. 180.
- 62 **pernah menyebut dia fasis:** Page, *Perón*, hlm. 165.
- 62 **atas dasar melanggar hukum:** Gretchen Helmke, *Courts Under Constraints: Judges, Generals, and Presidents in Argentina* (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 64.
- 62 **Perón lalu menunjuk empat loyalis:** Page, *Perón*, hlm. 165; Helmke, *Courts Under Constraints*, hlm. 64.
- 62 **menghindari pembatasan masa jabatan menurut konstitusi "tak konstitusional":** Conaghan, *Fujimori's Peru*, hlm. 126–31.

- 62 **para loyalis Fidesz:** Bojan Bugarcic & Tom Ginsburg, "The Assault on Postcommunist Courts," *Journal of Democracy* 27, no. 3 (Juli 2016), hlm. 73.
- 62 **Dalam satu langkah yang meragukan secara konstitusional:** Ibid., hlm. 73–74.
- 63 **kemampuan veto kepada para sekutu pemerintah dalam Mahkamah Konstitusi:** Joanna Fomina & Jacek Kucharczyk, "Populism and Protest in Poland," *Journal of Democracy* 27, no. 4 (Oktober 2016), hlm. 62–63. Mahkamah Konstitusi Polandia menyatakan rancangan undang-undang itu tak konstitusional pada awal 2016, tapi pemerintah mengabaikan putusan tersebut, dan pemimpin Partai Hukum dan Keadilan Jaroslaw Kaczyński menyatakan partainya "tak bakal membiarkan anarki di Polandia, biarpun didukung pengadilan." (Bugarcic & Ginsburg, "The Assault on Postcommunist Courts," hlm. 74.)
- 63 **Karena takut dibubarkan:** Allan R. Brewer-Carías, *Dismantling Democracy in Venezuela: The Chávez Authoritarian Experiment* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 58–59; Jones, *Hugo!*, hlm. 241–42.
- 63 **"Tapi hasilnya sama saja: mati":** Jones, *Hugo!*, hlm. 242.
- 63 **Dua bulan kemudian:** Brewer-Carías, *Dismantling Democracy in Venezuela*, hlm. 59.
- 63 **loyalis "revolusioner":** Javier Corrales & Michael Penfold, *Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela* (Washington, DC: The Brookings Institution, 2011), hlm. 27; dan Brewer-Carías, *Dismantling Democracy in Venezuela*, hlm. 236–38.
- 63 **taksatupun putusan Tribunal:** "El chavismo nuncia pierde en el Supremo Venezolano," *El País*, 12 Desember 2014, http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418373177_159073.html; juga Javier Corrales, "Autocratic Legalism in Venezuela," *Journal of Democracy* 26, no. 2 (April 2015), hlm. 44.
- 64 **kendali atas program berita saluran itu:** Conaghan, *Fujimori's Peru*, hlm. 154–62.
- 64 **"kami merencanakan siaran berita malam":** Ibid.
- 65 **tetap di rumah karena "alasan pribadi":** Ibid., hlm. 137.
- 65 **Balbín kalah:** Helmke, *Courts Under Constraints*, hlm. 64.
- 65 **atas tuduhan sodomi:** Dan Slater, "Iron Cage in an Iron Fist: Authorita-

- rian Institutions and the Personalization of Power in Malaysia," *Comparative Politics* 36, no. 1 (Oktober 2003), hlm. 94–95. Vonis Anwar dibatalkan pada 2004, setahun sesudah Mahathir Mohamad tak menjabat lagi.
- 65 **hasutannya "tak langsung":** Corrales, "Autocratic Legalism in Venezuela," hlm. 44–45; "Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest," *New York Times*, 10 September 2015.
- 65 **membuat pers ngeri:** "El Universo Verdict Bad Precedent for Free Press in Americas," *Committee to Protect Journalists Alert*, 16 Februari 2012, <https://cpj.org/2012/02/el-universosentence-a-dark-precedent-for-free-pre.php>.
- 66 **Pembelinya adalah pengusaha pro-pemerintah:** Soner Cagaptay, *The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey* (London: I.B. Tauris, 2017), hlm. 124; juga Svante E. Cornell, "As Dogan Yields, Turkish Media Freedom Plummets," *Turkey Analyst*, 18 Januari 2010, <https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/196-as-dogan-yields-turkish-media-freedom-plummets.html>.
- 66 **"menyebalkan":** Marshall Goldman, *PetroState: Putin, Power, and the New Russia* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 102.
- 66 **"seperti dalam film Mafia":** Peter Baker & Susan Glasser, *Kremlin Rising: Vladimir Putin's Russia and the End of the Revolution*, Revised Edition (Dulles, VA: Potomac Books, 2007), hlm. 83.
- 66 **Gusinsky menerima kesepakatan itu:** Ibid., hlm. 482.
- 66 **Di bawah tekanan besar finansial:** "Venden TV Venezolana Globovisión y Anuncian Nueva Línea Editorial de 'Centro,'" *El Nuevo Herald*, 13 Mei 2013, <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2023054.html>.
- 66 **yang dulunya dianggap jejaring pro-oposisi:** "Media Mogul Learns to Live with Chávez," *New York Times*, 5 Juli 2007.
- 67 **hanya bila mereka tak ikut-ikutan politik:** Baker & Glasser, *Kremlin Rising*, hlm. 86–87; Goldman, *PetroState*, hlm. 102.
- 67 **Putin yang merasa terancam lantas menahan Khodorkovsky:** Goldman, *PetroState*, hlm. 103, 106, 113–16. Juga Baker & Glasser, *Kremlin Rising*, hlm. 286–92.
- 67 **Tanpa sumber daya:** Levitsky & Way, *Competitive Authoritarianism*, hlm. 198.
- 67 **muncul sebagai pesaing serius:** "Rakibimiz Uzan," *Sabah*, 4 Juni 2003, <http://arsiv.sabah.com.tr/2003/06/04/p01.html>.

- 68 **petugas pajak mengaudit beberapa perusahaan Koç:** Svante E. Cornell, "Erdogan Versus Koç Holding: Turkey's New Witch Hunt," *Turkey Analyst*, 9 Oktober 2013, <http://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/64-erdogan-vs-ko>.
- 68 **"inspektur unggas dan kelinci":** Edwin Williamson, *Borges: A Life* (New York: Penguin, 2004), hlm. 292–95.
- 68 **El Sistema menerima tambahan pendanaan pemerintah:** Gustavo Dudamel, "Why I Don't Talk Venezuelan Politics," *Los Angeles Times*, 29 September 2015.
- 69 **pergeseran Venezuela menjadi kediktatoran:** Gustavo Dudamel, "A Better Way for Venezuela," *New York Times*, 19 Juli 2017.
- 69 **Dia mendapat balasan:** "Venezuela Cancels Gustavo Dudamel Tour After His Criticisms," *New York Times*, 21 Agustus 2017.
- 69 **daerah pemilihan parlemen diatur:** Harold Crouch, *Government and Society in Malaysia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996), hlm. 58–59, 74.
- 70 **mengurangi jumlah kursi parlemen:** William Case, "New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy: The Case of Malaysia," *Comparative Politics* 37, no. 1 (Oktober 2004), hlm. 101.
- 70 **melarang iklan kampanye:** Kim Lane Scheppele, "Understanding Hungary's Constitutional Revolution," dalam *Constitutional Crisis in the European Constitutional Area*, ed. Armin von Bogdandy & Pal Sonnevend (London: Hart/Beck, 2015), hlm. 120–21; dan Gabor Toka, "Constitutional Principles and Electoral Democracy in Hungary," dalam *Constitution Building in Consolidated Democracies: A New Beginning or Decay of a Political System?*, ed. Ellen Bos & Kálmán Pocza (Baden-Baden: Nomos-Verlag, 2014).
- 70 **mempertahankan mayoritas dua pertiga:** Cas Mudde, "The 2014 Hungarian Parliamentary Elections, or How to Craft a Constitutional Majority," *Washington Post*, 14 April 2014.
- 70 **kemunculan rezim-rezim otoriter satu partai:** Lihat V.O. Key Jr., *Southern Politics in State and Nation* (Knoxville: University of Tennessee Press, 1984); dan Robert Mickey, *Paths out of Dixie: The Democratization of Authoritarian Enclaves in America's Deep South, 1944–1972* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015).
- 71 **orang Afrika-Amerika tiba-tiba menjadi mayoritas:** Key, *Southern Politics in State and Nation*, hlm. 537; Richard Vallely, *The Two Recon-*

structions: The Struggle for Black Enfranchisement (Chicago: University of Chicago Press, 2004), hlm. 122.

- 71 **Pasukan federal mengawasi:** Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 38.
- 71 **Di banyak negara bagian selatan:** Valley, *The Two Reconstructions*, hlm. 24, 33; Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 38.
- 71 **diperkirakan partisipasi pemilih kulit hitam itu 65 persen:** J. Morgan Kousser, *The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, 1880–1910* (New Haven, CT: Yale University Press, 1974), hlm. 15, 28–29.
- 71 **40 persen lebih:** Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 38, 73; Valley, *The Two Reconstructions*, hlm. 3, 78–79.
- 71 **Partai Demokrat yang dulu dominan:** Valley, *The Two Reconstructions*, hlm. 77; dan Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 31.
- 71 **Partai Demokrat kehilangan kekuasaan:** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 26–27, 41.
- 71 **"status orang berkulit putih di sabuk kulit hitam":** Key, *Southern Politics in State and Nation*, hlm. 8.
- 71 **"Negro tak akan terdengar":** Dikutip dalam Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 209. Toombs pernah berkata dia bersedia "menghadapi perang tiga puluh tahun untuk menghapus hak suara orang kulit hitam di Selatan." Dikutip dalam Eric Foner, *Reconstruction: America's Unfinished Revolution* (New York: HarperCollins, 1988), hlm. 590–91.
- 71 **untuk melemahkan orang Afrika-Amerika:** Key, *Southern Politics in State and Nation*, hlm. 535–39; Kousser, *The Shaping of Southern Politics*; Valley, *The Two Reconstructions*, hlm. 121–48. Dua negara bagian non-Konfederasi, Delaware dan Oklahoma, juga mencabut hak suara orang Afrika-Amerika (Valley, *The Two Reconstructions*, hlm. 122–23).
- 71 **Agar tidak melanggar isi:** Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 42–43; Kousser, *The Shaping of Southern Politics*.
- 72 **"Maksud utama":** Alexander Keyssar, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 89.
- 72 **"aturan bagus dan jujur":** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 190.
- 72 **"Eight Box Law":** Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 72–73.

- 72 **Pada 1888, Gubernur John Richardson menyatakan:** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 145.
- 72 **turun sampai hanya 11 persen:** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 92.
- 72 **"menghancurkan Partai Republik":** Mickey, *Paths out of Dixie*, hlm. 73. Partai Republik tidak pernah meraih kursi gubernur South Carolina sampai 1974.
- 72 **"kemenangan besar Republik":** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 103, 113. Paragrafnya didasari Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 104–121.
- 73 **"untuk menghindari kesulitan":** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 131–32.
- 73 **"Saya mau tanda tangani undang-undang itu secepatnya":** Delapan tahun kemudian, satu konvensi konstitusional menambahkan pajak suara, tes baca tulis, dan syarat harta. Lihat Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 137.
- 73 **"hampir semuanya berkulit putih":** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 224.
- 73 **Partisipasi pemilih berkulit hitam di AS Selatan:** Stephen Tuck, "The Reversal of Black Voting Rights After Reconstruction," dalam *Democratization in America: A Comparative-Historical Analysis*, ed. Desmond King, Robert C. Lieberman, Gretchen Ritter, & Laurence Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009), hlm. 140.
- 73 **"Seluruh kawasan Selatan":** Foner, *Reconstruction*, hlm. 582.
- 74 **keadaan darurat untuk memperpanjang kekuasaannya:** William C. Rempel, *Delusions of a Dictator: The Mind of Marcos as Revealed in His Secret Diaries* (Boston: Little, Brown and Company, 1993), hlm. 32, 101–3.
- 74 **bahaya seperti pemberontakan:** Video lengkap pidato Marcos, 23 September 1972, ABS-CBN News, <https://www.youtube.com/watch?v=bDCHIIXEXes>.
- 74 **"berkumpul di sekitar bendera":** Lihat John Mueller, *War, Presidents, and Public Opinion* (New York: Wiley, 1973). Studi empiris lebih baru atas efek berkumpul di sekitar bendera di Amerika Serikat mencakup John R. Oneal & Anna Lillian Bryan, "The Rally 'Round the Flag Effect in U.S. Foreign Policy Crises, 1950–1985," *Political Behavior* 17, no. 4 (1995),

- hlm. 379–401; Matthew A. Baum, "The Constituent Foundations of the Rally-Round-the-Flag Phenomenon," *International Studies Quarterly* 46 (2002), hlm. 263–98; dan J. Tyson Chatagnier, "The Effect of Trust in Government on Rallies 'Round the Flag," *Journal of Peace Research* 49, no. 5 (2012), hlm. 631–45.
- 75 angka tertinggi yang pernah dicatat lembaga jajak pendapat Gallup:** David W. Moore, "Bush Approval Rating Highest in Gallup History," *Gallup News Service*, 21 September 2001. Lihat <http://www.gallup.com/poll/4924/bush-job-approval-highest-gallup-history.aspx>
- 75 mengkhawatirkan keselamatan sendiri:** Leonie Huddy, Nadia Khatib, & Theresa Capelos, "The Polls—Trends, Reactions to the Terrorist Attacks of September 11, 2001," *Public Opinion Quarterly* 66 (2002), hlm. 418–50; Darren W. Davis & Brian D. Silver, "Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the Terrorist Attacks on America," *American Journal of Political Science* 48, no. 1 (2004), hlm. 28–46; Leonie Huddy, Stanley Feldman, & Christopher Weber, "The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 614 (2007), hlm. 131–53; dan Adam J. Berinsky, *In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), Bab 7.
- 75 Sesudah 9/11:** Moore, "Bush Approval Rating Highest in Gallup History."
- 75 beberapa kebebasan sipil perlu dibatasi:** Sourcebook of Criminal Justice Online. Diakses di http://www.albany.edu/sourcebook/ind/TERRORISM.Public_opinion.Civil_liberties.2.html.
- 75 Sesudah Pearl Harbor:** "Gallup Vault: World War II-Era Support for Japanese Internment," 31 Agustus 2016, <http://www.gallup.com/vault/195257/gallup-vault-wwii-era-support-japanese-internment.aspx>.
- 75 Sebagian besar konstitusi memperbolehkan:** Mengenai "keadaan luar biasa" di konstitusi-konstitusi Amerika Latin, lihat Brian Loveman, *The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994). Mengenai Konstitusi AS, lihat Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 29–31.
- 76 sesudah kudeta:** Julio F. Carrion, "Public Opinion, Market Reforms, and Democracy in Fujimori's Peru," dalam *The Fujimori Legacy: The Rise of*

- Electoral Authoritarianism in Peru*, ed. Julio F. Carrion (University Park: Pennsylvania State University Press, 2005), hlm. 129.
- 76 **"ancaman komunis"**: Sterling Seagrave, *The Marcos Dynasty* (New York: Harper and Row, 1988), hlm. 243–44; Rempel, *Delusions of a Dictator*, hlm. 52–55. Pada Februari 1970, Marcos menulis di buku hariannya "Saya sedih karena terdorong ke suaka anti-komunisme" (Rempel, *Delusions of a Dictator*, hlm. 53).
- 76 **selusin pemberontak sungguhan**: Rempel, *Delusions of a Dictator*, hlm. 61, 122, 172–73.
- 76 **mengobarkan histeria masyarakat**: Seagrave, *The Marcos Dynasty*, hlm. 244.
- 76 **Marcos ingin menyatakan pemberlakuan hukum perang**: Rempel, *Delusions of a Dictator*, hlm. 105–7.
- 76 **ulah orang pemerintah**: "Philippines: Marcos Gambles on Martial Law," United States Department of State Declassified Intelligence Note, Bureau of Intelligence Research, 6 Oktober 1972. Juga Seagrave, *The Marcos Dynasty*, hlm. 242.
- 76 **"tidak berada di tempat kejadian"**: Stanley Karnow, *In Our Image: America's Empire in the Philippines* (New York: Ballantine Books, 1989), hlm. 359. Juga Seagrave, *The Marcos Dynasty*, hlm. 262.
- 76 **Persoalan apakah pelaku pembakar gedung parlemen di Berlin itu seorang pemuda Belanda**: Lihat bahasan historiografinya oleh Richard Evans, "The Conspiracists," *London Review of Books* 36, no. 9 (2014), hlm. 3–9.
- 77 **badan intelijen pemerintah**: Lihat John B. Dunlop, *The Moscow Bombings: Examinations of Russian Terrorist Attacks at the Onset of Vladimir Putin's Rule* (London: Ibidem, 2014). Juga Baker & Glasser, *Kremlin Rising*, hlm. 55.
- 77 **dorongan besar karena pengeboman**: Baker & Glasser, *Kremlin Rising*, hlm. 55.
- 77 **Masyarakat Rusia bersatu**: Richard Sakwa, *Putin: Russia's Choice*, Second Edition (New York: Routledge, 2007), hlm. 20–22; Masha Gessen, *Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin* (London: Penguin, 2012), hlm. 23–42; Dunlop, *The Moscow Bombings*.
- 77 **serangkaian serangan teroris ISIS**: Cagaptay, *The New Sultan*, hlm. 181–82.

- 77 **bahkan dua hakim konstitusi:** "Turkey: Events of 2016," Human Rights Watch World Report 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey>. Juga "Turkey Coup Attempt: Crackdown Toll Passes 50,000," BBC.com, 20 Juli 2016.
- 77 **Perebutan kekuasaan berpuncak:** Reformasi memberi presiden wewenang untuk membubarkan parlemen dan secara sepihak menunjuk empat perlima hakim di Mahkamah Konstitusi. Lihat evaluasi amendemen konstitusi oleh Asosiasi Pengacara Turki, tersedia di http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx.

BAB 5: PAGAR DEMOKRASI

- 79 **mercusuar harapan dan kemungkinan:** Karen Orren & Stephen Skowronek, *The Search for American Political Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 36.
- 79 **Konstitusi AS adalah alasan utama:** Untuk sumbernya, lihat Guillermo O'Donnell & Laurence Whitehead, "Two Comparative Democratization Perspectives: 'Brown Areas' and 'Immanence,'" dalam *Democratization in America: A Comparative-Historical Perspective*, ed. Desmond King, Robert C. Lieberman, Gretchen Ritter, & Laurence Whitehead, hlm. 48.
- 80 **Adolf Hitler meraih kekuasaan:** Kenneth F. Ledford, "German Lawyers and the State in the Weimar Republic," *Law and History Review* 13, no. 2 (1995), hlm. 317–49.
- 80 **hampir mirip Konstitusi AS:** George Athan Billias, *American Constitutionalism Heard Round the World, 1776–1989* (New York: New York University Press, 2009), hlm. 124–25; Zachary Elkins, Tom Ginsburg, & James Melton, *The Endurance of National Constitutions* (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 26.
- 80 **konstitusi 1853 Argentina:** Jonathan M. Miller, "The Authority of a Foreign Talisman: A Study of U.S. Constitutional Practice as Authority in Nineteenth Century Argentina and the Argentine Elite's Leap of Faith," *The American University Law Review* 46, no. 5 (1997), hlm. 1464–572. Juga Billias, *American Constitutionalism Heard Round the World*, hlm. 132–35.
- 80 **dua pertiga teksnya:** Miller, "The Authority of a Foreign Talisman," hlm. 1510–11.

- 80 **"menyediakan contoh khas":** Raul C. Pangalangan, "Anointing Power with Piety: People Power, Democracy, and the Rule of Law," dalam *Law and Newly Restored Democracies: The Philippines Experience in Restoring Political Participation and Accountability*, ed. Raul C. Pangalangan (Tokyo: Institute of Developing Economies, 2002), hlm. 3.
- 81 **"Tuhan tak pernah menganugerahi":** Benjamin Harrison, *This Country of Ours* (New York: Charles Scribner's Sons, 1897), hlm. ix.
- 81 **banyak cara yang bisa saling bertentangan:** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 72; juga William G. Howell, *Power Without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), hlm. 13–16.
- 81 **sedikit penjagaan untuk mencegah pengisian:** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 61–63; juga Bruce Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), hlm. 183.
- 81 **"lapisan tipis kebiasaan":** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 70.
- 82 **tidak mendefinisikan batas kekuasaan eksekutif:** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 29, 31. Juga Howell, *Power Without Persuasion*, hlm. 13–14, 183–87; dan Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*, hlm. 67–85.
- 82 **"pemimpin yang benar-benar antidemokrasi":** Huq & Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," hlm. 60, 75. Ahli konstitusi Yale Bruce Ackerman mencapai kesimpulan yang sama. Lihat Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*.
- 82 **Semua negara demokrasi yang sukses mengandalkan aturan-aturan informal:** Lihat Gretchen Helmke & Steven Levitsky, ed., *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006).
- 82 **aturan-aturan tak tertulis:** Ahli konstitusi Princeton Keith Whittington menyebutnya "konvensi". Lihat Keith E. Whittington, "The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States," *University of Illinois Law Review* 5 (2013), hlm. 1847–70.
- 83 **diperkuat oleh aturan permainan tak tertulis:** Lihat Scott Mainwaring & Aníbal Pérez-Liñán, *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall* (New York: Cambridge University Press, 2013).

- 83 Aturan-aturan tak tertulis ada di mana-mana:** Untuk laporan klasik mengenai norma atau "*folkways*" Senat AS, lihat Donald R. Matthews, *U.S. Senators and Their World* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960).
- 84 Meski gagasan itu mungkin kedengaran wajar:** Richard Hofstadter, *The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780–1840* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 8.
- 84 Federalis menganggap mereka pengkhianat:** Joseph J. Ellis, *American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson* (New York: Alfred A. Knopf, 1997), hlm. 122; Gordon S. Wood, *The Idea of America: Reflections on the Birth of the United States* (New York: Penguin Books, 2011), hlm 114; Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 105, 111.
- 84 merencanakan restorasi sistem kerajaan yang didukung Britania:** Wood, *The Idea of America*, hlm. 244–45; Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 94.
- 84 Tiap sisi berharap bisa memusnahkan:** Wood, *The Idea of America*, hlm. 245.
- 85 bukan saling memusnahkan:** Hofstadter, *The Idea of a Party System*.
- 85 Pemerintah Republik Spanyol baru yang berkecenderungan kiri:** Gabriel Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War, 1931–1939* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965), hlm. 52.
- 85 "agen asing Bolsyevik":** Shlomo Ben-Ami, "The Republican 'Take-Over': Prelude to Inevitable Catastrophe," dalam *Revolution and War in Spain, 1931–1939*, ed. Paul Preston (London: Routledge, 2001), hlm. 58–60.
- 85 "Kita telah memasuki pusaran sekarang":** Gerard Alexander, *The Sources of Democratic Consolidation* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002), hlm. 111.
- 85 sebagai kelompok monarkis atau fasis kontrarevolusi:** Raymond Carr, *Spain 1808–1939* (Oxford: Oxford University Press, 1966), hlm. 621.
- 85 bersedia bermain di arena demokrasi:** Michael Mann, *Fascists* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 330.
- 86 "tak setia" secara mendasar:** Juan J. Linz, "From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain," dalam *The Breakdown of Democratic Regimes: Europe*, ed. Juan J. Linz & Alfred Stepan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), hlm. 162.

- 86 **ancaman besar:** Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War*, hlm. 147–48.
- 86 **memutus segala solidaritas dengan lembaga-lembaga rezim sekarang:** Dikutip di Linz, "From Great Hopes to Civil War," hlm. 161.
- 86 **menindas pemberontakan itu dengan brutal:** Sampai 2.000 pekerja tewas dalam pemberantasan, dan diperkirakan 20.000 orang kiri dipenjara. Lihat Hugh Thomas, *The Spanish Civil War* (London: Penguin Books, 2001), hlm. 136; Stanley Payne, *The Franco Regime 1936–1974* (Madison: University of Wisconsin Press, 1987), hlm. 43.
- 86 **mengaitkannya dengan keseluruhan oposisi Republik:** Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War*, hlm. 165–68.
- 87 **menahan diri secara kelembagaan:** Kami meminjam istilah *forbearance* dari Alisha Holland. Lihat Alisha Holland, "Forbearance," *American Political Science Review* 110, no. 2 (Mei 2016), hlm. 232–46; dan Alisha Holland, *Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America* (New York: Cambridge University Press, 2017). Lihat juga Eric Nelson, "Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642–1649?," *History News Network*, 14 Desember 2014, <http://historynewsnetwork.org/article/157822>.
- 87 **"pengendalian diri yang sabar":** *Oxford Dictionary*, lihat <https://en.oxforddictionaries.com/definition/forbearance>.
- 87 **seluruh hak kelembagaan mereka:** Whittington, "The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States," hlm. 106.
- 87 **kekuasaan sebagai bersumber dari Tuhan:** Reinhard Bendix, *Kings or People: Power and the Mandate to Rule* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 7.
- 87 **bersikap "ilahiah":** Edmund Morgan, *Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America* (New York: W.W. Norton, 1988), hlm. 21; Bendix, *Kings or People*, hlm. 234.
- 88 **"masa depan meratapi tindakan keji itu":** Anthony Dawson & Paul Yachnin, ed., *Richard II*, The Oxford Shakespeare (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 241.
- 88 **"adalah hak raja atau ratu":** Whittington, "The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States," hlm. 107.
- 88 **bukan hukum tertulis, melainkan norma:** Julia R. Azari & Jennifer K. Smith, "Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies," *Perspectives on Politics* 10, no. 1 (Maret 2012); juga Whittington,

"The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States," hlm. 109–12.

- 89 **"Seharusnya saya dengan enggan":** Thomas Jefferson, Letter to the Vermont State Legislature, 10 Desember 1807, dikutip dalam Thomas H. Neale, *Presidential Terms and Tenure: Perspectives and Proposals for Change* (Washington, DC: Congressional Research Service, 2004), hlm. 5.
- 89 **Penyimpangan apa pun dari kebiasaan yang dihargai selama ini:** Bruce Peabody, "George Washington, Presidential Term Limits, and the Problem of Reluctant Political Leadership," *Presidential Studies Quarterly* 31, no. 3 (2001), hlm. 442.
- 89 **melanggar suatu "hukum tak tertulis":** Whittington, "The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States," hlm. 110. Ketika Theodore Roosevelt mau mengejar masa jabatan ketiga yang tak berturut-turut pada 1912, dia gagal meraih posisi calon presiden Partai Republik, dan ketika maju sebagai calon independen, dia ditembak ketika berkampanye oleh seseorang yang mengaku membela batas dua kali masa jabatan. Lihat Elkins, Ginsburg, & Melton, *The Endurance of National Constitutions*, hlm. 47.
- 89 **pemilihan kembali FDR pada 1940:** Azari & Smith, "Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies," hlm. 44.
- 89 **amat penting di demokrasi presidensial:** Lihat Nelson, "Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642–1649?"
- 90 **bisa dengan mudah mengalami kebuntuan:** Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism," *Journal of Democracy* 1, no. 1 (Januari 1990), hlm. 51– 69; lihat juga Gretchen Helmke, *Institutions on the Edge: The Origins and Consequences of Inter-Branch Crises in Latin America* (New York: Cambridge University Press, 2017).
- 90 **"main habis-habisan":** Mark Tushnet, "Constitutional Hardball," *The John Marshall Law Review* 37 (2004), hlm. 550, 523–53.
- 90 **"tindakan tercela" sebagai dasar pemakzulan:** Page, *Perón*, hlm. 165.
- 90 **wewenang presiden untuk mengeluarkan dekrit:** Delia Ferreira Rubio & Matteo Goretti, "When the President Governs Alone: The *Decretazo* in Argentina, 1989–1993," dalam *Executive Decree Authority*, ed. John M. Carey & Matthew Soberg Shugart (New York: Cambridge University Press, 1998).

- 90 **Menem tidak tanggung-tanggung:** Ferreira Rubio & Goretti, "When the President Governs Alone," hlm. 33, 50.
- 90 **Kongres baru hasil pemilu pun mengesahkan undang-undang amnesti:** "Venezuela's Supreme Court Consolidates President Nicolás Maduro's Power," *New York Times*, 12 Oktober 2016; "Supremo de Venezuela declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica," *El País*, 21 Januari 2016. Lihat http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/21/america/1453346802_377899.html.
- 91 **Pengadilan *chavista*:** "Venezuela Leaps Towards Dictatorship," *The Economist*, 31 Maret 2017; "Maduro podrá aprobar el presupuesto a espaldas del Parlamento," *El País*, 13 Oktober 2016. Lihat http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/america/1476370249_347078.html; "Venezuela's Supreme Court Consolidates President Nicolás Maduro's Power," *New York Times*, 12 Oktober 2016; "Supremo de Venezuela declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica," *El País*, 21 Januari 2016. Lihat http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/21/america/1453346802_377899.html.
- 91 **"semua undang-undang yang sudah disetujui":** "Radiografía de los chavistas que controlan el TSJ en Venezuela," *El Tiempo*, 29 Agustus 2016. Lihat <http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/perfil-de-los-jueces-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-44143>.
- 91 **sedikit teman di kongres:** Leiv Marsteintredet, Mariana Llanos, & Detlef Nolte, "Paraguay and the Politics of Impeachment," *Journal of Democracy* 42, no. 4 (2013), hlm. 113.
- 91 **dicopot dari jabatannya oleh senat:** Marsteintredet, Llanos, & Nolte, "Paraguay and the Politics of Impeachment," hlm. 112–14.
- 91 **"jelas-jelas konyol":** Francisco Toro, "What's in a Coup?," *New York Times*, 29 Juni 2012.
- 91 **sidang itu legal:** Pasal 225 Konstitusi 1992 Paraguay memperkenalkan Kongres memakzulkan presiden karena "melaksanakan tugas dengan buruk", suatu "rumusan yang sengaja tak jelas, bisa berarti apa pun yang diinginkan dua pertiga senator yang menjabat." Lihat Toro, "What's in a Coup?"
- 92 ***El Loco*:** Aníbal Pérez-Liñán, *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America* (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 26.
- 92 **susu bersubsidi yang berlabel namanya:** Carlos De la Torre, *Populist*

- Seduction in Latin America*, Second Edition (Athens, OH: Ohio University Press, 2010), hlm. 106; Pérez-Liñán, *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America*, hlm. 155.
- 92 **Dalam suatu pelanggaran terang-terangan:** Lihat De la Torre, *Populist Seduction in Latin America*, hlm. 102; Ximena Sosa, "Populism in Ecuador: From José M. Velasco to Rafael Correa," dalam *Populism in Latin America*, Second Edition, ed. Michael L. Conniff (Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 2012), hlm 172–73; dan Pérez-Liñán, *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America*, hlm. 26.
- 92 **"secara sepenuhnya legal":** Kousser, *The Shaping of Southern Politics*, hlm. 134–36.
- 93 **"lingkaran saling dorong konstitusional yang tereskalasi":** Nelson, "Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642–1649?" Juga Linz, "The Perils of Presidentialism," dan Helmke, *Institutions on the Edge*.
- 94 **"Lingkaran hadangan legislatif":** Nelson, "Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642–1649?"
- 94 **norma-norma demokrasi sehat:** Lihat Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), hlm. 13–20.
- 94 **"budaya kompromi":** Pamela Constable & Arturo Valenzuela, *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet* (New York: W.W. Norton, 1991), hlm. 21–22. Juga Luis Maira, "The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution in the Area of Political Institutions," dalam *Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970–1973*, ed. Federico Gil, Ricardo Lagos, & Henry Landsberger (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1979), hlm. 247.
- 94 **tidak ada pertengkaran:** Constable & Valenzuela, *A Nation of Enemies*, hlm. 21.
- 94 **didesak oleh polarisasi Perang Dingin:** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 22–39.
- 94 **borjuis yang tak sesuai zaman:** Constable & Valenzuela, *A Nation of Enemies*, hlm. 25.
- 94 **menjadi seperti Kuba:** Youssef Cohen, *Radicals, Reformers, and Reactionaries: The Prisoner's Dilemma and the Collapse of Democracy in Latin America* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 100.

- 94 **"kampanye kebencian raksasa":** Rodrigo Tomic, "Christian Democracy and the Government of the Unidad Popular," dalam *Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970–1973*, ed. Federico Gil, Ricardo Lagos, & Henry Landsberger, hlm. 232.
- 94 **berkomitmen ke demokrasi:** Paul Sigmund, *The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964–1976* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977), hlm. 18; Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 45.
- 95 **dengan cara apa pun:** Julio Faúndez, *Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende* (New Haven, CT: Yale University Press, 1988), hlm. 181.
- 95 **meninggalkan sikap menahan diri:** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 48; Sigmund, *The Overthrow of Allende*, hlm. 111.
- 95 **Statuta Jaminan:** Sigmund, *The Overthrow of Allende*, hlm. 118–20; Faúndez, *Marxism and Democracy in Chile*, hlm. 188–90.
- 95 **"kerusakan rasa saling percaya":** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 49.
- 95 **Tanpa mayoritas di legislatif:** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 50–60, 81; Ricardo Israel, *Politics and Ideology in Allende's Chile* (Tempe: Arizona State University Center for Latin American Studies, 1989), hlm. 210–16.
- 95 **"celah hukum":** Sigmund, *The Overthrow of Allende*, hlm. 133; Cohen, *Radicals, Reformers, and Reactionaries*, hlm. 104–5.
- 95 **"skak mat kelembagaan":** Maira, "The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution," hlm. 249–56.
- 96 **dijadikan senjata:** Maira, "The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution," hlm. 249–56; Israel, *Politics and Ideology in Allende's Chile*, hlm. 216.
- 96 **Allende menanggapi dengan mengangkat kembali:** Sigmund, *The Overthrow of Allende*, hlm. 164.
- 96 **Sekutu kirinya:** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 67; Constable & Valenzuela, *A Nation of Enemies*, hlm. 28.
- 96 **"membuka pintu fasisme":** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 67–77.
- 96 **"tak membiarkan Allende mencetak gol satu pun":** Israel, *Politics and Ideology in Allende's Chile*, hlm. 80.

- 97 **"penggulingan konstitusional":** Jorge Tapia Videla, "The Difficult Road to Socialism: The Chilean Case from a Historical Perspective," dalam *Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970–1973*, ed. Federico Gil, Ricardo Lagos, & Henry Landsberger, hlm. 56; Sigmund, *The Overthrow of Allende*, hlm. 282; Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 83–85.
- 97 **"seorang kepala negara tanpa legitimasi":** Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes*, hlm. 89–94.
- 97 **pemerintah tak konstitusional:** Cohen, *Radicals, Reformers, and Reactionaries*, hlm. 117.

BAB 6: ATURAN-ATURAN TAK TERTULIS POLITIK AMERIKA

- 98 **"Saya akan meminta Kongres":** Franklin Roosevelt, First Inaugural Address, 4 Maret 1933, The Avalon Project: Documents in Law, History, and Diplomacy, Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/froos1.asp.
- 98 **Mahkamah Agung mendapati banyak bagian:** Samuel Eliot Morison & Henry Steele Commager, *The Growth of the American Republic* (New York: Oxford University Press, 1953), hlm. 615–16.
- 99 **Roosevelt mengajukan usul:** Sidney Milkis & Michael Nelson, *The American Presidency: Origins and Development, 1776–2014*, Seventh Edition (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2016), hlm. 378–79.
- 99 **Rencana Roosevelt untuk Mahkamah Agung:** Noah Feldman, *Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR's Great Supreme Court Justices* (New York: Twelve, 2010), hlm. 108.
- 100 **Federalis mengesahkan:** Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 107.
- 100 **Undang-undang itu digunakan:** Matthew Crenson & Benjamin Ginsberg, *Presidential Power: Unchecked and Unbalanced* (New York: W.W. Norton, 2007), hlm. 49–50; Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 107–11.
- 100 **"langkah legal dan konstitusional":** Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 136, 140; Wood, *The Idea of America*, hlm. 246.
- 100 **"melambangkan semangat":** Ibid., hlm. 216.
- 101 **"banyak lawan":** Donald B. Cole, *Martin Van Buren and the American*

- Political System* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), hlm. 39, 430.
- 101 **generasi van Buren:** Lihat Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 216–31.
- 101 **"intensitas emosional":** Donald Fehrenbacher, *The South and the Three Sectional Crises* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1980), hlm. 27.
- 101 **"naik di atas orang kulit putih":** Dikutip dalam John Niven, *John C. Calhoun and the Price of Union: A Biography* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988), hlm. 325.
- 101 **"pengkhianat Konstitusi":** Anggota DPR AS Henry M. Shaw, U.S. House of Representatives, 20 April 1858. Lihat <https://archive.org/details/kansasquestionsp00shaw>; Ulrich Bonnell Phillips, *The Life of Robert Toombs* (New York: The MacMillan Company, 1913), hlm. 183.
- 101 **politikus anti-perbudakan:** Anggota DPR AS Thaddeus Stevens, U.S. House of Representatives, 20 Februari 1850. Lihat <https://catalog.hathitrust.org/Record/009570624>.
- 102 **Ahli sejarah Yale Joanne Freeman:** Joanne B. Freeman, "Violence Against Members of Congress Has a Long, and Ominous, History," *Washington Post*, 15 Juni 2017. Lihat juga Joanne B. Freeman, *The Field of Blood: Congressional Violence and the Road to Civil War* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018).
- 102 **Presiden Lincoln menghapuskan:** Milkis & Nelson, *The American Presidency*, hlm. 212–13.
- 102 **Kehancuran yang terjadi:** Louis Menand, *The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), hlm. 61.
- 102 **profesor ilmu politik Woodrow Wilson:** Woodrow Wilson, *Congressional Government: A Study in American Politics* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1885).
- 103 **"Semua orang yang mencoba":** Robert Green Ingersoll, *Fifty Great Selections, Lectures, Tributes, After Dinner Speeches* (New York: C.P. Farrell, 1920), hlm. 157–58.
- 103 **Kongres yang dikuasai Partai Republik mengurangi:** Horwill, *The Usages of the American Constitution*, hlm. 188.
- 103 **"tindakan tak pantas tingkat tinggi":** Keith Whittington, "Bill Clinton

- Was No Andrew Johnson: Comparing Two Impeachments,” *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 2 no. 2 (Mei 2000), hlm. 438–39.
- 103 **”melipat baju berdarah”**: Charles Calhoun, *From Bloody Shirt to Full Dinner Pail: The Transformation of Politics and Governance in the Gilded Age* (New York: Hill and Wang, 2010), hlm. 88.
- 104 **Perjanjian itu secara efektif mengakhiri**: C.Vann Woodward, *Reunion and Reaction: The Compromise of 1877 and the End of Reconstruction* (Boston: Little, Brown and Company), 1966.
- 104 **polarisasi pelan-pelan mereda**: Nolan McCarty, Keith Poole, & Howard Rosenthal, *Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches* (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), hlm. 10.
- 104 **Kerja sama bipartisan memungkinkan**: Kimberly Morgan & Monica Prasad, ”The Origins of Tax Systems: A French American Comparison,” *American Journal of Sociology* 114, no. 5 (2009), hlm. 1366.
- 105 **Di mahakarya dua jilidnya**: James Bryce, *The American Commonwealth*, vol. 1 (New York: Macmillan and Company, 1896), hlm. 393–94.
- 107 **Pasal itu tak berkata apa-apa**: Howell, *Power Without Persuasion*, hlm. 13–14.
- 107 **cabang eksekutif telah membangun**: Arthur M. Schlesinger Jr., *The Imperial Presidency* (Boston: Houghton Mifflin, [1973] 2004); Crenson & Ginsberg, *Presidential Power*; Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*; Milkis & Nelson, *The American Presidency*; Chris Edelson, *Power Without Constraint: The Post-9/11 Presidency and National Security* (Madison: University of Wisconsin Press, 2016).
- 107 **”alat pendobrak konstitusional”**: Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*, hlm. 87–119; Crenson & Ginsberg, *Presidential Power*, hlm. 180–351; Edelson, *Power Without Constraint*.
- 107 **presiden yang agendanya dihadapang**: William Howell, ”Unitary Powers: A Brief Overview,” *Presidential Studies Quarterly* 35, no. 3 (2005), hlm. 417.
- 107 **Presiden Amerika Serikat juga bisa melangkahi badan yudikatif**: Lihat James F. Simon, *Lincoln and Chief Justice Taney: Slavery, Secession, and the President’s War Powers* (New York: Simon & Schuster, 2007).
- 107 **”secara alami memicu kebijaksanaan dan kehati-hatian”**: Alexander Hamilton, *Federalist* 74.
- 108 **”Saya berjalan di tanah yang belum diinjak”**: Dikutip dalam Fred

- Greenstein, *Inventing the Job of President: Leadership Style from George Washington to Andrew Jackson* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009), hlm. 9.
- 108 Dengan giat dia membela:** Milkis & Nelson, *The American Presidency*, hlm. 91.
- 108 Dia membatasi penggunaan:** Ibid., hlm. 82.
- 108 "menandatangani banyak undang-undang":** Dikutip di ibid., hlm. 82.
- 108 Washington juga enggan:** Gerhard Peters & John T. Woolley, "Executive Orders," The American Presidency Project, ed. John T. Woolley & Gerhard Peters, Santa Barbara, CA, 1999–2017. Tersedia di <http://www.presidency.ucsb.edu/data/orders.php>.
- 108 "mendapat kekuasaan dari kesediaannya":** Garry Wills, *Cincinnatus: George Washington and the Enlightenment* (Garden City, NY: Doubleday, 1984), hlm. 23.
- 108 "Andai ada satu orang":** Gordon Wood, *Revolutionary Characters: What Made the Founders Different* (New York: Penguin, 2006), hlm. 30–31. Lihat juga Seymour Martin Lipset, "George Washington and the Founding of Democracy," *Journal of Democracy* 9, no. 4 (Oktober 1998), hlm. 24–36.
- 109 teori "penatagunaan":** Stephen Skowronek, *The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), hlm. 243–44.
- 109 "energi dan ambisi tanpa batas":** Dikutip dalam Milkis & Nelson, *The American Presidency*, hlm. 125–27.
- 109 "Apa Anda tak sadar":** Dikutip dalam ibid., hlm. 125.
- 109 Roosevelt ternyata bisa menahan diri:** Ibid., hlm. 128.
- 109 dia sangat hati-hati:** Sidney Milkis & Michael Nelson, *The American Presidency: Origins and Development, 1776–2007*, Fifth Edition (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2008), hlm. 217.
- 109 Roosevelt bekerja di dalam:** Ibid., hlm 289–90.
- 109 presiden tetap mengikuti norma-norma:** Crenson and Ginsberg, *Presidential Power*, hlm. 211; Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*, hlm. 87.
- 109 Mereka tak pernah menggunakan hak amnesti:** Lauren Schorr, "Breaking the Pardon Power: Congress and the Office of the Pardon Attorney," *American Criminal Law Review* 46 (2009), hlm. 1535–62.

- 110 "Federalis gigih":** Alexander Pope Humphrey, "The Impeachment of Samuel Chase," *The Virginia Law Register* 5, no. 5 (September 1889), hlm. 283–89.
- 110 Jefferson yang kemudian mendorong pemakzulannya:** Ellis, *American Sphinx*, hlm. 225.
- 110 "persekusi politik dari awal sampai akhir":** Humphrey, "The Impeachment of Samuel Chase," hlm. 289. Ahli sejarah Richard Hofstadter menjabarkan pemakzulan Chase sebagai "tindakan perang partisan murni dan sederhana" (Hofstadter, *The Idea of a Party System*, hlm. 163).
- 110 Senat tidak jadi memakzulkan Chase:** Lee Epstein & Jeffrey A. Segal, *Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments* (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 31.
- 110 Dimulai dengan langkah kelompok Federalis:** Tujuh kali perubahannya adalah sebagai berikut: 1) Pada 1800, ketika Kongres Federalis lemah mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung dari 6 ke 5 untuk membatasi kemampuan Jefferson mengatur yudikatif; 2) Pada 1801, ketika Kongres Jefferson yang baru dilantik mengembalikan jumlah hakim Mahkamah Agung dari 5 ke 6; 3) Pada 1807, ketika Kongres menambah jumlah hakim Mahkamah Agung jadi 7 untuk memberi satu tambahan penunjukan untuk Jefferson; 4) Pada 1837, ketika Kongres menambah jumlah hakim Mahkamah Agung jadi 9 untuk memberi dua tambahan penunjukan untuk Andrew Jackson; 5) Pada 1863, ketika Kongres menambah jumlah hakim Mahkamah Agung jadi 10 untuk memberi satu hakim anti-perbudakan untuk Lincoln; 6) Pada 1866, ketika Kongres yang didominasi Partai Republik mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung jadi 7 untuk membatasi kemampuan Presiden Andrew Johnson dari Partai Demokrat mengatur Mahkamah Agung; 7) Pada 1869, ketika Kongres menambah jumlah hakim Mahkamah Agung jadi 9 untuk memberi dua tambahan penunjukan untuk Presiden Ulysses S. Grant dari Partai Republik yang baru terpilih. Lihat Jean Edward Smith, "Stacking the Court," *New York Times*, 26 Juli 2007.
- 111 "tindakan kelewatan seperti itu":** Woodrow Wilson, *An Old Master and Other Political Essays* (New York: Charles Scribner's Sons, 1893), hlm. 151.
- 111 "amat menggoda bagi partisan":** Benjamin Harrison, *This Country of Ours* (New York: Charles Scribner's Sons, 1897), hlm. 317.
- 111 "cukup kuat untuk mencegah":** Horwill, *The Usages of the American Constitution*, hlm. 190.

- 111 **"amat luar biasa angkuhnya"**: Epstein & Segal, *Advice and Consent*, hlm. 46.
- 111 **"deklarasi perang terbuka"**: Dikutip dalam H.W. Brands, *Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt* (New York: Doubleday, 2008), hlm. 470–71.
- 111 **"langkah menuju kediktatoran"**: Dikutip dalam Feldman, *Scorpions*, hlm. 108.
- 111 **"mengubah arti"**: Brands, *Traitor to His Class*, hlm. 472.
- 112 **"Semua ini berbau Machiavelli"**: Gene Gressley, "Joseph C. O'Mahoney, FDR, and the Supreme Court," *Pacific Historical Review* 40, no. 2 (1971), hlm. 191.
- 112 **"langkah mundur piawai"**: Morison & Commager, *The Growth of the American Republic*, hlm. 618.
- 112 **Senat mengembangkan sejumlah alat**: Gregory Koger, *Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and Senate* (Chicago: University of Chicago Press, 2010); Gregory J. Wawro & Eric Schickler, *Filibuster: Obstruction and Lawmaking in the U.S. Senate* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).
- 112 **Senat tak punya aturan**: Wawro & Schickler, *Filibuster*, hlm. 6.
- 113 **[Tiap senator] punya kekuasaan besar**: Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 100.
- 113 **disfungsi tak terjadi**: Ibid., hlm. 101; Wawro & Schickler, *Filibuster*, hlm. 41.
- 113 **"ada sebagai ancaman potensial"**: Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 101.
- 113 **Penelitian Matthews**: Ibid.; juga Donald Matthews, "The Folkways of the United States Senate: Conformity to Group Norms and Legislative Effectiveness," *American Political Science Review* 53, no. 4 (Desember 1959), hlm. 1064–89.
- 113 **Kesantunan terutama berarti**: Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 98–99.
- 113 **"sulit untuk tak menyebut"**: Dikutip dalam Matthews, "Folkways", hlm. 1069.
- 113 **"musuh kita di satu isu"**: Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 98.
- 113 **"mengharuskan setidaknya tampilan"**: Ibid., hlm. 99.

- 114 **"Bila seorang senator menggunakan kekuasaan":** Matthews, "Folkways," hlm. 1072.
- 114 **"Bukan masalah persahabatan":** Dikutip dalam Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 100.
- 114 **Tak ada alat kelembagaan:** Mengenai asal-usul dan evolusi *filibuster* Senat, lihat Sarah Binder & Steven Smith, *Politics or Principle? Filibustering in the United States Senate* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 1997); Wawro & Schickler, *Filibuster*; dan Koger, *Filibustering*.
- 114 **Namun itu jarang terjadi:** Wawro & Schickler, *Filibuster*, hlm. 25–28.
- 114 **"senjata prosedural pamungkas":** Binder & Smith, *Politics or Principle?*, hlm. 114.
- 114 **hanya dua puluh tiga *filibuster*:** Ibid., hlm. 11.
- 114 **Kenaikan sedikit dalam penggunaan *filibuster*:** Wawro & Schickler, *Filibuster*, hlm. 41.
- 114 **Sarah Binder dan Steven Smith:** Binder & Smith, *Politics or Principle?*, hlm. 60.
- 114 **Penggunaan *filibuster* tetap rendah:** Ibid., hlm. 9.
- 114 **nasihat dan persetujuan:** Horwill, *The Usages of the American Constitution*, hlm. 126–28; Lee Epstein & Jeffrey A. Segal, *Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments* (New York: Oxford University Press, 2007); Robin Bradley Kar & Jason Mazzone, "The Garland Affair: What History and the Constitution Really Say About President Obama's Powers to Appoint a Replacement for Justice Scalia," *New York University Law Review* 91 (Mei 2016), hlm. 58–61.
- 114 **Itu tidak terjadi:** Horwill, *The Usages of the American Constitution*, hlm. 137–38; Kar & Mazzone, "The Garland Affair," hlm. 59–60.
- 115 **Hanya sembilan pejabat kabinet pilihan presiden:** Epstein & Segal, *Advice and Consent*, hlm. 21.
- 115 **praktik tak terputus selama tiga generasi:** Horwill, *The Usages of the American Constitution*, hlm. 137–38.
- 115 **90 persen lebih:** Berdasarkan Kar & Mazzone, "The Garland Affair," hlm. 107–14.
- 115 **Calon hakim agung yang amat kompeten:** Epstein & Segal, *Advice and Consent*, hlm. 106.
- 115 **Antonin Scalia yang ultrakonservatif:** Ibid., hlm. 107.

- 115 **Dalam tujuh puluh empat kesempatan:** Berdasarkan Kar & Mazzone, "The Garland Affair," hlm. 107–14.
- 115 **"artileri terberat":** James Bryce, *American Commonwealth* (New York: Macmillan and Company, [1888] 1896), hlm. 211.
- 116 **"alat partisan untuk mengganggu pengelola pemilu":** Keith Whittington, "An Impeachment Should Not Be a Partisan Affair," *Lawfare*, 16 Mei 2017.
- 116 **Batas legal pemakzulan:** Ibid.
- 116 **"Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tak":** Tushnet, "Constitutional Hardball," hlm. 528.
- 117 **Penggunaan perintah eksekutif oleh Roosevelt:** Data dari Gerhard Peters & John T. Woolley, "The American Presidency Project" (2017), http://www.presidency.ucsb.edu/executive_orders.php?year=2017.
- 117 **Keputusannya untuk melanjutkan:** Ahli konstitusi Noah Feldman menjabarkan rencana mengisi Mahkamah Agung sebagai "salah satu aksi individual konstitusional paling luar biasa yang pernah dicoba." Lihat Feldman, *Scorpions*, hlm. 108.
- 117 **Dimulainya Perang Dingin:** Edward Shils, *The Torment of Secrecy* (Glencoe: Free Press, 1956), hlm. 140.
- 118 **naik ke panggung nasional:** Richard Fried, *Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm. 122.
- 118 **"Di sini, di tangan saya":** Dikutip dalam *ibid.*, hlm. 123.
- 118 **Orang-orang moderat Partai Republik khawatir:** Ibid, hlm. 125.
- 118 **"Teruslah berbicara":** Dikutip dalam *ibid.*, hlm. 125.
- 118 **"Angkat telepon":** Dikutip dalam Robert Griffith, *The Politics of Fear: Joseph McCarthy and the Senate* (Amherst: University of Massachusetts Press, 1970), hlm. 53–54.
- 118 **"Pink Lady":** Iwan Morgan, *Nixon* (London: Arnold Publishers, 2002), hlm. 19.
- 118 **"Red Pepper":** Matthews, *U.S. Senators and Their World*, hlm. 70.
- 118 **Berkali-kali McCarthy menyatakan keraguan:** Fried, *Nightmare in Red*, hlm. 22.
- 119 **Awalnya Eisenhower menolak:** David Nichols, *Ike and McCarthy: Dwight Eisenhower's Secret Campaign Against Joseph McCarthy* (New York: Basic Books, 2017), pp.12– 15.

- 119 **Nixon yang selalu pragmatis pun:** Morgan, *Nixon*, hlm. 53.
- 119 **"dengan berat hati":** Ibid., hlm. 57
- 119 **"menjaga semangat McCarthyisme tetap hidup":** Geoffrey Kabaservice, *Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and the Destruction of the Republican Party, from Eisenhower to the Tea Party* (New York: Oxford University Press, 2012), hlm. 126.
- 120 **pers sebagai musuh:** Morgan, *Nixon*, hlm. 158–59; Keith W. Olson, *Watergate: The Presidential Scandal That Shook America* (Lawrence: University Press of Kansas, 2003), hlm. 2.
- 120 **anarkis dan komunis:** Jonathan Schell, "The Time of Illusion," *The New Yorker*, 2 Juni 1975; Olson, *Watergate*, hlm. 30.
- 120 **"Kita menghadapi musuh":** Morgan, *Nixon*, hlm. 24.
- 120 **"berperang, di dalam":** Rick Perlstein, *Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America* (New York: Scribner, 2008), hlm. 667.
- 120 **Langkah pemerintahan Nixon:** Morgan, *Nixon*, hlm. 160, 179; Olson, *Watergate*, hlm. 12; Perlstein, *Nixonland*, hlm. 517, 676.
- 120 **"lusinan orang Partai Demokrat":** Morgan, *Nixon*, hlm. 24.
- 120 **Pemerintah juga menggunakan:** Perlstein, *Nixonland*, hlm. 413.
- 120 **serangan kriminal Nixon terhadap lembaga-lembaga demokrasi:** Olson, *Watergate*, hlm. 35–42.
- 120 **"pencarian kebenaran sesungguhnya secara bipartisan":** Dikutip dalam ibid., hlm. 90.
- 120 **hampir selusin senator Republik:** Ibid., hlm. 76–82.
- 121 **Cox meminta Nixon:** Ibid., hlm. 102.
- 121 **Rodino sudah mendapat dukungan cukup banyak dari Partai Republik:** Ibid., hlm. 155.
- 121 **Nixon masih berharap:** Morgan, *Nixon*, hlm. 186–87.
- 121 **"Paling banyak sepuluh, barangkali kurang":** Olson, *Watergate*, hlm. 164.
- 122 **demokratisasi Amerika seutuhnya:** Eric Schickler, *Racial Realignment: The Transformation of American Liberalism, 1932–1965* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016).
- 122 **tantangan terbesar ke bentuk-bentuk saling toleransi dan menahan diri yang mapan:** Lihat juga Mickey, Levitsky, & Way, "Is America Still Safe for Democracy?," hlm. 20–29.

BAB 7: BUYAR

- 123 **"Bila Scalia benar-benar telah meninggal":** Rekonstruksi atas tanggapan media sosial terhadap kematian Scalia didasari dua sumber: Jonathan Chait, "Will the Supreme Court Just Disappear?," *New York Magazine*, 21 February 2016, dan "Supreme Court Justice Antonin Scalia Dies: Legal and Political Worlds React," *The Guardian*, 14 Februari 2016.
- 123 **"Apa yang lebih sedikit daripada nol?":** Ibid.
- 123 **untuk pertama kali dalam sejarah Amerika:** Kar & Mazzone, "The Garland Affair," hlm. 53–111. Menurut Kar & Mazzone, ada enam kejadian dalam sejarah Amerika—semuanya sebelum abad ke-20—di mana Senat menolak mengadakan pemungutan suara untuk menyetujui calon hakim agung yang diusulkan presiden. Di keenam kasus, legitimasi penunjukan dipertanyakan karena penunjukan dilakukan sesudah presiden pengganti telah terpilih atau presidennya sendiri tidak terpilih tapi menjadi presiden pengganti karena sebelumnya adalah wakil presiden (selama abad ke-19, ada debat konstitusional mengenai apakah wakil presiden yang naik menggantikan presiden benar-benar presiden atau sekadar pejabat presiden).
- 123 **tiap kali seorang presiden:** Berdasarkan Kar & Mazzone, "The Garland Affair," hlm. 107–14.
- 125 **"kata-kata Pramuka":** Teks pidato yang dicetak ulang di "To College Republicans: Text of Gingrich Speech," *West Georgia News*. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html>.
- 125 **Pemimpin Minoritas DPR Bob Michel:** Ike Brannon, "Bob Michel, House GOP Statesman Across Five Decades, Dies at Age 93," *Weekly Standard*, 17 Februari 2017.
- 125 **bila ingin meraih mayoritas:** Ronald Brownstein, *The Second Civil War: How Extreme Partisanship Has Paralyzed Washington and Polarized America* (New York: Penguin, 2007), hlm. 137, 144; Thomas E. Mann & Norman J. Ornstein, *The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on Track* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 65.
- 125 **Gingrich berjuang:** Matt Grossman & David A. Hopkins, *Asymmetric Politics: Ideological Republicans and Interest Group Democrats* (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 285.
- 125 **"menggunakan kata sifat seperti batu":** Brownstein, *The Second Civil War*, hlm. 142.

- 125 **Dia mempertanyakan patriotisme pesaingnya di Partai Demokrat:** Thomas E. Mann & Norman J. Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism* (New York: Basic Books, 2016), hlm. 35.
- 125 **"menghancurkan negara kita":** Dikutip dalam James Salzer, "Gingrich's Language Set New Course," *Atlanta Journal-Constitution*, 29 Januari 2012.
- 125 **"hal-hal yang keluar dari mulut Gingrich":** Dikutip dalam Salzer, "Gingrich's Language Set New Course."
- 126 **Mantan sekretaris pers Gingrich, Tony Blankley:** Gail Sheehy, "The Inner Quest of Newt Gingrich," *Vanity Fair*, 21 Januari 2012.
- 126 **Gingrich dan timnya menyebar memo:** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 39; Salzer, "Gingrich's Language Set New Course."
- 126 **"Senator Gingrich":** Sean Theriault, *The Gingrich Senators: The Roots of Partisan Warfare in Congress* (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- 126 **"mengubah politik Amerika":** Dikutip dalam Salzer, "Gingrich's Language Set New Course."
- 127 **Pemimpin Minoritas Senat Robert Dole:** Michael Wines, "G.O.P. Filibuster Stalls Passage of Clinton \$16 Billion Jobs Bill," *New York Times*, 2 April 1993.
- 127 **Penggunaan filibuster:** Binder & Smith, *Politics or Principle?*, hlm. 10–11; Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 107–8.
- 127 **tingkat "wabah":** Mantan senator Charles Mathias, dikutip dalam Binder & Smith, *Politics or Principle?*, hlm. 6.
- 127 **jumlah tahunan mosi cloture:** Data dari Senat AS. Lihat https://www.senate.gov/pagelayout/reference/cloture_motions/clotureCounts.htm.
- 127 **Anggota-anggota DPR dari Partai Republik menolak berkompromi:** Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 109–10; Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 293.
- 128 **"dengan alasan teknis":** Whittington, "Bill Clinton Was No Andrew Johnson," hlm. 459.
- 128 **Dalam suatu tindakan tanpa preseden:** Pemakzulan Andrew Johnson pada 1868 adalah suatu urusan yang jauh lebih serius, melibatkan perdebatan penting mengenai wewenang konstitusional presiden. Lihat Whittington, "Bill Clinton Was No Andrew Johnson."

- 128 **"hanya senjata dalam perang partisan":** Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 122.
- 128 **Dia menunjukkan itu:** Jacob Hacker & Paul Pierson, *Winner Take All Politics* (New York: Simon & Schuster, 2010), hlm. 207.
- 128 **"Kalau tidak ilegal, lakukan saja":** Dikutip dalam John Ydstie, "The K Street Project and Tom DeLay," NPR, 14 Januari 2006.
- 128 **"Berkali-kali":** Sam Tanenhaus, "Tom DeLay's Hard Drive," *Vanity Fair*, Juli 2004.
- 129 **"karena telah menjadi tempat kerja sama":** Brownstein, *The Second Civil War*, hlm. 227.
- 129 **"Kita tidak bekerja sama dengan Demokrat":** Tanenhaus, "Tom DeLay's Hard Drive."
- 129 **Presiden Bush memerintah sangat condong ke kanan:** Brownstein, *The Second Civil War*, hlm. 263–323.
- 129 **Harry Reid dan para pemimpin Senat lain:** Ibid., hlm. 339–40.
- 129 **Anggota Demokrat di Senat juga mulai menyimpang:** Todd F. Gaziano, "A Diminished Judiciary: Causes and Effects of the Sustained High Vacancy Rates in the Federal Courts," The Heritage Foundation, 10 Oktober 2002; Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 164–65.
- 130 ***New York Times* mengutip:** Neil Lewis, "Washington Talk: Democrats Ready for a Judicial Fight," *New York Times*, 1 Mei 2001.
- 130 **Demokrat menggunakan *filibuster*:** Tushnet, "Constitutional Hardball," hlm. 524–25; Epstein & Segal, *Advice and Consent*, hlm. 99.
- 130 **"salah satu tradisi besar":** Dikutip dalam Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 167.
- 130 **jumlah *filibuster* mencapai:** Data dari Senat AS. Lihat https://www.senate.gov/pagelayout/reference/cloture_motions/clotureCounts.htm.
- 130 **praktik informal "aturan reguler":** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 7, 50.
- 130 **Jumlah rancangan undang-undang yang diajukan:** Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. 172.
- 130 **"norma-norma perilaku lama di DPR":** Mann & Ornstein, *The Broken Branch*, hlm. xi.
- 130 **140 jam kesaksian di bawah sumpah:** Brownstein, *The Second Civil War*, hlm. 274–75.

- 130 **Anjing penjaga kongres:** Ibid.
- 131 **norma lama dan umum:** Tushnet, "Constitutional Hardball," hlm. 526.
- 131 **Pada 2003, orang-orang Partai Republik Texas:** Steve Bickerstaff, *Lines in the Sand: Congressional Redistricting in Texas and the Downfall of Tom DeLay* (Austin: University of Texas Press, 2007), hlm. 132, 171.
- 131 **orang-orang Partai Republik Texas membuat rencana:** Ibid., hlm. 84–108.
- 131 **Peta baru itu membuat:** Ibid., hlm. 102–4.
- 131 **"separtisan":** Dikutip dalam ibid., hlm. 108.
- 132 **Mereka tetap di sana:** Ibid., hlm. 220, 228.
- 132 **DeLay datang dari Washington:** Ibid., hlm. 251–53.
- 132 **"peta paling agresif":** Dikutip dalam ibid., hlm. 251–53.
- 133 **"angkat senjata untuk al-Qaeda":** "First Democrat Issue: Terrorist Rights," The Rush Limbaugh Show, 10 Januari 2006. Lihat https://origin-www.rushlimbaugh.com/daily/2006/01/10/first_democrat_issue_terrorist_rights/.
- 133 **membela Joseph McCarthy:** Ann Coulter, *Treason: Liberal Treachery from the Cold War to the War on Terrorism* (New York: Three Rivers Press, 2003).
- 133 **"ada dalam keseluruhan pandangan [liberal]":** Coulter, *Treason*, hlm. 292, 16.
- 133 **"Ada jutaan tersangka di sini":** "Coulter Right on Rape, Wrong on Treason," CoulterWatch, 11 Desember 2014. Lihat https://coulterwatch.wordpress.com/2014/12/11/coulter-right-on-rape-wrong-on-treason/#_edn3.
- 133 **calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama:** Untuk rangkuman serangan-serangan itu, lihat Martin A. Parlett, *Demonizing a President: The "Foreignization" of Barack Obama* (Santa Barbara, CA: Praeger, 2014).
- 133 **Program Fox News Hannity & Colmes:** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 129–30.
- 134 **"kecuali Obama bisa membuktikan saya keliru":** Parlett, *Demonizing a President*, hlm. 164.
- 134 **"kediktatoran totaliter":** "Rep. Steve King: Obama Will Make America a 'Totalitarian Dictatorship,'" *ThinkProgress*, 28 Oktober 2008.

- 134 **"main-main dengan teroris":** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 130.
- 134 **"meluncurkan karier politiknya":** Dana Milbank, "Unleashed, Palin Makes a Pit Bull Look Tame," *Washington Post*, 7 Oktober 2008.
- 134 **Pidato bernuansa rasis Palin:** Frank Rich, "The Terrorist Barack Hussein Obama," *New York Times*, 11 Oktober 2008.
- 135 **perlawanannya terhadap Obama:** Lihat Christopher S. Parker & Matt A. Barreto, *Change They Can't Believe In: The Tea Party and Reactionary Politics in America* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013); lihat juga Theda Skocpol & Vanessa Williamson, *The Tea Party and the Remaking of American Conservatism* (New York: Oxford University Press, 2013).
- 135 **anggota kongres asal Georgia Paul Broun:** "Georgia Congressman Calls Obama Marxist, Warns of Dictatorship," *Politico*, 11 November 2008.
- 135 **"Anda tak percaya Konstitusi":** "Broun Is Asked, Who'll 'Shoot Obama,'" *Politico*, 25 Februari 2011.
- 135 **"telah menjadi diktator":** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 214.
- 135 **pengikut Tea Party berkali-kali menegaskan:** Lihat Parker & Barreto, *Change They Can't Believe In*.
- 135 **"Ini bukan pergeseeran":** Dikutip di Parker & Barreto, *Change They Can't Believe In*, hlm. 2.
- 136 **"INI AKAN BIKIN DARAH ANDA BEKU!!!":** Dikutip dalam Jonathan Alter, *The Center Holds: Obama and His Enemies* (New York: Simon & Schuster, 2013), hlm. 36.
- 136 **"Saya tak percaya Barack Obama":** Dikutip dalam Parker & Barreto, *Change They Can't Believe In*, hlm. 200.
- 136 **"presiden anti-Amerika pertama":** "Newt Gingrich: Obama 'First Anti-American President,'" *Newsmax*, 23 Maret 2016; dan "Gingrich: Obama's Worldview Shaped by Kenya," *Newsmax*, 12 September 2010.
- 136 **"Saya tak percaya, dan saya tahu":** Darren Samuelson, "Giuliani: Obama Doesn't Love America," *Politico*, 18 Februari 2015.
- 136 **"Saya tak tahu":** "Mike Coffman Says Obama 'Not an American' at Heart, Then Apologizes," *Denver Post*, 16 Mei 2012.

- 136 **"pendukung birther":** Gabriel Winant, "The Birthers in Congress," *Salon*, 28 Juli 2009.
- 136 **Senator Roy Blunt:** Ibid.
- 137 **"Saya punya orang-orang":** "What Donald Trump Has Said Through the Years About Where President Obama Was Born," *Los Angeles Times*, 16 Desember 2016.
- 137 **pertanyaannya mengenai kebangsaan Presiden Obama:** Parker and Barreto, *Change They Can't Believe In*, hlm. 210.
- 137 **37 persen pemilih Republik:** "Fox News Poll: 24 Percent Believe Obama Not Born in the U.S.," FoxNews.com, 7 April 2011.
- 137 **Empat puluh tiga persen pemilih Republik:** "Poll: 43 Percent of Republicans Believe Obama is a Muslim," *The Hill*, 13 September 2015.
- 137 **satu jajak pendapat Newsweek mendapati:** Daniel Stone, "Newsweek Poll: Democrats May Not Be Headed for a Bloodbath," *Newsweek*, 27 Agustus 2010.
- 138 **"menyerap sebanyak mungkin gerakan Tea Party":** Dikutip dalam Abramowitz, *The Polarized Public?*, hlm. 101.
- 138 **Organisasi-organisasi berdana besar:** Skocpol & Williamson, *The Tea Party and the Remaking of American Conservatism*, hlm. 83–120.
- 138 **calon yang didukung Tea Party:** "How the Tea Party Fared," *New York Times*, 4 November 2010. Juga Michael Tesler, *Post-Racial or Most-Racial? Race and Politics in the Obama Era* (Chicago: University of Chicago Press, 2016), hlm. 122–23.
- 138 **Kaukus Tea Party DPR:** "Who Is in the Tea Party Caucus in the House?," CNN.com (*Political Ticker*), 29 Juli 2011.
- 138 **"ancaman terhadap supremasi hukum":** "Ted Cruz Calls Obama 'The Most Lawless President in the History of This Country,'" Tu94.9FM. Lihat <http://tu949fm.iheart.com/articles/national-news-104668/listen-ted-cruz-calls-barack-obama-14518575/>.
- 139 **sekelompok anggota DPR muda:** Lihat liputan oleh Michael Grunwald, *The New New Deal: The Hidden Story of Change in the Obama Era* (New York: Simon & Schuster, 2013), hlm. 140–42.
- 139 **"Young Guns":** Ibid., hlm. 140–42.
- 139 **"hal paling penting":** Dikutip dalam Abramowitz, *The Polarized Public?*, hlm. 122.

- 139 **Partai Republik melakukan *filibuster*:** Rancangan undang-undang itu akhirnya disahkan. Lihat Joshua Green, "Strict Obstructionist," *The Atlantic*, Januari/Februari 2011.
- 139 **Hadangan Senat meningkat sesudah 2008:** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 87–89.
- 139 **"tak terbatas atau berubah jadi veto permanen":** Ibid., hlm. 85.
- 139 **385 *filibuster* dilakukan:** Milkis & Nelson, *The American Presidency*, hlm. 490.
- 139 **tingkat penerimaan:** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 92–94.
- 140 **"pilihan nuklir":** "Reid, Democrats Trigger 'Nuclear' Option; Eliminate Most Filibusters on Nominees," *Washington Post*, 21 November 2013.
- 140 **"penggunaan kekuasaan politik mentah":** Dikutip dalam ibid.
- 140 **"Kami tak bisa menunggu":** Dikutip dalam Jonathan Turley, "How Obama's Power Plays Set the Stage for Trump," *Washington Post*, 10 Desember 2015.
- 140 **Obama mulai menggunakan wewenang eksekutif:** Lihat Nelson, "Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642–1649?"
- 140 **"memorandum eksekutif":** "Obama Mandates Rules to Raise Fuel Standards," *New York Times*, 21 Mei 2010.
- 140 **mengumumkan tindakan eksekutif:** "Obama to Permit Young Migrants to Remain in U.S.," *New York Times*, 15 Juni 2012.
- 140 **Presiden Obama menanggapi penolakan Kongres:** "Obama Orders Cuts in Federal Greenhouse Gas Emissions," *New York Times*, 19 Maret 2015.
- 141 **Mitch McConnell mengajak negara-negara bagian:** "McConnell Urges U.S. States to Defy U.S. Plan to Cut Greenhouse Gases," *New York Times*, 4 Maret 2015.
- 141 **"wacana separatis John Calhoun":** "A New Phase in Anti-Obama Attacks," *New York Times*, 11 April 2015.
- 141 **menaikkan batas atas utang:** Mann and Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 5.
- 141 **para pemimpin kedua partai tahu:** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 6–7.

- 141 **bersedia menggunakan batas utang:** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 295–96; Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 7–10.
- 141 **"meruntuhkan keseluruhan sistem":** Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*, hlm. 25–26.
- 141 **Dua senator yang didukung Tea Party:** Ibid., hlm. 7–8, 26–27.
- 142 **"Kami tak bercanda":** Ibid., hlm. 26.
- 142 **Para senator Republik:** Seperti dikatakan mantan penulis pidato George W. Bush, Michael Gerson, "Senat tidak ada urusan melakukan kebijakan luar negeri dengan pemerintah asing, terutama yang bermusuhan.... Surat Cotton menciptakan kesan bahwa Partai Republik di Senat ingin negosiasi gagal." Michael Gerson, "The True Scandal of the GOP Senators' Letter to Iran," *Washington Post*, 12 Maret 2015.
- 142 **"Saya tak bisa tak memikirkan":** Dikutip dalam Susan Milligan, "Disrespecting the Oval Office," *U.S. News & World Report*, 16 Maret 2015.
- 142 **Cotton dan kawan-kawan:** *New York Daily News* memasang kata *Traitors* di sampul depan pada keesokan harinya.
- 142 **sejak Rekonstruksi belum pernah terjadi:** Kar & Mazzone, "The Garland Affair."
- 142 **beberapa senator Partai Republik:** "Republican Senators Vow to Block Any Clinton Supreme Court Nominee Forever," *The Guardian*, 2 November 2016.
- 143 **"bila Hillary Clinton menjadi presiden":** Ibid.
- 143 **"preseden sejarah":** Dikutip dalam ibid.
- 143 **Para pemilih kedua partai kini terbelah:** Marc J. Hetherington & Jonathan D. Weiler, *Authoritarianism and Polarization in American Politics* (New York: Cambridge University Press, 2009); Abramowitz, *The Polarized Public?*
- 143 **"cara hidup":** Bill Bishop & Robert G. Cushing, *The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart* (Boston: Houghton Mifflin, 2008), hlm. 23.
- 144 **"tak suka" atau "sangat tak suka":** Shanto Iyengar, Gaurav Sood, & Yphtach Lelkes, "Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization," *Public Opinion Quarterly* 76, no. 3 (2012), hlm. 417–18.
- 144 **Menjadi pendukung Partai Demokrat atau Republik:** Ibid.

- 144 **jumlahnya lebih tinggi lagi:** Pew Research Center, "Partisanship and Political Animosity in 2016," 22 Juni 2016, <http://www.people-press.org/2016/06/22/partisanship-and-political-animosity-in-2016/>.
- 144 **Partai Demokrat mewakili:** Lihat James L. Sundquist, *Dynamics of the Party System: Alignment and Re-Alignment of Political Parties in the United States* (Washington, DC: The Brookings Institution, 1983), hlm. 214–27; Alan I. Abramowitz, *The Disappearing Center: Engaged Citizens, Polarization, and American Democracy* (New Haven, CT: Yale University Press, 2010), hlm. 54–56.
- 144 **Kristen Evangelis:** Geoffrey Layman, *The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics* (New York: Columbia University Press, 2001), hlm. 171.
- 145 **kedua partai sependapat:** Schickler, *Racial Realignment*, hlm. 179; Edward G. Carmines & James A. Stimson, *Issue Evolution: Race and the Transformation of American Politics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), Bab 3.
- 145 **perlawanan dari Demokrat AS selatan dan kendali strategis:** Ibid., hlm. 119.
- 145 **"koalisi konservatif":** Binder & Smith, *Politics or Principle?*, hlm. 88.
- 145 **mendemokratiskan AS Selatan:** Lihat Mickey, *Paths out of Dixie*.
- 145 **"Strategi Selatan" Nixon:** Abramowitz, *The Disappearing Center*, hlm. 66–73; Tesler, *Post-Racial or Most-Racial?*, hlm. 11–13.
- 145 **daerah yang tadinya basis:** Earl Black & Merle Black, *The Rise of Southern Republicans* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002); Abramowitz, *The Disappearing Center*, hlm. 66–73.
- 145 **orang-orang kulit hitam di selatan:** Carmines & Stimson, *Issue Evolution*.
- 146 **Pergeseran pasca-1965:** Matthew Levendusky, *The Partisan Sort: How Liberals Became Democrats and Conservatives Became Republicans* (Chicago: University of Chicago Press, 2009).
- 146 **sikap partisan dan ideologi menjadi sejalan:** Ibid.; Abramowitz, *The Disappearing Center*, hlm. 63–73.
- 146 **perbedaan ideologi antarpantai:** Lihat Pew Research Center, *Political Polarization in the American Public* (Washington, DC: Pew Foundation), 12 Juni 2014.
- 146 **Dasar sosial, etnis, dan budaya:** Bagian ini berdasarkan Hetherington

- & Weiler, *Authoritarianism and Polarization in American Politics*; Abramowitz, *The Disappearing Center*; Abramowitz, *The Polarized Public?*; dan Alan I. Abramowitz & Steven Webster, "The Rise of Negative Partisanship and the Nationalization of U.S. Elections in the 21st Century," *Electoral Studies* 41 (2016), hlm. 12–22.
- 147 merupakan 38 persen:** "It's Official: The U.S. Is Becoming a Majority-Minority Nation," *U.S. News & World Report*, 6 Juli 2015.
- 147 Biro Sensus AS memproyeksikan:** Sandra L. Colby & Jennifer M. Ortman, "Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014–2060," *United States Census Bureau Current Population Reports*, Maret 2015. Lihat <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf>.
- 147 Suara Demokrat dari kalangan bukan kulit putih:** Tesler, *Post-Racial or Most-Racial?*, hlm. 166; Abramowitz, *The Polarized Public?*, hlm. 29.
- 147 pemilih Republik:** Tesler, *Post-Racial or Most-Racial?*, hlm. 166–68.
- 147 Partai Republik merangkul kelompok Kristen Kanan:** Geoffrey C. Layman, *The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics* (New York: Columbia University Press, 2001); Abramowitz, *The Polarized Public?*, hlm. 69–77.
- 147 76 persen kelompok evangelis kulit putih:** "The Parties on the Eve of the 2016 Election: Two Coalitions, Moving Further Apart," *Pew Research Center*, 13 September 2016, <http://www.people-press.org/2016/09/13/2-party-affiliation-among-voters-1992-2016/>.
- 147 Persentase orang kulit putih pemilih Demokrat:** Abramowitz, *The Polarized Public?*, hlm. 67.
- 147 orang Kristen berkulit putih yang menikah:** Abramowitz, *The Disappearing Center*, hlm. 129.
- 147 Pada 2000-an:** Ibid., hlm. 129.
- 147 kedua partai sekarang terbelah:** Hetherington & Weiler, *Authoritarianism and Polarization in American Politics*, hlm. 27–28, 63–83.
- 148 sebagian besar pelanggaran norma:** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*; Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*.
- 148 Pemilih Republik lebih mengandalkan:** Levendusky, *How Partisan Media Polarize America*, hlm. 14–16; Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 149–64.
- 148 69 persen pemilih Republik:** Levendusky, *How Partisan Media Polarize America*, hlm. 14.

- 148 **pembawa acara bincang-bincang radio terkenal:** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 170–74.
- 148 **Bangkitnya media sayap kanan:** Theda Skocpol & Alexander Hertel-Fernandez, "The Koch Network and Republican Party Extremism," *Perspectives on Politics* 16, no. 3 (2016), hlm. 681–99.
- 148 **posisi "tanpa kompromi":** Levendusky, *How Partisan Media Polarizes America*, hlm. 152.
- 148 **wakil California dari Partai Republik, Darrell Issa:** Levendusky, *How Partisan Media Polarizes America*, hlm. 152.
- 148 **"Bila kita menyimpang sedikit saja":** Dikutip dalam Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 177.
- 148 **Posisi garis keras diperkuat:** Skocpol & Hertel-Fernandez, "The Koch Network," hlm. 681–99.
- 148 **Americans for Tax Reform pimpinan Grover Norquist:** Elizabeth Drew, *Whatever It Takes: The Real Struggle for Power in America* (New York: Viking Press, 1997), hlm. 65.
- 149 **kelompok-kelompok luar seperti Americans for Prosperity:** Skocpol & Hertel-Fernandez, "The Koch Network," hlm. 683.
- 149 **keluarga Koch menanggung:** Ibid., hlm. 684.
- 149 **Partai Republik tetap seragam secara budaya:** Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*, hlm. 43–46, 118–23.
- 149 **orang kulit putih Protestan menjadi minoritas:** Abramowitz, *The Disappearing Center*, hlm. 129.
- 149 **"terlalu panas, terlalu curiga, terlalu agresif":** Richard Hofstadter, *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays* (New York: Vintage, 1967), hlm. 4.
- 150 **"sedang berubah":** Parker & Barreto, *Change They Can't Believe In*, hlm. 3, 157.
- 150 **"orang asing di negeri sendiri":** Arlie Russell Hochschild, *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right* (New York: The New Press, 2016).
- 150 **"orang Amerika sejati":** Berdasarkan satu analisis hasil survei nasional, Elizabeth Theiss-Morse mendapati bahwa mereka yang paling merasa sebagai orang Amerika cenderung memandang "orang Amerika sejati" sebagai 1) lahir di Amerika Serikat, 2) berbicara bahasa Inggris, 3) ber-

kulit putih, dan 4) Kristen. Lihat Elizabeth Theiss-Morse, *Who Counts as an American: The Boundaries of National Identity* (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 63–94.

- 150 **"Pemilih Amerika bukan bergerak":** Ann Coulter, *Adios America! The Left's Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole* (Washington, DC: Regnery Publishing, 2015), hlm. 19.
- 150 **"Take Our Country Back":** Parker & Barreto, *Change They Can't Believe In*.

BAB 8: TAHUN PERTAMA TRUMP: RAPOR OTORITER

- 151 **Penelitian Shorenstein Center:** Thomas E. Patterson, "News Coverage of Donald Trump's First 100 Days," Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy, 18 Mei 2017, <https://shorensteincenter.org/news-coverage-donald-trumps-first-100-days>. Sumber berita yang diteliti adalah *New York Times*, *Wall Street Journal*, dan *Washington Post*, juga CNN, CBS, Fox News, NBC, dan tiga media Eropa.
- 151 **Para pejabat pemerintahan Trump pun segera merasa terkeping:** Lihat Glenn Thrush & Maggie Haberman, "At a Besieged White House, Tempers Flare and Confusion Swirls," *New York Times*, 16 Mei 2017.
- 151 **liputan pers:** Patterson, "News Coverage of Donald Trump's First 100 Days."
- 152 **"tak ada politikus dalam sejarah":** "Trump Says No President Has Been Treated More Unfairly," *Washington Post*, 17 Mei 2017.
- 152 **Trump dilaporkan menekan:** "Comey Memo Says Trump Asked Him to End Flynn Investigation," *New York Times*, 16 Mei 2017; "Top Intelligence Official Told Associates Trump Asked Him If He Could Intervene with Comey on FBI Russia Probe," *Washington Post*, 16 Juni 2017.
- 153 **dia membebastugaskan Comey:** Josh Gerstein, "Trump Shocks with Ouster of FBI's Comey," *Politico*, 9 Mei 2017; dan "Trump Said He Was Thinking of Russia Controversy When He Decided to Fire Comey," *Washington Post*, 11 Mei 2017.
- 153 **Sepanjang sejarah FBI selama delapan puluh dua tahun:** Philip Bump, "Here's How Unusual It Is for an FBI Director to Be Fired," *Washington Post*, 9 Mei 2017; "FBI Director Firing in Early '90s Had Some Similarities to Comey Ouster," *U.S. News & World Report*, 10 Mei 2017.

- 153 Trump telah mencoba menjalin:** Tina Nguyen, "Did Trump's Personal Lawyer Get Preet Bharara Fired?," *Vanity Fair*, 13 Juni 2017; "Mueller Expands Probe into Trump Business Transactions," *Bloomberg*, 20 Juli 2017.
- 153 presiden mencopot dia:** "Mueller Expands Probe into Trump Business Transactions."
- 153 Trump mempermalukan Sessions di depan umum:** Nolan McCaskill & Louis Nelson, "Trump Coy on Sessions's Future: 'Time Will Tell,'" *Politico*, 25 Juli 2017; Chris Cillizza, "Donald Trump Doesn't Want to Fire Jeff Sessions. He Wants Sessions to Quit," CNN.com, 24 Juli 2017.
- 153 melancarkan upaya mencari-cari kesalahan:** Michael S. Schmidt, Maggie Haberman, & Matt Apuzzo, "Trump's Lawyers, Seeking Leverage, Investigate Mueller's Investigators," *New York Times*, 20 Juli 2017.
- 154 Majelis Konstituante yang ditunjuk secara meragukan oleh pemerintah:** "Venezuela's Chief Prosecutor Luisa Ortega Rejects Dismissal," BBC.com, 6 Agustus 2017.
- 154 "pendapat seorang hakim":** "Trump Criticizes 'So-Called Judge' Who Lifted Travel Ban," *Wall Street Journal*, 5 Februari 2017.
- 154 "hakim yang tak dipilih":** White House Office of the Press Secretary, "Statement on Sanctuary Cities Ruling," 25 April 2017. Lihat <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/25/statement-sanctuary-cities-ruling>.
- 154 Trump sendiri menanggapi:** "President Trump Is 'Absolutely' Considering Breaking Up the Ninth Circuit Court," *Time*, 26 April 2017.
- 154 pengampunan politis:** Beberapa malam sebelumnya, Trump telah berkata di tengah tepuk tangan keras di satu kampanye politik, "Apa orang-orang di ruangan ini suka Sheriff Joe?" Dia bertanya retorik, "Jadi apa Sheriff Joe dipidana karena melakukan pekerjaannya?" Lihat "Trump Hints at Pardon for Ex-Sheriff Joe Arpaio," CNN.com, 23 Agustus 2017.
- 154 Langkah Trump tersebut memperkuat ketakutan:** "Trump's Lawyers Are Exploring His Pardoning Powers to Hedge Against the Russia Investigation," *Business Insider*, 20 Juli 2017.
- 154 "Bila presiden bisa mengamankan anak buahnya":** Martin Redish, "A Pardon for Arpaio Would Put Trump in Uncharted Territory," *New York Times*, 27 Agustus 2017.
- 155 Pemerintahan Trump juga pada akhirnya melabrak:** Ryan Lizza,

- "How Trump Broke the Office of Government Ethics," *The New Yorker*, 14 Juli 2017.
- 155 Ketua Pengawasan DPR Jason Chaffetz:** Richard Painter, seorang pengacara etika di pemerintahan George W. Bush, menjabarkan tindakan Chaffetz sebagai "tangan besi" dan "pembalasan politik". "GOP Lawmaker Hints at Investigating Ethics Chief Critical of Trump," *New York Times*, 13 Januari 2017.
- 155 pejabat pemerintah mencoba memaksa OGE:** "White House Moves to Block Ethics Inquiry into Ex- Lobbyists on Payroll," *New York Times*, 22 Mei 2017.
- 155 "OGE rusak":** Lizza, "How Trump Broke the Office of Government Ethics."
- 155 Trump tak menggantikan Comey:** "Trump Faces Tough Choices in FBI Pick," *The Hill*, 15 Mei 2017. Orang yang akhirnya ditunjuk Trump, Christopher Wray, secara luas diharapkan menjaga independensi FBI.
- 155 orang-orang Republik di Senat menolak:** "Trump Is Reportedly Considering Bringing Rudy Giuliani on as Attorney General amid Troubles with Jeff Sessions," *Business Insider*, 24 Juli 2017.
- 156 "musuh rakyat Amerika":** "Trump Calls the News Media the 'Enemy of the American People,'" *New York Times*, 17 Februari 2017.
- 156 "Saya cinta Amendemen Ke-1":** "Remarks by President Trump at the Conservative Political Action Committee," White House Office of the Press Secretary, 24 Februari 2017. Lihat <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/24/remarks-president-trump-conservative-political-action-conference>.
- 156 "membikin malu dunia media":** Lihat <https://twitter.com/realdonald-trump/status/847455180912181249>.
- 156 "Saya pikir itu sesuatu yang sudah kami jajaki":** Jonathan Turley, "Trump's Quest to Stop Bad Media Coverage Threatens Our Constitution," *The Hill*, 2 Mei 2017.
- 156 Gugatan pencemaran nama baik dengan ganti rugi jutaan dolar:** "Confrontation, Repression in Correa's Ecuador," Committee to Protect Journalists, 1 September 2011, <https://cpj.org/reports/2011/09/confrontation-repression-correa-ecuador.php>.
- 156 "Bila saya jadi presiden":** Conor Gaffey, "Donald Trump Versus Amazon: All the Times the President and Jeff Bezos Have Called Each Other Out," *Newsweek*, 25 Juli 2017.

- 156 **Dia juga mengancam akan mengganjal:** Philip Bump, "Would the Trump Administration Block a Merger Just to Punish CNN?," *Washington Post*, 6 Juli 2017.
- 157 **Presiden Trump menandatangani satu perintah eksekutif:** "President Trump Vows to Take Aggressive Steps on Immigration," *Boston Globe*, 25 January 2017.
- 157 **"Kalau harus":** "Judge Blocks Trump Effort to Withhold Money from Sanctuary Cities," *New York Times*, 25 April 2017.
- 157 **Rencana itu mengingatkan:** "Venezuela Lawmakers Strip Power from Caracas Mayor," Reuters, 7 April 2009.
- 157 **Presiden Trump bisa dihalangi pengadilan:** "Judge Blocks Trump Effort to Withhold Money from Sanctuary Cities," *New York Times*, 25 April 2017.
- 157 **dia menyerukan:** Aaron Blake, "Trump Wants More Power and Fewer Checks and Balances—Again," *Washington Post*, 2 Mei 2017. Juga <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/869553853750013953>.
- 157 **Orang-orang Partai Republik di Senat memang menghapuskan filibuster:** Aaron Blake, "Trump Asks for More Power. Here's Why the Senate GOP Will Resist," *Washington Post*, 30 Mei 2017.
- 158 **Beberapa pemimpin Partai Republik:** Lihat Hasen, *The Voting Wars*; Ari Berman, *Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America* (New York: Picador, 2015).
- 158 **aturan identifikasi pemilih yang ketat:** Berman, *Give Us the Ballot*; Benjamin Highton, "Voter Identification Laws and Turnout in the United States," *Annual Review of Political Science* 20, no. 1 (2017), hlm. 49–67.
- 158 **Dorongan untuk aturan kartu identitas pemilih:** Justin Levitt, "The Truth About Voter Fraud," New York University School of Law Brenner Center for Justice (2007). Lihat <https://www.brennancenter.org/publication/truth-about-voter-fraud>; juga Minnite, *The Myth of Voter Fraud*; Hasen, *The Voting Wars*, hlm. 41–73; Sharad Goel, Marc Meredith, Michael Morse, David Rothschild, & Houshmand Shirani-Mehr, "One Person, One Vote? Estimating the Prevalence of Double-Voting in U.S. Presidential Elections," naskah tak diterbitkan, Januari 2017.
- 158 **Semua penelitian yang bisa diandalkan:** Lihat misalnya Levitt, "The Truth About Voter Fraud"; Minnite, *The Myth of Voter Fraud*.
- 158 **"pajak suara zaman modern":** Dikutip dalam Berman, *Give Us the Ballot*, hlm. 223.

- 158 Diperkirakan 300.000 pemilih Georgia:** Ibid., hlm. 223.
- 158 "upaya tak terselubung":** Dikutip dalam ibid., hlm. 254.
- 159 rancangan undang-undang identitas pemilih diajukan:** Ibid., hlm. 260–61.
- 159 lima belas negara bagian mengesahkan aturan:** Highton, "Voter Identification Laws and Turnout in the United States," hlm. 152–53.
- 159 berdampak jauh lebih besar:** Charles Stewart III, "Voter ID: Who Has Them? Who Shows Them?" *Oklahoma Law Review* 66 (2013).
- 159 tidak punya surat izin mengemudi yang valid:** Ibid., hlm. 41–42.
- 159 Satu penelitian Brennan Center for Justice:** Berman, Give Us the Ballot, hlm. 254.
- 159 tujuh memakai aturan identitas yang lebih ketat:** Ibid., hlm. 264.
- 159 Para ahli baru mulai:** Highton, "Voter Identification Laws and Turnout in the United States," hlm. 153.
- 159 "penganjur utama pembatasan hak suara":** Peter Waldman, "Why We Should Be Very Afraid of Trump's Vote Suppression Commission," *Washington Post*, 30 Juni 2017.
- 159 Kobach telah membantu pengesahan:** Lihat Ari Berman, "The Man Behind Trump's Voter-Fraud Obsession," *New York Times Magazine*, 13 Juni 2017.
- 160 "menang dalam pemungutan suara rakyat":** Lihat <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/802972944532209664?lang=en>.
- 160 Dia mengulang pernyataan itu:** "Without Evidence, Trump Tells Lawmakers 3 Million to 5 Million Illegal Ballots Cost Him the Popular Vote," *Washington Post*, 23 Januari 2017. Pernyataan Trump tampaknya didasari klaim yang dibuat pengusung teori konspirasi terkenal, Alex Jones, di situs webnya, Infowars. Lihat Jessica Huseman & Scott Klein, "There's No Evidence Our Election Was Rigged," ProPublica, 28 November 2016.
- 160 proyek pemantauan pemilu nasional:** Huseman & Klein, "There's No Evidence Our Election Was Rigged."
- 160 Reporter *Washington Post* Philip Bump:** "There Have Been Just Four Documented Cases of Voter Fraud in the 2016 Election," *Washington Post*, 1 Desember 2016.
- 160 "benar-benar tepat":** Berman, "The Man Behind Trump's Voter-Fraud Obsession."

- 160 **"kita barangkali tak akan pernah tahu":** Max Greenwood & Ben Kamisar, "Kobach: 'We May Never Know' If Clinton Won Popular Vote," *The Hill*, 19 Juli 2017.
- 160 **Komisi sudah mulai berusaha:** Waldman, "Why We Should Be Very Afraid of Trump's Vote Suppression Commission."
- 161 **jumlah kesalahan:** Goel, Meredith, Morse, Rothschild, & Shirani-Mehr, "One Person, One Vote?"
- 161 **Komisi Integritas Pemilu Trump:** Pada Juli 2017, dilaporkan bahwa empat puluh empat negara bagian telah menolak membagi informasi pemilih ke Komisi. Lihat "Forty- Four States and DC Have Refused to Give Certain Voter Information to Trump Commission," CNN.com, 5 Juli 2017.
- 162 **Partai Kebenaran dan Keadilan:** "Poland's President Vetoes 2 Laws That Limited Courts' Independence," *New York Times*, 24 Juli 2017.
- 164 **Loyalis aktif:** Anggota DPR wakil California Duncan Hunter, misalnya, membela Trump di depan umum bahkan sesudah dirilisnya rekaman *Access Hollywood* selama kampanye 2016. Lihat "Trump's 10 Biggest Allies in Congress," *The Hill*, 25 Desember 2016.
- 165 **Beberapa di antara mereka diam-diam mendorong:** "Special Counsel Appointment Gets Bipartisan Praise," *The Hill*, 17 Mei 2017.
- 165 **senator-senator penting Republik:** "Republicans to Trump: Hands off Mueller," *Politico*, 12 Juni 2017.
- 165 **Ketua Komite Kehakiman Senat Chuck Grassley:** Ibid.
- 165 **Graham, McCain, dan Corker:** Lihat https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-core/?ex_cid=rrpromo.
- 165 **"sudah menentukan garis batas":** "Senators Unveil Two Proposals to Protect Mueller's Russia Probe," *Washington Post*, 3 Agustus 2017; Tracy, "As Mueller Closes In, Republicans Turn away from Trump."
- 166 **dukungan untuk Presiden Trump:** Jeffrey M. Jones, "Trump Has Averaged 50% or Higher Job Approval in 17 States," Gallup News Service, 24 Juli 2017. Lihat <http://www.gallup.com/poll/214349/trump-averaged-higher-job-approval-states.aspx>.
- 166 **Senator Demokrat dari West Virginia, Joe Manchin:** Lihat https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo.
- 166 **The Hill menyebut Manchin:** "Trump's 10 Biggest Allies in Congress."
- 166 **"Bukankah kita sudah cukup banyak tahu":** "In West Virginia, Trump Hails Conservatism and a New GOP Governor," *New York Times*, 3 Agustus 2017.

- 167 **menaikkan dukungan kepada pemerintah:** Lihat lagi Mueller, *War, Presidents, and Public Opinion* dan studi empiris lebih baru atas efek berkumpul di sekitar bendera di Amerika Serikat, termasuk Oneal & Bryan, "The Rally 'Round the Flag Effect in U.S. Foreign Policy Crises, 1950–1985", Baum, "The Constituent Foundations of the Rally-Round-the-Flag Phenomenon," dan Chatagnier, "The Effect of Trust in Government on Rallies 'Round the Flag."
- 167 **dukungan kepada Presiden Bush:** Moore, "Bush Approval Rating Highest in Gallup History."
- 167 **Warga jadi lebih mungkin menoleransi:** Huddy, Khatib, & Capelos, "The Polls—Trends," hlm. 418–50; Darren W. Davis & Brian D. Silver, "Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the Terrorist Attacks on America," *American Journal of Political Science* 48, no. 1 (2004), hlm. 28–46; Huddy, Feldman, & Weber, "The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity," hlm. 131–53; dan Adam J. Berinsky, *In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), Bab 7.
- 167 **Hakim jadi enggan:** Howell, *Power Without Persuasion*; Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic*, hlm. 67–85.
- 167 **pembatasan kelembagaan:** Howell, *Power Without Persuasion*, hlm. 184.
- 168 **kesembronoan kebijakan luar negeri Presiden Trump:** Selama kampanye 2016, lima puluh pakar kebijakan luar negeri Partai Republik, banyak di antaranya mantan pejabat pemerintahan Bush, menulis surat yang memperingatkan bahwa ketidaktahuan dan kesembronoan Trump bakal "menimbulkan risiko bagi keamanan nasional negara kita." Lihat "50 G.O.P. Officials Warn Donald Trump Would Put Nation's Security 'At Risk,'" *New York Times*, 8 Agustus 2016.
- 168 **"menabrak standar perilaku":** David Brooks, "Getting Trump out of My Brain," *New York Times*, 8 Agustus 2017.
- 168 **"limosin tertutup berpelindung":** James Wieghart & Paul Healy, "Jimmy Carter Breaks Protocol at Inauguration," *New York Daily News*, 21 Januari 1977.
- 168 **"kebiasaan informal":** Christine Hauser, "The Inaugural Parade, and the Presidents Who Walked It," *New York Times*, 19 Januari 2017.
- 169 **William Henry Harrison melanggar tradisi:** Paul F. Boller, *Presidential*

Campaigns: From George Washington to George W. Bush (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 70.

- 169 **"Booker T. Washington dari Tuskegee, Alabama":** Laporrannya berdasarkan Clarence Lusane, *The Black History of the White House* (San Francisco: City Lights Books, 2011), hlm. 219–78.
- 169 **"etiket sosial yang lazim":** Ibid.
- 169 **Presiden Trump melanggar:** "President Trump Breaks a 150-Year Tradition of Pets in the White House," AOL.com, 28 Juli 2017.
- 170 **"pembantaian Amerika":** Yashar Ali, "What George W. Bush Really Thought of Donald Trump's Inauguration," *New York Magazine*, 29 Maret 2017.
- 170 **secara teknis tak diwajibkan:** Seperti kata Walter Shaub, mantan kepala Kantor Etika Pemerintah, "Anda bisa saja jadi Menteri Energi sambil memiliki [saham] Chevron, Exxon, dan B.P. dan itu tidak melanggar hukum, asal Anda mau datang ke kantor setiap hari, menumpang kaki ke meja, membaca koran, dan tak melakukan apa pun." Lihat Lizza, "How Trump Broke the Office of Government Ethics."
- 170 **Presiden Trump tak melakukan itu:** Trump punya sejumlah potensi konflik kepentingan dari urusan bisnis internasionalnya dan hubungan eratny dengan Trump Organization. Dalam hitungan minggu sesudah pemilu, Sunlight Foundation sudah membuat daftar konflik "tanda merah", dan mengumumkan tiga puluh dua isinya pada November 2016. Pada Juli 2017 daftar itu sudah bertambah panjang jadi berisi enam ratus lebih potensi konflik kepentingan. Banyak orang yang ditunjuk Trump untuk posisi kabinet dan penasihat—yang berasal dari bidang energi, keuangan, dan lobi—juga menghadapi potensi konflik kepentingan. Lihat datanya di <http://www.sunlightfoundation.com>.
- 170 **Kantor Etika Pemerintahan:** "As Trump Inquiries Flood Ethics Office, Director Looks to House for Action," NPR.com, 17 April 2017. Tim hukum Trump menunjuk mantan Wakil Presiden Nelson Rockefeller sebagai contoh pejabat eksekutif yang tak sepenuhnya melepas kepemilikan atas harta keluarganya. Namun Wakil Presiden Rockefeller sempat menjalani pemeriksaan selama empat bulan terkait potensi konflik. Lihat "Conflicts of Interest: Donald Trump 2017 vs. Nelson Rockefeller 1974," CBSNews.com, 13 Januari 2017.
- 170 **Presiden Trump juga melanggar:** Lihat <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/802972944532209664?lang=en>.

- 171 **"jutaan" pemilih ilegal:** "California Official Says Trump's Claim of Voter Fraud Is 'Absurd,'" *New York Times*, 28 November 2016; "Voter Fraud in New Hampshire? Trump Has No Proof and Many Skeptics," *New York Times*, 13 Februari 2017; "Trump's Baseless Assertions of Voter Fraud Called 'Stunning,'" *Politico*, 27 November 2016.
- 171 **Jajak pendapat sebelum:** "Un Tercio de los Mexicanos Cree Que Hubo Fraude en las Elecciones de 2006," *El Pais*, 3 Juli 2008. Lihat https://elpais.com/internacional/2008/07/03/actualidad/1215036002_850215.html; Emir Olivares Alonso, "Considera 71% de los Mexicanos que Puede Haber Fraude Electoral," *La Jornada*, 29 Juni 2012. Lihat <http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/politica/003n1pol>.
- 171 **"sejumlah besar" kecurangan:** Sam Corbett-Davies, Tobias Konitzer, & David Rothschild, "Poll: 60% of Republicans Believe Illegal Immigrants Vote; 43% Believe People Vote Using Dead People's Names," *Washington Post*, 24 Oktober 2016.
- 171 **47 persen pemilih Republik:** "Many Republicans Doubt Clinton Won Popular Vote," *Morning Consult*, 27 Juli 2017
- 171 **Lima puluh dua persen pendukung Republik:** Ariel Malka & Yphtach Lelkes, "In a New Poll, Half of Republicans Say They Would Support Postponing the 2020 Election If Trump Proposed It," *Washington Post*, 10 Agustus 2017.
- 172 **"Parah! Baru tahu bahwa":** <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/837996746236182529>; lihat juga www.politifact.com/truth-o-meter/article/2017/mar/21/timeline-donald-trumps-false-wiretapping-charge%2F.
- 172 **"jangan menyangkal yang tak bisa disangkal":** "Many Politicians Lie, but Trump Has Elevated the Art of Fabrication," *New York Times*, 8 Agustus 2017.
- 172 **PolitiFact mencatat:** *PolitiFact*. Lihat <http://www.politifact.com/personalities/donald-trump/>.
- 172 **"mencapai sesuatu yang luar biasa":** David Leonhardt & Stuart Thompson, "Trump's Lies," *New York Times*, <https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/trumps-lies.html?mcubz=1>.
- 172 **Presiden Trump mengaku:** Rebecca Savransky, "Trump Falsely Claims He Got Biggest Electoral College Win Since Reagan," *The Hill*, 16 Februari 2017; Tom Kertscher, "Donald Trump Not Close in Claiming He Has Signed More Bills in First Six Months Than Any President," *PolitiFact Wisconsin*,

- 20 Juli 2017, <http://www.politifact.com/wisconsin/statements/2017/jul/20/donaldtrump/donald-trump-not-close-claiming-he-has-signed-more/>.
- 173 "pidato terhebat sepanjang masa":** Ella Nilsen, "Trump: Boy Scouts Thought My Speech Was 'Greatest Ever Made to Them.' Boy Scouts: No," *Vox*, 2 Agustus 2017.
- 173 memandang dia sebagai tak jujur:** Survei-survei dari pertengahan 2017 menunjukkan bahwa 57 persen orang Amerika percaya presiden tidak jujur. Lihat Quinnipiac University Poll, "Trump Gets Small Bump from American Voters," 10 Januari 2017 (<https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2415>) "U.S. Voters Send Trump Approval to Near Record Low," 10 Mei 2017 (<https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2456>); "Trump Gets Small Bump from American Voters," 29 Juni 2017 (<https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2471>).
- 173 Warga punya hak asasi:** Lihat Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven, CT: Yale University Press, 1971).
- 174 "termasuk manusia-manusia paling tak jujur":** "With False Claims, Trump Attacks Media on Turnout and Intelligence Rift," *New York Times*, 21 Januari 2017. Lihat juga <http://video.foxnews.com/v/5335781902001/?#sp=show-clips>.
- 174 Saya dengar @Morning Joe yang rating-nya payah:** <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/880408582310776832>, <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/880410114456465411>.
- 174 Sekretaris Pers Sean Spicer:** "CNN, *New York Times*, Other Media Barred from White House Briefing," *Washington Post*, 24 Februari 2017.
- 174 Satu-satunya contoh terdahulu:** "Trump Not the Only President to Ban Media Outlets from the White House," ABC10.com, 24 Februari 2017.
- 175 Manusia punya kemampuan terbatas untuk menghadapi:** Daniel Patrick Moynihan, "Defining Deviancy Down: How We've Become Accustomed to Alarming Levels of Crime and Destructive Behavior," *The American Scholar* 62, no. 1 (Musim Dingin 1993), hlm. 17–30.
- 175 Semua kecuali satu senator Republik:** Susan Collins dari Maine memberi suara mendukung Trump dalam 79 persen kesempatan. Lihat https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo.

- 175 **Bahkan Senator Ben Sasse:** Lihat https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo.
- 176 **Greg Gianforte, calon dari Republik:** "GOP Candidate in Montana Race Charged with Misdemeanor Assault After Allegedly Body-Slamming Reporter," *Washington Post*, 24 Mei 2017.
- 176 **"bias atau tak akurat":** "Attitudes Toward the Mainstream Media Take an Unconstitutional Turn," *The Economist*, 2 Agustus 2017; <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/08/daily-chart-0>.
- 176 **Mereka menggunakan sekolah-sekolah:** "Why Join the National Rifle Association? To Defeat Liberal Enemies, Apparently," *The Guardian*, 1 Juli 2017.
- 177 **"Kami sudah muak":** "'We're Coming for You': NRA Attacks *New York Times* in Provocative Video," *The Guardian*, 5 Agustus 2017.

BAB 9: MENYELAMATKAN DEMOKRASI

- 178 **Baru sesudah 1965:** Mickey, *Paths out of Dixie*.
- 178 **pergeseran mendasar:** Mickey, Levitsky, & Way, "Is America Still Safe for Democracy?," hlm. 20–29.
- 178 **Ada persepsi bahwa demokrasi sedang mundur:** Lihat Larry Diamond, "Facing Up to the Democratic Recession," *Journal of Democracy* 26, no. 1 (Januari 2015), hlm. 141–55; dan Roberto Stefan Foa & Yascha Mounk, "The Democratic Disconnect," *Journal of Democracy* 27, no. 3 (Juli 2016), hlm. 5–17.
- 178 **Larry Diamond:** Diamond, "Facing Up to the Democratic Recession."
- 179 **klaim-klaim mengenai resesi demokrasi global:** Steven Levitsky & Lucan A. Way, "The Myth of Democratic Recession," *Journal of Democracy* 26, no. 1 (Januari 2015), hlm. 45–58.
- 180 **pemerintah AS menggunakan tekanan diplomatik:** Levitsky & Way, *Competitive Authoritarianism*; Mainwaring & Pérez-Liñán, *Democracies and Dictatorships in Latin America*.
- 181 **Partai Republik pro-Trump:** Kendali Partai Republik atas berbagai cabang pemerintahan kiranya dimungkinkan akibat konsentrasi suara Demokrat di kota-kota besar. Itu menyebabkan Partai Republik—yang mendominasi suara di kota kecil dan desa—menjadi hampir tak bisa dikalahkan di sebagian besar wilayah negara, sehingga unggul di Electoral College dan terutama di Senat.

- 183 **Penduduknya juga beragam:** Lihat <https://www.census.gov/quick-facts/NC>.
- 183 **"mikrokosmos politik hiper-partisan negara":** Jedediah Purdy, "North Carolina's Partisan Crisis," *The New Yorker*, 20 Desember 2016.
- 183 **partisan telah mempertengskarkan:** "North Carolina Governor Signs Controversial Transgender Bill," CNN.com, 24 Maret 2016.
- 184 **"lebih terpolarisasi dan sengit":** Dikutip dalam Mark Joseph Stern, "North Carolina Republicans' Legislative Coup Is an Attack on Democracy," *Slate*, 15 Desember 2016.
- 184 **Perubahan itu memungkinkan Partai Republik:** Max Blau, "Drawing the Line on the Most Gerrymandered District in America," *The Guardian*, 19 Oktober 2016.
- 184 **Mereka memulai dengan meminta akses:** Lihat <http://pdfserver.amlaw.com/nlj/7-29-16%204th%20Circuit%20NAACP%20v%20NC.pdf>, hlm. 10, 13.
- 184 **Mereka mengesahkan aturan identitas pemilih:** "North Carolina Governor Signs Extensive Voter ID Law," *Washington Post*, 12 Agustus 2013; dan "Critics Say North Carolina Is Curbing the Black Vote. Again," *New York Times*, 30 Agustus 2016.
- 184 **"presisi tinggi":** "Justices Reject Two Gerrymandered North Carolina Districts, Citing Racial Bias," *New York Times*, 27 Mei 2017.
- 184 **Partai Republik meraih kendali:** "Critics Say North Carolina Is Curbing the Black Vote. Again."
- 185 **McCrory menolak mengakui kekalahan:** "North Carolina Governor Alleges Voter Fraud in Bid to Hang On," *Politico*, 21 November 2016; dan "North Carolina Gov. Pat McCrory Files for Recount as Challenger's Lead Grows," NBCNews.com, 22 November 2016.
- 185 **"sidang istimewa kejutan":** "Democrats Protest as GOP Calls Surprise Special Session," WRAL.com, 14 Desember 2016.
- 185 **"kudeta legislatif":** "NC Is in the Hot National Spotlight Yet Again as Media Focus on General Assembly, Cooper," *Charlotte Observer*, 16 Desember 2016; Stern, "North Carolina Republicans' Legislative Coup Is an Attack on Democracy."
- 185 **"perebutan kekuasaan yang kebablasan":** "A Brazen Power Grab in North Carolina," *New York Times*, 15 Desember 2016.
- 185 **Senat memberi kepada dirinya sendiri wewenang:** "Proposed Cuts

- to Gov.-Elect Roy Cooper's Appointment Powers Passes NC House in 70–36 Vote," *News & Observer*, 15 Desember 2016; dan lihat "Bill Would Curb Cooper's Appointment Powers," WRAL.com, 14 Desember 2016.
- 185 Gubernur McCrory yang akan melepas jabatan:** "Before Leaving Office, McCrory Protected 908 State Jobs from Political Firings," *News & Observer*, 23 Februari 2017.
- 185 Partai Republik lalu mengubah komposisi:** "Senate Passes Controversial Merger of Ethics, Elections Boards," WRAL.com, 15 Desember 2016.
- 185 bertanggung jawab atas aturan lokal:** Lihat <https://www.ncsbe.gov/about-us>.
- 185 Badan itu tadinya di bawah:** Purdy, "North Carolina's Partisan Crisis."
- 185 ketua badan penyelenggara pemilu:** "Proposed Cuts to Gov.-Elect Roy Cooper's Appointment Powers Passes NC House in 70–36 Vote."
- 186 legislatif mengadakan pemungutan suara untuk mengurangi:** "Rebuked Twice by Supreme Court, North Carolina Republicans Are Unabashed," *New York Times*, 27 Mei 2017.
- 186 "demokrasi Amerika":** Dikutip dalam Purdy, "North Carolina's Partisan Crisis."
- 186 Baron de Montesquieu memelopori:** Baron von Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
- 187 Kredo Amerika:** Gunnar Myrdal, *An American Dilemma: The Negro Problem and American Democracy* (New York: Harper and Brothers, 1944), hlm. 3–4.
- 188 Posisi negosiasi Partai Demokrat:** David Faris, "It's Time for Democrats to Fight Dirty," *The Week*, 1 Desember 2016.
- 188 "tak berbuat banyak untuk menghentikan dia":** Dahlia Lithwick and David S. Cohen, "Buck Up, Democrats, and Fight Like Republicans," *New York Times*, 14 Desember 2016.
- 189 "tak punya legitimasi":** Dikutip dalam Daniella Diaz & Eugene Scott, "These Democrats Aren't Attending Trump's Inauguration," CNN.com, 17 Januari 2017.
- 189 "presiden yang sah":** Dikutip dalam Theodore Schleifer, "John Lewis: Trump Is Not a 'Legitimate' President," CNN.com, 14 Januari 2017.
- 189 Hampir tujuh puluh anggota DPR dari Demokrat:** Michelle Goldberg,

- "Democrats Are Finally Learning How to Fight Like Republicans," *Slate*, 19 Januari 2017.
- 189 **"meniru cara Partai Republik"**: Faris, "It's Time for Democrats to Fight Dirty." Juga Graham Vyse, "Democrats Should Stop Talking About Bipartisanship and Start Fighting," *The New Republic*, 15 Desember 2016.
- 189 **"Semuanya harus dipertengkarkan"**: Michelle Goldberg, "The End Is Nigh," *Slate*, 16 Mei 2017.
- 189 **"keinginan terbesar saya"**: Daniella Diaz, "Rep. Maxine Waters: Trump's Actions 'Leading Himself' to Impeachment," CNN.com, 6 Februari 2017.
- 189 **Pembicaraan mengenai pemakzulan makin ramai**: Goldberg, "The End Is Nigh."
- 189 **"Saya tak memandangnya seperti itu"**: Ibid.
- 189 **ketika oposisi bermain kotor**: Lihat Laura Gamboa, "Opposition at the Margins: Strategies Against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela," *Comparative Politics* 49, no. 4 (Juli 2017), hlm. 457–77.
- 190 **Pemogokan itu berlangsung selama dua bulan**: Ibid., hlm. 466.
- 190 **Ketiga strategi menjadi senjata makan tuan**: Laura Gamboa, "Opposition at the Margins: The Erosion of Democracy in Latin America," Disertasi Ph.D., Department of Political Science, University of Notre Dame (2016), hlm. 129–51.
- 190 **mengurangi dukungan publik terhadap oposisi**: Ibid., hlm. 102–7.
- 190 **Strategi oposisi di Kolombia**: Ibid.
- 190 **perebutan kekuasaan yang tak jauh beda dengan yang dilakukan Chávez**: Gamboa, "Opposition at the Margins: Strategies Against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela," hlm. 464–68.
- 190 **Itu menyulitkan**: Ibid., hlm. 468–72.
- 192 **protes tanpa kekerasan yang dipimpin orang kulit hitam**: Omar Wasow, "Do Protests Matter? Evidence from the 1960s Black Insurgency," naskah tak diterbitkan, Princeton University, 2 Februari 2017.
- 194 **Rasa saling tak percaya**: "Interview with President Ricardo Lagos," dalam *Democratic Transitions: Conversations with World Leaders*, ed. Sergio Bitar & Abraham F. Lowenthal (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015), hlm. 85.
- 194 **Pemimpin Sosialis yang terasing, Ricardo Lagos**: Ibid., hlm. 74.
- 194 **Keduanya mulai sering bertemu**: Ibid.

- 194 pemimpin Partai Demokrat Kristen Patricio Aylwin:** "Interview with President Patricio Aylwin," dalam Bitar & Lowenthal, *Democratic Transitions*, hlm. 61–62.
- 194 "Grup 24":** Ibid.
- 195 Persetujuan Nasional:** Constable & Valenzuela, *A Nation of Enemies*, hlm. 271–72.
- 195 Persetujuan itu membentuk dasar:** "Interview with President Ricardo Lagos," hlm. 83.
- 195 "politik musyawarah mufakat":** Ibid.
- 195 para pemimpinnya mengembangkan praktik:** Peter Siavelis, "Accommodating Informal Institutions and Chilean Democracy," dalam *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America*, ed. Gretchen Helmke & Steven Levitsky (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006) hlm. 40–48.
- 195 Konstitusi 1980 Pinochet:** Ibid., hlm. 49.
- 195 Aylwin juga merundingkan:** Ibid., hlm. 48–49.
- 195 "membantu menahan":** Ibid., hlm. 50.
- 196 para ahli ilmu politik telah mengajukan:** Lihat misalnya Nathaniel Persily, ed., *Solutions to Political Polarization in America* (New York: Cambridge University Press, 2015).
- 196 Partai Republik:** Jacob Hacker & Paul Pierson, *Off Center: The Republican Revolution and the Erosion of American Democracy* (New Haven, CT: Yale University Press, 2006); Mann & Ornstein, *It's Even Worse Than It Looks*; Grossman & Hopkins, *Asymmetric Politics*; Michael Barber & Nolan McCarty, "Causes and Consequences of Polarization," dalam Persily, *Solutions to Political Polarization in America*.
- 197 Kehampaan itu:** Nathaniel Persily, "Stronger Parties as a Solution to Polarization," dalam Persily, *Solutions to Political Polarization in America*, hlm. 123.
- 197 "mabuk populisme":** Jeff Flake, *Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle* (New York: Random House, 2017), hlm. 8.
- 197 reformasi partai konservatif:** Daniel Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- 197 Christlich Demokratische Union:** Charles Maier, "The Two Postwar

- Eras and the Conditions for Stability in Twentieth- Century Western Europe," *American Historical Review* 86, no. 2, hlm. 327–52.
- 197 Konservativisme Jerman:** Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, hlm. 172–333.
- 198 kredibilitas anti-Nazi "tak dipertanyakan":** Jeffrey Herf, *Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), hlm. 270. Beberapa tokoh partai CDU pada tahun-tahun pertamanya punya hubungan dengan rezim Nazi, sehingga partai itu selalu dikritik mengenai hal tersebut.
- 198 "Dunia lama telah tenggelam":** Noel Cary, *The Path to Christian Democracy: German Catholics and the Party System from Windthorst to Adenauer* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), hlm. 147.
- 198 CDU menawarkan visi jelas:** Geoffrey Pridham, *Christian Democracy in Western Germany* (London: Croom Helm, 1977), hlm. 21–66.
- 198 suatu masyarakat "Kristen":** Ibid., hlm. 32.
- 198 "Kolaborasi akrab":** Dikutip dalam ibid., hlm. 26–28.
- 199 Bernie Sanders dan beberapa tokoh moderat:** Mark Penn & Andrew Stein, "Back to the Center, Democrats," *New York Times*, 6 Juli 2017; Bernie Sanders, "How Democrats Can Stop Losing Elections," *New York Times*, 13 Juni 2017; lihat juga Mark Lilla, "The End of Identity Liberalism," *New York Times*, 18 November 2016.
- 199 Mark Penn dan Andrew Stein:** Penn & Stein, "Back to the Center, Democrats." Juga Mark Lilla, "The End of Identity Liberalism."
- 200 "Kenyataan sederhananya":** Danielle Allen, "Charlottesville Is Not the Continuation of an Old Fight. It Is Something New," *Washington Post*, 13 Agustus 2017.
- 200 Intensitas permusuhan partisan:** Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).
- 200 Polarisasi partisan yang bernuansa rasial hari ini:** Robert Gordon, *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), hlm. 613.
- 201 perubahan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir:** Katherine Kramer, *The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker* (Chicago: University of Chicago Press, 2016), hlm. 3.
- 201 "welfare queens":** Ian Haney Lopez, *Dog Whistle Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

- 201 agenda kebijakan sosial:** Gosta Esping- Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
- 202 "kebijakan keluarga":** Paul Krugman, "What's Next for Progressives?," *New York Times*, 8 Agustus 2017.
- 202 Anggaran Amerika Serikat untuk keluarga:** Ibid.
- 202 Partai Demokrat dapat mempertimbangkan:** Harold Wilensky, *American Political Economy in Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 225.
- 202 Dan kami tidak menganggap enteng:** Untuk contoh keberhasilannya, lihat laporan revisionis atas koalisi New Deal oleh Eric Schickler, *Racial Realignment*.
- 203 Dewan tentu saja tahu apa itu demokrasi:** E.B. White, "The Meaning of Democracy," *The New Yorker*, 3 Juli 1943.

DUA PROFESOR HARVARD MENJELASKAN DUNIA BERBAHAYA YANG KITA HADAPI HARI INI

Demokrasi bisa mati karena kudeta—atau mati pelan-pelan. Kematian itu bisa tak disadari ketika terjadi selangkah demi selangkah, dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah, dan penindasan total atas oposisi. Ketiga langkah itu sedang terjadi di seluruh dunia dan kita semua mesti mengerti bagaimana cara menghentikannya.

Dalam buku ini, dua profesor Harvard Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyampaikan pelajaran penuh wawasan dari sejarah untuk menerangkan kerusakan rezim selama abad ke-20 dan ke-21. Mereka menunjukkan bahayanya pemimpin otoriter ketika menghadapi krisis besar.

Berdasarkan riset bertahun-tahun, keduanya menyajikan pemahaman mendalam mengenai mengapa dan bagaimana demokrasi mati; suatu analisis pemicu kewaspadaan mengenai bagaimana demokrasi didesak; dan pedoman untuk memelihara dan memperbaiki demokrasi yang terancam, bagi pemerintah, partai politik, dan individu.

Sejarah tak berulang. Namun kita bisa melindungi demokrasi kita dengan belajar dari sejarah, sebelum terlambat.



“Kami berutang terima kasih kepada kedua penulis atas kesediaan mereka mengemukakan pemahaman mereka yang mendalam tentang isu-isu politik sentral saat ini.”

Francis Fukuyama

Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37
Jakarta 10270
www.gpu.id

